



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan kondisi sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga pembangunan daerah lebih relevan dan berdampak positif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan/sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
11. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan/sub kegiatan, program atau sasaran, dan tujuan dalam bentuk Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), Dampak (*impact*).
13. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
14. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan/sub kegiatan dalam satu program.
15. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (*outcome*) beberapa program.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan/sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS;
- b. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III : kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V : Rencana Kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI : Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII : penutup.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2026 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan RKPD Tahun 2026 bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 - b. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
 - c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.
- (2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan visi, misi, dan Program Wali Kota, serta hasil kesepakatan bersama antara Wali Kota dan DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Tahun 2026 dan/atau pemutakhiran RKPD Tahun 2026 telah ditetapkan serta terdapat pemutakhiran Program Strategis Nasional, Pemerintah Daerah melakukan penambahan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 8

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berdasarkan:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat;
- c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
- e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
- f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 15 AGUSTUS 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

BATANG TUBUH PERATURAN III

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR GRAFIK xii

DAFTAR TABEL xv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-5

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD..... I-8

1.4. Maksud dan Tujuan I-10

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Aspek Geografis dan Demografis II-1

2.1.1. Kondisi Geografi II-1

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah..... II-3

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-5

2.1.4. Aspek Demografi II-7

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-10

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-10

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya II-24

2.3 Aspek Daya Saing Daerah..... II-32

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah II-32

2.3.2. Daya Saing SDM..... II-39

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah..... II-45

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi II-51

2.4 Aspek Pelayanan Umum..... II-52

2.4.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... II-54

2.4.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-88

2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan..... II-117

2.4.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-124

2.4.5 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Lainnya..... II-129

2.5 Evaluasi Hasil Program RKPD Tahun 2024 dan Realisasi terhadap Target Akhir RPD Tahun 2023-2026..... II-135

2.6 Permasalahan Pembangunan II-139

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-1

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah III-6

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga..... III-8

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....III-10

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah III-12

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah.....III-18

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....III-32

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1

4.2. Prioritas Pembangunan..... IV-4

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 IV-4

4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 IV-14

4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026..... IV-16

4.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 untuk Mendukung Kebijakan Nasional IV-36

4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD..... IV-66

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

5.1. Rencana Kerja V-2

5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama V-2

5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua V-61

5.2. Pendanaan Daerah V-83

LAMPIRAN BAB V RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH V-87

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN..... VI-1

6.1 Indikator Kinerja Utama VI-1

6.2 Indikator Kinerja Daerah..... VI-2

6.3 Indikator Kinerja Program VI-30

6.4 Indikator Utama Pembangunan VI-87

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Diagram Proses Penyusunan RKPD 2026.....	I-5
Gambar 1. 2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga	I-9
Gambar 2. 1	Peta Kota Salatiga.....	II-2
Gambar 2. 2	Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan	II-4
Gambar 2. 3	Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga	II-7
Gambar 3. 1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024.....	III-4
Gambar 3. 2	Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2024	III-6
Gambar 3. 3	Gambaran Struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2024	III-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-8
Grafik 2. 2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-11
Grafik 2. 3	Inflasi Kota Salatiga tahun 2020-2024	II-11
Grafik 2. 4	Indeks Gini Tahun 2023-2024	II-12
Grafik 2. 5	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024	II-13
Grafik 2. 6	Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024	II-14
Grafik 2. 7.	Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024.....	II-15
Grafik 2. 8.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024	II-16
Grafik 2. 9.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024.....	II-16
Grafik 2. 10.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020– 2024	II-17
Grafik 2. 11.	Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024	II-18
Grafik 2. 12.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2024	II-19
Grafik 2. 13.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020- 2024.....	II-19
Grafik 2. 14.	Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024	II-20
Grafik 2. 15.	Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	II-22
Grafik 2. 16.	Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	II-23
Grafik 2. 17.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024(%).....	II-24
Grafik 2. 18.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-25
Grafik 2. 19.	Score Capaian KLA di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-27
Grafik 2. 20.	Perbandingan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-28

Grafik 2. 21.	Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-28
Grafik 2. 22.	Perbandingan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-30
Grafik 2. 23.	Perbandingan IPG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain	II-30
Grafik 2. 24.	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-31
Grafik 2. 25.	Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah).....	II-37
Grafik 2. 26.	Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Ribu Rupiah)	II-37
Grafik 2. 27.	Grafik PDRB Perkapita Tahun 2020-2024 (Tw III).....	II-38
Grafik 2. 28.	Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	II-39
Grafik 2. 29.	Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-40
Grafik 2. 30.	Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-41
Grafik 2. 31.	Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2024	II-41
Grafik 2. 32.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-42
Grafik 2. 33.	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-42
Grafik 2. 34.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-44
Grafik 2. 35.	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	II-44
Grafik 2. 36.	Angka Melek Huruf (usia 15-59) Tahun 2020-2024.....	II-45
Grafik 2. 37.	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-46
Grafik 2. 38.	Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-47
Grafik 2. 39.	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-48
Grafik 2. 40.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga	II-50
Grafik 2. 41.	Realisasi Pertumbuhan Investasi di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-51
Grafik 2. 42.	Persentase Peminat Transmigrasi di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-52
Grafik 2. 43.	Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-54
Grafik 2. 44.	Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-56

Grafik 2. 45.	Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-62
Grafik 2. 46.	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-65
Grafik 2. 47.	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-66
Grafik 2. 48.	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-66
Grafik 2. 49.	Succes Rate Tuberkulosis (TB) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-67
Grafik 2. 50.	Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-78
Grafik 2. 51.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga	II-78
Grafik 2. 52.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-80
Grafik 2. 53.	Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA di Kota Salatiga Tahun.....	II-82
Grafik 2. 54.	Cakupan Penanganan PMKS di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-85
Grafik 2. 55.	Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-88
Grafik 2. 56.	Cakupan Presentase Perempuan dalam Parlemen di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-90
Grafik 2. 57.	Cakupan Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-91
Grafik 2. 58.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-94
Grafik 2. 59.	Tren Emisi GRK Sektor Limbah	II-98
Grafik 2. 60.	Tren Emisi GRK Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi 2019-2023.....	II-99
Grafik 2. 61.	Tren Emisi GRK Sektor Limbah 2019-2023.....	II-99
Grafik 2. 62.	Tren Emisi GRK Sektor IPPU (Proses dan penggunaan Produk Industri) 2019-2023	II-100
Grafik 2. 63.	Tren Emisi GRK Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Land Use) 2019-2023	II-100
Grafik 2. 64.	Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2019-2024.....	II-102
Grafik 2. 65.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-107
Grafik 2. 66.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-111
Grafik 2. 67.	Perkembangan Banyaknya Organisasi Kesenian di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-115

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga
Tahun 2020-2024..... II-8

Tabel 2. 2 Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga
Tahun 2020-2024..... II-9

Tabel 2. 3 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun
2024 II-9

Tabel 2. 4 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024.....II-10

Tabel 2. 5. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Salatiga.....II-21

Tabel 2. 6. Data Stunting Kota Salatiga 2020-2024.....II-32

Tabel 2. 7. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah) II-32

Tabel 2. 8. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah) II-33

Tabel 2. 9. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota
Salatiga Tahun 2020-2040 (dalam miliar rupiah) II-34

Tabel 2. 10. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar
rupiah) II-35

Tabel 2. 11. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga
Tahun 2020-2024 (persen).....II-36

Tabel 2. 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota
Salatiga Tahun 2020-2024 II-36

Tabel 2. 13. Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2020-2024 II-40

Tabel 2. 14. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.....II-46

Tabel 2. 15. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2024.....II-53

Tabel 2. 16. Perkembangan Capaian Pembangunan Pendidikan di Kota
Salatiga tahun 2020-2024.....II-54

Tabel 2. 17. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga
.....II-55

Tabel 2. 18. Perkembangan Rasio Murid-Guru di Kota Salatiga Tahun 2020-
2024 II-55

Tabel 2. 19. Perkembangan Prosentase Guru Layak Mengajar di Kota
Salatiga Tahun 2020--2024 II-55

Tabel 2. 20.	Persentase Guru bersertifikat pendidik di Kota Salatiga Tahun 2024	II-56
Tabel 2. 21.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-57
Tabel 2. 22.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-57
Tabel 2. 23.	Jumlah Lembaga Pendidikan Kesetaraan di Kota Salatiga.....	II-58
Tabel 2. 24.	Laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024.....	II-60
Tabel 2. 25.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	II-62
Tabel 2. 26.	Capaian SDGs Urusan Pendidikan.....	II-63
Tabel 2. 27.	Data Stunting Kota Salatiga 2020-2024.....	II-67
Tabel 2. 28.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan	II-68
Tabel 2. 29.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	II-69
Tabel 2. 30.	Capaian SDGs Urusan Kesehatan.....	II-71
Tabel 2. 31.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-73
Tabel 2. 32.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum.....	II-74
Tabel 2. 33.	SPM Pelayanan Dasar Air Minum.....	II-75
Tabel 2. 34.	SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik.....	II-75
Tabel 2. 35.	Capaian SDGs Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-76
Tabel 2. 36.	Luas PSU berdasarkan nBA/SK.....	II-78
Tabel 2. 37.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat.....	II-81
Tabel 2. 38.	Capaian SDGs Perumahan Rakyat.....	II-81
Tabel 2. 39.	Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-82
Tabel 2. 40.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-82
Tabel 2. 41.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-83
Tabel 2. 42.	Capaian SDGs Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-84
Tabel 2. 43.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial	II-86
Tabel 2. 44.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial	II-87
Tabel 2. 45.	Capaian SDGs Urusan Sosial.....	II-87
Tabel 2. 46.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja.....	II-89
Tabel 2. 47.	Capaian SDGs Urusan Tenaga Kerja.....	II-90
Tabel 2. 48.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-91
Tabel 2. 49.	Capaian SDGs Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-92

Tabel 2. 50.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan.....	II-92
Tabel 2. 51.	Capaian SDGs Urusan Pangan.....	II-93
Tabel 2. 52.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian.....	II-94
Tabel 2. 53.	Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup	II-95
Tabel 2. 54.	Data Potensi Energi Baru Terbarukan Kota Salatiga	II-96
Tabel 2. 55.	Data Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan	II-97
Tabel 2. 56.	Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor	II-97
Tabel 2. 57.	Ketersediaan RTH di Kota Salatiga 2020-2024.....	II-101
Tabel 2. 58.	Persentase Sampah yang Terangkut Tahun 2019 sd 2024	II-101
Tabel 2. 59.	Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2019-2024.....	II-103
Tabel 2. 60.	Capaian SDGs Urusan Lingkungan Hidup	II-103
Tabel 2. 61.	Indikator Kinerja Daerah Administrasi Kependudukan Sipil	II-105
Tabel 2. 62.	Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta di Kota Salatiga.....	II-106
Tabel 2. 63.	Capaian SDGs Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-106
Tabel 2. 64.	Indikator Kinerja Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-108
Tabel 2. 65.	Capaian SDGs Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-108
Tabel 2. 66.	Indikator Kinerja Daerah Perhubungan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-109
Tabel 2. 67.	Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-110
Tabel 2. 68.	Indikator Kinerja Daerah Penanaman Modal di Kota Salatiga	II-113
Tabel 2. 69.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan dan Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2. 70.	Indikator Kinerja Daerah Statistik dan Persandian di Kota Salatiga	II-114
Tabel 2. 71.	Indikator Kinerja Daerah Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	II-115
Tabel 2. 72.	Data Dukung Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2. 73.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.....	II-116
Tabel 2. 74.	Jumlah Pengunjung, Anggota dan Koleksi Perpustakaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2. 75.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kelautan dan Perikanan	II-117
Tabel 2. 76.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata	II-118
Tabel 2. 77.	Capaian SDGs Urusan Pariwisata	II-119
Tabel 2. 78.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian	II-119

Tabel 2. 79.	Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kota Salatiga 2020-2024	II-120
Tabel 2. 80.	Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Kota Salatiga 2020-2024.....	II-121
Tabel 2. 81.	Luas Penggunaan Lahan Pertanian Kota Salatiga 2020-2024	II-121
Tabel 2. 82.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan	II-122
Tabel 2. 83.	Capaian SDGs Urusan Perdagangan.....	II-122
Tabel 2. 84.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian.....	II-123
Tabel 2. 85.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Transmigrasi	II-123
Tabel 2. 86.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	II-124
Tabel 2. 87.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2024	II-125
Tabel 2. 88.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Keuangan Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2. 89.	Capaian SDGs Urusan Keuangan	II-126
Tabel 2. 90.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Kepegawaian Tahun 2020-2024.....	II-126
Tabel 2. 91.	Capaian SDGs Kepegawaian	II-127
Tabel 2. 92.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Pengawasan Tahun 2020-2024.....	II-127
Tabel 2. 93.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2. 94.	Capaian SDGs Setwan.....	II-129
Tabel 2. 95.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024.....	II-130
Tabel 2. 96.	Capaian SDGs Setda.....	II-130
Tabel 2. 97.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidomukti Tahun 2020-2024.....	II-131
Tabel 2. 98.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidorejo Tahun 2020-2024.....	II-132
Tabel 2. 99.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Tingkir Tahun 2020-2024.....	II-133
Tabel 2. 100.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Argomulyo Tahun 2020-2024.....	II-134
Tabel 2. 101.	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2024.....	II-136
Tabel 2. 102.	Persandingan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026.....	II-140
Tabel 3. 1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2026.....	III-5

Tabel 3. 2.	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026.....	III-5
Tabel 3. 3.	Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2021, 2022, 2023 , 2024 dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2026	III-10
Tabel 3. 4.	Komposisi Anggaran untuk pemenuhan Mandatory Spending Tahun 2026.....	III-12
Tabel 3. 5.	Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2022 sampai dengan Penetapan APBD Tahun 2024	III-15
Tabel 3. 6.	Target Proyeksi Pendapatan Tahun 2025, Proyeksi Pendapatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027	III-17
Tabel 3. 7.	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 dan 2024, anggaran 2025 dan Proyeksi tahun 2026	III-22
Tabel 3. 8.	Alokasi Dana Kelurahan Kota Salatiga Tahun 2023-2025.....	III-27
Tabel 3. 9.	Alokasi Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026	III-29
Tabel 3. 10.	Realisasi Pembiayaan pada Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026.....	III-34
Tabel 3. 11.	Proyeksi Struktur APBD Kota Salatiga Tahun 2026 dan 2027	III-35
Tabel 4. 1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga beserta target kinerja Tahun 2026 berdasarkan hasil capaian tahun 2024	IV-2
Tabel 4. 2.	Keselarasan Visi dan Misi Wali Kota Salatiga dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026.....	IV-3
Tabel 4. 3.	Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2026.....	IV-5
Tabel 4. 4.	Keselarasan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2026	IV-18
Tabel 4. 5.	Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	IV-25
Tabel 4. 6.	Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Pendukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	IV-28
Tabel 4. 6.	Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026	IV-29
Tabel 4. 7.	Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Prioritas Tahun 2026 sesuai Rancangan RPJMD dengan Program Unggulan Kepala Daerah	IV-32
Tabel 4. 8.	Konsistensi Permasalahan, Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026	IV-33
Tabel 4. 9.	Pemetaan Kegiatan Implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	IV-35
Tabel 4. 10.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penurunan Stunting	IV-38

Tabel 4. 11.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pemenuhan SPM	IV-48
Tabel 4. 12.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Salatiga Tahun 2026.....	IV-54
Tabel 4. 13.	Sasaran, Prioritas dan Program yang Mendukung Terwujudnya SDGs.....	IV-60
Tabel 4. 14.	Usulan Pokok-pokok Pikiran berdasarkan Kamus Usulan dan Permasalahan untuk RKPD Tahun 2026	IV-67
Tabel 5. 1	Penyelarasan prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi.....	V-3
Tabel 5. 2	Akomodasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga Tahun 2026.....	V-16
Tabel 5. 3	Akomodasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2026.....	V-32
Tabel 5. 4	Akomodasi untuk Kebijakan Penurunan Stunting Tahun 2026.....	V-39
Tabel 5. 5	Kerangka Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2026.....	V-84
Tabel 6. 1.	Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2026	VI-1
Tabel 6. 2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026.....	VI-2
Tabel 6. 3.	Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga	VI-9
Tabel 6. 4.	Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga	VI-10
Tabel 6. 5.	Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan antara RKP dengan RKPD Kota Salatiga	VI-19
Tabel 6. 6.	Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga	VI-23
Tabel 6. 7.	Program , Indikator dan Target Kinerja berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2026	VI-31
Tabel 6. 8.	Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026	VI-87

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan :



Hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2024,



Isu-isu strategis yang berkembang,



Kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional,



Regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya



Kedudukan, peran, dan fungsi strategis Dokumen RKPD Tahun 2026 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

SECARA SUBSTANSIAL

Memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana rencana kerja yang dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun.

SECARA NORMATIF

Menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS R-APBD;

SECARA OPERASIONAL

Memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan

SECARA FAKTUAL

Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top up dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu penyusunan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut ketentuan Pasal 4 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah adalah “Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022. Selain itu, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 juga memperhatikan penjabaran tahun kedua dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Selanjutnya, karena penyusunan RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara paralel, RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, mempedomani visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global / nasional / regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan berbagai proyeksi dalam RKPD Tahun 2025. Dengan berpedoman pada **kebijakan periode tahun terakhir** dari RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka RKPD Tahun 2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Salatiga yaitu **“Mewujudkan Masyarakat yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur dan Berbagi”**. Selain itu RKPD tahun 2026 juga mendukung kebijakan **periode pertama** (2025-2029) dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada **“Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah”**.

Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 juga memedomani arah kebijakan pembangunan dari program Asta Cita dalam RPJMN 2025 – 2029, Rancangan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, rancangan RKP 2026, Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Tahun 2026. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, RKPD Kota Salatiga tahun 2026 juga diarahkan pada tahap pertama pembangunan lima tahun yaitu **pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup**. Sedangkan dukungan Kota Salatiga tahun 2026 pada arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah adalah dengan fokus kebijakan pada Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui **pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar**. Selain itu tema pembangunan 2026 Kota Salatiga juga mendukung tema RKP tahun 2026 yaitu **Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan inklusif**.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah jangka menengah;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan, mulai dari persiapan penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Kota; perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD.

Penjelasan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD
 - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan agenda tim kerja penyusunan RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
 - a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
 - d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
 - e. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
 - f. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dengan program strategis nasional;
 - i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan baik Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Salatiga.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Salatiga merupakan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Pra Musrenbang di tingkat RT dan RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai stakeholders seperti unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak secara terintegrasi dan partisipatif.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Salatiga. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

6. Penetapan RKPD Tahun 2026

Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 diwajibkan untuk memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan sebagaimana diukur melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dokumen RKPD Tahun 2026 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

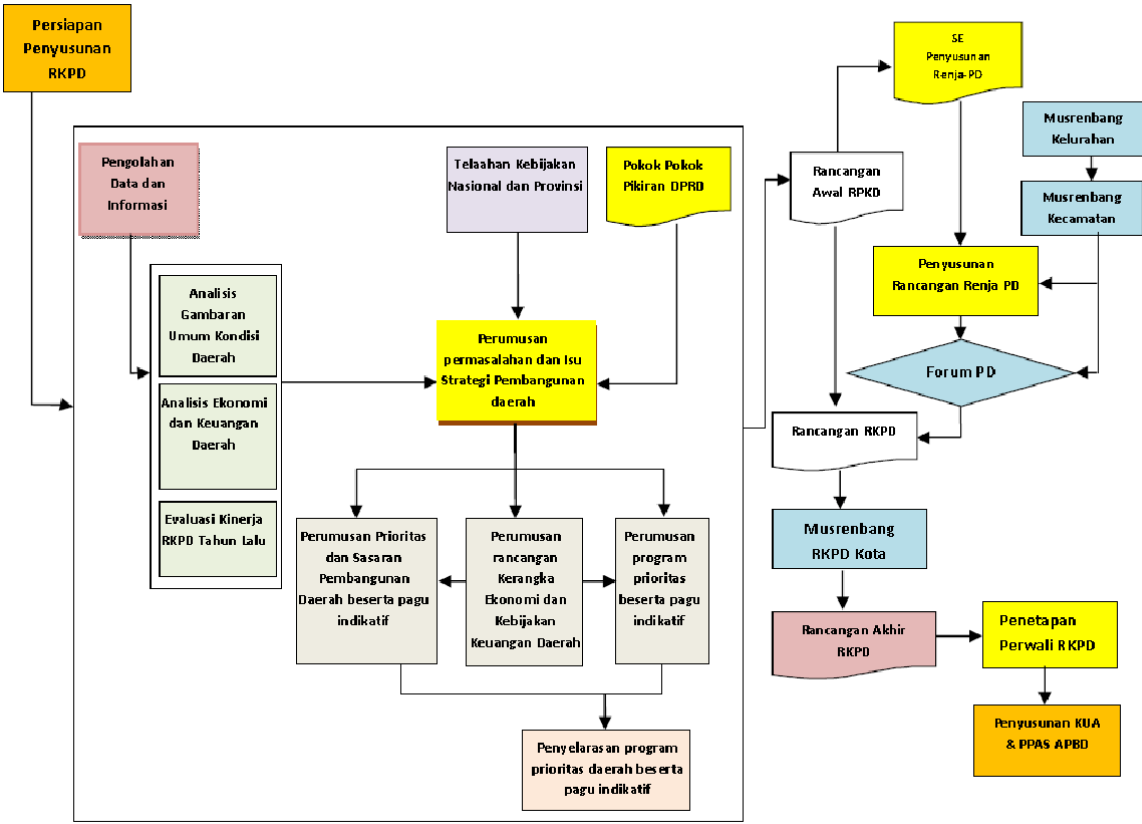
1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan

4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2026.

Proses penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 secara sederhana dapat dibuat diagram pada Gambar 1.1 berikut

Gambar 1. 1 Diagram Proses Penyusunan RKPD 2026



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Ineventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 33. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;
 34. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

35. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD

RKPD Kota Salatiga tahun 2026 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045

RKPD Kota Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Salatiga Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN.

2. RKPD dengan Teknokratik RPJMD 2025-2029

RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD tahun 2025-2029. Namun penyusunan kedua dokumen tersebut dilakukan secara bersamaan, sehingga RKPD sementara ini mengacu pada dokumen teknokratik RPJMD yang telah disusun.

RKPD berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.

3. RKPD dan RPD 2023-2026

RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPD Tahun 2023-2026 yang berisikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang penyusunannya disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kota Salatiga.

4. RKPD dan RPJMD

RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 memedomani penjabaran tahun pertama dari Rancangan RPJMD Tahun 2025-2026 yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang penyusunannya disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kota Salatiga.

5. RKPD dan Renja PD

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

6. RKPD dan APBD

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

7. RKPD dan RTRW

- Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Salatiga sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
8. RKPD dan RPKD

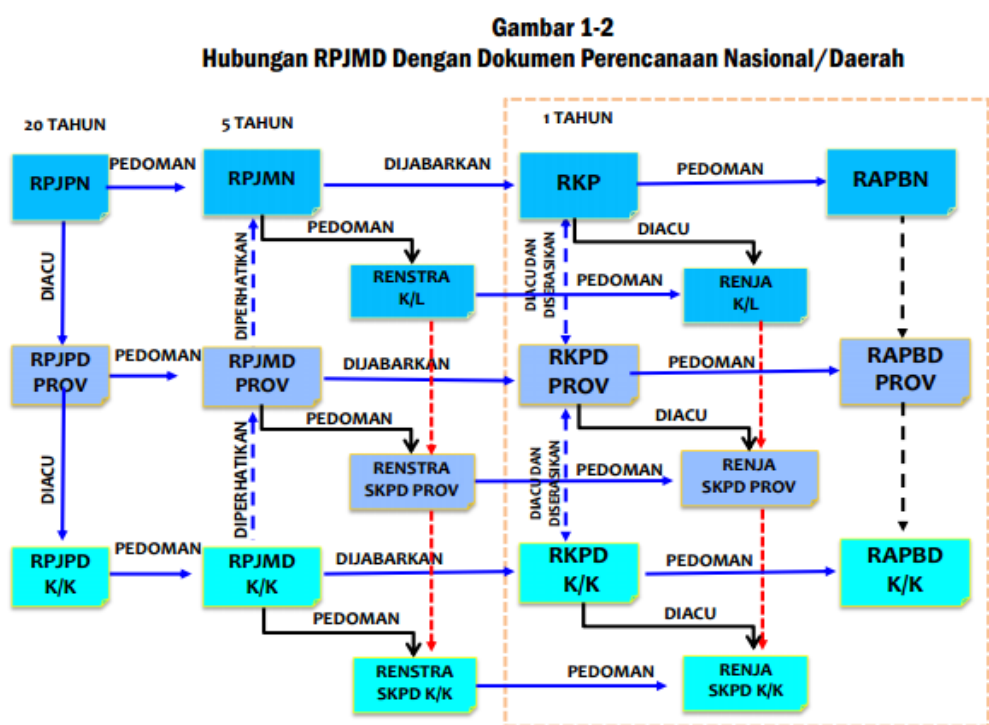
Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2027, di mana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.
 9. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD
 10. RKPD dan SPM

Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.
 11. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga



Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, RKPD Kota Salatiga tahun 2026 juga mengacu pada dokumen-dokumen sektoral yang menjadi salah satu sumber informasi penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan. Selanjutnya akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- 2) Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
- 3) Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 bertujuan untuk :

- 1) Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
- 3) Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 4) Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2026

RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memberikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2024 dan realisasinya terhadap target RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di Kota Salatiga.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2024 dan perkiraan tahun 2026, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2024, keterkaitannya dengan RPJPD dan teknokratik RPJMD serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan daerah yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026 beserta pagu indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kota Salatiga tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

REALISASI INDIKATOR MAKRO	TARGET 2024	% CAPAIAN	REALISASI INDIKATOR MAKRO	TARGET 2024	% CAPAIAN
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) Tahun 2023 Tahun 2024 84,99 85,72	85,10	100,73%	Pertumbuhan Ekonomi (persen) Tahun 2023 Tahun 2024 5,37 5,54	4,86-5,44	100 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) Tahun 2023 Tahun 2024 4,57 3,86	5,70-5,20	125,77%	Tingkat Kemiskinan (persen) Tahun 2023 Tahun 2024 4,66 4,57	4,32-4,18	94,21%

Gambaran Umum Kondisi Daerah ditunjukkan dengan Capaian Kinerja dari 4 Aspek Pembangunan, yaitu :

Aspek Geografis dan Demografis

- 1.Kondisi Geografi
- 2.Potensi Pengembangan Wilayah
- 3.Wilayah Rawan Bencana
- 4.Demografi

Aspek Daya Saing

- 1.Daya Saing Ekonomi
- 2.Daya Saing SDM
- 3.Daya Saing Infrastruktur
- 4.Daya Saing Iklim Investasi

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- 1.Kesejahteraan Ekonomi
- 2.Kesejahteraan Sosial Budaya

Aspek Pelayanan Umum

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

- 

Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar yang Belum Optimal
- 

Rendahnya daya saing kepemudaan dan olahraga
- 

Indeks Literasi Masyarakat belum optimal
- 

Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata yang belum optimal
- 

Rendahnya daya saing perekonomian daerah terutama pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, IKM dan ekonomi kreatif
- 

Belum Optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 

Pertumbuhan Investasi yang masih rendah dan belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan
- 

Kualitas Cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan penunjang belum optimal
- 

Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal untuk menurunkan tingkat kesejahteraan yang belum merata

- 

Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk peningkatan kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan masyarakat
- 

Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta menurunkan Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk
- 

Pertumbuhan investasi dan daya saing ekonomi lokal
- 

Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar dan penunjang dan pengelolaan lingkungan;
- 

Peningkatan kualitas pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif serta upaya pengentasan kemiskinan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Kondisi Geografi

Kota Salatiga terletak antara 007.17' dan 007.17'.23" Lintang Selatan, dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga terletak di ketinggian 450-825 dari permukaan air laut Wilayah Kota Salatiga secara morfologis berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh beberapa gunung, antara lain Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga subur dan potensi alam yang cukup besar.

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

- Daerah Bergelombang $\pm 65\%$, terdiri dari Kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.
- Daerah Miring $\pm 25\%$, terdiri dari Kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan.
- Daerah Datar $\pm 10\%$, terdiri dari Kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan

Berdasarkan kondisi geologi, tekstur tanah Kota Salatiga dibedakan menjadi tanah Latosol Coklat dan tanah Latosol Coklat Tua, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah Latosol Coklat

Tanah latosol coklat bahan induknya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur remah dan gembur, produktivitas tanah sedang sampai tinggi. Jenis tanah ini terdapat di sebagian wilayah Kota Salatiga dan cocok ditanami padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, cengkih dan lain-lain.

- Tanah Latosol Coklat Tua

Bahan dasarnya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur tanahnya remah dan gembur sekali. Tanah ini terdapat di bagian ujung kota, sekitar Gunung Rong. Tanah ini cocok ditanami kopi, teh, coklat, padi, pisang, cengkih dan tanaman campuran

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Salatiga beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 23°C-28°C. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara.

Peta wilayah Kota Salatiga disajikan pada Gambar 2.1.

[illegible]

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Salatiga beriklim tropis dengan dua pergantian musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Nopember–April dipengaruhi oleh angin muson barat, sedang musim kemarau terjadi antara bulan Mei–Oktober yang dipengaruhi oleh angin muson timur. Sedangkan jumlah curah hujan terendah 3 mm/tahun dan tertinggi 62 mm/tahun.

Wilayah administrasi Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan:

- *Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejanten*
- *Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung*

b. Sebelah Timur berbatasan dengan:

- *Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan*
- *Kecamatan Tenganan: Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat*

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:

- *Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak*
- *Kecamatan Tenganan: Desa Patemon, Desa Karang Duren*

d. Sebelah Barat berbatasan dengan:

- *Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan*
- *Kecamatan Getasan: Desa Polobogo Kecamatan Getasan.*

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Salatiga berjarak $\pm$ 53 kilometer dari Kota Surakarta dan $\pm$ 50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang–Surakarta) dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Oleh karena itu, Kota Salatiga berpotensi menjadi kota transit.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, pengembangan Kawasan Perkotaan Salatiga (tematik kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Semarang, antara lain melalui :

- a. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
- b. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
- c. Penyediaan dan penirgkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga keda yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
- d. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian Sistem Pusat Pelayanan di Kota Salatiga, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. **Pusat Pelayanan Kota (PPK) Salatiga** berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kota dan perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan Pendidikan tinggi yang berpusat pada Kelurahan Kalicacing mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kalicacing

di Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir.

b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Salatiga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub daerah yang meliputi :

- 1) **SPPK Sidorejo** yang berfungsi sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
- 2) **SPPK Tingkir** yang berfungsi sebagai kawasan pelayanan transportasi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
- 3) **SPPK Argomulyo** yang berfungsi sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, sport centre, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;
- 4) **SPPK Sidomukti** yang berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti.

c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Salatiga berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, Pendidikan, permukiman dan perdagangan dan jasa berada di:

- 1) Kecamatan Argomulyo, terdiri atas Kelurahan Noborejo, Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Cebongan;
- 2) Kecamatan Sidomukti, terdiri atas Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh;
- 3) Kecamatan Sidorejo, terdiri atas Kelurahan Blotongan; Kelurahan Bugel; Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Pulutan;
- 4) Kecamatan Tingkir, terdiri atas Kelurahan Gendongan, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor dan Kelurahan Tingkir Tengah.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kota Salatiga tersebar di beberapa kelurahan diantaranya di Kelurahan Blotongan, Bugel, Sidorejo Kidul, Tegalrejo, Randuacir dan Kumpulrejo. Peningkatan dan Pembangunan jalur evakuasi bencana meliputi:

- a. Jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan pada Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
- b. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
- c. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
- d. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Randuacir di

Kecamatan Argomulyo;

- e. Jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola di Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
- f. Jalan lainnya berdasarkan kajian.

Sedangkan untuk tempat evakuasi bencana meliputi :

- a. Lapangan Kelurahan Randuacir di Argomulyo dan Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
- b. Bangunan kantor pemerintah pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir, Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
- c. Ruang/Bangunan lainnya.

Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III.2
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**

SKALA 1:18.500

U
0 0,5 1 2 km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum 1960/2005

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kabupaten/Kota
○ Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
----- Batas Kota
----- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
[B] Rawa Air

Kawasan Perlindungan Setempat
[K] Kawasan Perlindungan Setempat

Ruang Terbuka Hijau

[RTH] Ruang Terbuka Hijau
[RTH1] Ruang Terbuka Hijau Primer
[RTH2] Ruang Terbuka Hijau Sekunder
[RTH3] Ruang Terbuka Hijau Tersier
[RTH4] Ruang Terbuka Hijau Lainnya

KAWASAN BUDI DAYA

Badan Jalan
[J] Jalan

Kawasan Pertanian
[P1] Kawasan Pertanian Pangan
[P2] Kawasan Perikanan
[P3] Kawasan Perikanan

Kawasan Perumahan Industri
[PI] Kawasan Perumahan Industri

Kawasan Pariwisata
[P] Kawasan Pariwisata

Kawasan Perumahan
[P] Kawasan Perumahan

Kawasan Industri
[I] Kawasan Industri

Kawasan Perdagangan dan Jasa
[K] Kawasan Perdagangan dan Jasa

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
[KRB] Kawasan Rawan Bencana

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Sistem Daerah
- Citra Satelit Spot 7 Perencanaan Tahun 2018
- Foto Udara Kota Salatiga Perencanaan Tahun 2019 dan Tahun 2020
- Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
- SK 5002/ME/LHK-PN/TKU/PLA/21/2021 Tentang Peta Perencanaan Perencanaan Kawasan Rawan Bencana
- Pengolahan Data Tahun 2020 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
Pj. WALI KOTA SALATIGA

TTD

SINOENG N. RACHMADI

2.1.4. Aspek Demografi

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

11-7

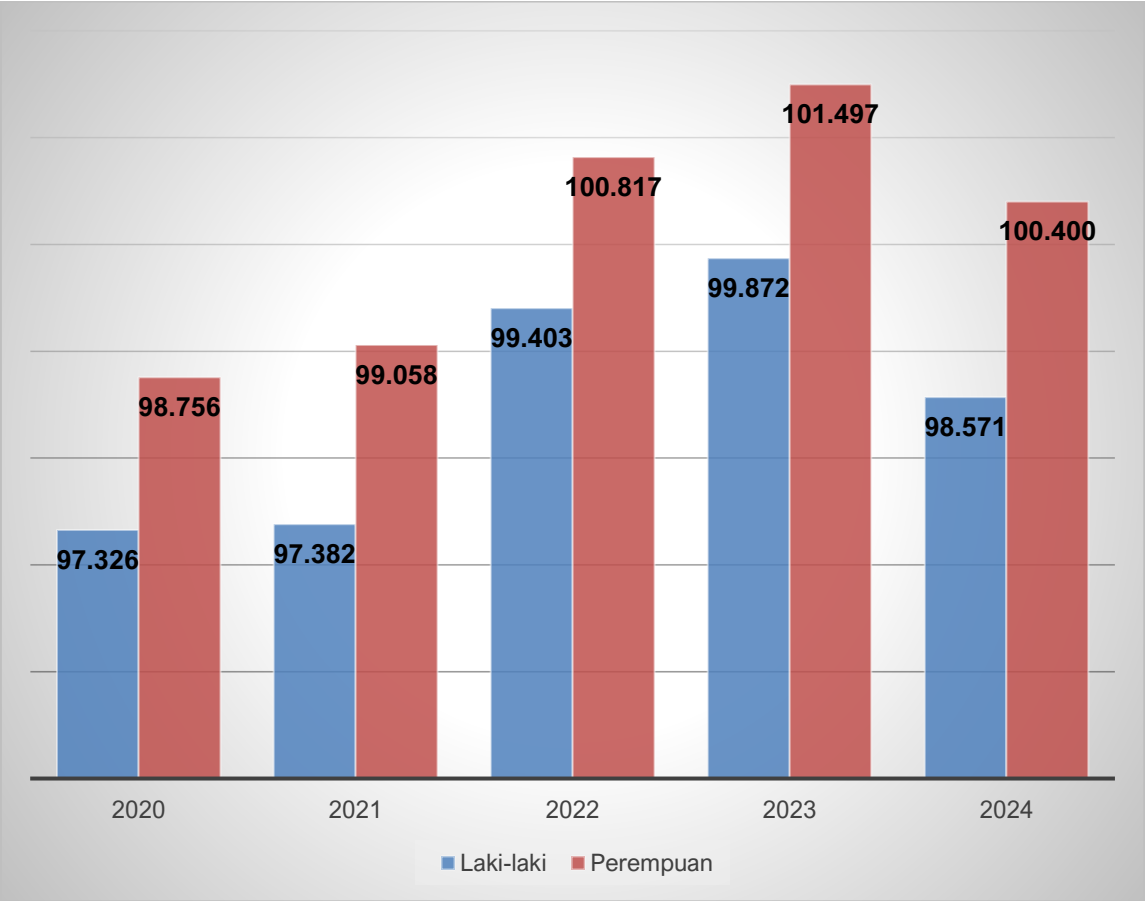
penduduk sebanyak 2.498 jiwa atau 1,26%. Pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 98.571 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 100.400 jiwa artinya penduduk laki-laki lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2024 sebesar 98,31%, menurun sebesar 0,22% dibandingkan tahun 2023 sebesar 98,39%. Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	2020	97.326	98.756	196.082	98,55
2.	2021	97.382	99.058	196.440	98,30
3.	2022	99.403	100.817	200.220	98,59
4.	2023	99.872	101.497	201.369	98,39
5.	2024	98.571	100.400	198.971	98,17

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

Grafik 2. 1 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2024 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 54.755 jiwa dan terendah di Kecamatan Sidomukti sebanyak 45.634 jiwa. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Tahun	Argomulyo	Tingkir	Sidomukti	Sidorejo	Kota Salatiga
2020	50.261	46.937	44.162	54.722	196.082
2021	50.264	46.838	45.054	54.284	196.440
2022	51.542	47.699	45.764	55.215	200.220
2023	52.045	48.106	46.125	55.093	201.369
2024	51.376	47.206	45.634	54.755	198.971

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

Pada tahun 2024, jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tertinggi yaitu kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 25.838 jiwa atau sebesar 12.98% dari jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia kurang dari 1 tahun sebanyak 1735 jiwa atau sebesar 0.87% dari jumlah penduduk.

Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024

No	Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	%
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
1.	0 sd.1	859	876	1.735	0,87
2.	1 sd 5	6.699	6.142	12.841	6,45
3.	6 sd 10	7.467	6.935	14.402	7,24
4.	11 s.d. 15	8.120	7.809	15.929	8,01
5.	16 s.d. 20	7.815	7.353	15.168	7,62
6.	21 s.d. 25	7.279	7.120	14.399	7,24
7.	26 s.d. 30	7.352	7.319	14.671	7,37
8.	31 s.d. 35	7.084	7.044	14.128	7,10
9.	36 s.d. 40	6.968	7.247	14.215	7,14
10.	41 s.d. 45	8.398	8.503	16.901	8,49
11.	46 s.d. 50	7.124	7.197	14.321	7,19
12.	51 s.d. 55	6.204	6.769	12.973	6,52
13.	56 s.d. 60	5.399	6.051	11.450	5,75
14.	Lebih dari 60	11.803	14.035	25.838	12,98
Jumlah 2024		98.571	100.400	198.971	
2023		99.872	101.497	201.369	
2022		99.403	99.058	200.220	
2021		97.382	98.629	196.440	
2020		96.989	98.629	196.082	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk Kota Salatiga tahun 2024 tertinggi adalah penduduk berpendidikan SLTA/ Sederajat sebanyak 52.181 jiwa dan terendah adalah penduduk berpendidikan Sarjana Strata III sebanyak 190 jiwa.

Data penduduk Kota Salatiga berdasarkan tingkat pendidikan berdasarkan pendidikan tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
1)	Tidak/Belum Sekolah	44.106	Jiwa
2)	Belum Taman SD/Sederajat	19.030	Jiwa
3)	Tamat SD/ sederajat	26.783	Jiwa
4)	SLTP/ Sederajat	26.828	Jiwa
5)	SLTA/ Sederajat	52.181	Jiwa
6)	Diploma I/II	1.822	Jiwa
7)	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	6.055	Jiwa
8)	Diploma IV/Strata I	19.130	Jiwa
9)	Strata II	1.846	Jiwa
10)	Strata III	190	Jiwa
Jumlah		198.971	Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan ekonomi, dan (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial budaya. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

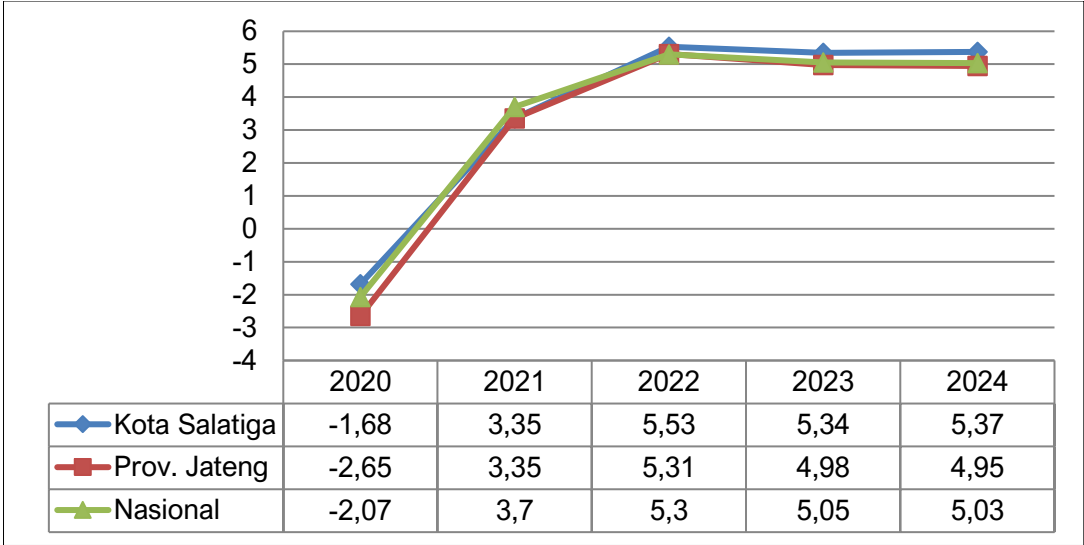
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain, pertumbuhan ekonomi, gini rasio, TPT, TPAK, angka kemiskinan dan rasio penduduk miskin.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dapat dianalisis melalui nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang tercermin dalam nilai PDRB ADHK. Selama periode 2020 - 2024, terjadi fluktuasi cenderung meningkat dalam nilai laju pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga sebesar -1,68% menjadi 5,37% di tahun 2024. Kemudian jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pergerakan laju ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sama dengan laju pertumbuhan ekonomu Kota Salatiga memiliki tren fluktuatif cenderung meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2020-2024



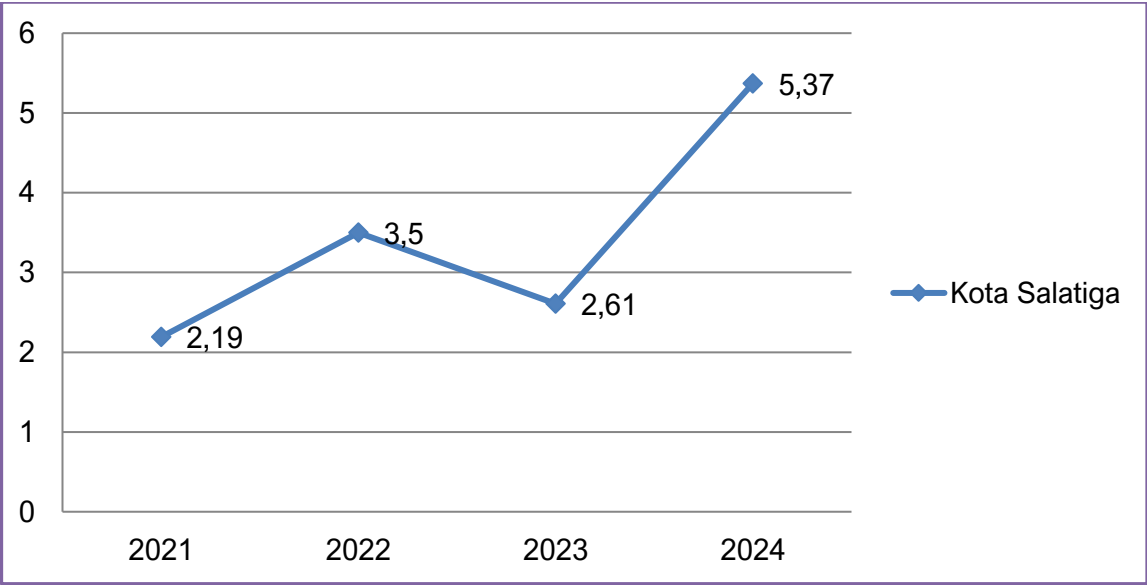
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Namun, tidak jarang ada barang dan jasa yang harganya justru turun. Kenaikan harga satu atau dua sejumlah barang dan jasa saja tidak dapat disebut inflasi, terkecuali bila kenaikan itu meluas yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Inflasi di Kota Salatiga Tahun 2024 sebesar 5,37% mengalami kenaikan sebesar 2,76 % tahun 2023 sebesar 2,61% . Laju inflasi Kota Salatiga selama kurun waktu tahun 2020-2024 terlihat dalam grafik berikut.

Grafik 2. 3 Inflasi Kota Salatiga tahun 2020-2024

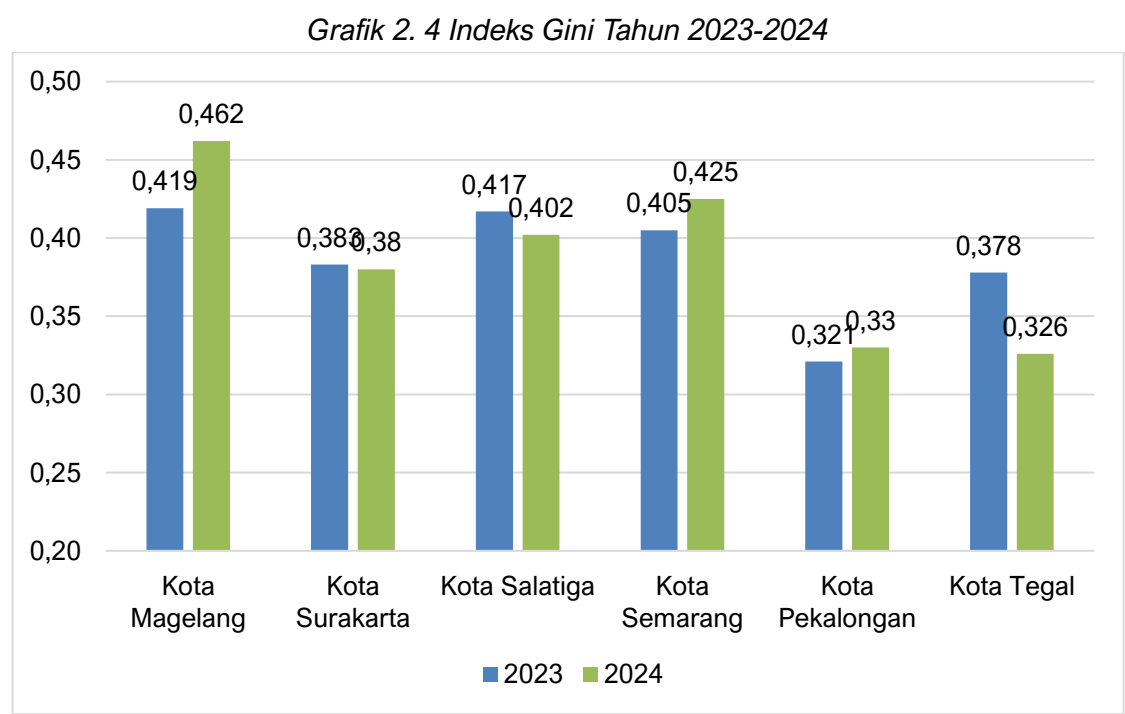


c. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Koefisien Indeks

Gini adalah 0 (nol) hingga 1 (satu) yang mengandung arti bahwa sama sekali tidak terjadi ketimpangan ketika capaian indeks Gini ketika bernilai 0 (nol) dan ketimpangan dapat dikatakan tinggi apabila capaian Indeks Gini ketika bernilai 1 (satu). Ketimpangan pemerataan pendapatan menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Indeks Gini dikategorikan rendah apabila capaiannya dibawah 0,3. Capaian Indeks Gini dikatakan sedang apabila capaiannya berada diantara 0,3 hingga 0,4 dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas 0,4 hingga 1.

Tingkat ketimpangan pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2024 ini menurun yaitu pada tahun 2023 sebesar 0,417 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,402. Ini berarti bahwa ketimpangan pemerataan pendapatan Kota Salatiga cenderung semakin menurun tetapi masih tergolong tinggi. Grafik ketimpangan pendapatan menurut Indeks Gini beberapa kota di Jawa Tengah ditunjukkan pada grafik berikut.



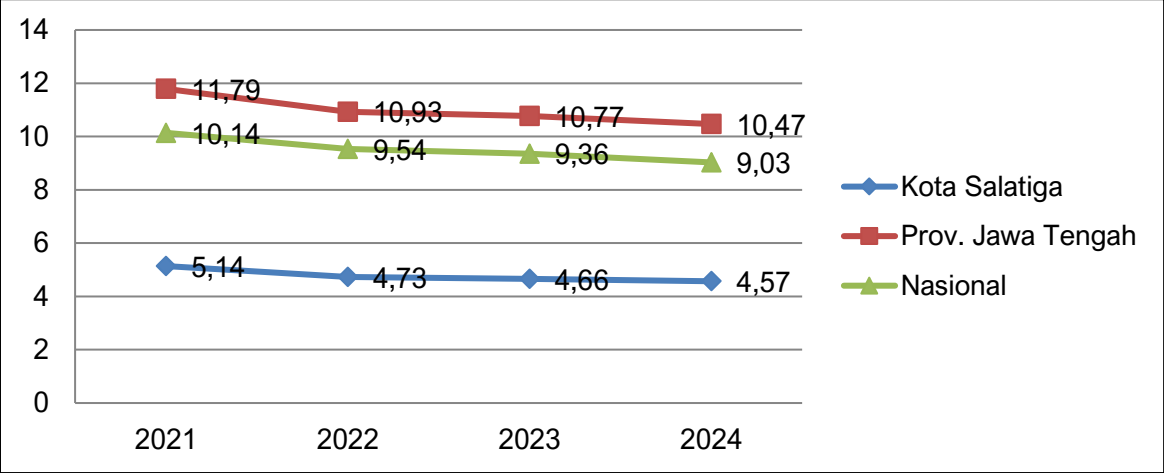
Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

d. Angka Kemiskinan

Pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga mencapai 9.330 jiwa. Dibandingkan tahun 2023 jumlah penduduk miskin menurun 0,08 ribu orang, dari sebelumnya 9.410 jiwa. Kemiskinan Kota Salatiga 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar 4,57% menurun 0,09% dibanding dengan tahun 2023 sebesar 4,66%. Kota Salatiga memiliki persentase penduduk miskin nomor 2 (dua) terendah se - Jawa Tengah setelah Kota Semarang.

Meskipun demikian, capaian penurunan angka kemiskinan Kota Salatiga berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10,47% dan capaian rata-rata nasional sebesar 9,03%. Kondisi tersebut bisa dilihat pada Grafik berikut ini.

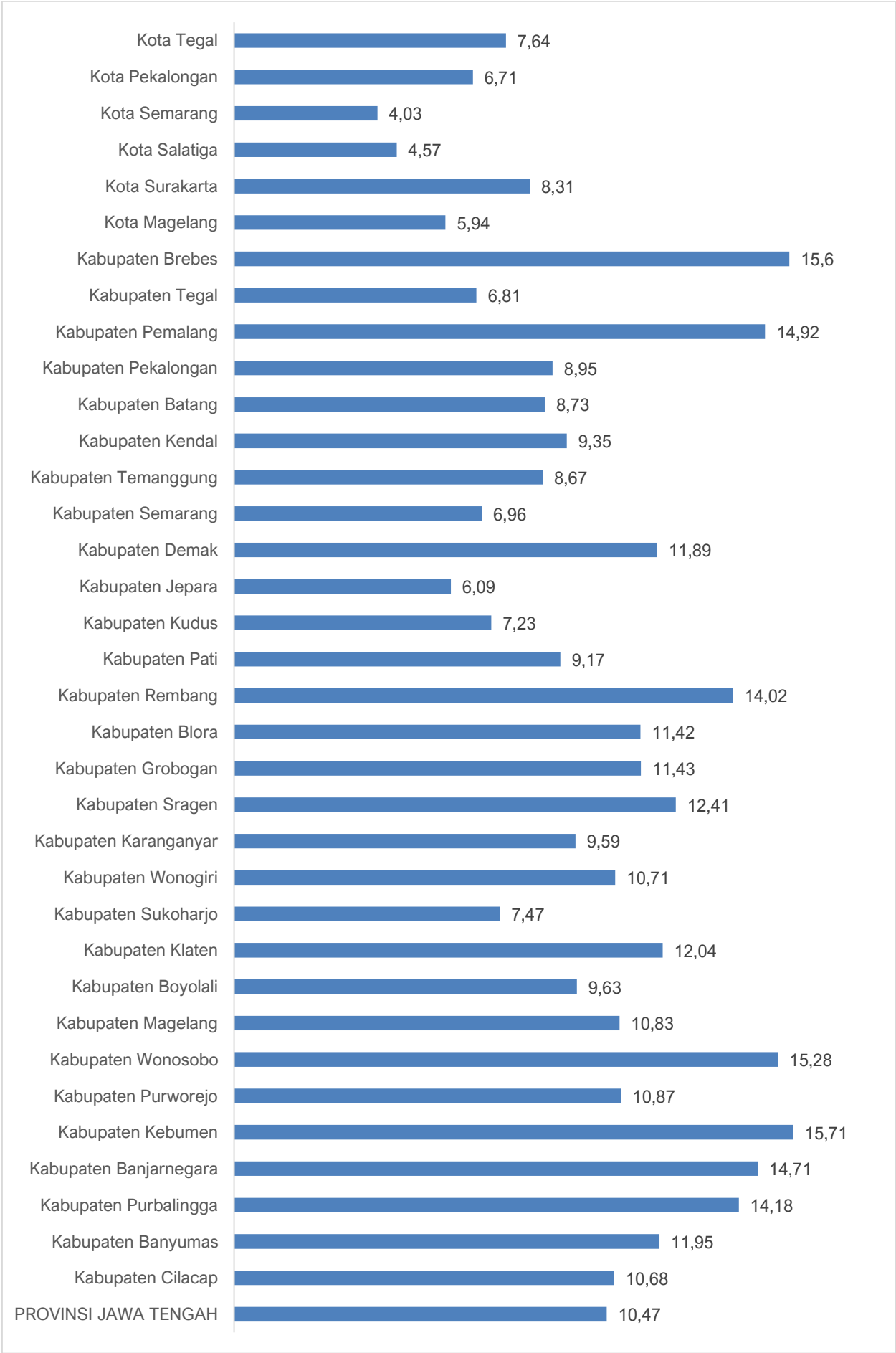
Grafik 2. 5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Capaian Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 2 terbawah sebesar 4,57%. Adapun persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Kebumen dengan persentase penduduk miskin sebesar 15,71%, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Semarang dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,03%. Adapaun data posisi relative persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah adalah sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 6 Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024

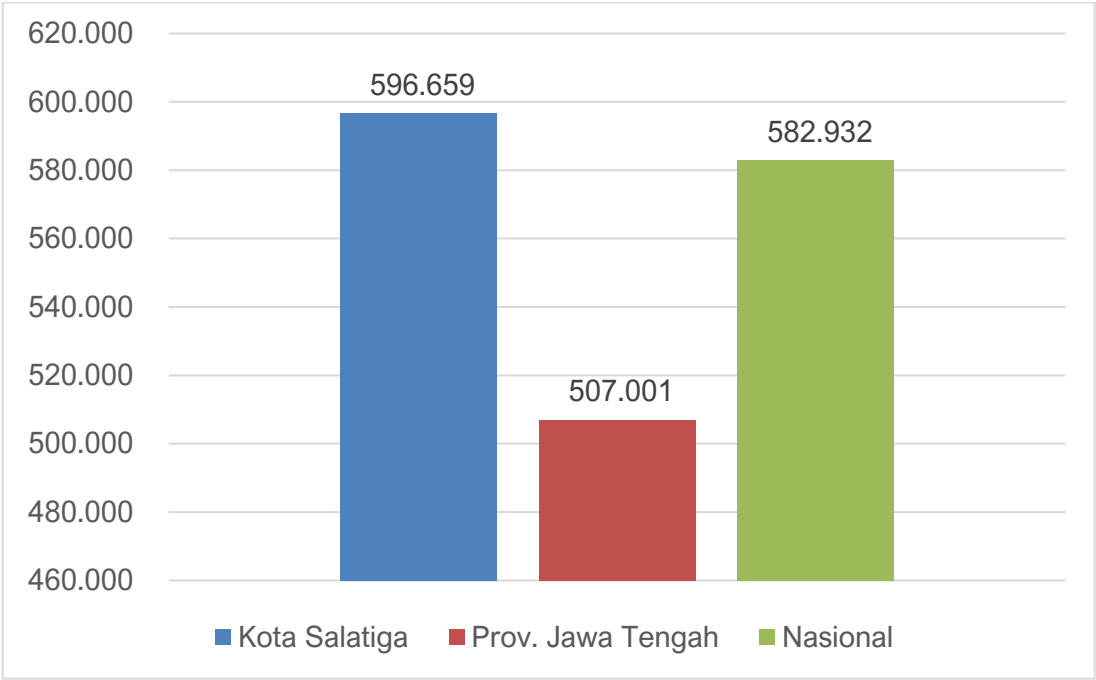


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Dalam menghitung GK, BPS melihat dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Dalam menghitung GKM, BPS memberikan definisi bahwa GKM adalah merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Tahun 2024 garis kemiskinan Kota Salatiga sebesar Rp.596.659,- dengan demikian lebih tinggi dari rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp.507.001,- dan relatif sama dengan garis kemiskinan nasional yaitu Rp.582.932,- . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 7. Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

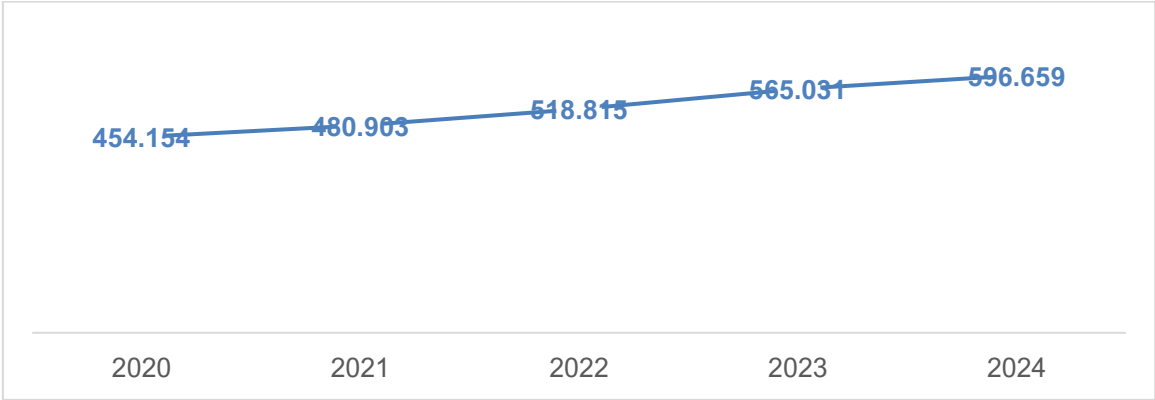


Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2024

Garis kemiskinan menjadi ukuran yang paling berpengaruh terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. Kenaikan garis kemiskinan jika tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka akan berdampak pada kenaikan jumlah penduduk miskin. Untuk itu perlu ada penekanan dalam menghadapi tren atau kenaikan garis kemiskinan dengan mendorong program dan kegiatan sektor riil yang menyentuh langsung kepada masyarakat dengan kategori berpenghasilan rendah.

Garis Kemiskinan Tahun 2024 tercatat naik Rp. 596.659,- jika dibandingkan pada Tahun 2023 Rp. 565.031,- mengalami kenaikan Rp. 31.628,-. Tren garis kemiskinan Kota Salatiga dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

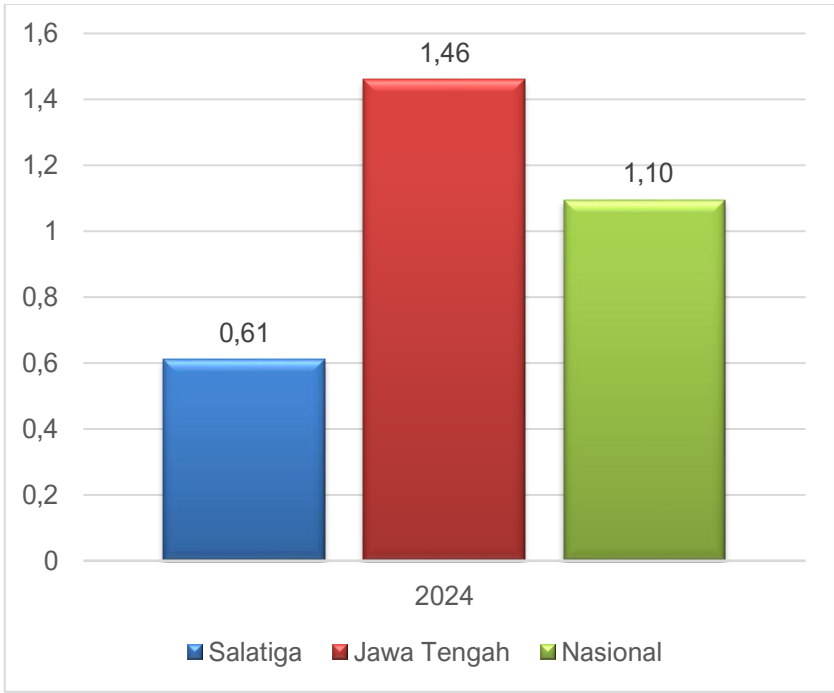
Grafik 2. 8. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2020 – 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Untuk mengukur kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinannya. Semakin kecil nilai Poverty Gap önden, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Salatiga pada tahun 2024 adalah sebesar 0,61. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

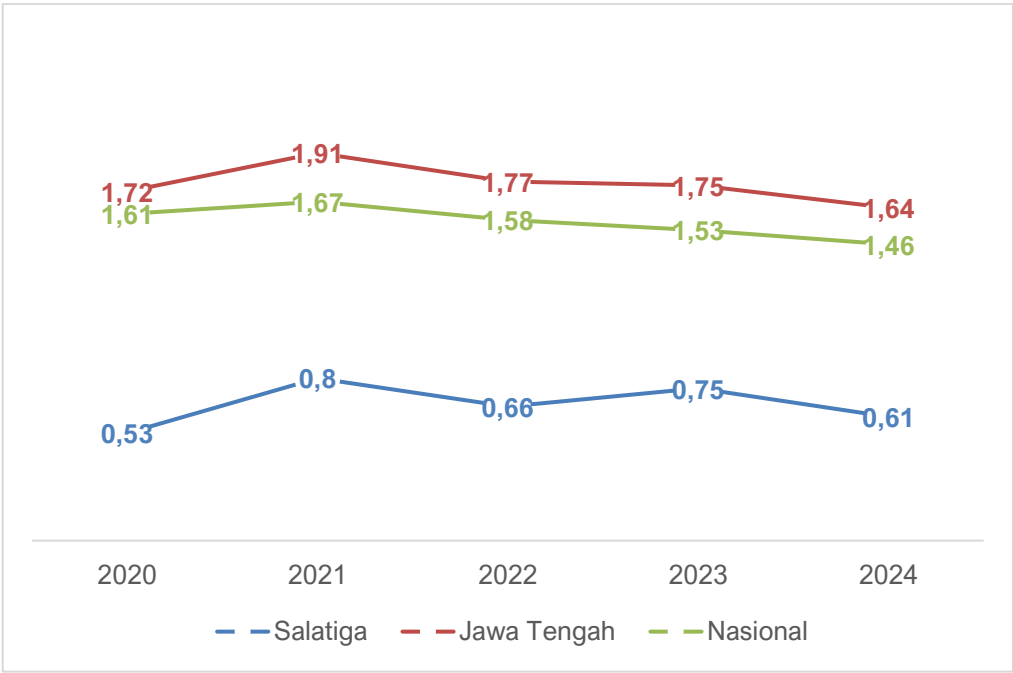
Grafik 2. 9. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Pencapaian P1 Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2020-2024 terlihat fluktuatif, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,61. Untuk mengetahui perkembangan P1 Kota Salatiga tahun 2020-2024 serta perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

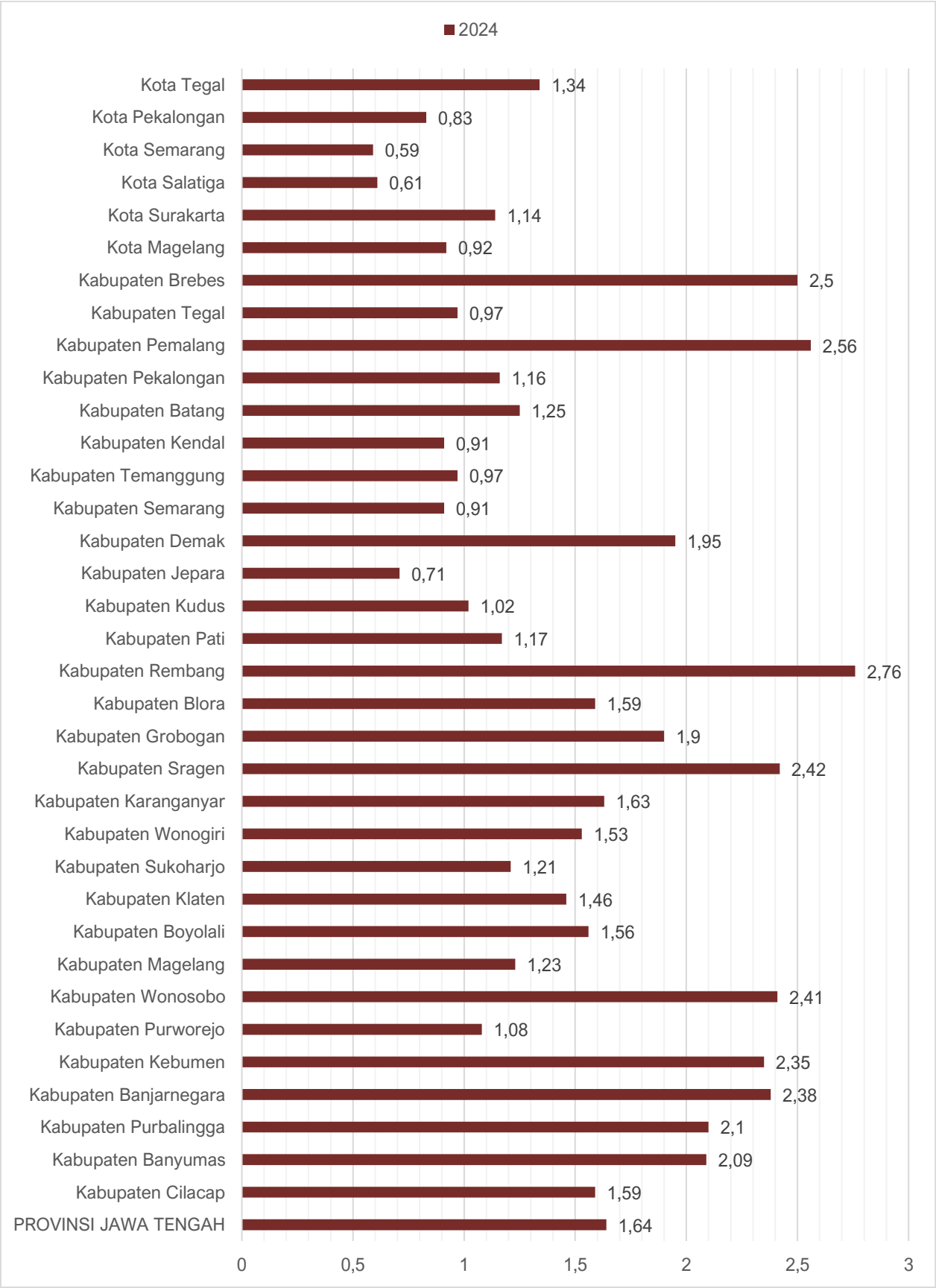
Grafik 2. 10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020– 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 2 terbawah sebesar 0,61%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,76%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) paling sedikit adalah Kota Semarang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,59%.

Grafik 2. 11. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024

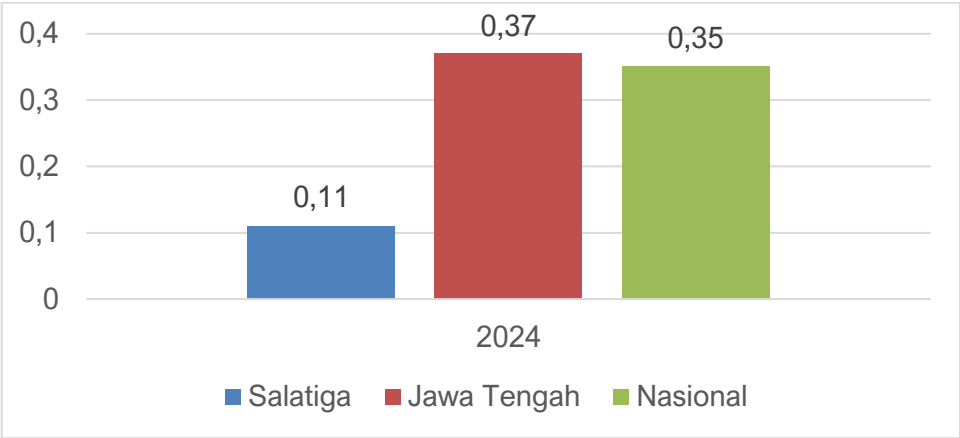


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kondisi tahun 2024 indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Salatiga sebesar 0,11 Provinsi Jawa Tengah 0,37 dan

nasional sebesar 0,35. Jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian Kota Salatiga pada tahun 2024 masih lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

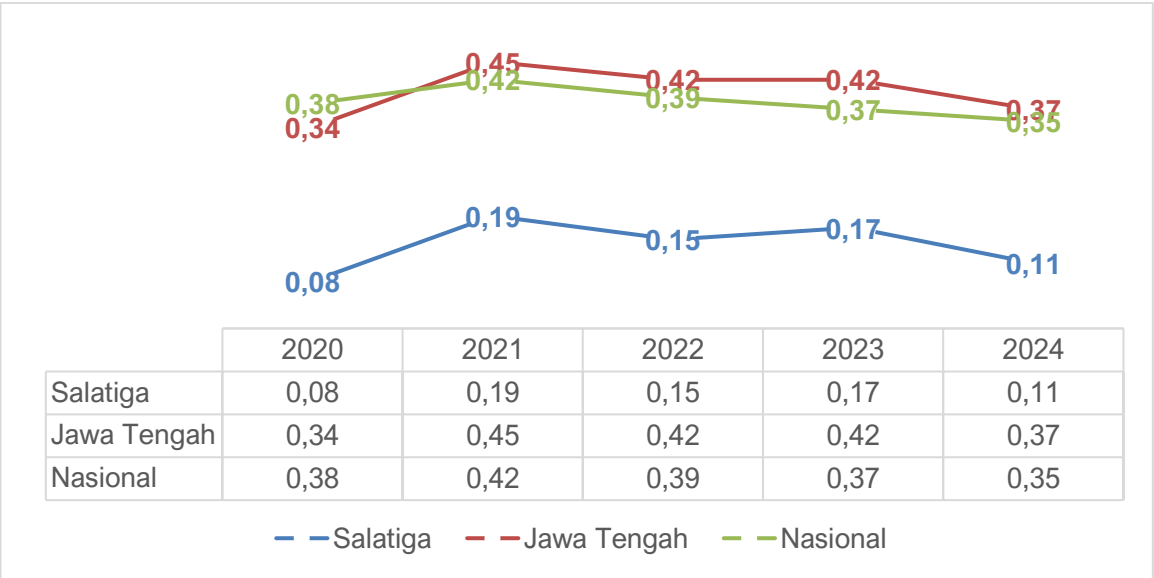
Grafik 2. 12. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, capaian indeks keparahan kemiskinan Kota Salatiga mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat dari P2 Kota Salatiga pada tahun 2019 0.20 turun menjadi 0.08 di tahun 2020 dan pada tahun 2021 naik menjadi 0.19 lalu menjadi 0.15 pada tahun 2022 dan 0.17 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0.11. Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

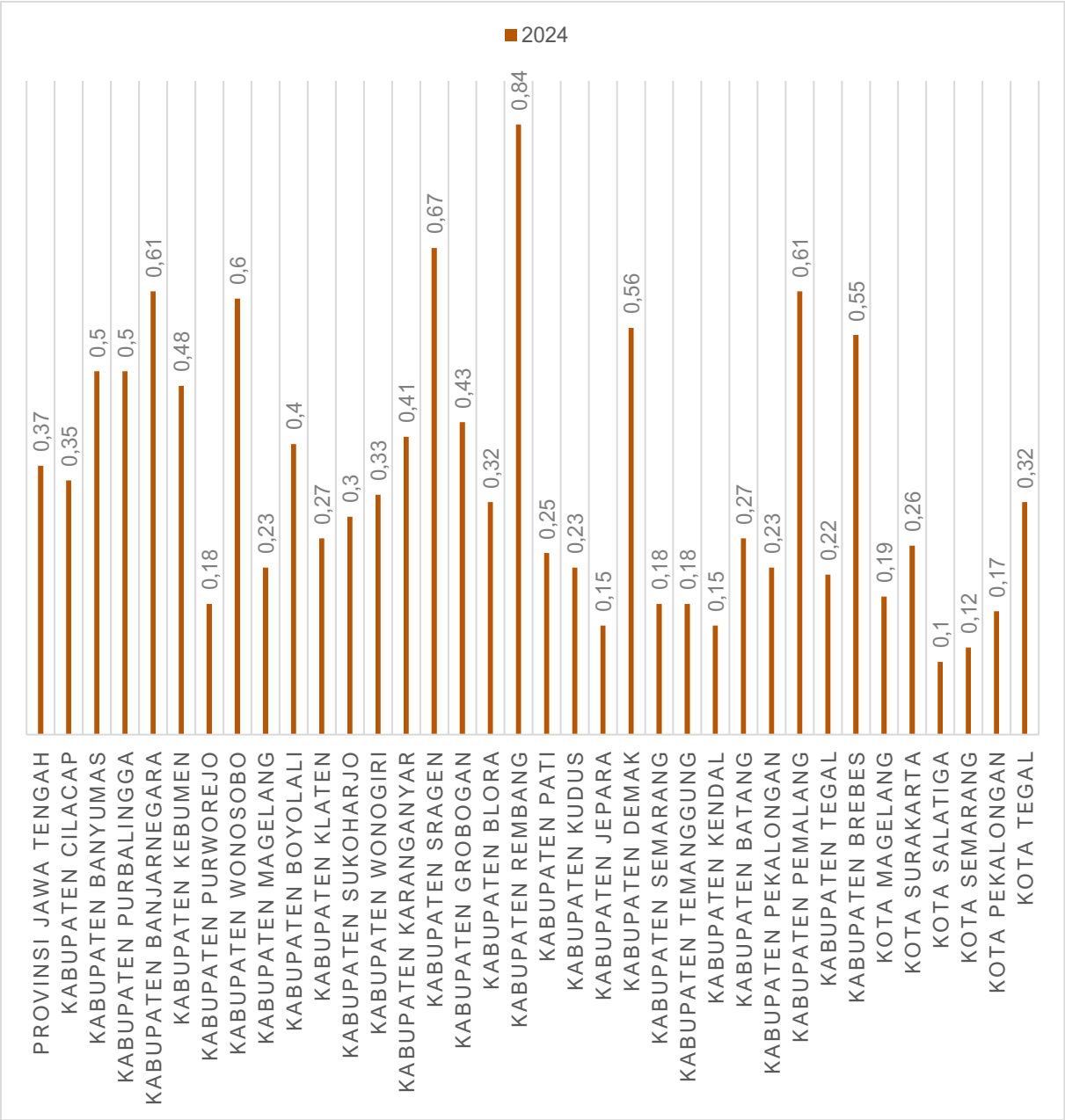
Grafik 2. 13. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020- 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 1 terbawah sebesar 0,11%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 0,84%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) paling sedikit adalah Kota Salatiga dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 0,11%.

Grafik 2. 14. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Data Kemiskinan telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 000.7.2/270/2024 tanggal 29 Oktober 2024 berjumlah 4.815 kepala rumah tangga miskin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Salatiga

No	Kecamatan	Kelurahan	KRT Aktif
1	Argomulyo	Cebongan	163
2	Argomulyo	Kumpulrejo	319
3	Argomulyo	Ledok	240
4	Argomulyo	Noborejo	359
5	Argomulyo	Randuacir	196
6	Argomulyo	Tegalrejo	159
7	Sidomukti	Dukuh	231
8	Sidomukti	Kalicacing	89
9	Sidomukti	Kecandran	273
10	Sidomukti	Mangunsari	409
11	Sidorejo	Blotongan	278
12	Sidorejo	Bugel	44
13	Sidorejo	Kauman Kidul	54
14	Sidorejo	Pulutan	217
15	Sidorejo	Salatiga	172
16	Sidorejo	Sidorejo Lor	244
17	Tingkir	Gendongan	51
18	Tingkir	Kalibening	123
19	Tingkir	Kutowinangun Kidul	217
20	Tingkir	Kutowinangun Lor	361
21	Tingkir	Sidorejo Kidul	360
22	Tingkir	Tingkir Lor	201
23	Tingkir	Tingkir Tengah	55

Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Beberapa Indikator Intervensi Penghapusan Kemiskinan diantaranya: jamban/sanitasi layak, sumber air minum layak, sambungan listrik, rumah tidak layak huni, disabilitas, anak tidak sekolah usia 7-18 tahun, individu tidak bekerja dan rumah tangga berisiko stunting.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

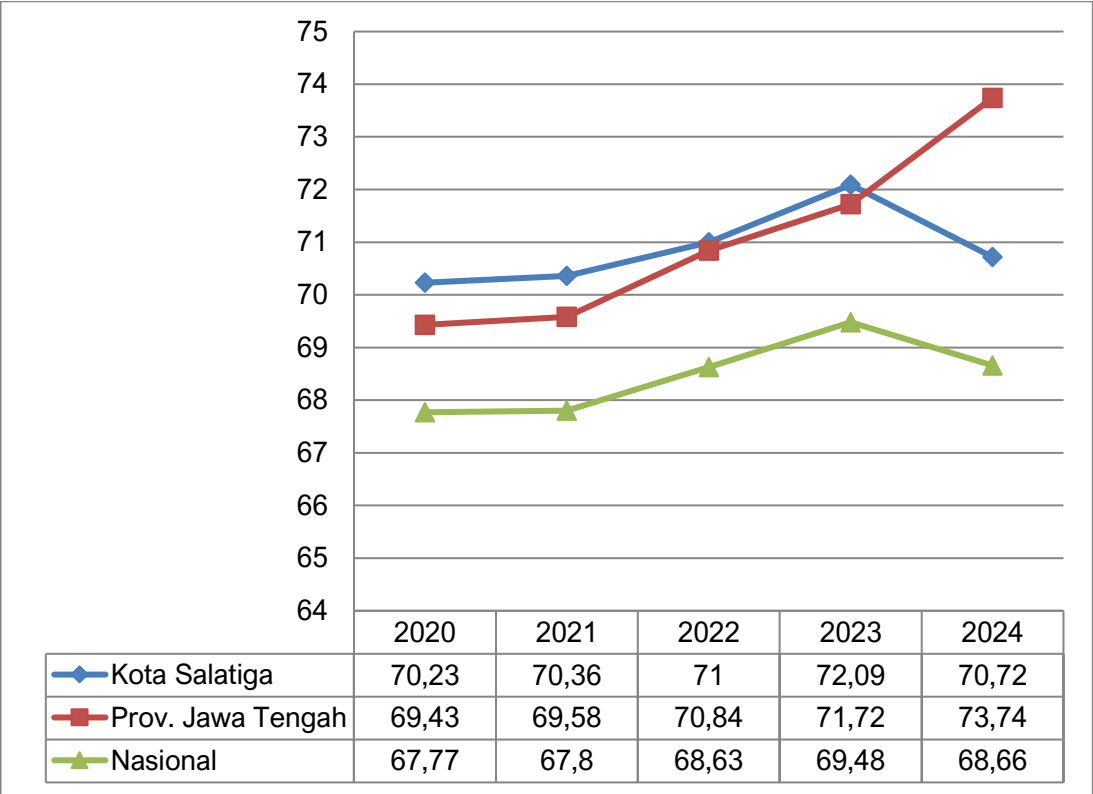
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. TPAK sendiri merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Jumlah TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Capaian TPAK Kota Salatiga Tahun 2024 sebesar 70,72% mengalami penurunan 1,37% dari tahun 2023 sebesar 72,09%. Angka ini diperoleh dari jumlah angkatan kerja sebesar 112.710 orang dibagi jumlah penduduk usia kerja sebanyak 159.370 orang dikalikan 100% (sumber data dari Berita Resmi Stastistik Kota Salatiga No

18/12/3373/Th.VIII, tanggal 20 Desember 2024). Target indikator TPAK sampai dengan tahun terakhir RPD (tahun 2023-2026) yaitu tahun 2026 sebesar 70,10% sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 adalah 70,72% maka realiasi sudah mencapai lebih dari yang ditargetkan. Faktor – faktor keberhasilan diantaranya bertambahnya jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk usia kerja dan berkurangnya jumlah pengangguran.

Capaian TPAK Kota Salatiga Tahun 2024 sebesar 70,72% mengalami penurunan 1,37% dari tahun 2023 sebesar 72,09%. Capaian Kota Salatiga pada tahun 2024 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,74% dan di atas capaian Nasional sebesar 68,66%. Perbandingan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024 tersaji pada grafik di bawah ini.

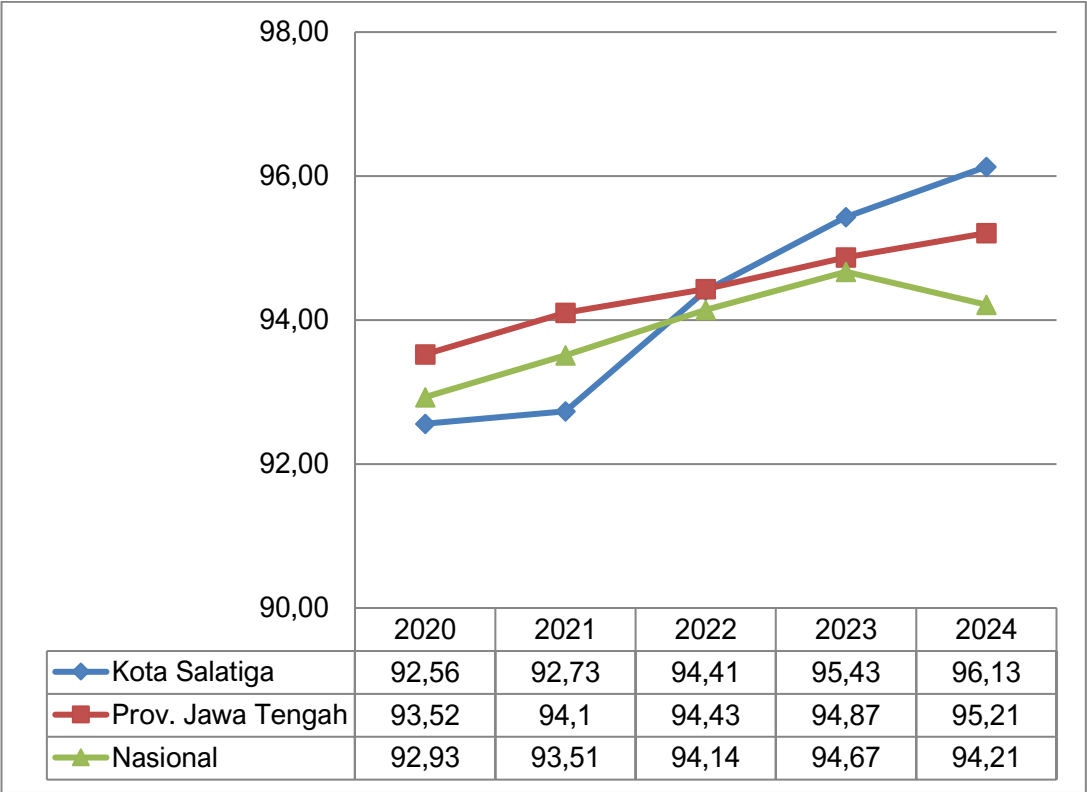
Grafik 2. 15. Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Kondisi setelah adanya pandemi Covid-19 rasio penduduk yang bekerja di Kota Salatiga menunjukkan tren yang cenderung membaik. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor manufaktur, sedangkan yang mengalami penurunan jumlah yang cukup besar adalah sektor jasa-jasa. Gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut:

Grafik 2. 16. Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

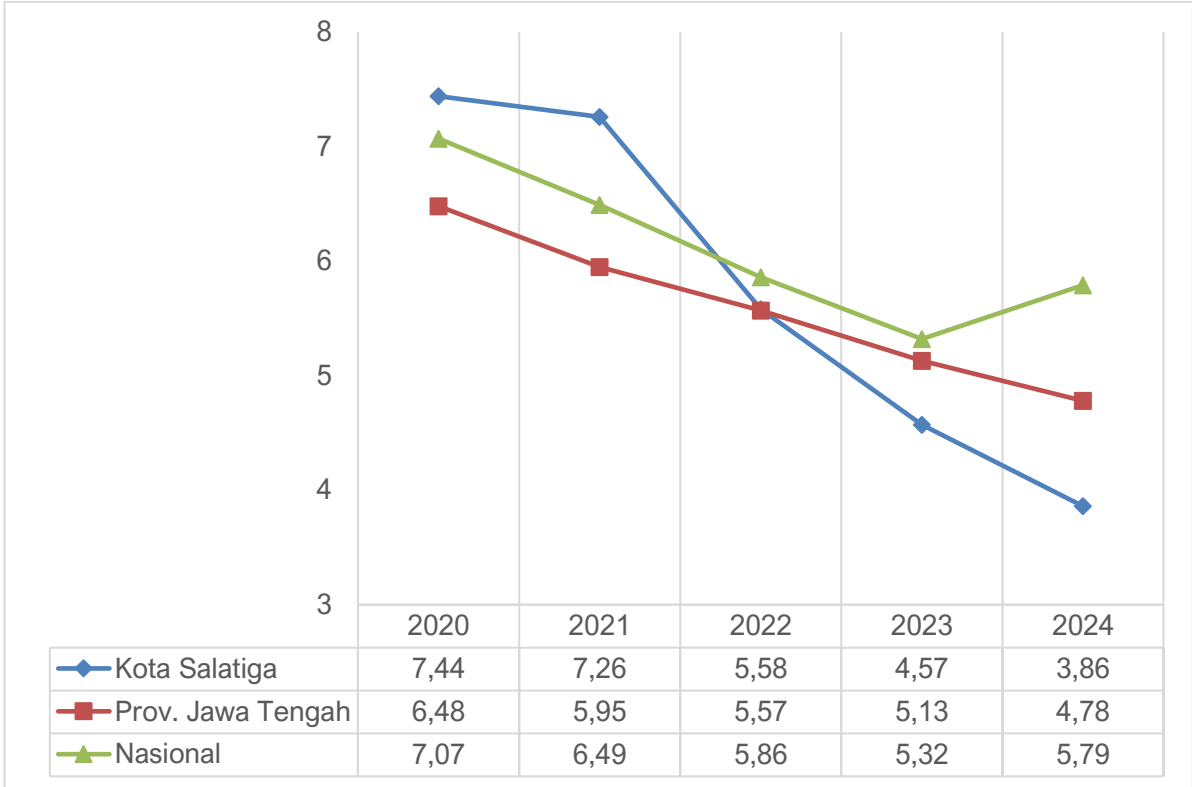
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pengangguran terbuka meliputi :

- penduduk yang sedang mencari pekerjaan;
- penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha;
- penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai

Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Tahun 2024 yaitu 3,86% mengalami penurunan sebesar 0,71% dari tahun 2023 sebesar 4,57%. Berarti di antara 100 orang angkatan kerja ditemukan sekitar 3 sampai 4 orang penganggur. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 17. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024(%)



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Angka Harapan Hidup

Definisi Usia Harapan Hidup adalah rata- rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Angka Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Usia harapan hidup saat lahir tahun 2024 Kota Salatiga sebesar 78,26 tahun berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,69 dan capaian Nasional sebesar 73,39. Hal ini berarti dari tahun 2020 sampai tahun 2024, rata-rata penduduk Kota Salatiga dapat bertahan hidup pada usia 78 tahun

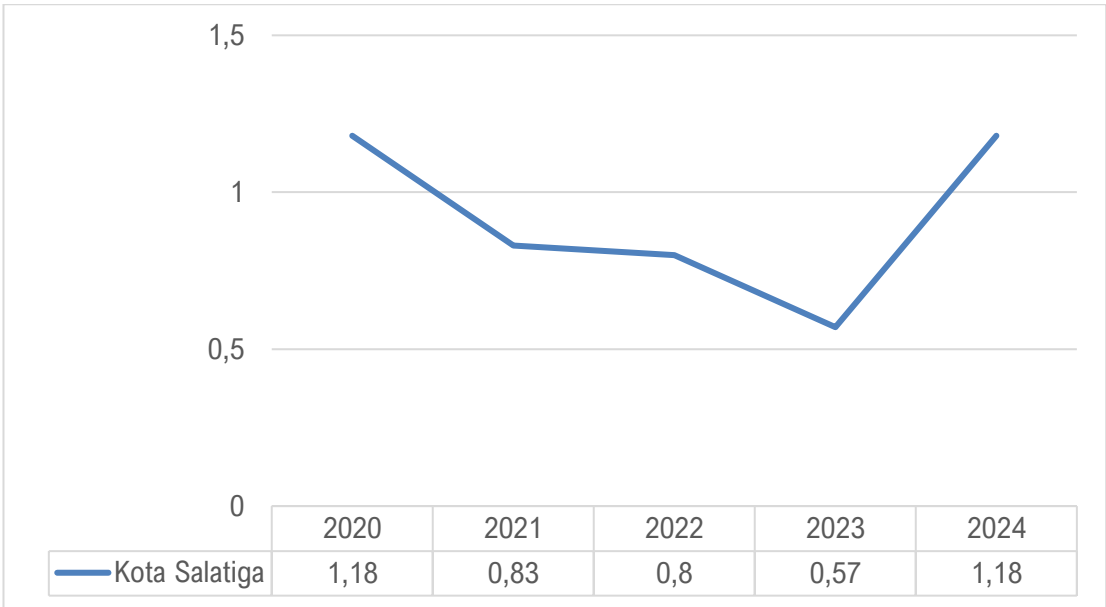
b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Target yang ditetapkan untuk Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2024 sebesar 1,32%. Data capaian kinerja didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga sebesar 1,18% sehingga tingkat keberhasilan sebesar 10,61%. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 yaitu 1,18% dari target sebesar 1,32% dengan capaian kinerja sebesar 110,61%. Dibandingkan tahun 2023 dengan target sebesar 1,34% dan terealisasi sebesar 1,25% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,72%.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan ini diantaranya

- o terjalannya komunikasi, edukasi dan informasi bagi kelompok kegiatan serta penyuluh keluarga berencana dengan penyediaan Genre Kit, BKB Kit,BKL.Kit dan KIE Kit;
- o pemberian penghargaan bagi akseptor Modus Operasi Pria (MOP) dan Modus Operasi Wanita (MOW);
- o penyediaan sarana dan prasana untuk pelayanan pemasangan kontrasepsi baik bagi pemberi pelayanan KB maupun akseptor KB;
- o melakukan monitoring program KKBPK oleh PLKB di tingkat Kelurahan ;
- o meningkatkan kualitas dan kuantitas IMP (Institusi Masyarakat Pedesa

Grafik 2. 18. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

c. Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS

Indikator kinerja Cakupan Penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk terdata dalam DTKS dibagi dengan jumlah seluruh penduduk yang memenuhi. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Pada tahun 2024 angka kemiskinan ditargetkan 4.67- 4,59 dan terealisasi 4,57 di akhir RPD ditargetkan 4,67-4.59, sehingga capaian kinerja mencapai 100,21% dengan status Tercapai. Faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja ini diantaranya melaksanakan koordinasi intensif secara vertikal dan horisontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan masalah kesejahteraan sosial. Adapun kegiatannya meliputi :

- 1) pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
- 2) penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;

- 3) penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
- 4) verifikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/penerima bansos).

Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani ditargetkan 75% terealisasi 92,72% dan di akhir RPD target 70 persen dengan capaian kinerja di Tahun 2024 sebesar 123,62% dengan status Tercapai. Faktor- faktor yang mendukung diantaranya :

- 1) pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
- 2) penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
- 3) penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
- 4) verifikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/ penerima bansos)

d. Pola Pangan Harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Semakin beragam bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat, maka semakin rendah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap jenis bahan pangan tertentu. Hal ini akan mendorong terwujudnya ketahanan pangan di tengah masyarakat.

Indikator kinerja Pola Pangan Harapan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Jika skor PPH semakin mendekati 100, konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang.

Realisasi Skor Pola Pangan Harapan tahun 2018 sebesar 91,tahun 2019 sebesar 93,5 tahun 2020 sebesar 93,9, tahun 2021 sebesar 90, tahun 2022 sebesar 95,51, tahun 2023 sebesar 92,2 dan realisasi tahun 2024 adalah 94,4 dengan demikian Skor Pola Pangan Harapan mengalami fluktuasi naik turun dalam beberapa tahun terakhir

Dasar perhitungan Skor Pola Pangan Harapan untuk tahun ini menggunakan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan, adapun Realisasi Skor PPH sejak Tahun 2021 menggunakan perhitungan Susenas Tahun 2020, Jika dibandingkan Target Skor PPh pada Tahun 2023, capaian Tahun 2024 adalah sama. Adapun jika dibandingkan target tahun 2024 maka mampu memenuhi target atau realisasi sebesar 100%.

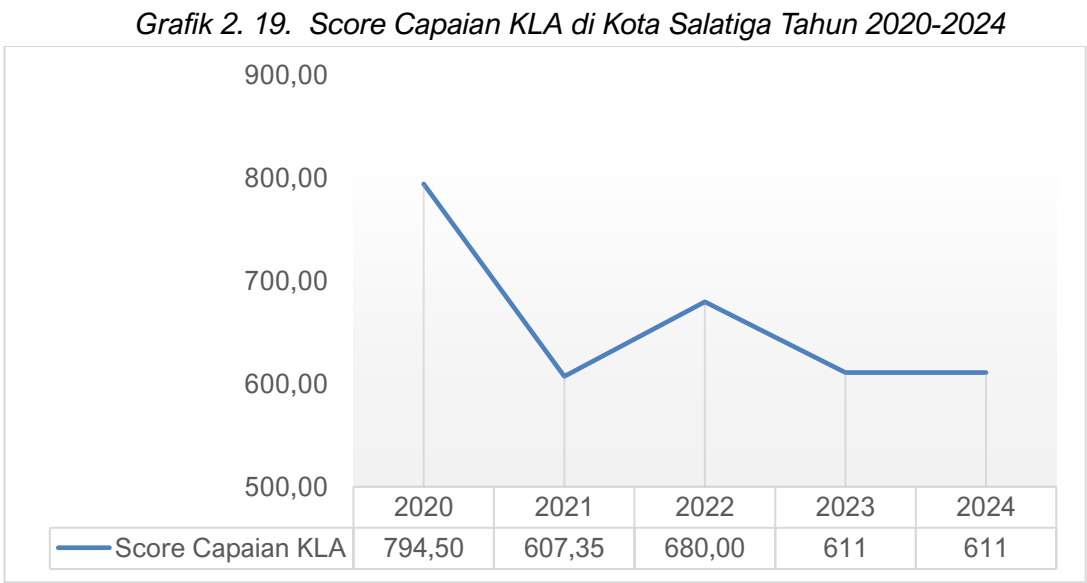
Terdapat 9 komoditas kelompok pangan yang mempengaruhi skor PPH berupa padi-padian; umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. komoditas padi-padian. Dari kesembilan kelompok pangan diatas, diperoleh 5 kelompok pangan yang memiliki nilai dibawah skor maksimal, yaitu padi-padian, umbi-umbian, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya, maka terdapat realisasi penurunan sebesar 2,6 point. Penurunan angka ini banyak terdapat di komoditas padi dan umbi-umbian.jika dilihat dari penurunan angka komoditas padi dan umbi-umbian ini, sebagai

kesuksesan pemerintah dalam mendorong bahan pangan non beras dan diversifikasi produk lokal.

e. Score Capaian Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Indikator kinerja Capaian Kota Layak Anak (KLA) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

Target kinerja capaian kota layak anak tahun 2024 sebesar 620 dapat tercapai sebesar 611 sehingga realisasi capaian sebesar 98,55%. Tingkatan Kota Layak Anak Kota Salatiga berada pada kategori Madya dengan kriteria score 500 sampai dengan 800. Angka capaian kinerja untuk capaian kota layak anak didapatkan dari hasil penilaian evaluasi kota layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nilai untuk KLA didapatkan dari penilaian pada tahun berjalan dengan menilai kinerja pada tahun sebelumnya. Hasil penilaian pada tahun 2024 belum keluar nilai yang didapatkan, sehingga masih menggunakan nilai pada tahun 2023.

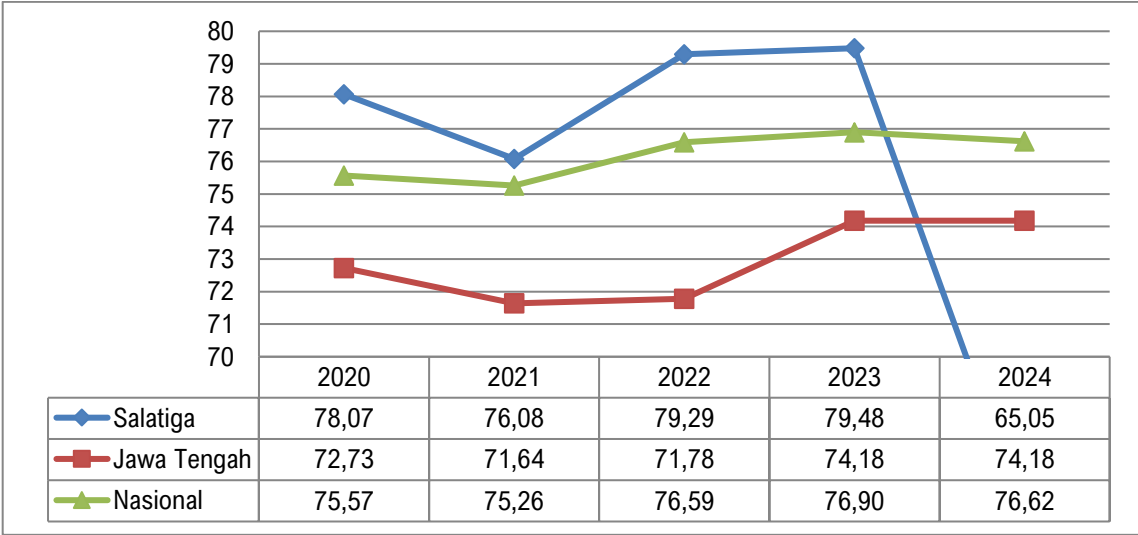
Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, standar nasional skor kota layak anak adalah 1000, maka jika dibandingkan dengan skor capaian tahun 2023 sebesar 611, Kota Salatiga masih perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan.

f. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender atau disingkat IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan

ekonomi. Tiga indikator yang dipakai dalam IDG, antara lain keterlibatan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan. Pada Tahun 2024 target IDG Kota Salatiga ditetapkan sebesar 80,5 terealisasi 65,05 sehingga capaian kinerjanya sebesar 80,80% sedangkan untuk Tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 80 terealisasi sebesar 79,48 mengalami kenaikan 0,19 dari tahun 2022 dengan indeks 79,29. Capaian IDG Kota Salatiga berada dibawah Provinsi Jawa Tengah dengan indeks 74,18 dan Nasional dengan indeks 76,62. Perbandingan capaian IDG tersebut dapat terlihat pada grafik berikut.

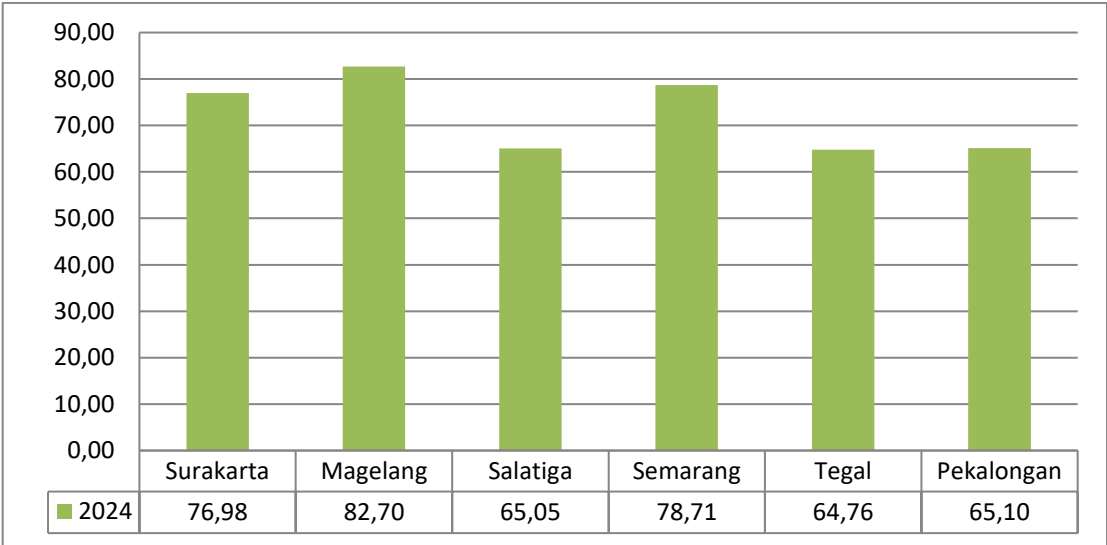
Grafik 2. 20. Perbandingan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 berada pada peringkat keenam. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 21. Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

g. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) atau *Gender Inequality Index* (GII) adalah indikator komposit yang menggambarkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi penting pembangunan manusia:

- 1. Kesehatan Reproduksi
- 2. Pemberdayaan
- 3. Partisipasi dalam kegiatan ekonomi

Unsur penghitung IKD (Komponen Dimensi dan Indikatornya).

Dimensi Indikator :

- 1. Kesehatan Reproduksi
 - Angka Kematian Ibu (AKI) (*maternal mortality ratio*)
 - Angka Kelahiran Remaja (adolescent birth rate, usia 15–19 tahun.
- 2. Pemberdayaan
 - Proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan
 - Tingkat pendidikan (perempuan dan laki-laki usia ≥ 25 tahun yang menamatkan pendidikan menengah ke atas)
- 3. Partisipasi Ekonomi
 - Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki (usia kerja produktif).

Contoh Interpretasi Nilai IKG

Nilai IKG berada pada rentang 0 hingga 1:

0 = tidak ada ketimpangan gender

1 = ketimpangan total (semakin tinggi nilainya, semakin timpang)

Analisis Sederhana IKG

✔ Kekuatan atau Capaian Positif:

AKI rendah → pelayanan kesehatan ibu membaik.

Tingkat pendidikan perempuan tinggi → peluang pemberdayaan meningkat.

Representasi perempuan di parlemen meningkat → kesetaraan pengambilan keputusan

h. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga dari tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Berdasarkan data yang tersedia, nilai i-Bangga Kota Salatiga mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai i-Bangga tercatat sebesar 60,1 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 56,1. Data untuk tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia, namun pada tahun 2024 nilai i-Bangga meningkat signifikan menjadi 67,3. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas kehidupan keluarga di Kota Salatiga, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan layanan sosial, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta keberhasilan program pembinaan keluarga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Nilai i-Bangga yang terus ditingkatkan dapat menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis keluarga, guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya. Suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indeks pembangunan kualitas keluarga mencerminkan seberapa tinggi kualitas suatu

keluarga. Daerah yang memiliki indeks pembangunan yang tinggi mengindikasikan memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi. Indeks pembangunan keluarga Kota Salatiga Kota Salatiga menunjukan angka sebesar 67,3. Angka ini ditargetkan semakin meningkat setiap tahunnya. Angka indeks pembangunan keluarga yang tinggi artinya keluarga tersebut telah berhasil menciptakan kondisi lingkungan yang harmonis.

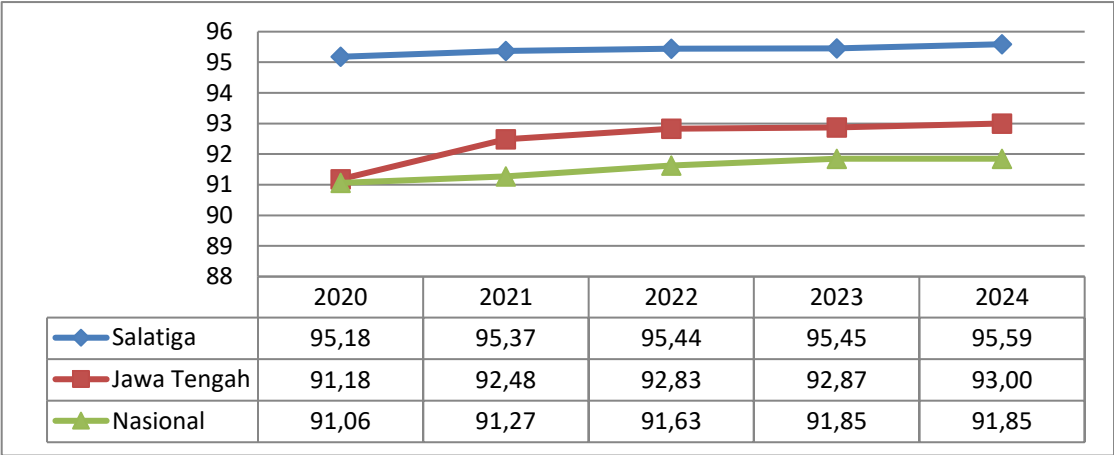
i. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti definisi IPM), namun terpilih berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati/sama dengan angka 100.

Tahun 2024 target yang ditetapkan untuk Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,5 terealisasi dengan nilai 95,59 sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%.. Sedangkan pada tahun 2023 target IPG untuk tahun 2023 dengan nilai 95 dapat terealisasi sebesar 94,45 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,47%.

Capaian IPG Kota Salatiga berada diatas capaian IPG Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 93,00 dan Nasional sebesar 91,85 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

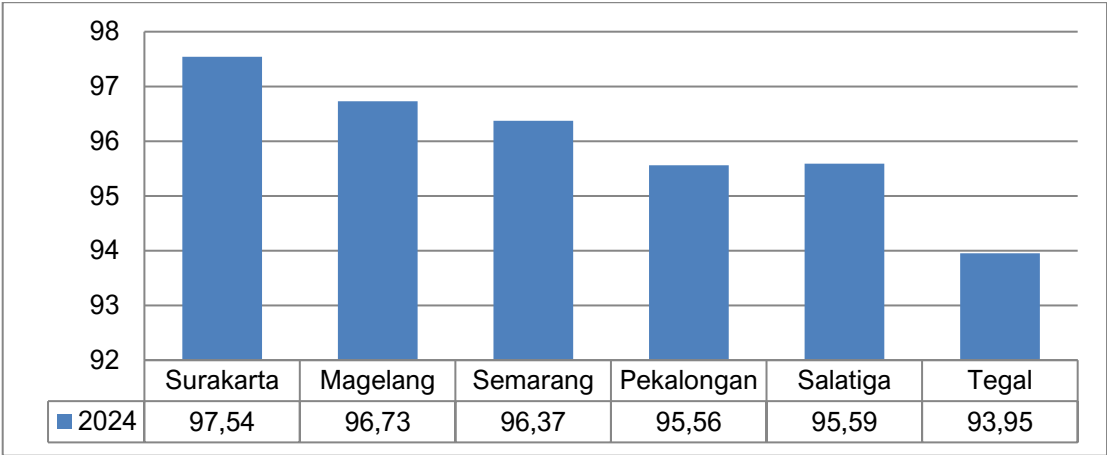
Grafik 2. 22. Perbandingan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Perbandingan capaian IPG Kota Salatiga dengan kota – kota lain di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke 4 sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2. 23. Perbandingan IPG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

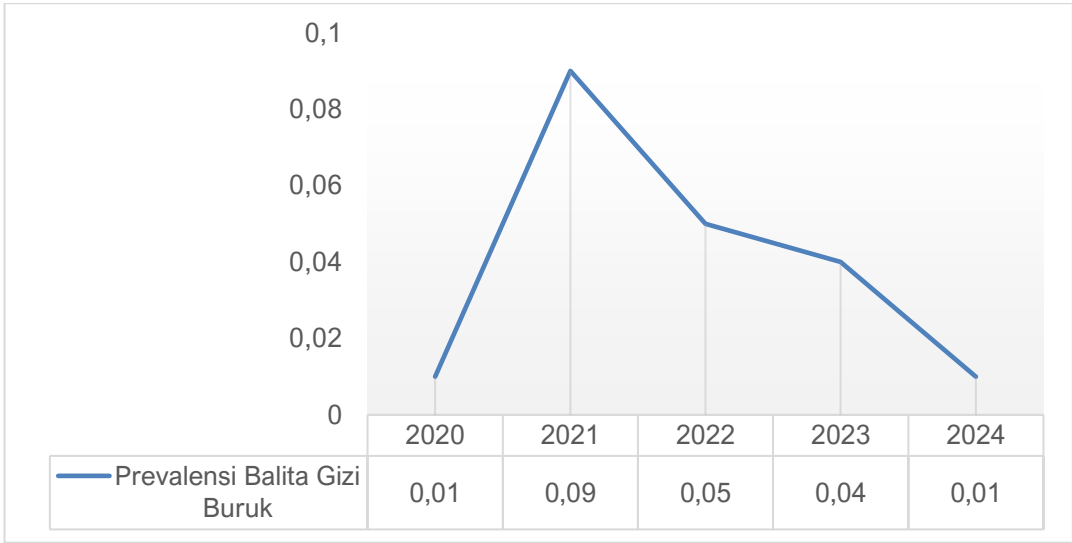


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

j. **Prevalensi Balita Gizi Buruk**

Pada tahun 2024 prevalensi gizi buruk di Kota Salatiga sebesar 0,01%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2020-2024 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun. Walaupun masih munculnya kasus gizi buruk berulang dengan balita yang sama karena adanya kelainan pada balita tersebut. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan KIE, Sosialisasi terkait gizi seimbang dan bahayanya balita dengan gizi buruk serta dengan memanfaatkan rumah pemulihan gizi secara maksimal bekerjasama dengan dokter spesialis anak melalui pemeriksaan dan konsultasi kesehatan serta dengan memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan keluarga miskin.

Grafik 2. 24. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Permasalahan status gizi salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 7,01 persen atau sebanyak 605 Balita Stunting pada tahun 2024 dan tersebar pada semua kecamatan dan kelurahan di Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik. Stunting akan

mempengaruhi secara nyata pada kualitas sumber daya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2. 6. Data Stunting Kota Salatiga 2020-2024

Tahun	BADUTA		BALITA	
2020	329/4.649	7,07%	1099/11.462	9,58%
2021	286/3.431	8,34%	856/9.480	9,03%
2022	204/3.746	5,44%	647/10.418	6,21%
2023	135/2927	4,61%	484/8.177	5,92%
2024	181/2698	6,71%	605/8627	7,01%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang.

Pada tahun 2024, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp.11.505.05 (dalam miliar) mengalami kenaikan sebesar Rp.586,32 (dalam miliar) atau 5,37% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp.10.918,73 (dalam miliar) .

Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 3.364,87 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 2,18 (dalam miliar).

Data PDRB ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha Kota Salatiga Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 7. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	419,10	430,02	445,45	453,68	477,82
B	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,27	2,94	2,99	2,18
C	Industri Pengolahan	2.831,44	2.955,35	3.092,87	3.242,60	3.364,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,96	23,08	24,56	25,26	26,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,77	7,87	8,15	8,46	8,70

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
F	Konstruksi	1.288,95	1.299,23	1.312,76	1.377,88	1.475,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.310,22	1.380,39	1.436,36	1.500,64	1.574,03
H	Transportasi dan Pergudangan	251,54	259,35	391,62	419,69	447,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	730,71	762,77	872,57	972,29	1.034,99
J	Informasi dan Komunikasi	514,41	546,88	558,13	594,27	648,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	333,74	337,29	339,17	346,27	353,48
L	Real Estate	508,42	519,27	544,72	579,00	600,50
M, N	Jasa Perusahaan	115,67	119,39	126,15	133,41	144,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	467,89	476,44	487,32	499,82	535,25
P	Jasa Pendidikan	436,68	436,81	443,50	468,26	498,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161,98	162,41	167,56	176,63	188,51
R, S, T, U	Jasa lainnya	99,88	100,49	111,47	117,54	124,20
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.503,71	9.822,00	10.365,44	10.918,73	11.505,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun tertentu dan saat ini yang digunakan yaitu tahun dasar 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

Pada tahun 2024, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 18.079.27 (dalam miliar) mengalami peningkatan sebesar Rp1.308,84 (dalam miliar) atau 7,80% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 16.770,34 (dalam miliar) Kontribusi tertinggi PDRB ADHB menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 5.992,10 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp.3,82 (dalam miliar).

Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 8. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	602,19	631,75	683,29	727,26	791,94
B	Pertambangan dan Penggalian	5,44	5,34	4,95	5,16	3,82
C	Industri Pengolahan	4.272,67	4.586,93	5.042,85	5.551,83	5.992,10

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,71	25,76	27,66	28,74	30,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	90,60	9,31	9,85	10,32	11,15
F	Konstruksi	1.850,35	1.929,82	2.086,17	2.282,64	2.456,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.704,86	1.823,95	1.973,25	2.136,25	2.285,99
H	Transportasi dan Pergudangan	304,90	324,56	517,84	600,04	649,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	944,91	1.002,97	1.196,13	1.317,09	1.431,13
J	Informasi dan Komunikasi	510,45	542,72	555,04	593,00	649,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,77	498,68	543,54	567,51	693,65
L	Real Estate	612,78	631,73	675,21	725,01	755,84
M,N	Jasa Perusahaan	167,00	174,33	192,12	210,37	232,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	690,22	705,65	741,13	806,63	853,08
P	Jasa Pendidikan	733,79	741,66	757,28	806,63	871,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	239,51	242,33	252,67	272,01	295,90
R, S, T, U	Jasa lainnya	127,24	129,09	148,68	161,50	174,86
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.271,84	14.008,91	15.407,64	16.773,09	19.079,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 6 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan net ekspor barang dan jasa.

Tabel 2. 9. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2040 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.539,32	8.824,97	9.692,95	10.533,34	11.412,78

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	136,71	143,12	161,69	180,22	202.48
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.251,53	1.307,85	1.321,27	1.391,99	1.484,97
Pembentukan Modal tetap Bruto	6.284,91	6.384,00	6.761,85	7.143,45	7.672,15
Perubahan Inventori	126,24	111,89	146,33	168,40	125.97
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(3.066,87)	(2.762,91)	(2.676,44)	(2.647,15)	-2.819,08
Produk Domestik Regional Bruto	13.271,84	14.008,91	15.407,64	16.773,34	18.079,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

Selain dinilai dengan Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024, dan terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan di beberapa komponen. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2024 terjadi kenaikan di beberapa komponen dengan nilai akhir PDRB 11,505,05 milyar rupiah.

Tabel 2. 10. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.040,15	6.152,12	6.493,80	6.814,96	7.188,09
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	85,89	87,15	91,43	98,08	108,25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	776,65	795,55	796,20	812,57	838,42
Pembentukan Modal tetap Bruto	4.150,35	4.182,73	4.263,74	4.408,81	4.610,58
Perubahan Inventori	122,13	90,51	118,27	124,83	88,49
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(1.671,46)	(1.486,07)	(1.398,12)	(1.340,56)	(1.328,77)
Produk Domestik Regional Bruto	9.503,71	9.822,00	10.365,31	10.918,69	11.505,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2024 yang dipengaruhi oleh berbagai jenis pengeluaran yang mengalami pertumbuhan PDRB pada Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan angka 10,37%. Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai

konsumsi antara ditambah biaya primer (kompensasi pegawai, penyusutan, dan pajak atas produksi lainnya). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). LNPRT dibedakan atas 6 jenis lembaga, yaitu:

- Organisasi kemasyarakatan
- Organisasi sosial
- Organisasi profesi dan serikat buruh
- Organisasi kebudayaan, olahraga, dan rekreasi
- Partai Politik
- Lembaga keagamaan

Tabel 2. 11. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (persen)

Jenis Pengeluaran PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	(1,14)	1,85	5,55	4,95	5,48
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	(1,99)	1,47	4,90	7,28	10,37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(1,54)	2,43	0,08	2,11	3,23
Pembentukan Modal Tetap Bruto	(6,92)	0,74	1,94	3,35	4,61
Perubahan Inventori	86,97	(25,89)			
Net Ekspor Barang dan Jasa	9,36	11,09		0	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	(1,68)	3,33	5,53	5,34	5,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

PDRB per kapita Kota Salatiga menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dan terjadi pertumbuhan positif dengan nilai 5.37%. Pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya yang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk, menunjukkan tingkat kemakmuran dari penduduk yang lebih tinggi pada setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2020 dampak pandemi menyebabkan pertumbuhan PDRB per kapita berada dibawah pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Miliar RP)					
-ADHB	13.271,84	14.008,91	15.407,64	16.773,09	18.079,27
-ADHK 2010	9.503,71	9.822,00	10.365,31	10.918,69	11.505,05
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	-1,68	3,35	5,53	5,34	5,37
PDRB perkapita (Juta Rp)					
-ADHB	69,14	72,39	78,26	76,51	
-ADHK 2010	49,51	50,75	53,14	54,89	

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	(1,03)	2,71	4,70	3,29	
Jumlah Penduduk (Orang)	191.950	193.525	196,54	201,37	198,971
Pertumbuhan (%)	(0,66)	0,83	0,80	1,21	0,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

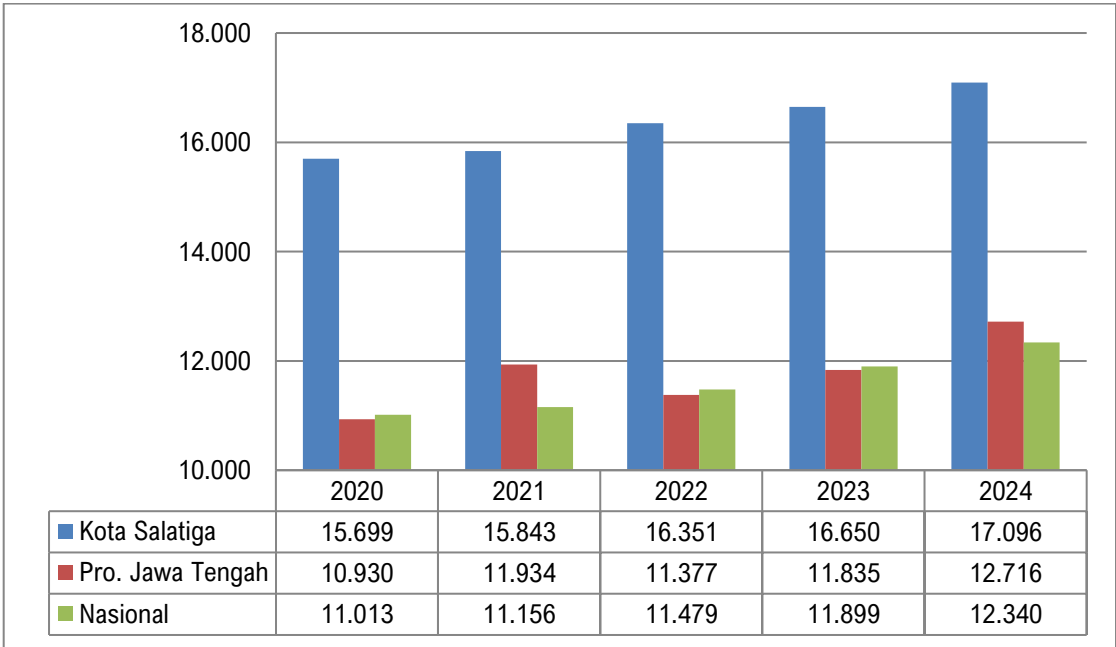
b. Pengeluaran Riil Per Kapita

Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

Pengeluaran per kapita Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar Rp.16.650.000,- sama dengan tahun 2023 ,-

Capaian pengeluaran per kapita Kota Salatiga tahun 2023 berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp11.835.000,-dan Nasional sebesar Rp.11.899.000,-, secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.

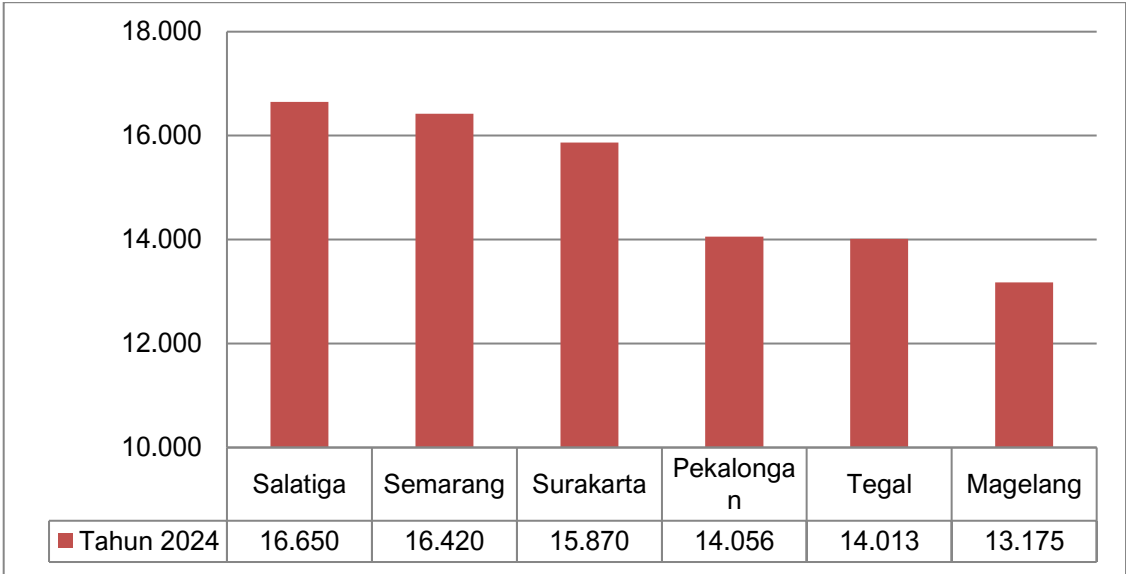
Grafik 2. 25. Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Perbandingan pengeluaran per kapita Kota Salatiga dengan kota-kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat pertama sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 26. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Ribu Rupiah)

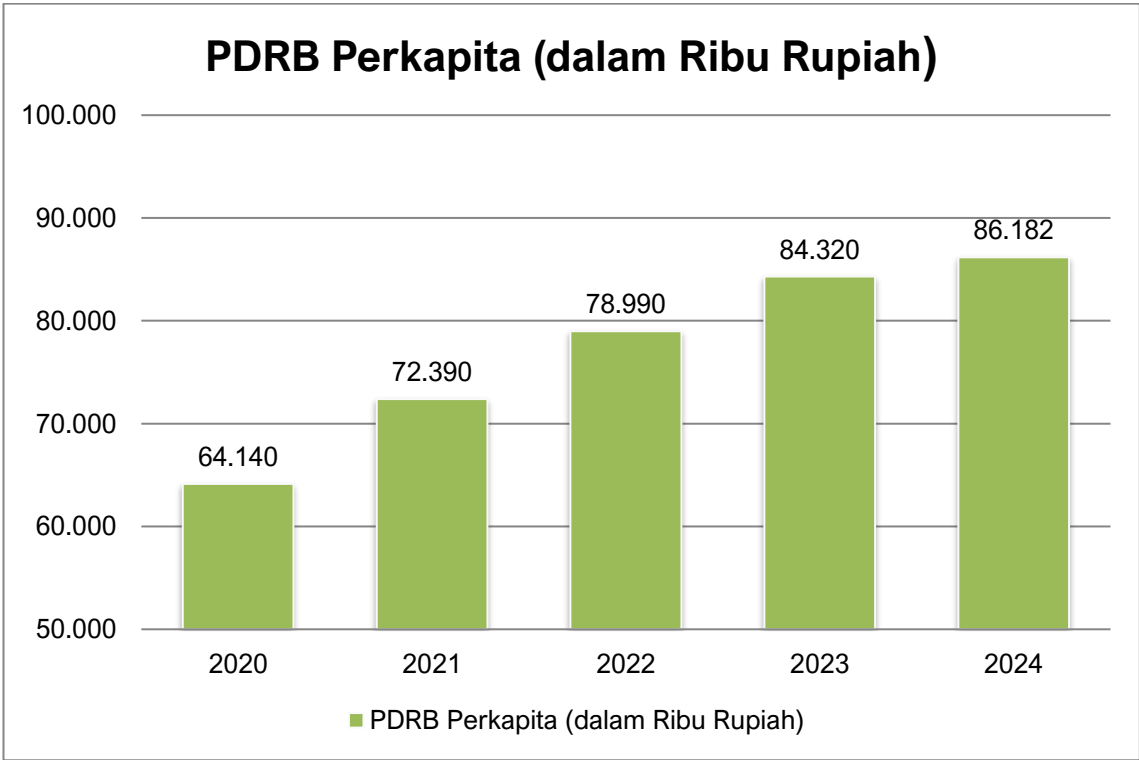


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

c. Pengeluaran Riil Per Kapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah. Nominal PDRB bila dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah akan menghasilkan PDRB per kapita. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai pendekatan untuk menghitung pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita di Kota Salatiga setiap tahunnya cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2020 di angka Rp. 64.140.000,00 dan pada 2023 sebesar Rp. 84.320.000,00. Selanjutnya pada tahun 2024 di angka 86.182.000,00 Data PDRB perkapita di Kota Salatiga disajikan pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 27. Grafik PDRB Perkapita Tahun 2020-2024 (Tw III)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

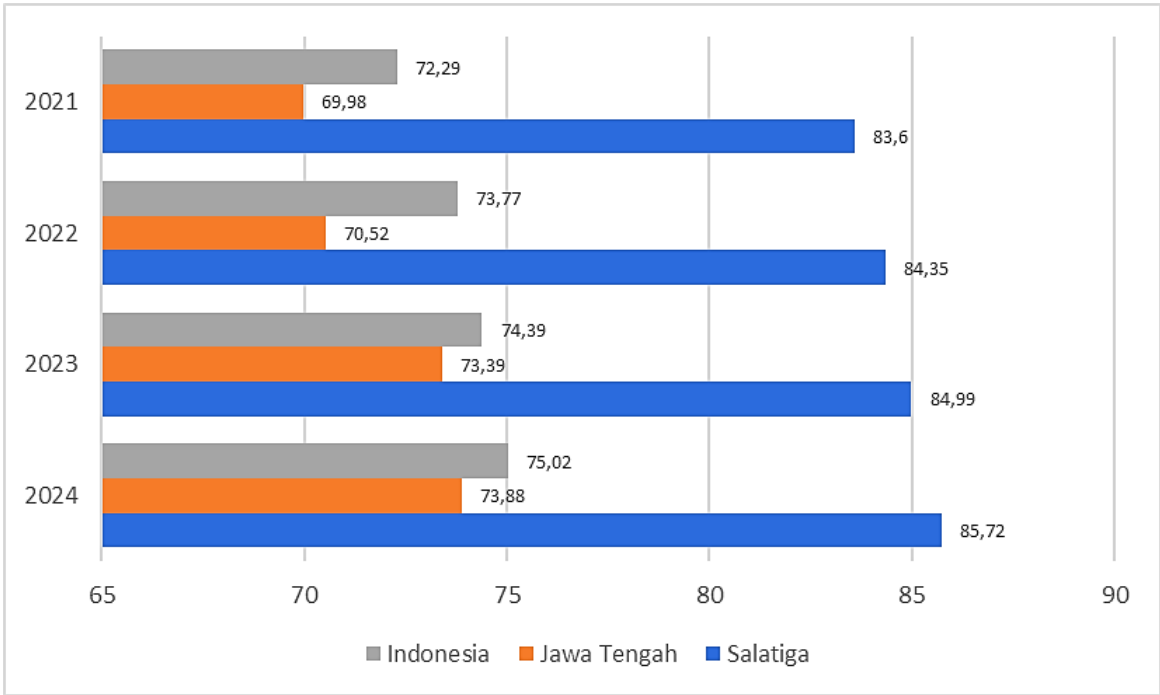
2.3.2. Daya Saing SDM

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Capaian IPM Kota Salatiga selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Pada Tahun 2024 IPM Kota Salatiga mencapai 85,72 angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 84,99 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,73. Hal ini tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam kategori pencapaian Kota Salatiga dengan status capaian Pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka IPM Kota Salatiga selama enam tahun terakhir selalu berada diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 28. Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar tersebut diukur dengan empat komponen IPM yaitu Umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Capaian komponen IPM selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Data capaian masing-masing komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel di bawah ini.

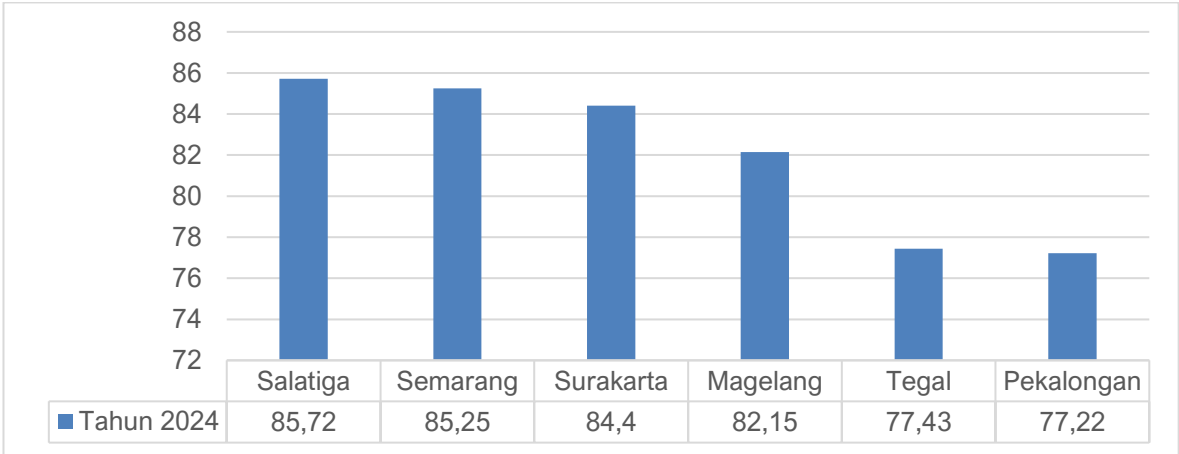
Tabel 2. 13. Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No.	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	77,40	77,55	77,72	77,93	78,26
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,41	15,42	15,43	15,44	15,46
3.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,42	10,66	10,95	11,24	11,48
4.	Pengeluaran Riil Perkapita (ribu Rp)	15.699	15.843	16.351	16.650	17.096
IPM Kota Salatiga		83,14	83,14	83,60	84,99	85,72
Jawa Tengah		69,98	69,98	70,52	73,39	72,88
Nasional		71,94	71,94	72,29	74,39	75,02

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

Pada tahun 2024 tidak terjadi perubahan peringkat di antara 6 (enam) kota dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Salatiga masih menempati peringkat pertama, diikuti Kota Semarang diperingkat kedua, Kota Surakarta di peringkat ketiga. Kecepatan pertumbuhan IPM dari keenam kota juga hampir sama berkisaran 0,6 persen. Perbandingan posisi capaian IPM Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 29. Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

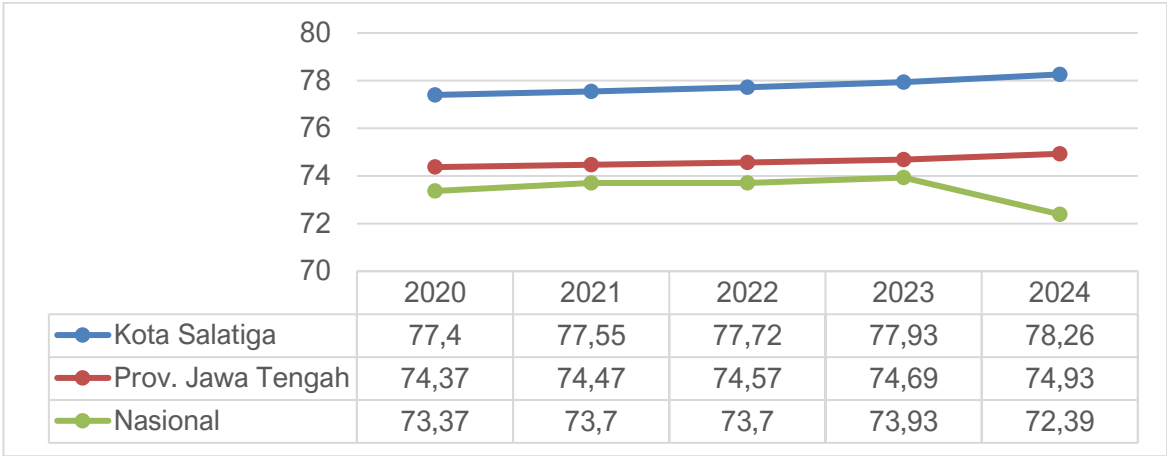
1) Usia Harapan Hidup saat Lahir

Usia harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data ini berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Usia harapan hidup saat lahir menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat.

Usia harapan hidup saat lahir tahun 2024 Kota Salatiga sebesar 78,26 tahun berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,69 dan capaian Nasional sebesar 73,39. Hal ini

berarti dari tahun 2020 sampai tahun 2024, rata-rata penduduk Kota Salatiga dapat bertahan hidup pada usia 78 tahun. Tren perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga selama kurun waktu 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

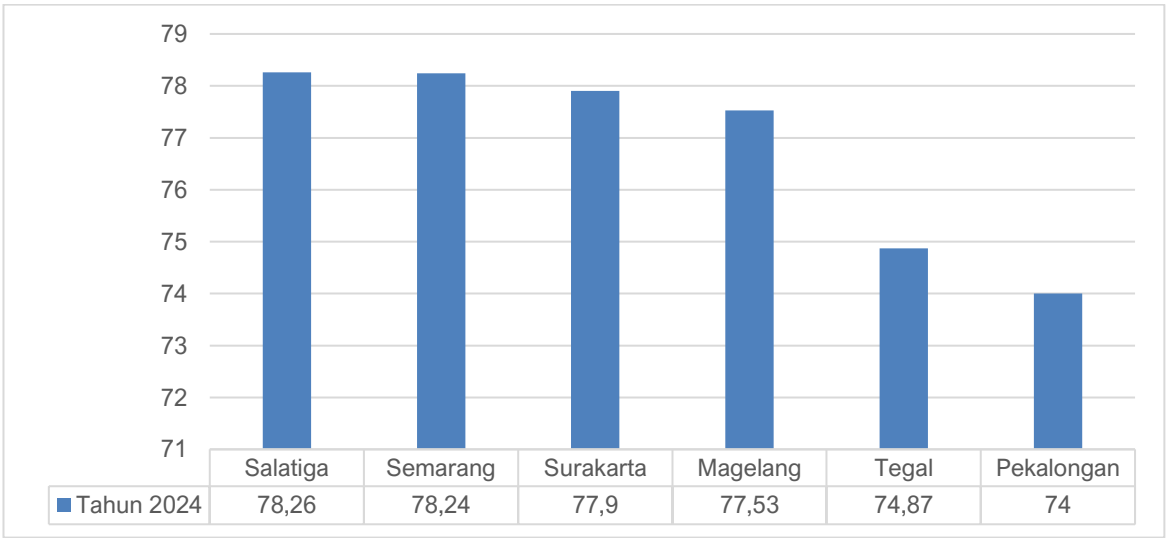
Grafik 2. 30. Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga dengan kota-kota di Jawa Tengah berada pada peringkat pertama di ikuti oleh Kota Semarang sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2. 31. Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2024

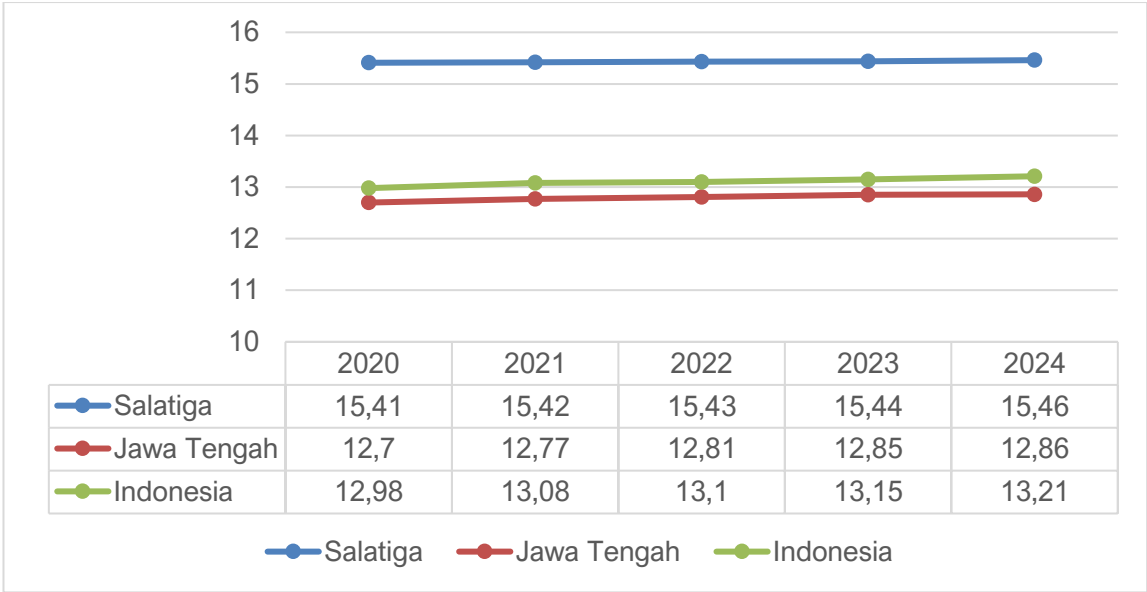


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2. 32. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024

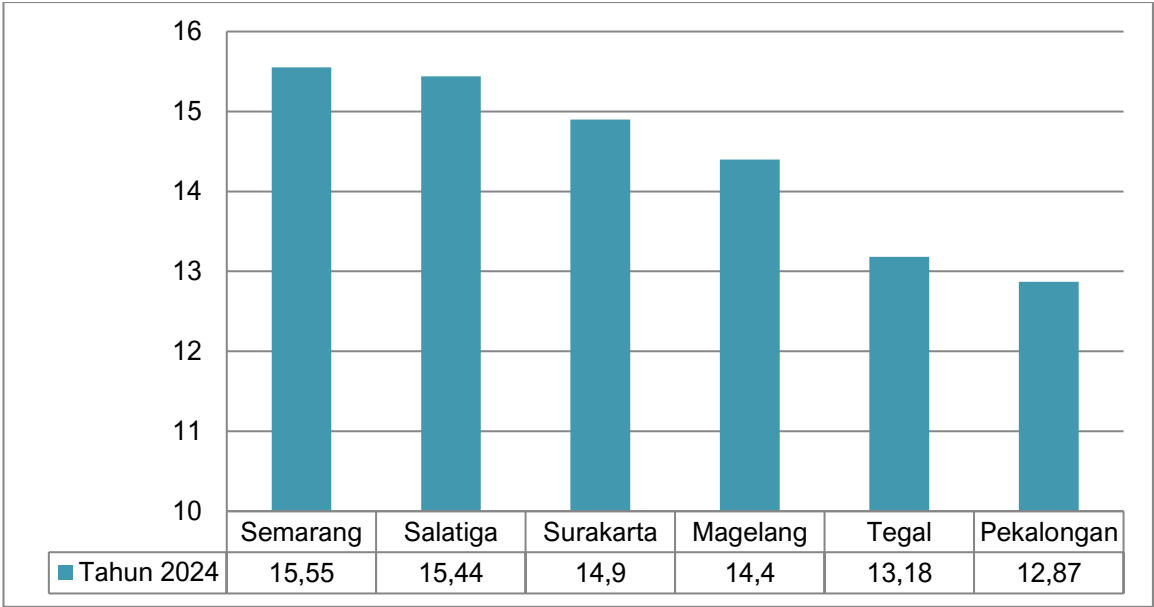


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Salatiga pada tahun 2024 yaitu 15,46 tahun mengalami kenaikan 0,02 tahun dari tahun 2023 sebesar 15,44 tahun. Angka capaian Kota Salatiga berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,86 tahun dan Nasional sebesar 13,21 tahun.

Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berada di posisi kedua tertinggi 15,44 setelah Kota Semarang sebesar 15,55 tahun, secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 33. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



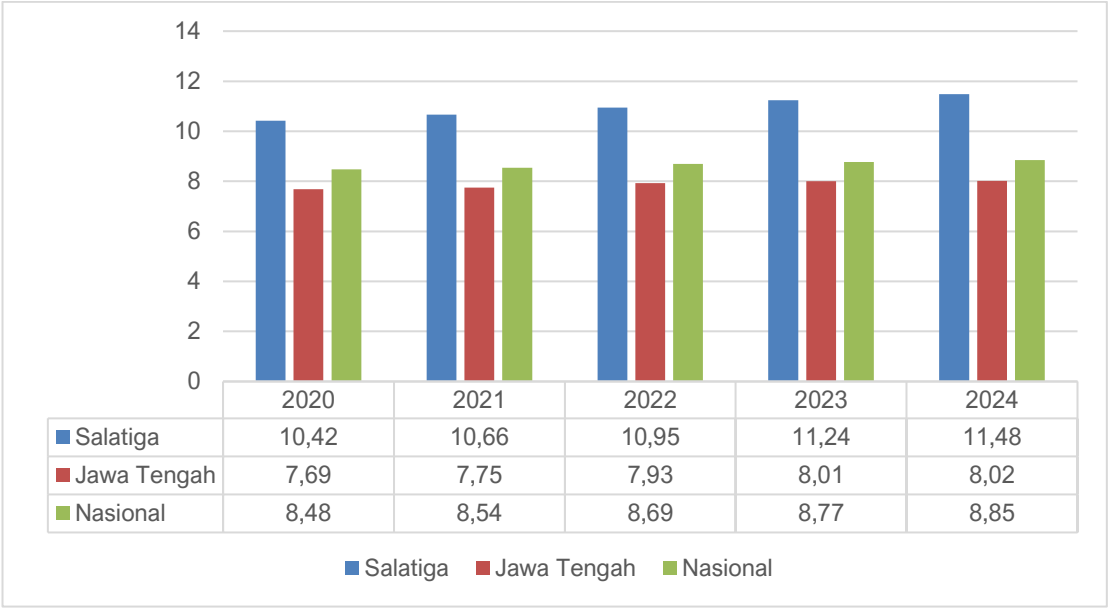
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah atau disingkat RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Perkembangan RLS Kota Salatiga Tahun 2024 sebesar 11,48 tahun, mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 11,24 tahun. Peningkatan RLS juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan secara Nasional, namun angka capaian Kota Salatiga berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah Sebesar 8,02 tahun dan Nasional sebesar 8,85 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

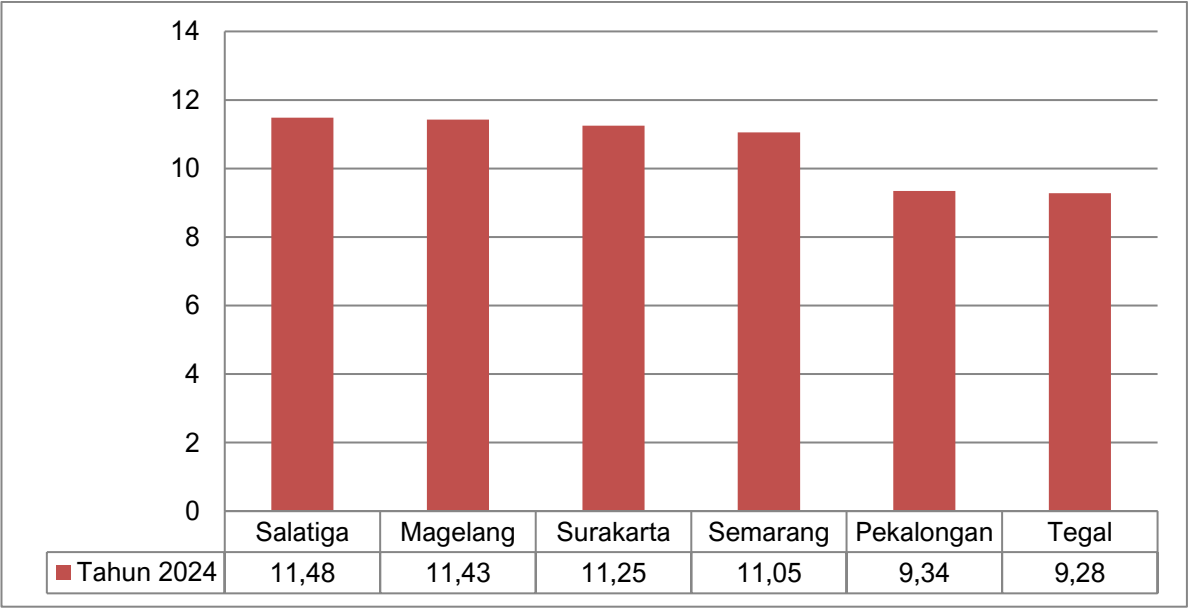
Grafik 2. 34. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Perbandingan RLS Kota Salatiga dengan kota lainnya di Jawa Tengah tahun 2024 masih sama seperti tahun 2023 yaitu berada pada peringkat pertama diikuti Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan terakhir Kota Tegal, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 35. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga dengan Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

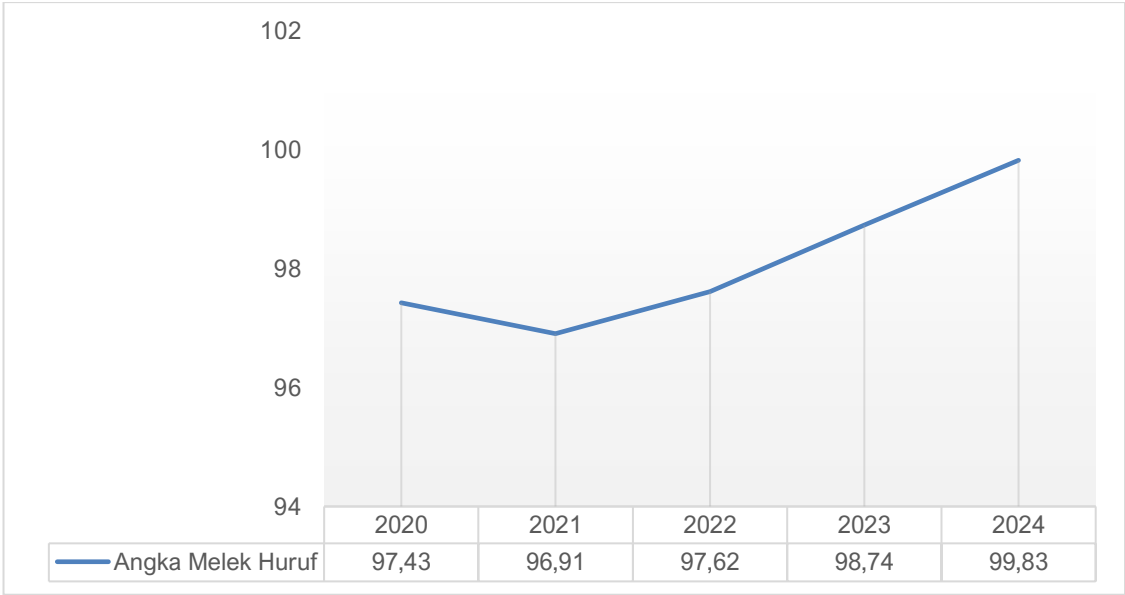
b. Indeks Literasi Masyarakat

Indeks Literasi Masyarakat dapat diukur dari kemampuan antara lain: membaca, menulis, memahami bacaan, eksplorasi pengetahuan, transformasi menjadi pengetahuan dan transformasi menjadi produk/jasa. Realisasi kinerja ILM pada tahun 2024 adalah 63,14.

c. Angka Melek huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Angka melek huruf yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar dan program keaksaraan yang ada efektif.

Grafik 2. 36. Angka Melek Huruf (usia 15-59) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Tahun 2024

Perkembangan AMH Kota Salatiga tahun 2020 – 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, walaupun sempat menurun pada tahun 2021. Nilainya terus meningkat setiap tahun berkisar 0,02-1. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir 99 dari 100 orang dewasa di Kota Salatiga mampu untuk membaca dan menulis.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

a. Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik

Indikator Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata dengan baik merupakan indikator kinerja positif yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Target kawasan wajah kota yang menjadi target sasaran antara lain

- 1) Jl. Diponegoro-Fatmawati, (100%)

2) Jl. Jenderal Sudirman

3) Jl. W. Mongonsidi, (100%)

4) Jl. Soekarno Hatta, (100%)

5) Tamansari,

6) Lap Pancasila dan sekitarnya, (100%)

7) Jl. Sukowati-Jl,Tentara Pelajar (100%, ruas Sukowati)

8) Jl. Brigjen Sudiarto, (100%)

9) Jl. Hasanudin, (100%)

10) Jl. A. Yani, (50%)

11) Jl. Pattimura, (100%)

12) Tingkir – Barukan,

13) Jl. Kartini, (100%)

14) Jl. Osamaliki, (100%)

15) Jl. Veteran,

16) Jl. Pemuda,

17) Jl. Muh Yamin,

Dari 17 target diatas yang terealisasi pada tahun 2024 sebanyak 10 ruas dan 0.5 ruas jalan (yaitu jalan A.Yani) sehingga realisasi presentase kawasan wajah kota yang tertat dengan baik pada tahun 2024 adalah 61,8%.

b. Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik

Indikator kinerja Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik dapat di hitung dengan rata rata dari (jalan, drainase kondisi baik dan rasio luas irigasi yang terlayani jaringan irigasi) secara lebih detail akan di bahas di bawah ini.

Tabel 2. 14. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1)	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	91	74	91,97	91,97	124.28	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Tahun 2024 persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 91,97 % dari total jalan berdasarkan SK Jalan tahun 2017 sepanjang 337,471 km yang berada dalam kondisi mantap sepanjang 226,311 km dan 84,071 Km dengan kondisi sedang.

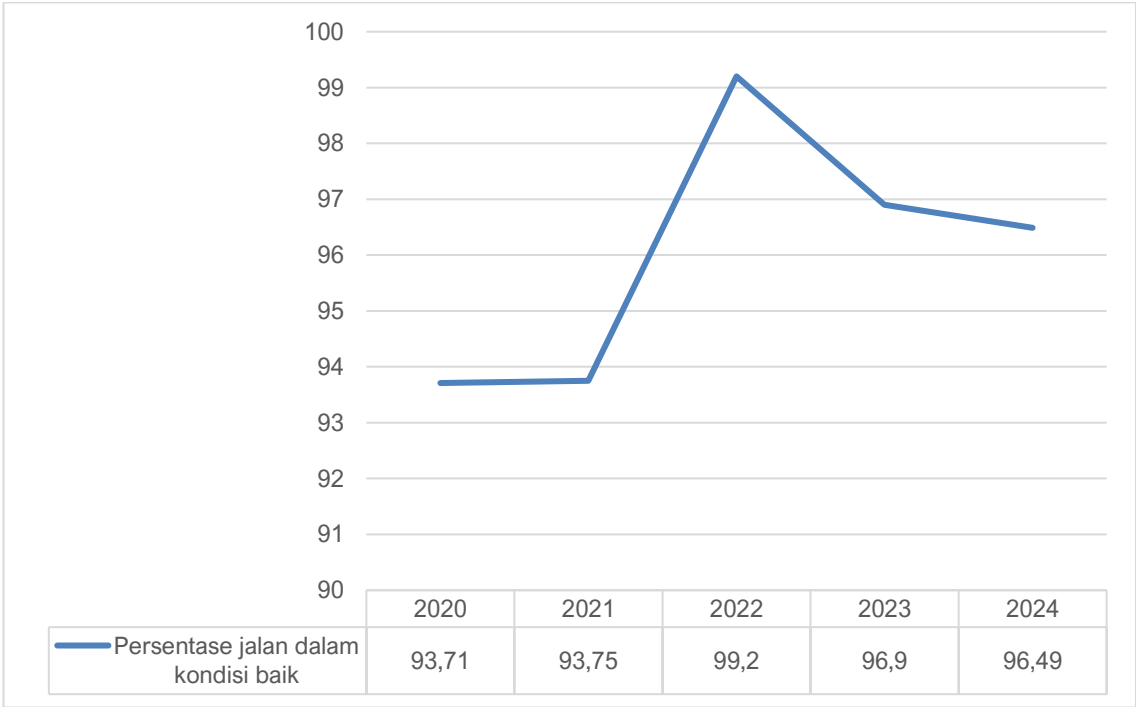
Grafik 2. 37. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Jaringan drainase dalam kondisi baik di Kota Salatiga mengalami perkembangan dengan tren meningkat dalam kurun waktu 2020-2024 walaupun pada tahun 2024 jaringan drainase dalam kondisi baik mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2023. Sampai dengan tahun 2024 panjang saluran drainase terbangun adalah 374,15 m. Pada tahun 2024 ini panjang drainase kondisi baik adalah 96.49% atau sepanjang 363,3 KM. Kondisi lainya adalah 9,5 KM kondisi rusak ringan, 3,65 KM kondisi rusak berat.

Grafik 2. 38. Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



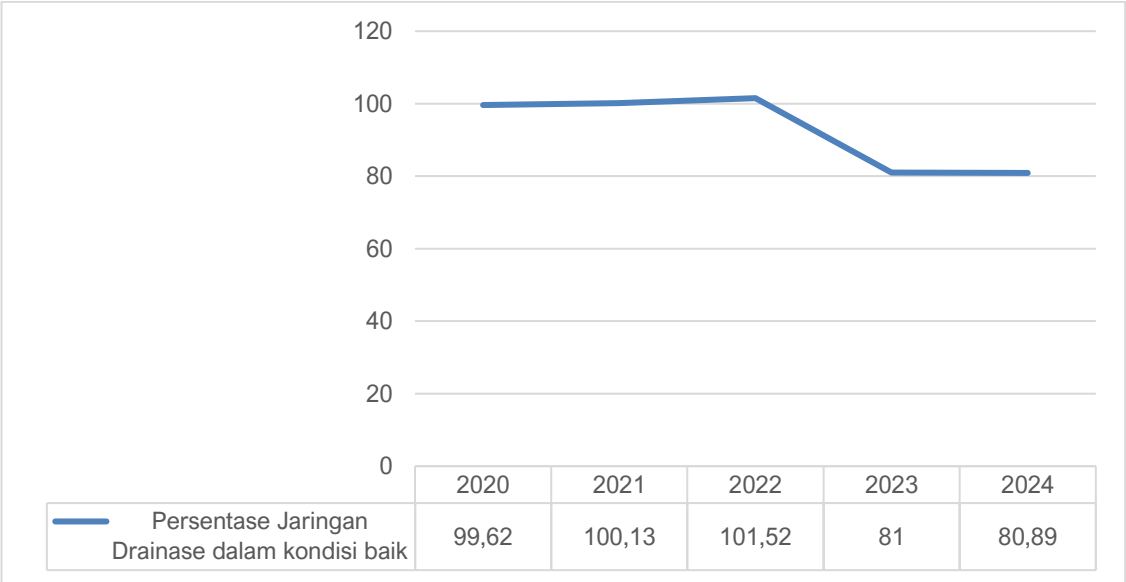
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Sampai dengan tahun 2024 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 19.801,06 m dan kondisi sedang adalah 4.677,94 m, sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 24.479 m. Dari data tersebut maka capaian Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2024 adalah 80,89%. Dibandingkan capaian tahun 2023 yang terealisasi sebesar 81%, capaian tahun 2024 adalah mengalami penurunan sebesar 0,61%.

Untuk mengukur kinerja sistem irigasi secara komprehensif untuk mendukung ketahanan pangan menggunakan Indeks Kinerja Sistem Irigasi. Indeks Kinerja Sistem Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk Kota Salatiga pada tahun 2024 adalah 64,84%. Indeks ini tidak hanya mengukur sarana prasarana fisik jaringan, tetapi juga termasuk produktivitas tanam, sarana penunjang jaringan utama dan kelembagaannya berdasarkan pada Peraturan Menteri PUPR No.12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi di Kota Salatiga sebesar 12 DI.

Dari 12 daerah irigasi di Kota Salatiga yang ada semuanya terlayani meskipun dengan kondisi jaringan irigasi yang tidak semuanya baik.

Grafik 2. 39. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH merupakan penggabungan analisis dari 3 indikator yang meliputi Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Lahan. Sedangkan Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan merupakan bagian yang mendukung capaian indikator Indeks Pencemaran Udara.

Berikut rumus perhitungan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021:

IKLH

=

$(0,376 \times \text{Realisasi Indeks Pencemaran Air}) + (0,405 \times \text{Realisasi Indeks Pencemaran Udara}) + (0,219 \times \text{Realisasi Indeks Tutupan Lahan})$

Berdasarkan rumus di atas maka realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Realisasi IKLH

=

$(0,376 \times 48,67 + (0,405 \times 87,80) + (0,219 \times 34,67)$

= 61,45%

Indikator kinerja indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

d. Rasio Konektivitas Kota

Indikator Rasio Konektivitas Kota merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Rasio Konektivitas Kota Tahun 2024 sebesar 0,71 dan terealisasi sebesar 0,88 sehingga capaian kinerja indikator Rasio Konektivitas Kota adalah 123,94% dengan kategori sangat tinggi. Perhitungan di dapatkan dari 15 jumlah trayek di bagi dengan 17 kebutuhan trayek di Kota Salatiga. Realisasi kinerja Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional adalah tidak ada sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi

kinerja dengan standar nasional, namu pada penentuan target dibatasi bahwa tingkat capaian maksimal adalah 1, dengan realisasi sebesar 0,88 atas target 0,71 , capaian ini terkategori baik dikarenakan jumlah trayek yang dilayani jauh dari jumlah trayek yang dibutuhkan.

e. Kinerja Lalu Lintas Kota

Indikator Kinerja Lalu Lintas Kota merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin kecil realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Kinerja Lalu Lintas Kota Tahun 2024 sebesar 0,4% dan terealisasi sebesar 0,31% sehingga capaian kinerja indikator Kinerja Lalu Lintas Kota adalah 122,50 % dengan kategori tinggi. Perhitungan indikator diperoleh dari rata rata VCR (Volume, Capacity, Ratio) 40 jalan yang telah disurvey di Kota Salatiga.

Standar nasional untuk kinerja lalu lintas tidak ada sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, Namun oada penentuan target dibatasi bahwa tingkat capaian maksimal adlah 1, dengan realiasi sebesar 0,31 atas target sebesar 0,4 capaian ini terkategori sangat baik dikarenakan berada pada nilai yang lebih kecil dari target.

f. Persentase Rumah yang di dukung oleh PSU

Indikator Kinerja Utama Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut dihitung dengan rumus:

Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	=	$\frac{\text{Jumlah rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah Unit Rumah di Kota Salatiga}} \times 100\%$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan tahun 2024 sebagai berikut:

Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	=	$\frac{5.638}{8.582} \times 100\%$	= 65,69%

g. Pemukiman yang Tertata

Indikator Kinerja Permukiman yang Tertata merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Kinerja Permukiman yang Tertata Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut dihitung dengan rumus:

Permukiman yang Tertata	=	$\frac{\text{Luasan Permukiman yang sudah di tata}}{\text{Luas Permukiman se Kota Salatiga}} \times 100\%$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Permukiman yang Tertata tahun 2024 sebagai berikut:

$\frac{\text{Permukiman yang Tertata}}{\text{Permukiman}} = \frac{167,05}{2.636,45} \times 100\% = 6,34\%$

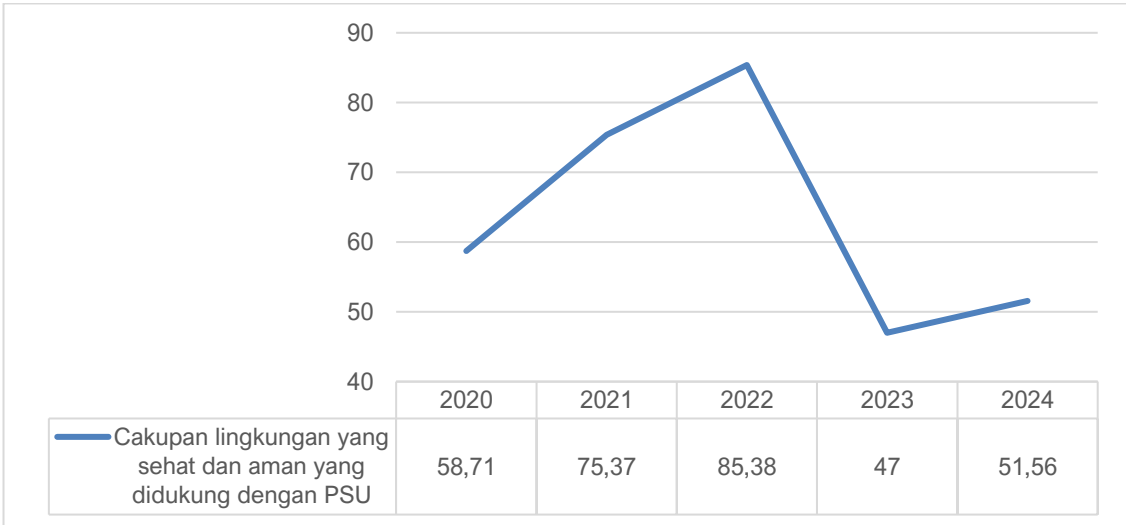
h. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dapat dihitung dengan jumlah PSU Perumahan yang sudah diserahterimakan di bagi jumlah perumahan di Kota Salatiga, indikator ini merupakan indikator positif yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya.

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2024 ditargetkan 46% mencapai realisasi 51,56%. Persentase ini dicapai dari jumlah perumahan yang sudah dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 33 perumahan dibagi jumlah perumahan yang sudah diserahkan sebanyak 64 perumahan dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 47%, realisasi kinerja mengalami peningkatan karena berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- 4) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- 5) Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas PSU serta memelihara PSU dalam keadaan baik, sehingga jumlah perumahan yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Salatiga mengalami peningkatan.

Grafik 2. 40. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi adalah istilah yang dijadikan mantra untuk segala yang berbau ekonomi. Lewat investasi, pemerintah berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi. Caranya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk menghitung pertumbuhan nilai investasi digunakan rumus sebagai berikut:

**Pertumbuhan
Nilai Investasi**

=

$$\frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } (n-1)}{\text{Realisasi Investasi tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi pertumbuhan nilai investasi tahun 2024 sebagai berikut:

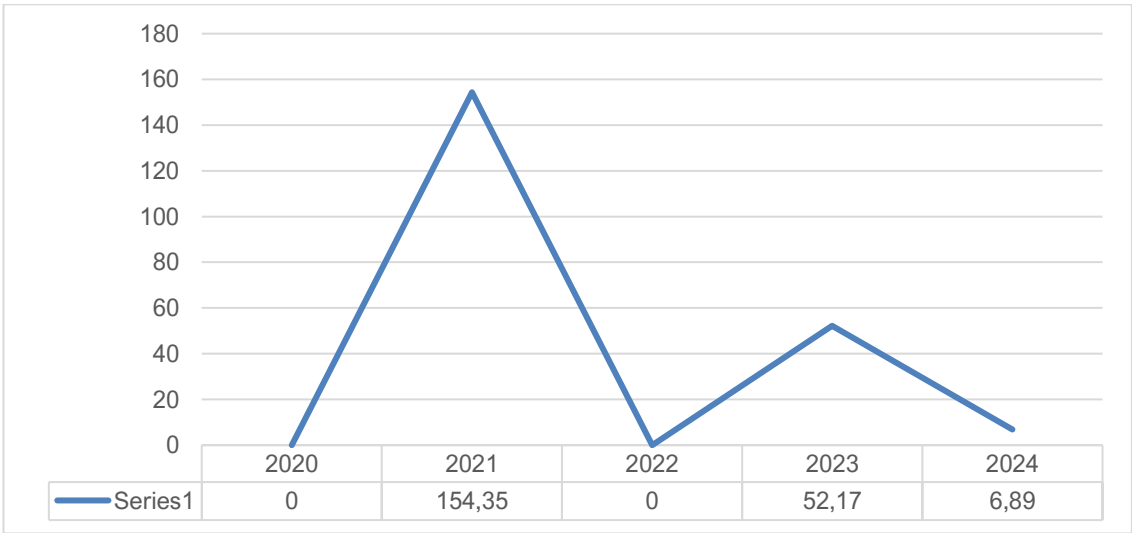
6,89

=

$$\frac{634,853,695,77 - 593.922.654.515}{593,922.654.515} \times 100\%$$

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Grafik 2. 41. Realisasi Pertumbuhan Investasi di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



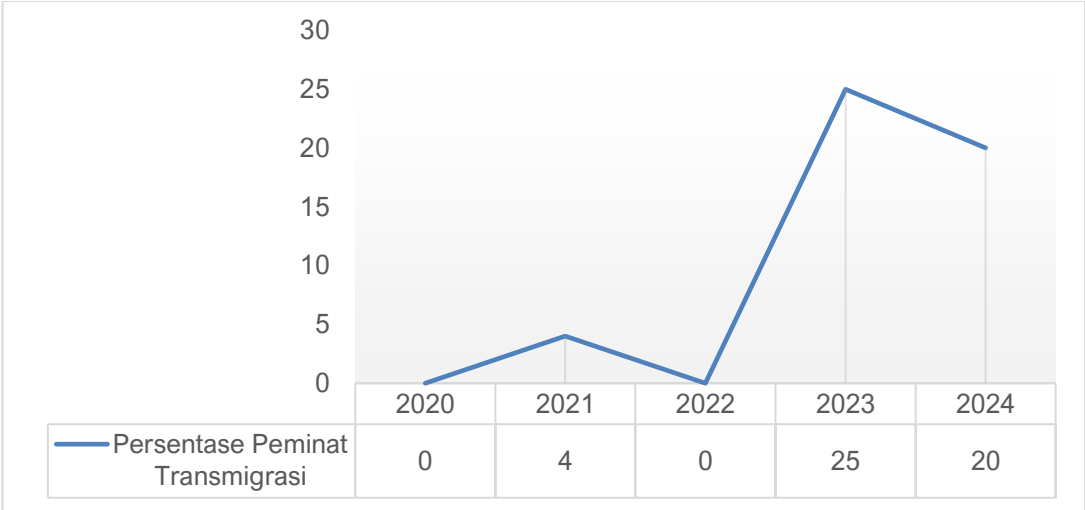
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2024

Dengan demikian realisasi kinerja indikator pertumbuhan nilai investasi terus fluktuasi naik turun realisasinya dalam beberapa tahun terakhir.

b. Persentase Peminat Transmigrasi

Persentase Peminat Transmigrasi adalah dihitung dengan cara membagi jumlah calon transmigran yang berminat dibagi dengan peserta penyuluhan calon transmigran di kalikan 100%. Indikator kinerja Persentase Peminat Transmigrasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Grafik 2. 42. Persentase Peminat Transmigrasi di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2024

c. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya.

Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana Tahun 2024 sebesar 3,86 dan terealisasi sebesar 3,9 sehingga capaian kinerja indikator Penanggulangan Potensi Konflik adalah 101,04% dengan kategori sangat tinggi.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar dan fokus layanan urusan pemerintah pilihan.

Integrasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs, pengarusutamaan gender serta mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai urusannya.

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur terhadap penyelenggara pelayanan

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk mendapatkan IKM, dilakukan kegiatan pengukuran secara komprehensif yang disebut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Indeks Kepuasan masyarakat dengan target sebesar 84.75% dan realisasi 86,32% dan realisasi target sebesar 101,85% dan target RPD tahun 2026 sebesar 85.00% maka status tercapai.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penerapan SPBE sebagai key driver transformasi digital bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan masyarakat pengguna SPBE sehingga ketika masyarakat mengingat SPBE yang terlintas adalah pemerintah yang akuntabel dan layanan yang berkualitas. Presiden telah menetapkan Arsitektur SPBE Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi implementasi integrasi penerapan SPBE yang bermuara pada cita-cita utama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2024 target Indeks SPBE sebesar 2,50% terealisasi 3,64% dengan predikat sangat baik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Ssstem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan capaian kinerjanya sebesar 145,6% dengan target RPD sebesar 2.7% serta status tercapai.

c. Indeks Reformasi Birokrasi

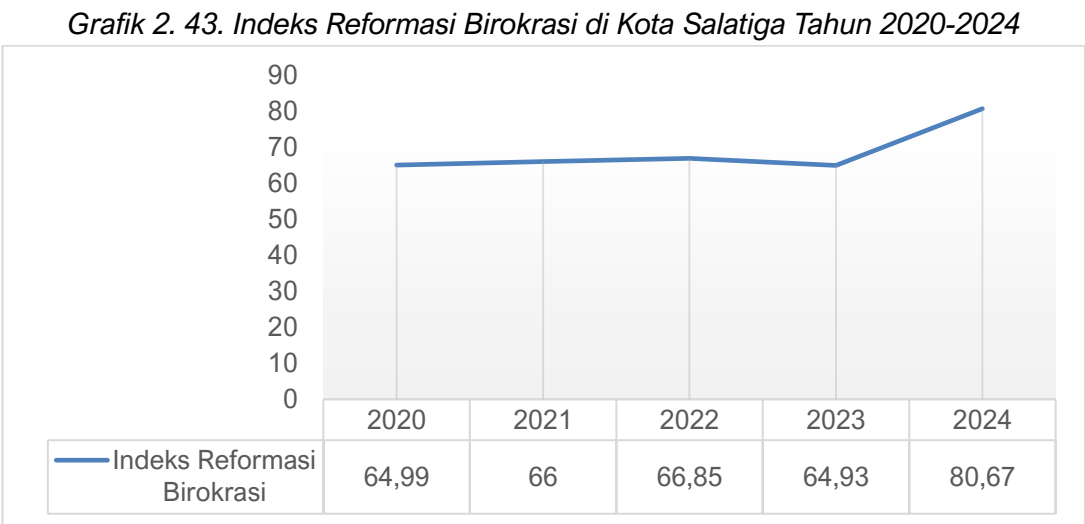
Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan oleh instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan serta menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan Surat dari Kementerian PAN dan RB Nomor 8/260//RB.06/2025 tanggal 25 April tahun 2025 dengan nilai 80,67 kategori Sangat Baik (A-) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 15. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	73,63
B	RB Tematik	20	7,04
C	Indeks RB	120	80,67

Sumber Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga, LHE RB 2024

Di bawah ini merupakan realisasi kinerja nilai indeks reformasi birokrasi yang cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir dengan capaian tertinggi ada pada tahun 2024.



Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2024

2.4.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu Pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan dengan pembangunan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan. Strategi yang dilakukan bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan pendidikan di Kota Salatiga menunjukkan kondisi yang sangat baik ditunjukan dengan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah 11,48 tahun dan harapan lama sekolah 15,46 tahun, serta Prosentase Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (usia 15-59) sebesar 99,62%.. Perkembangan capaian pembangunan pendidikan di Kota Salatiga dalam kurun tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 16. Perkembangan Capaian Pembangunan Pendidikan di Kota Salatiga tahun 2020-2024

Capaian Pembangunan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,42	10,66	10,95	11,24	11,48
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,41	15,42	15,43	15,44	15,46
Prosentase Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (usia 15-59)	%	97,43	96,91	97,62	98,74	99,62

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai dan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan ditunjukan dengan ruang kelas dalam kondisi baik. Tahun 2024 persentase ruang kelas dalam kondisi baik untuk jenjang PAUD

sebesar 87,43%, untuk jenjang SD 88,44% dan jenjang SMP 97,78%. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 17. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Prosentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	%	82,22	87,33	92,45	92,45	87.43
SD	%	89,5	87,28	91,98	91,98	88,44
SMP	%	88,91	97,70	97,10	97,10	87,78

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru di sekolah yang bersangkutan. Rasio ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin rendah nilai rasio ini berarti semakin bertambah tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran semakin tinggi. Rasio murid-guru di Kota Salatiga tahun 2024 yaitu 13,16. Perkembangan rasio murid-guru di Kota Salatiga Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 18. Perkembangan Rasio Murid-Guru di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Tahun	SEKOLAH	MURID	GURU	RATA-RATA PER SEKOLAH		RASIO MURID GURU
				MURID	GURU	
2020	89	16473	1023	185,09	11,49	16,1
2021	81	15900	1074	196,3	13,26	14,08
2022	80	15621	1056	195,26	13,2	14,79
2023	80	15069	1096	188,36	13,70	13,74
2024	80	14953	1136	186,91	14,2	13,16

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Prosentase Guru Layak Mengajar pada tahun 2024 di Kota Salatiga untuk jenjang PAUD sebanyak 87,80%, jenjang SD 97,15% dan jenjang SMP 99,10%.

Tabel 2. 19. Perkembangan Prosentase Guru Layak Mengajar di Kota Salatiga Tahun 2020--2024

Prosentase Guru Layak Mengajar	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	%	80,43	84,95	86,91	88,15	87,80
SD	%	94,52	97,30	97,39	97,95	97,15
SMP	%	94,47	96,43	97,63	98,19	99,10

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Pemerataan pendidikan di Kota Salatiga dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini cenderung meningkat dalam kurun waktu 2020-2024, hal ini ditunjukkan dengan Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA.

Pada Tahun 2024 Presntase guru bersertifikat pendidik , untuk Guru TK/RA sebesar 36,84%, Guru SD 49,31% dan SMP sebesar 58,65%

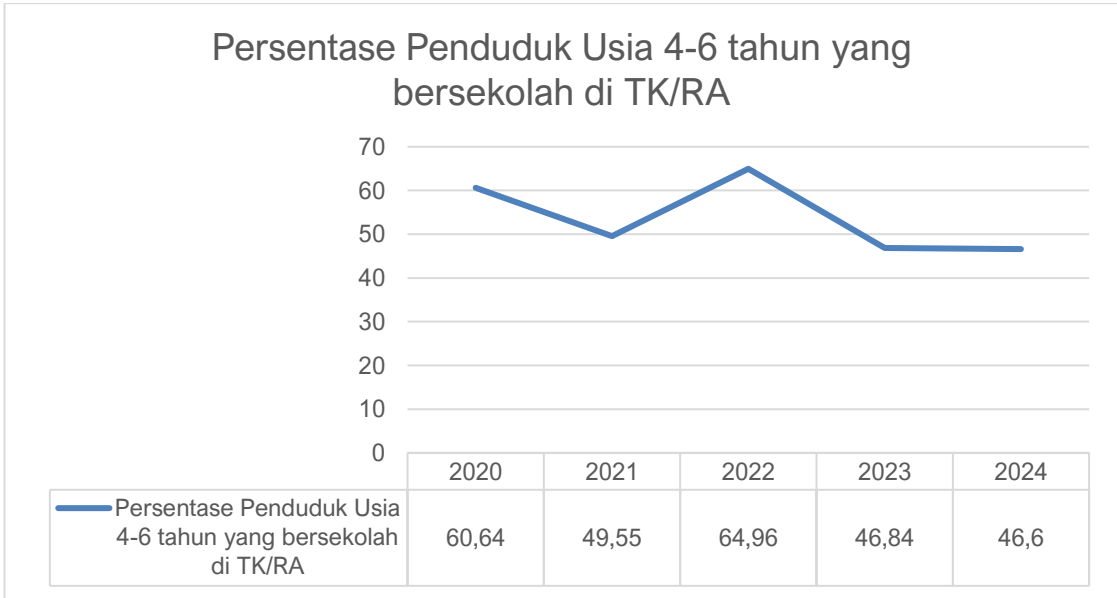
Tabel 2. 20. Persentase Guru bersertifikat pendidik di Kota Salatiga Tahun 2024

Persentase Guru bersertifikat pendidik	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
TK/RA	%	n/a	n/a	n/a	34,83	36,84
SD	%	n/a	n/a	n/a	48,25	49,31
SMP	%	n/a	n/a	n/a	57,23	58,65

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Pemerataan pendidikan di Kota Salatiga dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini cenderung meningkat dalam kurun waktu 2020-2024, hal ini ditunjukkan dengan Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA. Target sebesar 38,35% realisasi sebesar 46,60% dengan capaian 121,51%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 46,84% terdapat penurunan sebesar 0,24% ., terdapat 2 lembaga PAUD yang tidak beroperasi lagi yaitu TK Pelangi Nusantara, TK Tabita dan 1 kelompok belajar yang tidak melakukan proses pembelajaran yaitu KB Permata.

Grafik 2. 44. Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan seberapa tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Tahun 2024 APK di Kota

Salatiga untuk jenjang PAUD sebesar 46.60%, jenjang SD sebesar 114,51%, dan jenjang SMP 131,15%. Perkembangan APK di Kota salatiga dalam kurun waktu 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2. 21. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	%	42,64	38,33	40,10	46,84	46,60
SD	%	110,37	113,46	114,07	113,81	115,85
SMP	%	127,66	130,81	130,59	130,92	133,63

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjangnya. Persentase APS menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga mulai Tahun 2023 ada penambahan indikator yaitu APS Kesetaraan. Perkembangan APS di Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 22. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Usia 5-6 tahun (PAUD)	%	95,5	84,81	89,61	96,88	97,88
Usia 7-12 tahun (SD/MI)	%	116,45	99,22	99,23	99,30	99,34
Usia 13-15 tahun (SMP/MTs)	%	131,07	96,72	90,56	96,80	96,82
Pendidikan Kesetaraan	%	n/a	n/a	n/a	65,56	71,05

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Angka Partisipasi Sekolah PAUD pada Tahun 2024 yang ditargetkan 84.83% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 97.88%. Angka diperoleh dari perbandingan jumlah anak berusia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD sebanyak 5.646 , jumlah anak usia 5-6 tahun Kota Salatiga sebanyak 5.768 anak sehingga realisasi sebesar 97.88% dengan capaian 115,38%. Realisasi Tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 naik sebesar 1%.

Angka Partisipasi Sekolah PAUD mencapai lebih 100%, dikarenakan terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak seusia PAUD (Golden Age).

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI pada Tahun 2024 yang ditargetkan 99.24% terealisasi targetnya sebesar 99,34%. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah anak berumur 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar/ Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 17.570 sehingga realisasi sebesar 99.34%. Target 2024 sebesar 99.24%, realisasi 99.34% dengan capaian 100.10%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 99.30% terdapat kenaikan 0.04%

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI sebesar 99,24% dikarenakan adanya peran serta masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke Salatiga.

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada Tahun 2024 yang ditargetkan 96,74% terealisasi sebesar 96.82%. Angka diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah dibagi jumlah anak usia 13-15 Tahun Kota Salatiga sebanyak 9.452 orang dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun sebanyak 9.762 orang dikalikan 100%.

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS terealisasi sebesar 96,82% dikarenakan terbangunnya pemahaman masyarakat untuk melanjutkan sekolah anaknya ke SMP/MTS.

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2024 yang ditargetkan 61,97% terealisasi sebesar 63,92%

Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan Tahun 2024 paling rendah jika dibandingkan dengan APS PAUD, SD dan SMP hanya sebesar 63,92%. Selain itu peningkatan APS juga masih paling rendah diantara tiga APS yang lain, yaitu hanya meningkat sebesar 3,61% dibandingkan tahun 2023. Peran PKBM atau Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggaran pendidikan kesetaraan di Kota Salatiga perlu lebih dioptimalkan dan tingkatkan. Kota Salatiga saat ini mempunyai lembaga pendidikan kesetaraan sebanyak 12 lembaga dan sudah terakreditasi.

Tabel 2. 23. Jumlah Lembaga Pendidikan Kesetaraan di Kota Salatiga

No.	NPSN	Nama Lembaga	Status (Aktif)	Akreditasi	Jumlah Peserta Didik TA 2023/2024
1	P9934634	PKBM SUNAN GIRI	√	C	86
2	P9934490	PKBM TUNAS HARAPAN	√	A	519
3	P9952699	UPTD SPNF SKB SALATIGA	√	B	160
4	P2964419	PKBM AL GHUFRON	√	B	58
5	P9934611	PKBM DESTINY INSTITUTE	√	A	168
6	P9996669	PKBM JUNGLE SCHOOL	√	B	152
7	P9934621	PKBM KARISMA	√	B	75
8	P9934605	PKBM PERMATA	√	B	105
9	P9947912	PKBM AL ISHLAH	√	B	1.202
10	P9970294	PKBM MARGA YASA	√	B	92
11	P9970512	PKBM PIWULANG BECIK	√	C	330
12	P2964421	PKBM QARYAH THAYYIBAH	√	A	63

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Salah satu indikator keberhasilan urusan pendidikan juga dapat dilihat dari Capaian Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi. Pada tahun 2023, Capaian Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi Kota Salatiga secara keseluruhan mengalami kenaikan pada Jenjang SD dan SMP. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024.

Tabel 2. 24. Laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024

Jenis Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	No	Indikator	Capaian	Skor Rapor 2025	Definisi Capaian	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Skor Rapor 2024	Peringkat di Provinsi	Sumber Data
SMP Umum	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	94,84	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik 0,08	94,76	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Umum	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		84,87		Naik 1,03	83,84	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Kemenag	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	89,67	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik 1.47	88,2	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Kemenag	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		80,04		Naik 3,34	76,7	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	92,54	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Turun 1,25	93,79	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		74,42		Naik 0,11	74,31	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	81,62	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik 4,45	77,17	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		65,81		Naik 3,56	62,25	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Umum	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Baik	91,62	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi	Naik 0.69	90,93	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Umum	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		71,98		Naik 0.44	71,54	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Kemenag	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Baik	85,87	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas ompetensi minimum untuk numerasi	Naik 4,50	81,37	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024

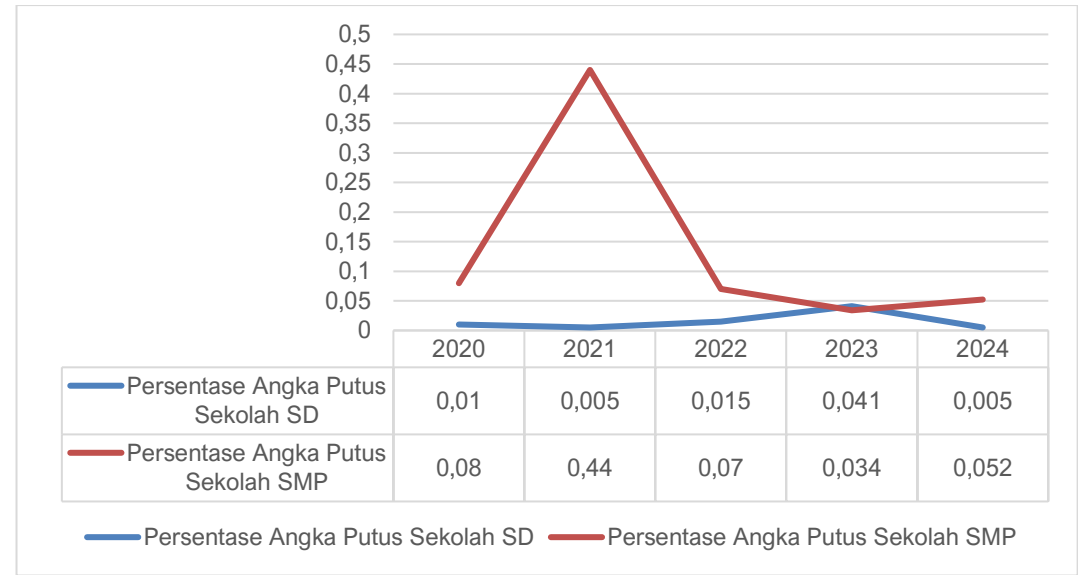
Jenis Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	No	Indikator	Capaian	Skor Rapor 2025	Definisi Capaian	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Skor Rapor 2024	Peringkat di Provinsi	Sumber Data
SMP Kemenag	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		67,68		Naik 1,65	66,03	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Baik	88,65	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi	Naik 3,58	85,07	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		61,2		Naik 7,17	54,92	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Sedang	70	40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi inimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.	Naik 10	60.00	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		54,03		Naik 7,58	46,45	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024

Laporan ini berisi capaian seluruh indikator yang mempengaruhi indeks SPM Anda berdasarkan hasil agregat per jenjang di kabupaten/kota Anda.
Laporan ini dapat memberi gambaran kualitas satuan pendidikan Anda seperti yang tertuang di Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Laporan diperbarui 17 Maret 2025

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Salatiga kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tren yang baik yaitu cenderung menurun. Siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI Tahun Pelajaran lalu sebanyak 1 (satu) , jumlah peserta didik SD/MI Tahun pelajaran lalu sebanyak 19.220 orang sehingga realisasi sebesar 0,005%. Target 2024 sebesar 0,004% realisasi sebesar 0,005% dengan capaian 99,99%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 0,041% terdapat penurunan angka putus sekolah 0,004%

Grafik 2. 45. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Tabel 2. 25. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Kesenjangan	151,83	61,95	69,74	65,56	65,56
2	Pendidikan Anak Usia Dini	149,23	84,81	88,38	96,06	98,76
3	Pendidikan pada Sekolah Dasar	128,35	90,90	87,75	98,42	98,46

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dinilai berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah pada Kesenjangan, PAUD dan Pendidikan Dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Pendidikan bahwa pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

Rata-rata Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2023 sesuai dengan penerapan Indikator sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2021, yaitu Tuntas Madya dengan Pendidikan Kesenjangan, 65,56 (Tuntas Pratama) , Anak Usia Dini 96,76 (Tuntas Utama) dan Pendidikan pada Sekolah Dasar 98,46 (Tuntas Utama).

Indikator SDGs Tujuan 4: Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua

Tabel 2. 26. Capaian SDGs Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka	98,69	99,05	90,53	99,97	97,15
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka	74,03	75,43	75,90	81,72	78,76
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Angka	62,14	63,54	64,08	67,64	70,74
4	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	99,2	98,9	95,70	95,7	
5	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	97	100	96,88	88,6	
6	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persen	100	86,2	81,82	86,2	
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Angka Komposisi	108,35	107,03	106,58	106,05	115,85
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Angka Komposisi	83,85	84,12	84,62	84,15	133,63
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Komposisi	119,10	118,12	119,89	112,30	95,92
10	Rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari 15 tahun	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,42	10,66	10,95	11,24	11,48
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Komposisi	42,6	38,3	40,10	46,84	46,60
12	Persentase APK SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Komposisi	119,10	118,12	119,89	112,30	95,92
13	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat;	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	Rasio	1 : 0,99	1 : 0.8261	98,13	98,1	

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	(3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT							
14	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur lebih dari 15 tahun.	Persen	99,1	99,2	99,6	99,63	98,7
15	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 dan umur 15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur lebih dari 15 tahun.	Persen		97,4	96,9	99,63	100
16	Persentase Penduduk Melek Huruf	Persentase Penduduk Melek Huruf	persen					99,6
17	Persentase Kelas dalam Kondisi Baik (SD/MI	Persentase Kelas dalam Kondisi Baik (SD/MI)	Persen	82,4	78,7	87,3	91,98	88,44
18	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen					92
19	Persentase guru layak mengajar SMP/ MTs	Persentase guru layak mengajar SMP/ MTs	Persen	97	97,5	96,4	98.19	99.10
20	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen				57,53	58,65

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

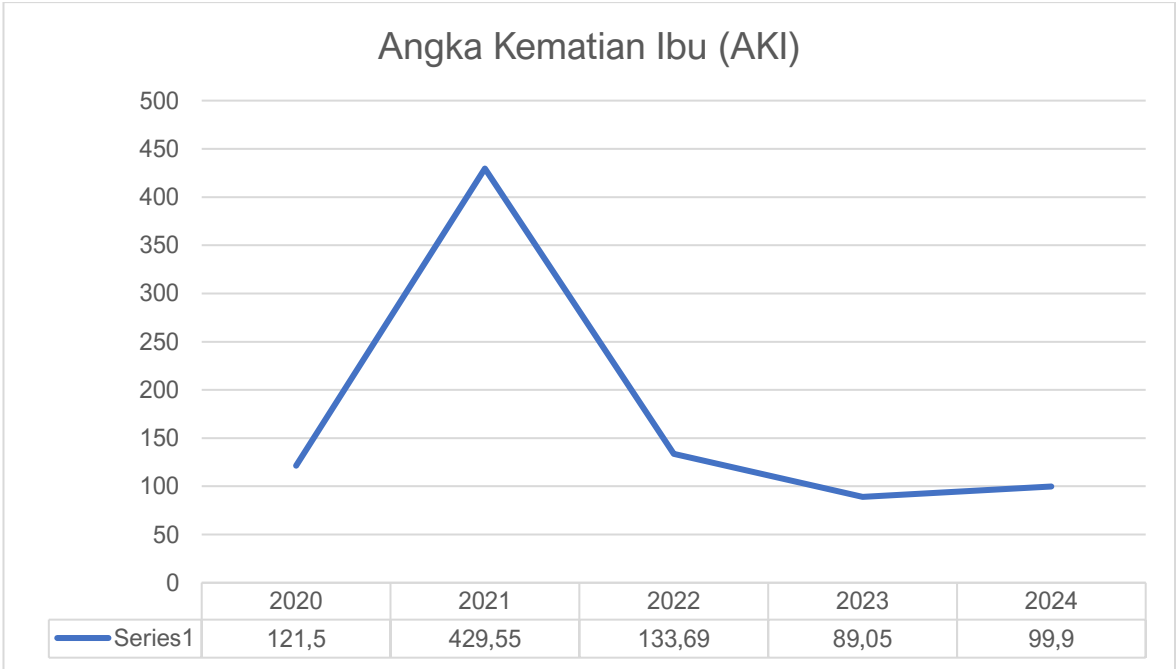
b. **Urusan Kesehatan**

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain : Faktor lingkungan, Perilaku kesehatan, Pelayanan kesehatan dan Kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu Faktor kesehatan lingkungan dan faktor Pelayanan kesehatan. Kinerja daerah urusan kesehatan mendukung pencapaian tujuan ke 4 RPD tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk”.

Target Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Salatiga tahun 2024 ditetapkan 172/100.000KH atau 2 kasus kematian ibu, sedangkan realisasi AKI pada tahun 2024 sebesar 99,9/100.000 KH atau 2 kasus kematian ibu. Dengan demikian capaian kinerja AKI pada tahun 2024 sudah memenuhi target ditetapkan. Karena indikator negative berarti kinerja AKI telah mencapai 141,92% dengan predikat tercapai.

Penyebab dari kematian ibu pada tahun 2024 karena Pre eklamasi dan pendarahan. Sehingga untuk evaluasi ke depannya harus dilakukan deteksi dini terhadap resiko yang berkaitan dengan penyakit-penyakit penyerta. Selain itu ibu hamil yang memiliki resiko tinggi dalam persalinan harus mendapatkan perhatian lebih dan pendampingan dari tenaga medis.

Grafik 2. 46. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



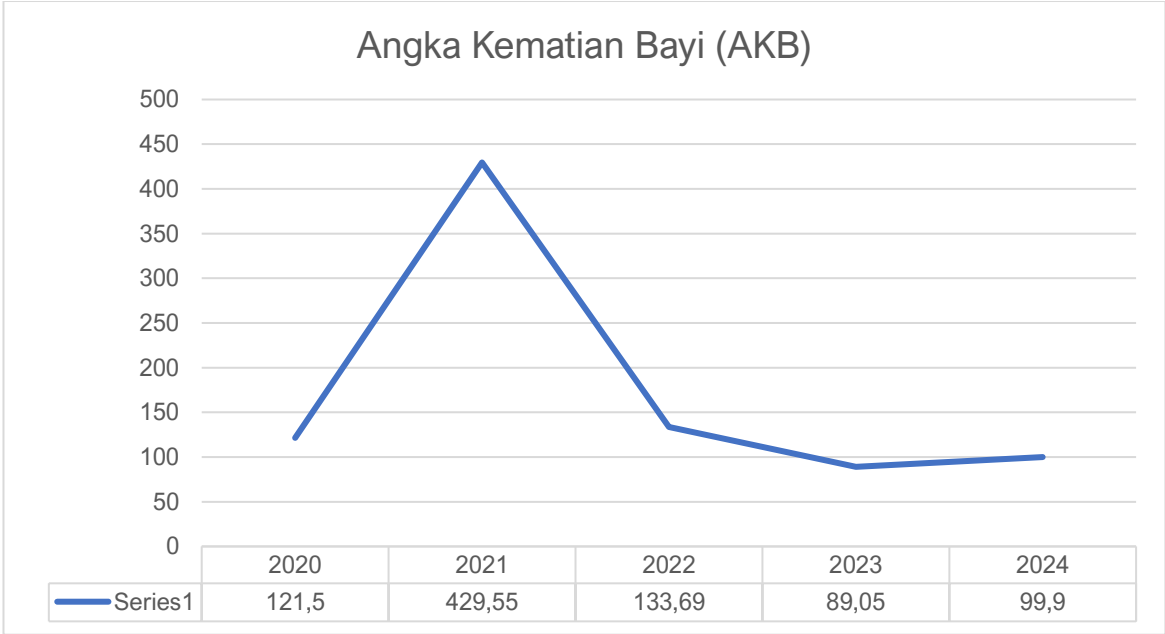
Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi sasaran strategis pembangunan di bidang kesehatan di Kota Salatiga. Kasus kematian bayi yang dilahirkan berkaitan erat dengan riwayat dan kondisi ibu sejak hamil, penatalaksanaan persalinan atau bahkan penyakit penyerta/kelainan bawaan pada bayi.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian pada bayi lahir terutama karena masih adanya ibu hamil dengan KEK dan anemia. Upaya yang dilakukan adalah Optimalisasi SHK (screening hipotiroid kongenital) dan meningkatkan cakupan ANC (antenal care) yaitu pemeriksaan ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar.

AKB di Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar 12,03/1.000 KH. Angka tersebut berada di bawah target yang telah ditentukan yaitu 12,89/1000 KH. Secara absolute dari target 31 kasus kematian bayi, terdapat 28 kasus kematian bayi di Kota Salatiga pada tahun 2024 Hasil penilaian kinerja pada indikator ini mencapai 104.49%, masuk dalam kategori tercapai. Perkembangan capaian AKB dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif, dengan capaian 2024 sebesar 12,03% per 1000 kelahiran bayi.

Grafik 2. 47. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Pada tahun 2024 prevalensi gizi buruk di Kota Salatiga sebesar 0,01%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2020-2024 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun. Walaupun masih munculnya kasus gizi buruk berulang dengan balita yang sama karena adanya kelainan pada balita tersebut. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan KIE, Sosialisasi terkait gizi seimbang dan bahayanya balita dengan gizi buruk serta dengan memanfaatkan rumah pemulihan gizi secara maksimal bekerjasama dengan dokter spesialis anak melalui pemeriksaan dan konsultasi kesehatan serta dengan memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan keluarga miskin.

Grafik 2. 48. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Permasalahan status gizi salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 7,01 persen atau sebanyak 605 Balita Stunting pada tahun 2024 dan tersebar pada semua kecamatan dan kelurahan di

Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik. Stunting akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas sumber daya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

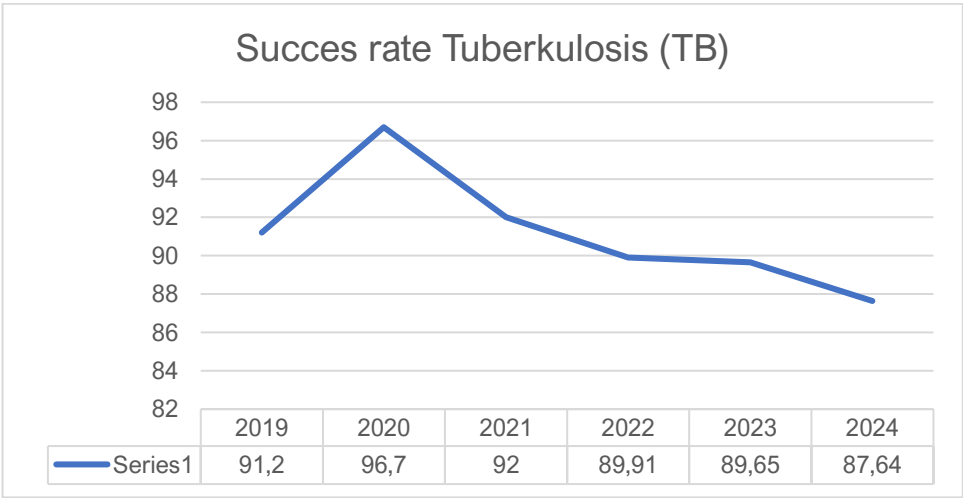
Tabel 2. 27. Data Stunting Kota Salatiga 2020-2024

Tahun	BADUTA		BALITA	
2020	329/4.649	7,07%	1099/11.462	9,58%
2021	286/3.431	8,34%	856/9.480	9,03%
2022	204/3.746	5,44%	647/10.418	6,21%
2023	135/2927	4,61%	484/8.177	5,92%
2024	181/2698	6,71%	605/8627	7,01%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Salah satu sasaran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu menurunnya penyakit menular dan tidak menular. Keberhasilan menurunnya penyakit menular terlihat dari Success Rate Tuberkulosis (TB) Kota Salatiga yang capaiannya pada Tahun 2024 sebesar 87,64% dari target 2024 sebesar 93%. Pelayanan program TB di fasilitas dalam tatalaksana pengobatan TB secara keseluruhan sudah sesuai standar, angka keberhasilan pengobatan belum bisa mencapai target dikarenakan ada kasus kematian pada penderita TB sebesar 2% sehingga mempengaruhi capaian succes rate. Perkembangan penanganan Tuberkulosis (TB) cenderung fluktuatif dari tahun 2020-2024.

Grafik 2. 49. Succes Rate Tuberkulosis (TB) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

-Persentase HIV/AIDS yang ditangani.

Sesuai kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS seluruh penderita HIV/AIDS harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Tata laksana penderita

HIV/AIDS meliputi *Voluntary Counseling Testing* (VCT) yaitu tes konseling secara sukarela, perawatan orang sakit dengan HIV/AIDS, pengobatan Anti Retroviral (ARV), pengobatan infeksi oportunistik, dan rujukan kasus spesifik.

Pada tahun 2020 ditemukan 15 kasus , tahun 2021 ditemukan sebanyak 12 kasus tahun 2022 ditemukan sebanyak 24 kasus, tahun 2023 ditemukan sebanyak 28 kasus dan seluruhnya sudah 100% mendapatkan pengobatan ARV. Sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 37 kasus dan 81,08% telah mendapatkan pengobatan ARV.

-Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk

Malaria merupakan salah satu salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Di Kota Salatiga terdapat 160 kasus malaria di tahun 2024 (API: 0,8/1.000 penduduk). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana kasus malaria terdapat 13 kasus (API: 0,06/1.000 penduduk). Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 10 kasus (API: 0,05/1.000 penduduk).

Terdapat 38 kasus malaria di tahun 2021, meningkat jika dibandingkan Tahun 2020 yang berjumlah 35 kasus (API: 0,18/1.000 penduduk). Kasus malaria yang ditemukan sebagian besar merupakan kasus yang di bawa dari daerah endemis. Oleh karena itu perlu diwaspadai sumber penularan dan peta wilayah kasusnya, sehingga penularan di wilayah Salatiga dapat dicegah sedini mungkin.

Menurunnya penyakit tidak menular untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari perkembangan prevalensi hipertensi penduduk usia diatas 18 tahun. Pada tahun 2024 Prevalensi Hipertensi penduduk usia diatas 15 tahun dengan target 36,97%, terealisasi sebesar 38,61%.

Dari data di atas menunjukkan bahwa hipertensi sudah banyak diderita oleh masyarakat usia 15-18 tahun dengan prevalensi di atas target. Dalam hal ini Dinas Kesehatan harus meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang PTM, memaksimalkan skrining pada masyarakat usia produktif secara berkala agar status kesehatan masyarakat dengan hipertensi dapat terkontrol.

Tabel 2. 28. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD 20023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2004 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	82	66	100	100	151.52	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Sangat Tinggi	Tercapai

Pada Tahun 2024 Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama ditetapkan target sebesar 66% Puskesmas terakreditasi minimal strata utama, dan berdasarkan hasil reakreditasi semua puskesmas mendapatkan hasil paripurna. Sehingga target tahun 2024 tercapai karena capaian kinerja sebesar 100 %.

No.	Nama Puskesmas	Akreditasi
1	Sidorejo Lor	Paripurna
2	Sidorejo Kidul	Paripurna
3	Kalicacing	Paripurna
4	Cebongan	Paripurna
5	Tegalrejo	Paripurna
6	Mangunsari	Paripurna

Pada tahun 2024 peringkat kelulusan akreditasi RSUD ditetapkan Paripurna dan sampai akhir tahun 2024 ini statusnya adalah paripurna sehingga target tercapai. Tercapainya target ini tidak lepas dari dukungan sumber daya yang memadai serta kelengkapan administrasi yang mendukung RSUD mendapat predikat akreditasi paripurna.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi pelayanan dasar Urusan Kesehatan dapat dilihat dari SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga dengan capaian tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 29. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,73	97,53	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,06	98,20	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	75,52	93,79	97,06	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	32,11	25,14	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	20,13	26,62	93,08	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	85,34	70,88	93,34	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	27,11	33,71	93,17	97,69	98,16
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	48,73	67,71	93,84	100	100

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	59,18	73,52	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13,99	33,43	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV)	50,60	50,60	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan capaian pada tahun 2023. Pencapaian telah mencapai kategori Tuntas Paripurna (100%) yaitu Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia lanjut, Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus sedangkan capaian cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Penderita Hipertensi dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mencapai kategori Tuntas Utama. . Oleh karena itu IP SPM Bidang Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2024 berkategori TUNTAS UTAMA.

Walaupun ada Indikator SPM Bidang Kesehatan belum mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi upaya pemecahan masalah telah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan PKK, tokoh masyarakat dan lintas sektor terkait
- 2) Mendekatkan Posbindu hingga ke tingkat RW di semua wilayah
- 3) Menetapkan posyandu terintegrasi percontohan sebagai bentuk pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di setiap wilayah puskesmas
- 4) Meningkatkan edukasi ke masyarakat

Dengan upaya-upaya pemenuhan penerapan SPM tersebut diharapkan progress capaian indikator SPM Kesehatan akan sesuai dengan target pada tahun berikutnya.

Pencapaian target 12 (dua belas) indikator SPM bidang kesehatan di Kota Salatiga, pada tahun 2023 ada 11 (sebelas) indikator yang telah mencapai kategori Tuntas Paripurna (100%) yaitu Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*). Sedangkan

capaian yang terendah adalah cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi yang hanya mencapai 98,16% (Tuntas Utama).

Indikator SDGs TUJUAN :2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Tabel 2. 30. Capaian SDGs Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	88,4	92,2	95,92 (BPS)	97,9	98,55
2	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Persen	119	116	100	100	100
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak	Persen	100%	100%	97,72	98,2	
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persentase Kasus Stunting	Persen	9,58	9,03	6,21	5,92	
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persentase Kasus Stunting	Persen	9,58	9,03	6,21	4,61	
7	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	NA	NA	12,3	11,18	11	
8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eks.	Persen	70	73,7	78,59	82,4	
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	/100.00 KH	122	430	133,69	89,05	99,9
10	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	100	100	100	100	100
11	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
12	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	10,9	12,3	11,59	13,8	
13	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	8,10	8,91	6,24	9,35	
14	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	10,5	13,8	10,25	12,5	11,49
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Persen	119	116	####	131	100
16	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	%	0,01	0,01	0,02	0,02	
17	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Angka	162	35	####		
18	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					167	167
19	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	%	NA	NA	####	100	100
20	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	2	1	1	0 kasus/ti dak ada kasus	0 kasus/ti dak ada kasus
21	Prevalensi tekanan darah tinggi	Prevalensi Hipertensi Penduduk Usai >18 tahun	Persen	0,6	0,72	0,81		
22	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Unit			6	6	6
23	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Persentase cakupan kepesertaan JKN	Persen	88,4	92,2	95,92	97,9	99,55
24	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase cakupan kepesertaan JKN	Persen	13,8	92,2	95,92	97,9	
25	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	NA	9,35	NA	25,36	23,15	33,39
26	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	12,5		####	100	100

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
27	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	NA	98,78	98,04	98,71	93,95
28	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	98,44	98,82	98,04	98,71	98,44
29	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	%		96,3	97,4	95,7	95,7
30	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan STBM	Kelurahan	167	23	23	23	23
31	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Kelurahan	100	23	23	23	23

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menetapkan sasaran strategis meningkatkan kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi serta meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 2. 31. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1)	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	98	97	96,51	96,5	99,5	Sangat Tinggi	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
2)	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	91	97	91,97	91,97	101	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Capaian kinerja Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditunjukkan dengan jumlah KRK (Keterangan Rencana Kota) sebagai syarat pengajuan IMB. Pada yang terbit dibandingkan jumlah permohonan KRK yang masuk. Pada tahun 2024 terdapat 396 berkas permohonan yang masuk, dari permohonan yang masuk diterbitkan 382 berkas KRK sehingga realisasi sebesar 96,50%, capaian realiasinya 99,5% dan target RPD 98% maka status akan tercapai.

Wilayah dengan infrastruktur kodisi baik target 91% dan realiasi 91.97% capaian realisasi sebesar 101% dan target RPD tahun 2026 sebesar 91 maka status tercapai. Total panjang jalan sesuai SK Jalan tahun 2017 adalah sepanjang 337,471 km. Dari panjang jalan tersebut pada tahun 2024 kondisinya 91,97% dalam kondisi mantab, yang terdiri dari 226,311 Km dalam kondisi baik dan 84,07 Km dengan kondisi sedang. Faktor pendukung diantaranya ketersediaan anggaran baik untuk pemeliharaan maupun untuk peningkatan kondisi jalan.

Pada Tahun 2023 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 18.586m dan kondisi sedang adalah 4.467m sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 23.053m, dari data tersebut maka capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan 12 daerah irigasi yang ada semuanya terlayani. Penyebab keberhasilan ini karena ketersediaan anggaran dan dukungan OP irigasi yang turut mendukung pemeliharaan jaringan irigasi.

SPM urusan Pekerjaan Umum di tingkat kabupaten/kota mencakup pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Realisasi SPM tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 32. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	92	131,82	99,09	99.28	88,45
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	100	100	82,28	86.89	98,06

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Pencapaian Indikator Standar Minimal Bidang Pekerjaan Umum berupa Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air bersih melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap kualitas air.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) terhadap kuantitas akses pengolahan air limbah domestik. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik.

Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota dan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbah nya diolah di IPAL.

Permasalahan yang dihadapi bidang pekerjaan Umum pada Pencapaian SPM antara lain:

- 1) belum adanya data rumah tangga akses air minum dan sanitasi yang akurat;
- 2) kesulitan mencari lahan untuk pembngunan IPLT baru karena adanya penolakan di rencana lokasi Gunungsari
- 3) keterbatasan lahan di masyarakat untuk pembangunan IPAL komunal (SPALD-T)

Solusi yang dilakukan diantaranya adalah perlunya survey/sensus BNBA bagi rumah tangga yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi juga pengoptimaan IPLT yang lama untuk 10 tahun ke depan dengan meningkatkan kapasitas perlu kajian penggunaan alat mekanis.

Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Salatiga untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari berada pada kategori Tuntas Madya, sedangkan pada jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berkategori Tuntas Utama, sehingga IP SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2024 dikategorikan Tuntas Madya.

Tabel 2. 33. SPM Pelayanan Dasar Air Minum

No.	Air Minum	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Air Minum Layak	86,30	81,87	91,55	98,44	93,20
2.	Persentase Air Minum Jaringan Perpipaan	86,30	75,05	95,00	91,30	91,30
3.	Persentase Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	13,70	24,95	2,98	8,7	6,16
4.	Persentase Air Minum Aman	69,29	72,15	82,65	91,71	87,04

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Tabel 2. 34. SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik

No.	Air Minum	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Air Limbah Domestik Layak	94,71	93,75	94,37	94,67	96,67

No.	Air Minum	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Persentase Air Limbah Domestik Belum Layak	5,29	6,25	5,63	5,33	5,92
3.	Persentase Air Limbah Domestik Aman	7,10	7,75	8,37	12,12	10,93

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Tabel 2. 35. Capaian SDGs Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga,perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Persentase Pemenuhan Air Baku	Persen	89	97	98,19	99,3	
2	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persen	98,8	98,6	98,04	98,7	
3	Persentase rumah angga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak	Persen	94,71	93,75	94,37	94,61	92.00
4	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur airlimbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur airlimbah dengan sistem terpusat skala kawasan dan komunal	Kecamatan	Sdh terpenuhi	2	4,00	4	4
5	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan	Jumlah Kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan	Kecamatan	PM	PM	4,00	4	4

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Lumpur Tinja (IPLT)	Lumpur Tinja (IPLT)						
6	Kondisi mantap jalan nasional	Persentase Jalan kota dalam Kondisi baik	Persen	95,00	96.45	99,20	91.00	91,97

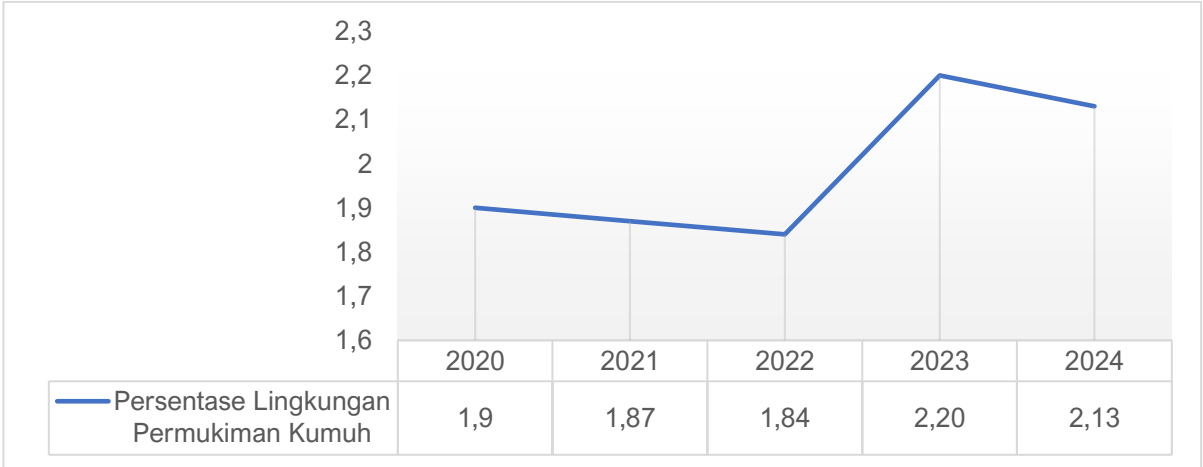
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu isu yang masih berkembang saat ini adalah semakin menurunnya kualitas kawasan permukiman. Beberapa faktor penyebab kekumuhan antara lain meningkatnya arus urbanisasi di perkotaan, kemampuan ekonomi khususnya untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pertumbuhan penduduk itu sendiri. Hal ini mendorong tumbuhnya kawasan kumuh permukiman.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 653/483/2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Salatiga, Total luasan Kawasan kumuh Kota Salatiga tingkat kumuh ringan dan sedang adalah 128,59 Ha. Pada tahun 2024 luasan kawasan kumuh yang tertangani bertambah 3,91 Ha mencapai 7,53 Ha. Sehingga luasan kawasan kumuh Salatiga menjadi 121,06 Ha atau 2,20% dari total luas Kota Salatiga yang baru yaitu 5.498 Ha.

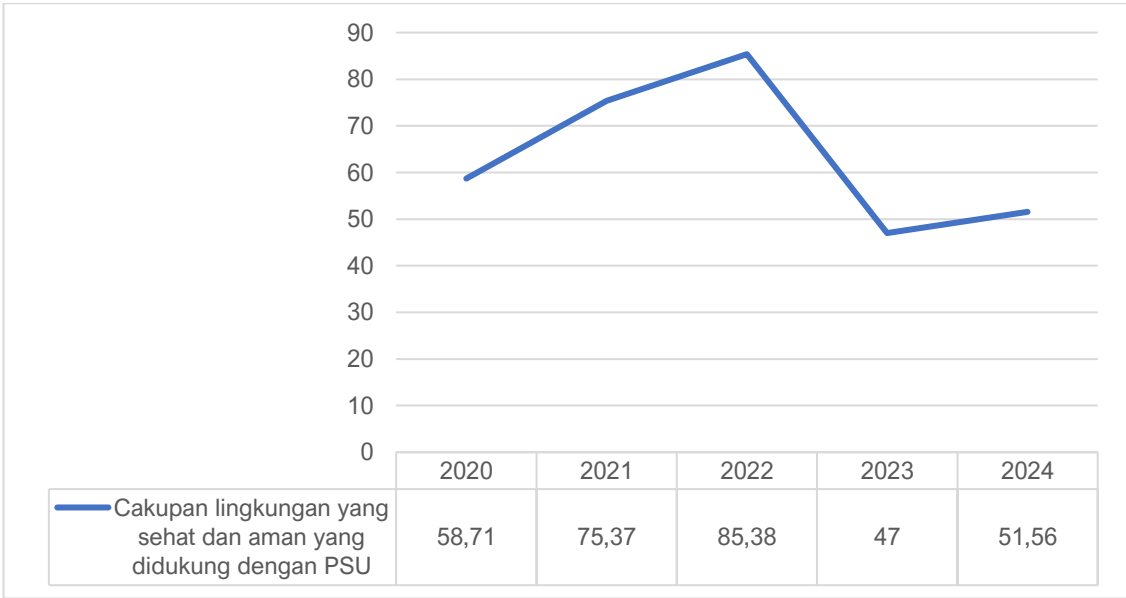
Grafik 2. 50. Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2024 ditargetkan 46% mencapai realisasi 51,56%. Persentase ini dicapai dari jumlah perumahan yang sudah dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 33 perumahan dibagi jumlah perumahan yang sudah diserahkan sebanyak 64 perumahan dikalikan 100%

Grafik 2. 51. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

Tabel 2. 36. Luas PSU berdasarka nBA/SK

No	Nama Perumahan	Peruntukan	Luas Ba	Hgb	Luas Peta Bidang (m2)
1	Reka Griya Premiere Tegalrejo	Jalan dan Draniase	899,52		918
2	Puri Satya Permai Salatiga	PSU Balai RW			267
		PSU RTH			407

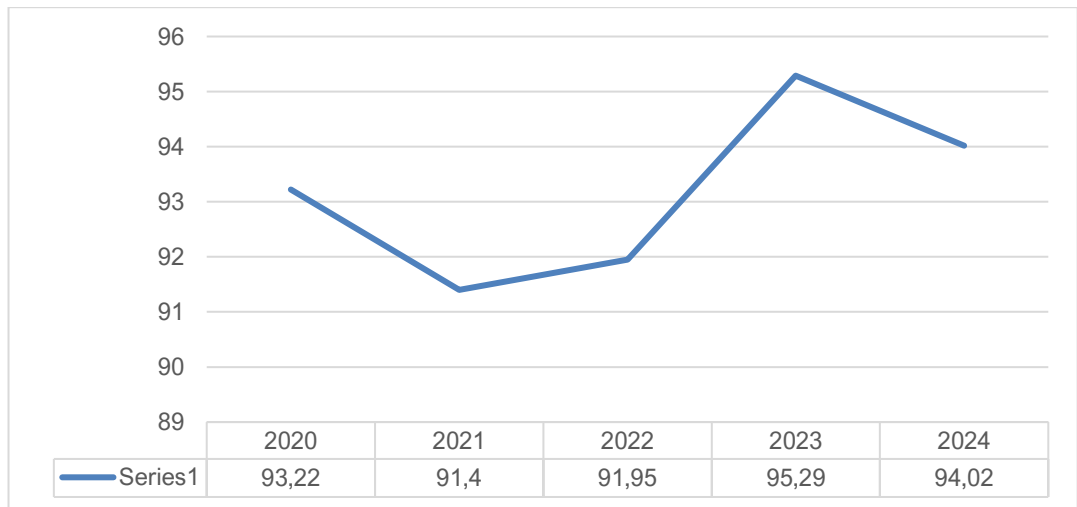
No	Nama Perumahan	Peruntukan	Luas Ba	Hgb	Luas Peta Bidang (m2)
3	Cendrawasih Noborejo	Jalan dan Drainase I			724
		Jalan dan Drainase II			957
		Jalan dan Draninase III			257
4	Pondok Aren Tegalrejo	Jalan dan Drainase			448
5	Permata Argosari Randuacir	Jalan dan Drainase			1577
		Balai RT			80
6	Puri Wahid Regency Randuacir	Drainase 1A	64,00	648	
		Drainase 1B	93,00	603	
		Drainase 1c	128,00	698	128
		Jalan dan Drainase 15	1.532,00	642	1532
		Jalan dan Drainase 1 d	555,00	669	
		Jalan dan Drainase 13	7.201,00	601	7201
		Drainase 1e	101,00	1129	101
		Drainase if	71,00	1103	71
		Jln dan Drainase 14	497,00	612	
		Jalan dan Drainase 12	608,00	1100	608
		GOR Lapangan tenis dan Taman	2238	915	2238
7	Pesona Merbabu 4	Jalan, Drainase dan RTH	1945		
8	Griya Dukuh Asri	Balai Rt 01			
		Balai Rw, Balai Rt 02, Lapangan Voli, Masjid dan RTH			
		Balai Rt 03 dan Lapangan Voli			
		Balai Rt 04			
		Jalan, Drainase dan RTH			

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, 2024

Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang ditargetkan 92,14% terealisasi 95,29%, dengan capaian kinerja sebesar 102,04%. Realisasi peningkatan kualitas RTLH yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 2.318 unit, dengan rincian penambahan sebagai berikut:

- a) Tahun 2017 sebanyak 411 unit;
- b) Tahun 2018 sebanyak 58 unit;
- c) Tahun 2019 sebanyak 415 unit;
- d) Tahun 2020 sebanyak 340 unit;
- e) Tahun 2021 sebanyak 226 unit;
- f) Tahun 2022 sebanyak 211 unit;
- g) Tahun 2023 sebanyak 416 unit dan
- h) Tahun 2024 sebanyak 241 unit

Grafik 2. 52. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

Untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kota Salatiga pada sektor perumahan menggunakan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak. Indikator tersebut menjadi salah satu kebijakan RKPD Kota Salatiga tahun 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja mendukung Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045. Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak pada tahun 2023 sebesar 84,77% yang dijadikan dasar untuk penetapan target pada tahun 2025.

Indikator SPM Bidang Perumahan rakyat berupa Presentase jumlah Warga Negara korban bencana kota yang memperoleh rumah layak huni dan Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni untuk Kota Salatiga sampai saat ini masih belum terdata secara lengkap. Hal ini dikarenakan masih belum adanya inventarisasi obyek penerima layanan SPM bidang Perumahan Rakyat, Data Program Pemerintah yang berkaitan dengan relokasi penduduk serta integrasi informasi kebencanaan Kota Salatiga.

Walaupun capaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2023 belum bisa dihitung karena tidak adanya realisasi kegiatan, tetapi program-program pendukung penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Salatiga berupa pengalokasian anggaran untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat atas perumahan.

Pengalokasian anggaran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota. Pada tahun 2023, realisasi capaian indikator program kegiatan yang mendukung indikator tersebut mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian 99,29%.

Tabel 2. 37. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2020	2010	2022	2023	2024
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	0	0	100	100	100
2.		0	0	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

Pada Tahun 2024 di Kota Salatiga tidak terdapat bencana, sehingga Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota tidak ada pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 38. Capaian SDGs Perumahan Rakyat

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi rumah tangga yang memilki hunian yang layak dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	99,8	96,3	93,94	89,2	94,02

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah di Kota Salatiga ditunjang dengan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada. Rasio Linmas dibanding penduduk kota salatiga yaitu 73 orang Linmas per 10.000 penduduk. Perkembangan rasio pertugas Linmas dalam kurun waktu 2020-2022sebagaimana dalam tabel berikut:

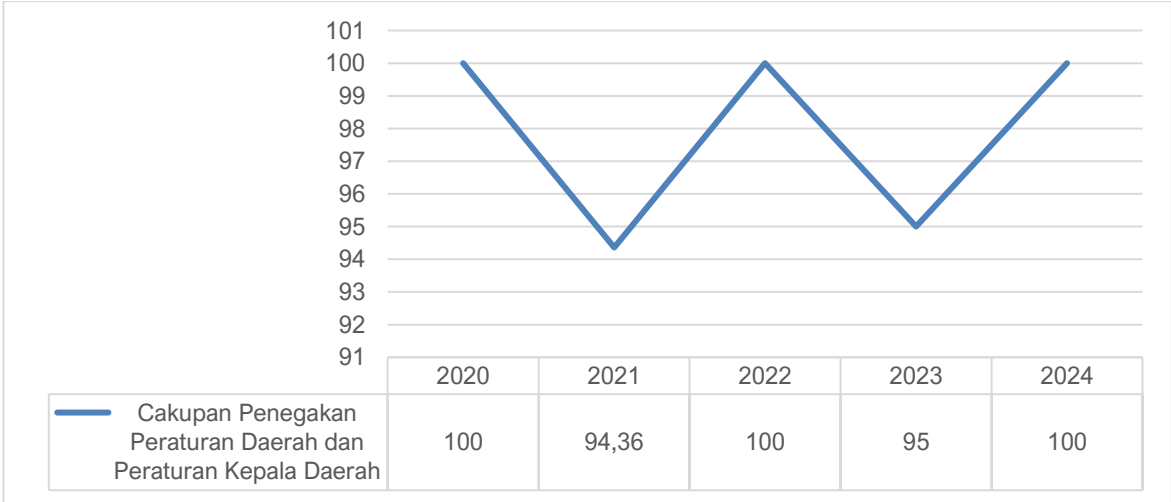
Tabel 2. 39. Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Jml linmas	1.298	1.264	1258	1312	1467
Jml Penduduk	196.082	196.440	200.220	201.369	198.971
Rasio 1 : x	151	155	159	153	135
rasio per 10.000	66	64	62	65	73

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Kondusifitas wilayah tergambar dari penegakan PERDA di Kota Salatiga relatif stabil dalam kurun waktu 2020-2024. Cakupan penegakan perda pada tahun 2024 sebesar 100% Dengan penyelesaian sejumlah 31 kasus dari 274 kasus pelanggaran PERDA dan PERKADA sedangkan yang lainnya sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan tetapi masih ada yang dalam proses administrasi APIP.

Grafik 2. 53. Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Tabel 2. 40. Capaian Indikator Kinerja Daerah Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1.70	1.71	1.66	1.66	102,92	Sangat Tinggi	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
4)	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Bakesbangpol, BPDB Tahun 2024

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditargetkan 100% pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 100% dikarenakan dengan kategori sangat berhasil, dikarenakan setiap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat ke Satpol PP sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan tetapi masih ada yang dalam proses administrasi.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ditargetkan 1.71 per 10.000 penduduk ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, terealisasi 1.66. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih ada kasus penyalahgunaan Narkoba sebanyak 1.71 orang per 10.000 penduduk atau di tahun 2024, atau masih ada 33 kasus penyalahgunaan narkoba.

Capaian Prevalensi penyalahgunaan narkoba untuk akhir RPD ditargetkan 1,70, sedangkan realisasi pada tahun 2024 tercapai 1,66, sehingga capaian kinerja mencapai 102.92% dengan status Tercapai.

Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik target 100% dan realisasi 100% serta capaian realisasi 100% dan target RPD tahun 2026 sebesar 100% maka status tercapai. Faktor keberhasilan diantaranya :

- 1) Adanya koordinasi rutin pada Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Cipta Kondusifitas dan FKDM serta Foeum Komunikasi Pimpina Daerah.
- 2) Sinergitas dan komunikasi antara Pemerintah Kota , TNI, Polri , FKDM dan masyarakat sehingga mampu menciptakan kondusifitas wilayah

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan untuk Kelurahan Tangguh Bencana sebesar 19,00% dan terealisasi 26,08% dengan capaian 137,26% yang diperoleh dari perbandingan antar target 17,00% dengan realisasi 26,08% sehingga capaiannya 137,26 %, dengan status tercapai. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini karena pada tahun 2024 BPBD Kota Salatiga telah membentuk 2 (dua) kelurahan Tangguh Bencana yaitu di Kelurahan Blotongan dan Kelurahan Kauman Kidul.

Target yang ditetapkan untuk Indeks Resiko Bencana Pada tahun 2024 sebesar 90,45% dan terealisasi 90,89% dengan capaian 100,10% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 90.00% maka status tercapai. Penyebab keberhasilan ini karena terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan indeks Ketahanan daerah.

Tabel 2. 41. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100
3	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Seluruh Indeks Penerapan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan 2024 telah mencapai 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Walaupun demikian, jika dilihat dari permasalahan masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dari Satpol PP dan BPBD dalam pencapaian SPM tahun 2024 diantaranya:

- 1) Masih adanya SDM PNS Pemadam kebakaran yang belum bersertikat.
- 2) Mobil pemadam kenakaran hanya ada 3 yang sudah uzue semua paling muda tahun 2009
- 3) Belum tersedianya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana.

Tabel 2. 42. Capaian SDGs Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2222	2023	2024
1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	orang			0	0,00	1
2	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks	91,2	91,2	90,89	94	
3	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana				NA	NA	
4	Dokumen strategi pengurangan	Dokumen strategi pengurangan	Dokumen	Belum	Belum	ada	ada	ada

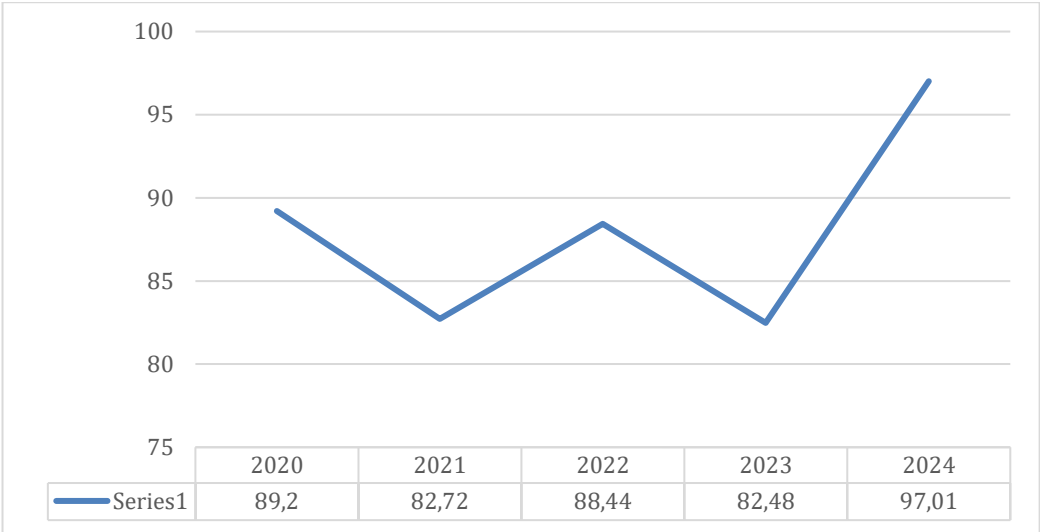
NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2222	2023	2024
	risiko bencana (PRB)	risiko bencana (PRB)						
5	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	kecamatan				4	4 kecamatan
6	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	Belum	Belum	1	1,00	1,00
7	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	91,2	91,2	90,89	84	76,52
8	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen	Belum	Belum	1	1,00	1,00
9	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	0	0	0	1,00	0 kasus
10	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	0	0 kasus
11	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah kasus kejahatan pada satu tahun terakhir	Kasus	1	129	94	3 kasus	3 Kasus

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Bakesbangpol, BPDB Tahun 2024

f. **Urusan Sosial**

Pada tahun 2024 penduduk Salatiga yang terdata DTKS sebanyak 52.298 orang yang sudah diverifikasi dan validasi (Verval) yang memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS sehingga cakupan penduduk memenuhi kreteria yang terdata dalam DTKS mencapai 97,01.

Grafik 2. 54. Cakupan Penanganan PMKS di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2024

Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani ditargetkan 95% terealisasi 97.01% dan di akhir RPD target 70 persen dengan capaian kinerja di Tahun 2024 sebesar 102,11% dengan status Tercapai.

Faktor yang menyebabkan tercapainya capaian indikator cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS adalah melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertikal dan horisontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial antara lain :

- 1) pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
- 2) penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
- 3) penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
- 4) verifikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan /penerima bansos)

Tabel 2. 43. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial

Indikator Kinerja Daerah	Satu an	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	70	95	97.01	97.01	102,11	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2024

Standar pelayanan minimal urusan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan PP 2 Tahun 2018 terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya

gelandangan dan pengemis di luar panti, perlindungan dan jaminan sosial ada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Realisasi SPM tahun 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 44. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	100	100	98,73	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	100	70	100	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	100	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	100	100	99,72	100	100
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Ada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2024

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagaimana diamanahkan pada Permendagri 59 Tahun 2021 untuk Kota Salatiga sampai dengan tahun 2023 untuk semua jenis pelayanan telah berada pada Kategori Tuntas Paripurna, sehingga IP SPM Bidang Sosial di Kota Salatiga dikategorikan Tuntas Paripurna.

Tabel 2. 45. Capaian SDGs Urusan Sosial

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Angka	4,94	5,14	4,73	4,66	
2	Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	53,24	53,20	55,60		
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti					100	100
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai	Jumlah	4491	4491	5.093	4470	

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	bersyarat/Program Keluarga Harapan.	bersyarat/Program Keluarga Harapan.						
5	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Jiwa			0	0 (tidak pernah terjadi kasus bencana sosial)	0 (tidak pernah terjadi kasus bencana sosial)
6	Koefisien Gini	Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka Komposit	0,40	0,41	0,45	0,42	
7	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Angka	4,94	5,14	4,73	1,06 (angka Kemiskinan ekstrem)	

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2024

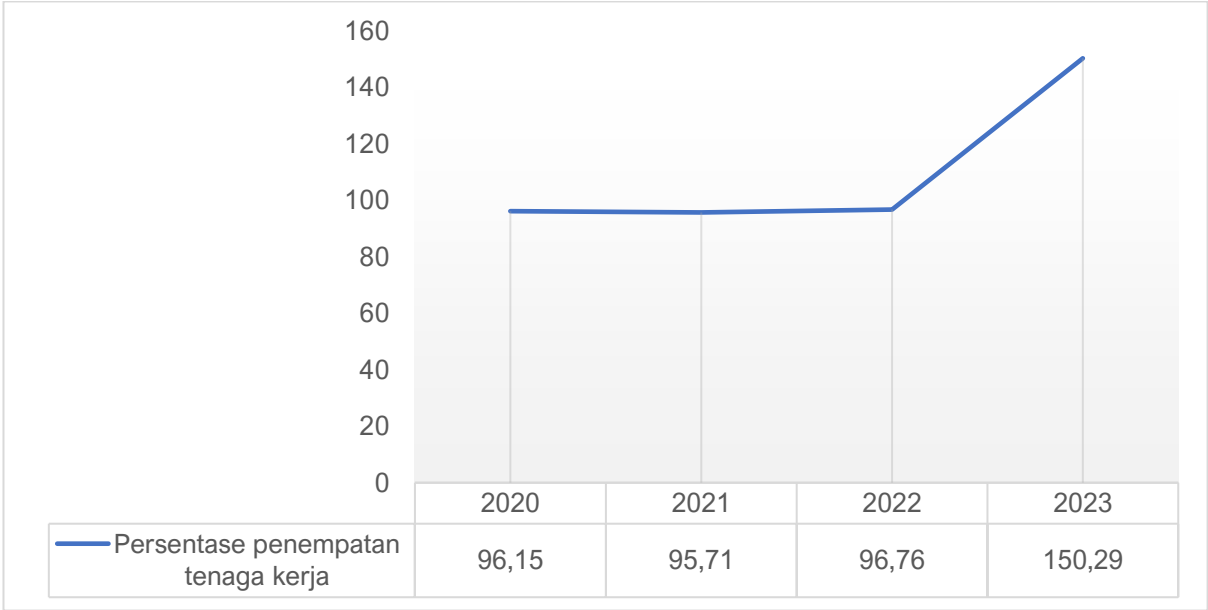
2.4.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Gambaran aspek pelayanan umum pada fokus urusan wajib non pelayanan dasar terlihat pada capaian indikator kinerja masing-masing urusan sebagai berikut:

a. Tenaga kerja

Persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2024 mencapai 137,17% yang mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu150,29%. Hal ini di sebabkan karena para pencari kerja masih pilih-pilih dalam mencari pekerjaan oleh pemulihan ekonomi yang di tandai oleh penyerapan tenaga kerja.

Grafik 2. 55. Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Pada tahun 2024 jumlah

penduduk lulusan S1/S2/S3 di Kota Salatiga sebanyak 21.166 jiwa, sedangkan total jumlah penduduk 201.369 jiwa.

Tabel 2. 46. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	100	80	63.64	63.64	85	Tinggi	Akan tercapai
2)	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	50	50	68,59	68,59	137,17	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta%	99.72	97,08	10077,24	10077,24	10095036011,797	Sangat Tinggi	Tercapai
4)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	76.9	61,5	100	100	162,01	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2024

Capaian Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin yang ditargetkan 80% terealisasi 63,64% dengan target 100 persen di tahun 2026 dan realisasi 85% dengan status akan tercapai.

Faktor yang melatarbelakangi belum tercapainya ini disebabkan kurangnya perhatian dan kesadaran Lembaga Pelatihan Kerja dalam hal pelaporan, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan rapat koordinasi dan kunjungan ke Lembaga Pelatihan Kerja.

Capaian prosentase pencari kerja yang ditempatkan yang ditargetkan 50% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 68,59% dengan target RPD tahun 2026 sebesar 50% dan realisasi 137,17% dengan status tercapai. Faktor pendukung diantaranya salah satu perusahaan besar di Kota Salatiga mempunyai program perekrutan tenaga kerja,

Tingkat produktifitas tenaga kerja yang ditargetkan 95,76% dengan realisasi 95,62 dgn capaian 99,96% dan target RPD sebesar 99.72% dengan status akan tercapai.

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga kerja ditargetkan 53,80% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 185,87% dan target RPD tahun 2026 sebesar 76.9% dengan status tercapai.

- 1) Faktor keberhasilan ini karena Perencanaan kegiatan sejalan dan mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja daerah.
- 2) Perencanaan kegiatan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan yang diinventarisir pada saat melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan

Tabel 2. 47. Capaian SDGs Urusan Tenaga Kerja

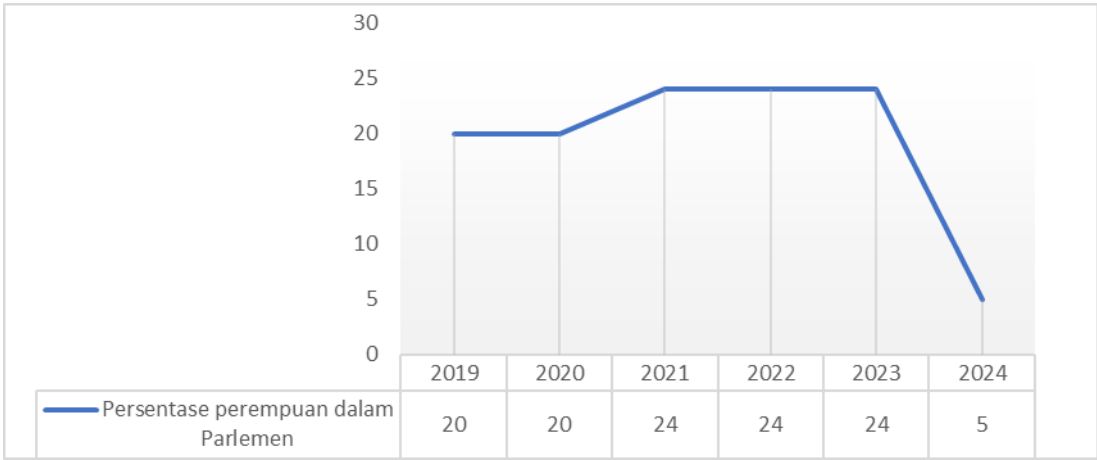
NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	Persen		50,5	60,67	68	
2	Presentase Tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di sektor pertanian	Persen			2,82	3,27	
3	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai	Rupiah			3.032.318	2.952.582	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,44	7,26	5,58	4,57	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2024

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

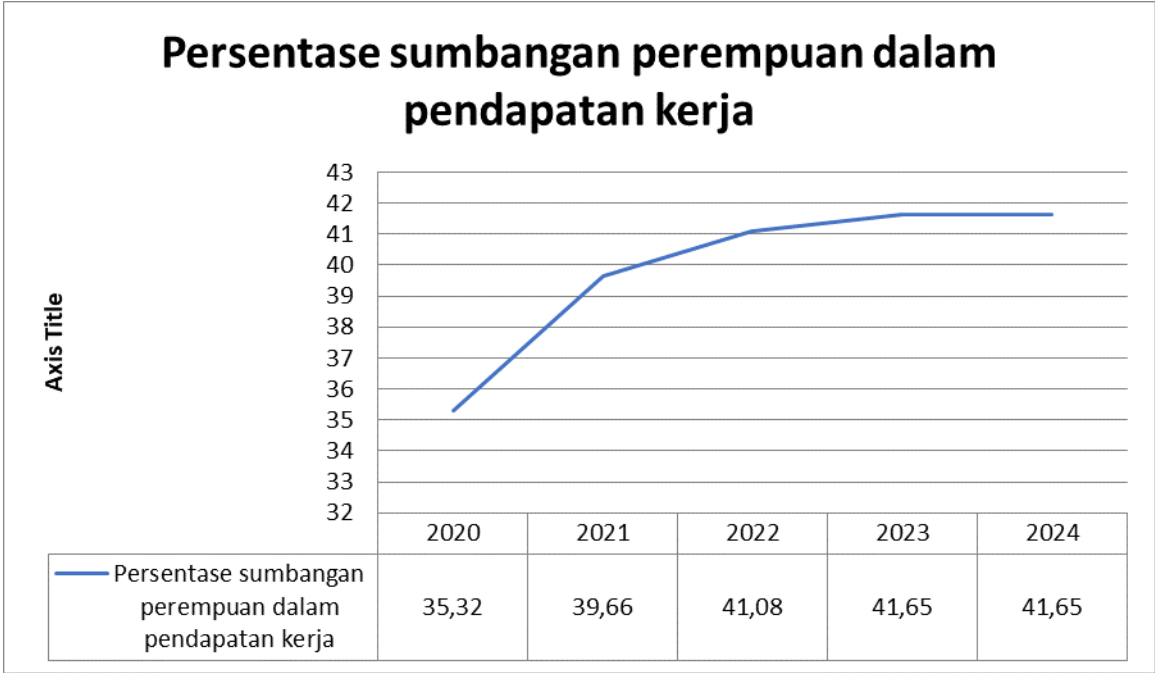
Pada tahun 2024 persentase perempuan dalam parlemen di Kota Salatiga sebanyak 8 % atau sebanyak 2 orang perempuan dari 25 orang jumlah keseluruhan Anggota DPRD Salatiga hasil Pemilu 2025.

Grafik 2. 56. Cakupan Presentase Perempuan dalam Parlemen di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja pada tahun 2024 mencapai 41,65% dari target yang ditetapkan sebesar 40% sehingga capaian kinerjanya 104,13. Angka tersebut sama dengan capain kinerja pada tahun 2023 dengan target yang ditetapkan sebesar 40% terealisasi sebesar 41,65% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,13%. Faktor pendukungnya diantaranya adanya pelatihan – pelatihan yang mendorong upaya peningkatan peran serta gender dan peningkatan ekonomi rumah tangga terhadap masyarakat khususnya perempuan di Kota Salatiga juga semakin mudahnya akses bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Grafik 2. 57. Cakupan Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

Pada tahun 2024 masih terdapat banyak kasus kekerasan, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 33 kasus sedangkan kasus kekerasan pada perempuan sebanyak 23 kasus. Hal tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023 kasus kekerasan pada anak sebanyak 32 kasus, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 20 kasus. Melihat dari kenaikan kasus kekerasan setiap tahunnya menunjukkan bahwa kasus kekerasan menjadi isu penting yang harus segera ditangani. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa korban kekerasan sudah mulai berani untuk mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya, terlebih dengan kemajuan teknologi maka kasus pengaduan kekerasan bisa dilakukan secara online

Tabel 2. 48. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	39.29	32,14	100.00	100.00	311,4	Sangat Tinggi	tercapai

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan yang ditargetkan 32,4% terealisasi 100%. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan jumlah kelembagaan forum anak yang sudah terbentuk di Kota Salatiga yaitu mulai dari 1 kelembagaan forum anak tingkat kota, 4 kelembagaan forum anak tingkat kecamatan dan 23 kelembagaan forum anak tingkat kelurahan. Berdasarkan target RPD tahun 2026 sebesar 39,29 % dan tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 311,14% dengan status tercapai.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari semua pihak dan stakeholder terkait, karena komitmen untuk membentuk kelembagaan forum anak,khususnya dari Rumanksa selaku Forum Anak Tingkat Kota di Salatiga yang aktif dalam berbagai kegiatan. Tidak terlepas juga dari keanggotan Rumanksa yang diisi oleh anak-anak milenial yang melek akan teknologi, sehingga lebih bisa meningkatkan kinerja untuk mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada

Tabel 2. 49. Capaian SDGs Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Persen	0,01	0,037	0,05	0,02	0,06

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

c. Pangan

Tabel 2. 50. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1)	Ketersediaan beras	%	70	70	267,67	267,67	382,34	Sangat Tinggi	tercapai
2)	Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita	2.487	2.487	2.792	2.792	112,26	Sangat Tinggi	tercapai
3)	Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita	111	109	77,84	77.84	71,41	Tinggi	Akan Tercapai
4)	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1.65	1,49	1.49	1,49	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

Ketersediaan beras ditargetkan 70% dengan realisasi 267,67% dan capaian realiasi kinerja 382,34% dimana target RPD tahun 2026 sebesar 70% sehingga status tercapai.

Ketersediaan energi per kapita target sebesar 2.48 kkal/kapita dengan realisasi 2.726 kkal/perkapita dengan capaian realisasi 110,01 % dimana target RPD 2026 sebesar 2.487 kkal/perkapita sehingga status tercapai.

Hal ini menunjukkan capaian angka yang lebih tinggi dengan tahun 2022 sebesar 2.600 kkal/kapita. Capaian yang melebihi target ini dikarenakan terjaminnya pasokan bahan makanan dari luar Kota Salatiga, khususnya kelompok bahan makanan penghasil energi seperti beras, jagung, tepung gandum, ubi kayu, ubi jalar, dan gula. Pasokan dari luar kota menjadi sangat strategis karena Kota Salatiga bukan merupakan daerah penghasil bahan pangan pokok.

Ketersedian protein per kapita adalah komponen dalam perhitungan ketersediaan pangan per hari. Angka ini diperoleh dari komponen bahan makanan produk hewani dan kacang-kacangan. Pada Tahun 2024 ketersediaan protein perkapita dengan target 109 gram/kapita dan realisasi 77,7 gram/kapita , capaian kinerja sebesar 96.06 gram/kapita serta target RPD Tahun 2026 sebesar 111 gram/kapita maka status akan tercapai.Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2 point. Jika mengacu pada ketersediaan protein yang ditetapkan oleh Widya Karya Pangan Nasional dan Gizi X Tahun 2012 yaitu 63 gr/kapita/hari untuk protein. Kelompok bahan makanan buah/biji berminyak dan kacang-kacangan memiliki skor dibawah skor maksimal, sehingga ketersediaan pada kelompok bahan makanan ini perlu ditingkatkan melalui peningkatan produksi maupun ekspor dari daerah lain. Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan dengan target 1,42% dan realisasi sebesar 1.42% dengan capaian kinerja 100% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 1,64% sehingga status tercapai.

Faktor yang mendorong keberhasilan dalam indikator Ketersediaan Pangan Sesuai Kebutuhan adalah ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Kota Salatiga. Meskipun Salatiga bukan kota pertanian, akan tetapi kebutuhan pangan di Masyarakat

Tabel 2. 51. Capaian SDGs Urusan Pangan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Penguatan cadangan pangan	Persen	Data belum Tersedia	70,00	100,00	100	
2	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	nilai	94	90	95,51	92,4	94,4

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

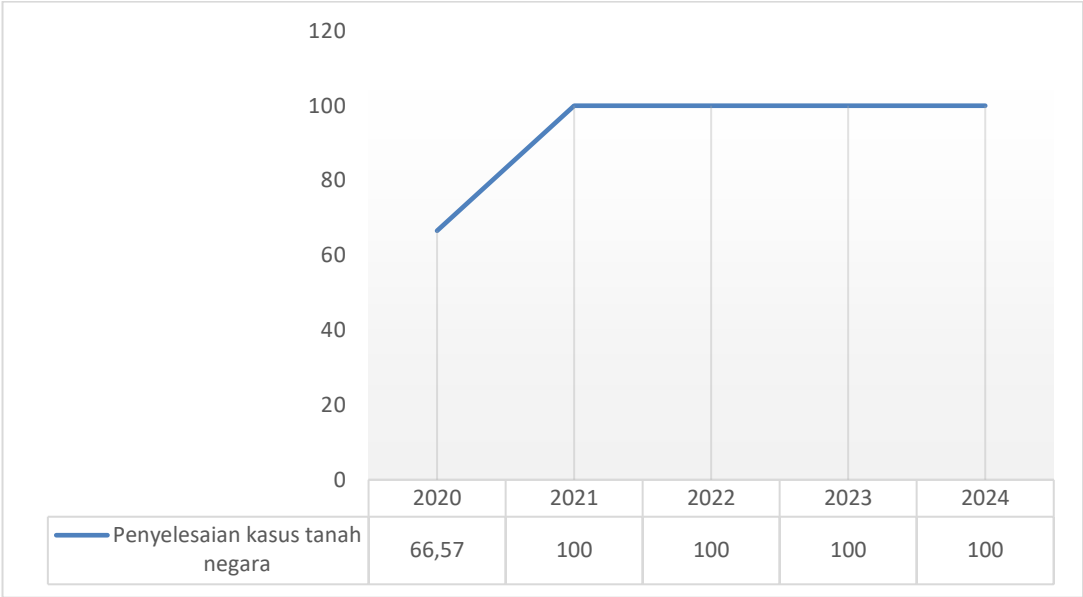
d. **Pertanahan**

Persentase penyelesaian kasus tanah negara ditargetkan sebesar 50% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 200%.

Pada Tahun 2024 Bidang Pertanahan hanya menangani kasus tanah warga karena Bidang Pertanahan tidak menangani kasus tanah negara, dan di tahun 2024 terdapat 1 kasus tanah terkait Batas Tanah Warga Benoyo Perencanaan Pengadaan RTH Benoyo dengan Tanah a./n. DENZIBANG Salatiga dan kasus tersebut sudah dilakukan pengukuran dengan BPN Salatiga dengan disesuaikan alas hak yang dimiliki warga benoyo.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2022, realisasi kinerjanya sudah mencapai 100% dan menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah mencapai target akhir RPJMD. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh terlaksananya koordinasi yang baik dengan OPD terkait yang mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan pertanahan. Selain itu, capaian kinerja ini juga didukung dengan adanya pelaksanaan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan anggaran sebesar Rp 31.645.828,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.660.000,00.

Grafik 2. 58. *Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Salatiga Tahun 2020-2024*



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun

Tabel 2. 52. *Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan*

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Prosentase luas lahan bersertifikat	%	100	20	32.27	32.27	161.35	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

Persentase luas lahan bersertifikat ditargetkan sebesar 20% dan terealisasi sebesar 32.27%. Angka ini diperoleh dari luas PSU yang bersertifikat yaitu seluas 26.044 m2 dibagi luas PSU yang telah diserahkan ke Pemkot yaitu seluas 68.092,78 m2 dikalikan 100%.

e. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan.

Dari hasil pemantauan, inventarisasi data dan perhitungan yang telah dilaksanakan di Kota Salatiga untuk tahun 2024 telah diperoleh nilai IKA, IKU, dan IKL sebagai berikut :

Tabel 2. 53. Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup

No	Indikator	satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1)	Indeks pencemaran air	Nilai	43,54	44,29	42,50	45,00	-	
2)	Indeks Kualitas Air (IKA)	nilai	-	-	-	-	44.29	48,67
3)	Indeks pencemaran udara	Nilai	76,98	79,41	79,82	84,11	-	
4)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	-	-	-	-	84.84	87,80
5)	Indeks tutupan lahan	Nilai	59,62	59,43	47,21	47,28	-	
6)	Indeks Kualitas lahan (IKL)	nilai	-	-	-	-	33.62	34,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2024 sebesar 48.67 meningkat dibanding tahun 2023 yang hanya sebesar 44,29.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2024 sebesar 87,90, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 84,84.

Realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 sebesar 84,84 sudah diatas target jika dibandingkan dengan target akhir RPD Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 80,40. Sehingga status tercapai.

Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. Realisasi Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2024 sebesar 34,67 meningkat dibanding realisasi Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 sebesar 33,62.

Dari hasil indeks IKA, IKU dan IKL, dapat diperoleh capaian nilai IKLH di tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 48,67) + (0,405 \times 87,80) + (0,219 \times 34,67) \\ &= 61,45 \end{aligned}$$

Capaian IKLH tahun 2024 sebesar 61,45 ini naik 3,08 point dari capaian IKLH tahun 2023 yang hanya sebesar 58,37. Hal ini menandakan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Salatiga tahun 2024 semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Upaya Peningkatan Kualitas Udara, Kualitas Air dan Tutupan Lahan serta pengelolaan sampah yang dilakukan Kota Salatiga di tahun 2024 semakin baik, sehingga berpengaruh signifikan terhadap kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 di Kota Salatiga.

Sedangkan untuk data Potensi Energi Baru Terbarukan di Kota Salatiga adalah sebagaimana disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2. 54. Data Potensi Energi Baru Terbarukan Kota Salatiga

No	Infrastruktur EBT	2024	Jumlah Unit	Kapasitas	Keterangan
1.	Biogas	105	823	M3	
2.	PLTA	-	--	kW	
3.	PLTM	-	-	kW	
4.	PLTMH	-	-	kVa	
5.	PLTS SHS	-	-	kWp	
6.	PLTS Ground Mounted	-	-	kWp	
7.	PLTS Rooftop	4	36	kWp	
8.	PJUTS	-	-	-	
9.	Panas Bumi	-	-	-	
10.	PLTSA	-	-	-	PLTSa belum punya, adanya pirolis 2 unit di TP3R Bulu, Tegalrejo, Kec Argomulyo, Salatiga

Berikut ini merupakan data dukung terkait Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Tabel 2. 55. Data Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan

No	Uraian	TAHUN						Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Total Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan (dokumen)	192	200	159	49	34	13	SPPL yang dihitung adalah pengajuan SPPL manual bukan dengan system
2	Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi thd IL dan Izin PPLH (perusahaan)	11	30	65	53	52	73	
3	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan thd IL dan Izin PPLH (persen)	81,81	76,76	41,54	5,66	7.69	17,81	ketaatan yang dimaksud adalah usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten /Kota

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Besaran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2023 fluktuatif kadang mengalami tren kenaikan, kadang mengalami tren penurunan. Emisi GRK Kota Salatiga Pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022, dimana pada tahun 2023 emisi GRK 845,27 Gg CO₂eq, sedangkan pada tahun 2022 emisi GRK 868,99 Gg CO₂eq.

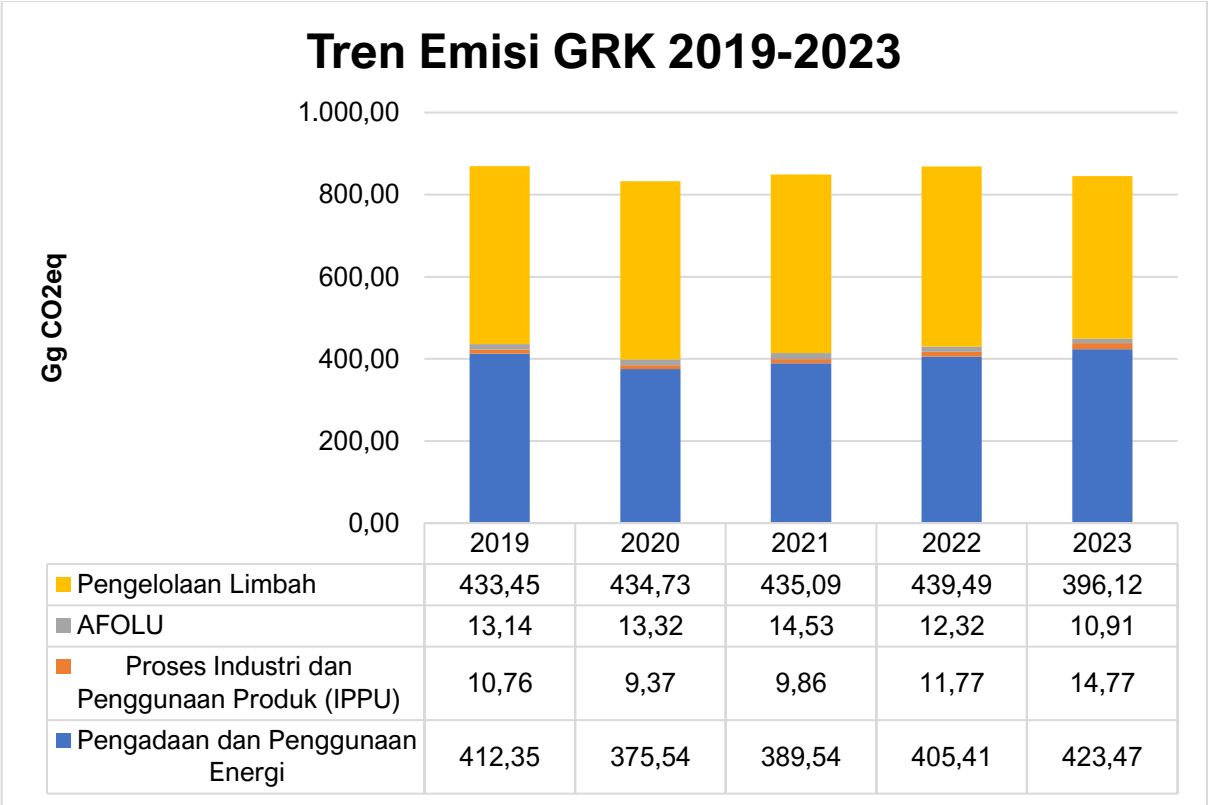
Data data di bawah ini tersaji dalam kurun waktu 5 tahun 2019-2023 berdasarkan laporan GRK yang disusun pada tahun 2024, sedangkan laporan GRK tahun 2025 saat ini sedang proses penyusunan dokumen. Berikut ini merupakan besaran tren emisi GRK pada setiap sektor di Kota Salatiga :

Tabel 2. 56. Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
ENERGI	412,35	375,54	389,54	405,41	423,47
AFOLU	13,14	13,32	14,53	12,32	10,91
IPPU	10,76	9,37	9,86	11,77	14,77
LIMBAH	433,45	434,73	435,09	439,49	396,12
TOTAL	869,70	832,96	849,02	868,99	845,27

Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2024

Grafik 2. 59. Tren Emisi GRK Sektor Limbah



Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2024

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan selama 2019-2023 untuk masing-masing sektor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada tahun 2023 sumber emisi yang berkontribusi terhadap emisi GRK paling tinggi yaitu: (1) Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi; (2) sektor Limbah; (3) sektor IPPU; (4) sektor AFOLU.

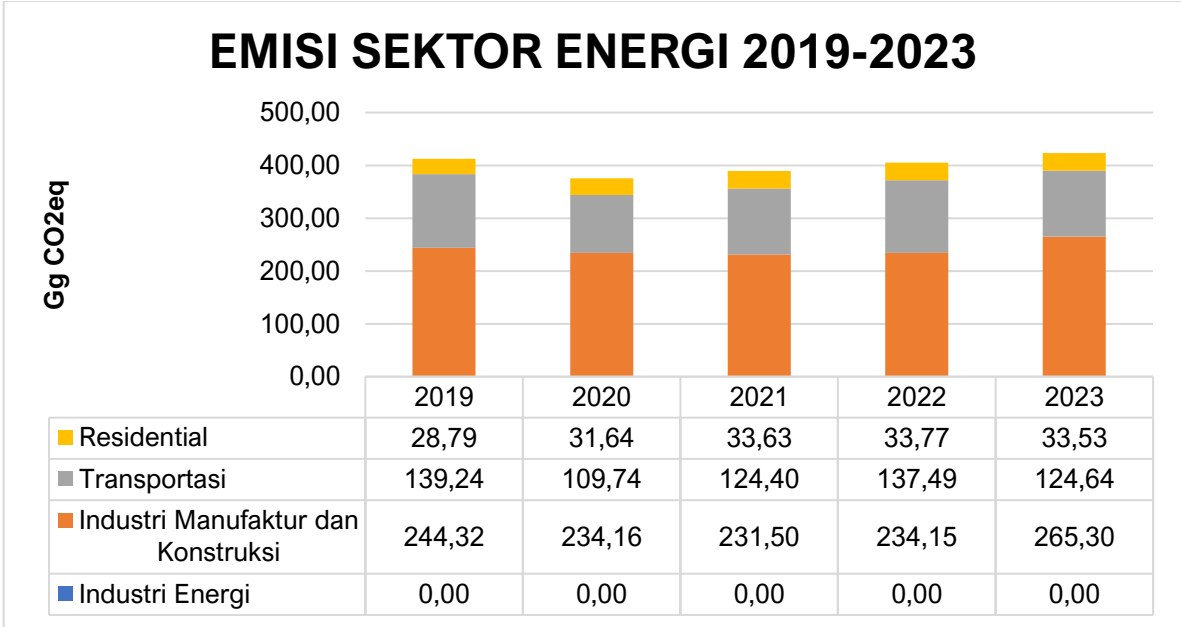
Dalam kurun waktu 2019-2023, emisi tertinggi untuk Pengelolaan Limbah dihasilkan pada tahun 2022 sebesar 439.49 Gg CO₂eq. Sedangkan emisi terendah yang dihasilkan terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar 393.12 Gg CO₂eq.

Pada sektor AFOLU, terjadi kenaikan di tahun 2023 sebesar 14.77 Gg CO₂eq dibanding tahun 2022 yang hanya 11.77 Gg CO₂eq. Sedangkan sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi, terjadi kenaikan emisi yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar 405.41 Gg CO₂eq dan pada tahun 2023 adalah sebesar 423.47 Gg CO₂eq.

Pada sektor IPPU terjadi kenaikan emisi di tahun 2023 menjadi 14.77 Gg CO₂eq, dibanding dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 11.77 Gg CO₂eq.

Tren emisi masing masing sektor digambarkan sebagai berikut :

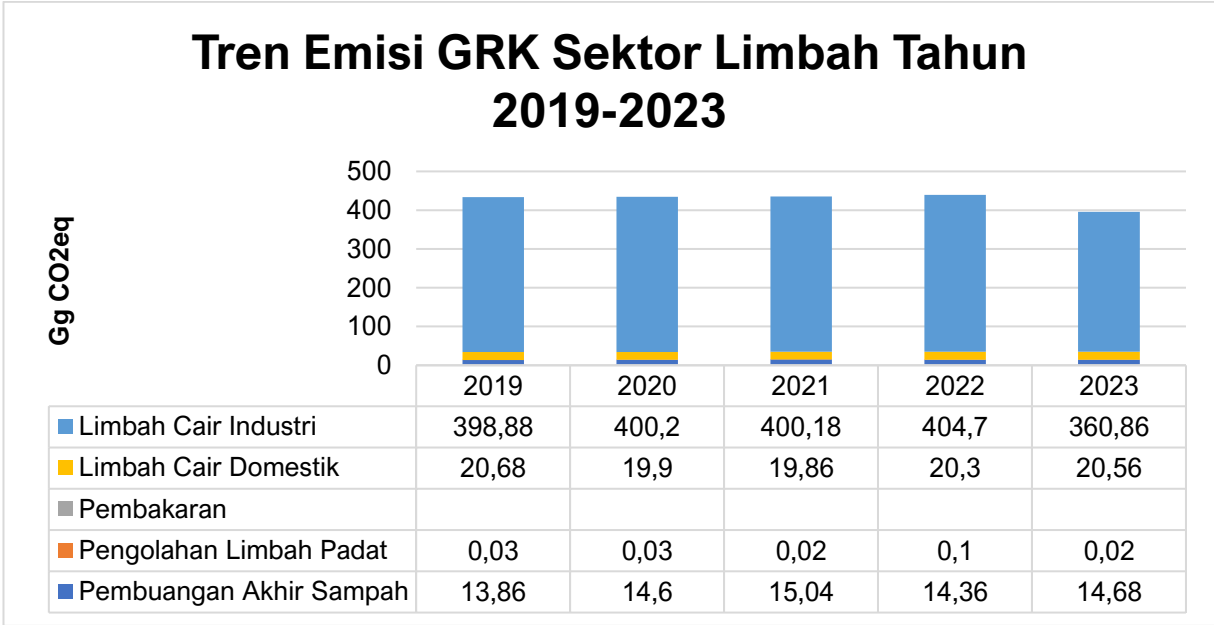
Grafik 2. 60. Tren Emisi GRK Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi 2019-2023



Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2024

Dalam kurun waktu 2019-2023 kontribusi emisi tertinggi GRK sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi terjadi pada tahun 2023 yang berasal dari sub-sektor industri manufaktur yaitu sebesar 265.30 Gg CO₂eq. Pemicu tingginya sub-sektor Manufaktur dan Energi karena adanya peningkatan penggunaan bahan bakar biomassa dengan total penggunaan sebanyak 4.333.460 Ton serta peningkatan penggunaan LPG.

Grafik 2. 61. Tren Emisi GRK Sektor Limbah 2019-2023

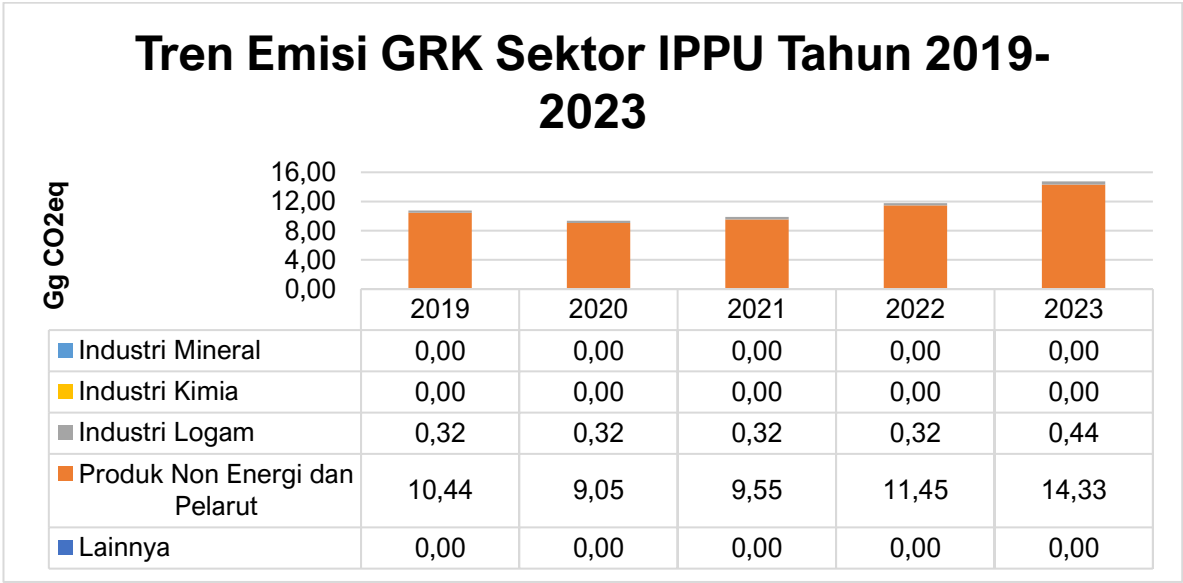


Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga 2024

Emisi GRK Sektor Limbah 2019-2023 yang berkontribusi paling tinggi dan sangat dominan terhadap GRK adalah sub sektor limbah cair Industri. Dimana emisi tahun 2019 adalah tertinggi yaitu sebesar 398.88 Gg CO₂eq, dan emisi terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 360.86 Gg CO₂eq. Menurunnya emisi di sektor Limbah cair industri dikarenakan kegiatan industri yang menghasilkan limbah cair sudah lebih baik dalam mengelola limbahnya, dan

terpantau secara rutin oleh instansi yang menangani. Emisi sub sektor Limbah cair domestik di Kota Salatiga menjadi kontributor utama kedua penyumbang emisi sebesar 20,56 Gg CO₂eq pada tahun 2023, meningkat dibanding tahun 2022 yang hanya 20,3 Gg CO₂eq.

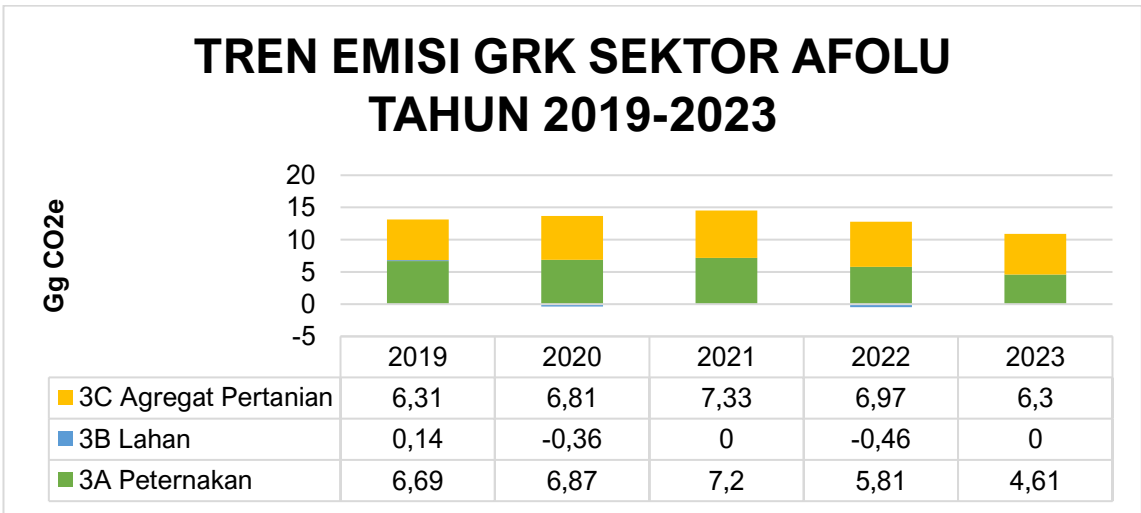
Grafik 2. 62. Tren Emisi GRK Sektor IPPU (Proses dan penggunaan Produk Industri) 2019-2023



Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2024

Dalam periode 2019-2023 untuk emisi GRK sektor IPPU yang menghasilkan emisi GRK paling besar adalah sub sektor Produk non energi dan pelarut dimana untuk tahun 2023 adalah sebesar 14.33 Gg CO₂eq, meningkat dibanding tahun 2022 yang hanya 11.45 Gg CO₂eq. Peningkatan produk non energi dan pelarut dikarenakan meningkatnya jumlah penggunaan pelumas baik disektor transportasi maupun di sektor industri. Sedangkan kontribusi emisi kedua di sektor IPPU adalah emisi dari sub sektor industri logam yang naik signifikan dibanding tahun 2022, dari 0,32 Gg CO₂eq menjadi 0.44 Gg CO₂eq di tahun 2023.

Grafik 2. 63. Tren Emisi GRK Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Land Use) 2019-2023



Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2024

Kontribusi tertinggi pada sektor AFOLU Tahun 2023 adalah sub sektor agregat pertanian sebesar 6.3 Gg CO2eq, kemudian peternakan sebesar 4.61 Gg CO2eq , sementara itu, subsektor lahan pada tahun 2023 tidak menghasilkan emisi/serapan.

Penurunan Emisi GRK Kumulatif menjadi salah satu kebijakan RKPD Kota Salatiga tahun 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja mendukung Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045. Penurunan emisi GRK Kumulatif dihitung dari penurunan emisi gas rumah kaca dari empat sektor/ sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, dan pengelolaan sampah. Berdasarkan data AKSARA, capaian penurunan emisi GRK Kumulatif Kota Salatiga sampai dengan bulan Februari tahun 2025 sebesar 13.289,09 TonCO2eq.

Ketersediaan RTH di Kota Salatiga pada tahun 2024 meningkat sebesar 0,12% menjadi 17,01% atau seluas 935,29 hektar, dibandingkan dari ketersediaan RTH 2023 yang hanya 16,89% atau seluas 928,60 hektar.

Tabel 2. 57. Ketersediaan RTH di Kota Salatiga 2020-2024

Tahun	Luas RTH (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap luas Wilayah (%)
2020	1.528,1	5.498,47	27,70
2021	824,77	5.498,47	15
2022	896,81	5.498,47	16,31
2023	928,60	5.498,57	16,89
2024	935,29	5.498,57	17,01

Sumber Dinas Lingkungan Hidup 2024

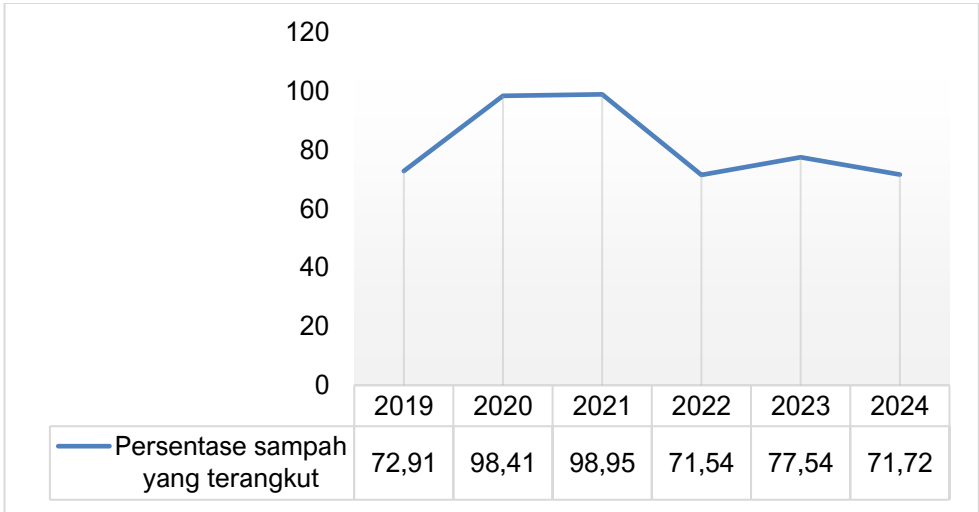
Dalam pengelolaan persampahan di Kota Salatiga volume sampah yang terangkut pada tahun 2024 mencapai 323,46 m³ per hari atau 71,72% dari total volume sampah per hari 450,99 m³. Prosentase sampah yang terangkut tren menurun capaiannya dikarenakan sampah sudah terpilah dan terolah di TPS3R maupun dikelola oleh Bank Sampah yang ada di Kota Salatiga yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas serta menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan.

Tabel 2. 58. Persentase Sampah yang Terangkut Tahun 2019 sd 2024

Tahun	VOLUME (M³/HARI)	TERANGKUT (M³/HARI)	Persentase sampah yang terangkut (%)
2019	342.18	249.51	72,91
2020	349.95	344.42	98,41
2021	387.05	383	98,95
2022	448.9	321.16	71,54
2023	424.96	329.51	77,54
2024	450.99	323.46	71,72

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Grafik 2. 64. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2019-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Tabel 2. 59. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	Jumlah	%
1.	Timbunan Sampah	41.284		41.620		40.969		41.668		42.496,23		41.995,45	
2.	Pengurangan Sampah	7.311	17,71	7.393	17,76	7.274	17,76	7.877	18,9	8.371.3	19.7	9.090,61	21,65
3.	Penanganan Sampah	30.007	72,68	29.441	70,74	29.510	72,03	32.307	77,53	32.952.57	77.54	32.130,95	76,51
4.	Pengelolaan Sampah	37.317	90,39	36.835	88,5	36.784	89,78	40.184	96,44	41.324.47	97.24	41.221,56	98,16
5.	Sampah tidak terkelola	3.966	9,61	4.785	11,5	4.185	10,22	1.484	3,56	1.171.76	2.76	773,79	1,84

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Pada tahun 2024 timbunan sampah menurun sebesar 1,98% persen menjadi 41.995,45 dibandingkan tahun 2023 yaitu 42.496,23. Turunnya

Tabel 2. 60. Capaian SDGs Urusan Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Nilai	43,54	44,29	42,5	47,87	44,29	48,67
2	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase Penanganan Sampah	Persen	72,68	74,77	72	77,53	77,54	76,51
3	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	27,66	27,66	27,7	17,00	17,00	17,01

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	27,66	27,66	27,7	17,00	17,00	17,01
5	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Perusahaan	1	1	Data Belum Tersedia	3,00	3	3
6	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton/Tahun	NA	NA	5.593,014 ton per tahun	5.593,725 ton per tahun	5.593,014 ton per tahun	5,602.884 ton per tahun
7		Persentase penataan /penaatan limbah B3						75	100
8	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada
9	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Indeks Kualitas Lahan	Angka Komposit	60,05	60,88	47,21	47,28	33,62	34,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase target cakupan akta kelahiran (0-18 th) pada tahun 2024 yaitu 98.80% meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 99.70%. Hal ini dikarenakan :

- 1) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta adanya kegiatan sosialisasi melalui media cetak (harian Suara Merdeka dan harian Jawa Pos 1 (satu) kali dalam setahun dan sosialisasi melalui media eletronik melalui siaran Radio Suara Salatiga yang disiarkan 5 (lima) kali sehari dalam 1 (satu) tahun;
- 2) pelayanan Paket Kelahiran 3 in 1 yaitu untuk pengajuan akta kelahiran anak usia sampai dengan 60 hari akan diterbitkan Kartu Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Target kinerja persentase penduduk ber KTP eletronik tahun 2024 sebesar 95,90% dan terealisasi sebesar 97,95% sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,14% meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 99,22%. Faktor yang melatarbelakangi peningkatan ini diantaranya:

- 1) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipl;
- 2) semua lembaga layanan publik mewajibkan adanya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) untuk pengurusan administrasi;
- 3) sosialisasi melalui media cetak (harian Suara Merdeka dan harian Jawa Pos 1 (satu) kali dalam setahun dan sosialisasi melalui media eletronik melalui siaran Radio Suara Salatiga yang disiarkan 5 (lima) kali sehari dalam 1 (satu) tahun;

Pada Tahun 2024 Persentase anak 0-17 th kurang 1 hari yang memiliki Kartu Indentitas Anak (KIA) dengan target 79,50 % dan terealisasi sebesar 85,86% dan capaian realisasinya sebesar 108,00%. Faktor-faktor keberhasilannya :

- 1) kesadaran masyarakat akan pentingnya terhadap kepemilikan dokumen kependudukan;
- 2) perjanjian kerja sama pelayanan terintegrasi dengan beberapa Rumah Sakit dengan memberikan Paket Pelayanan 3 in 1 yaitu bagi penduduk Kota Salatiga yang melahirkan di rumah sakit langsung mendapatkan Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak);
- 3) pelayanan paket kelahiran 2 in 1 untuk pengajuan akta kelahiran anak usia 60 hari sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun akan diterbitkan Akta Kelahiran dan KIA.

Tabel 2. 61. Indikator Kinerja Daerah Administrasi Kependudukan Sipil

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cakupan akta kelahiran	%	98,51	98,67	99,07	99,08	99,44
2	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	97,56	95,53	96,26	99,22	97,95
3	Persentase anak 0-17 th kurang 1 hari yang	%	n/a	n/a	n/a	83.84	85,86

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	memiliki Kartu Indentitas Anak (KIA)						

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Banyaknya pelayanan permohonan Akta-Akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 2. 62. Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga				
Tahun	Kelahiran	Kematian	Perkawinan	Perceraian
2020	3.286	1.531	257	63
2021	3.650	2.503	290	46
2022	3.207	1790	246	40
2023	2.919	1617	216	35
2024	2513	1574	218	41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Tabel 2. 63. Capaian SDGs Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah					98,03	
2		Persentase anak yang memiliki akte kelahiran						99,08
3	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Persen	93,61	94		98,44	
4		Persentase anak yang memiliki akte kelahiran						99,08
5	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

g. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pada tahun 2024 target laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,32 % dan terealisasi sebesar 1,18% sehingga capaian kinerja sebesar 110.61%, sedangkan pada tahun 2023 dengan target kinerja sebesar 1,34% terealisasi sebesar 1,25% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 106,72%.

Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kerjanya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan ini diantaranya :

- 1) tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan pemasangan kontrasepsi baik bagi pemberi pelayanan KB maupun akseptor KB;
- 2) meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi bagi kelompok kegiatan dan penyuluh keluarga berencana dengan penyediaan Genre Kit, BKB Kit,BKL.Kit dan KIE Kit;
- 3) sosialisasi melalui media cetak (harian Suara Merdeka dan harian Jawa Pos 1 (satu) kali dalam setahun dan sosialisasi melalui media eletronik melalui siaran Radio Suara Salatiga yang disiarkan 5 (lima) kali sehari dalam 1 (satu) tahun;
- 4) pemberian penghargaan bagi akseptor Modus Operasi Pria (MOP) dan Mi=odus Operasi Wanita (MOW);
- 5) melakukan monitoring program KKBK oleh PLKB di tingkat Kelurahan;
- 6) meningkatkan kualitas dan kuantitas IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan).

Grafik 2. 65. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

Total Ferility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Target TFR Kota Salatiga tahun 2024 sebesar 2,3% dan realisasi sebesar 1.71% dengan capaian realisasi sebesar 125,65%. Angka tersebut dihitung dengan rumus 5 x

ASFR per 1000 kelahiran. Age Specific Fertility Rates (ASFR) adalah angka kelahiran menurut umur. ASFR Kota Salatiga menurut jumlah kelompok wanita usia subur (usia 15-19 tahun) pada tahun 2024 sebesar 6,33/1000. Maka perhitungan TFR = 5 x 0,342 = 1,71%. Dengan capaian 1,71 bisa dikatakan bahwa untuk PUS rata-rata memiliki 1-2 anak.

Tabel 2. 64. Indikator Kinerja Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,55	1,90	1,84	1,81	1,71

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

Cakupan akseptor KB aktif yaitu perbandingan jumlah akseptor KB aktif (PA) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). Pada tahun 2024 jumlah akseptor KB Aktif sebanyak 17.988 dan jumlah PUS sebanyak 26.571 sehingga cakupan akseptor KB aktif 67,7%. Cakupan ini naik dibanding tahun 2023 yaitu 67,46%, hal ini dikarenakan beberapa pendukung yaitu :

- 1) Meningkatnya besaran Reward bagi peserta KB Pria yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan pengganti tidak bekerja;
- 2) Meningkatnya KIE;
- 3) Meningkatnya peran kader dan penyuluh KB di daerah.

Tabel 2. 65. Capaian SDGs Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	Persen	71,27	71,9	64,65	67,46	67,70
2	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen			26,06	26,28	
3	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	per 1000 penduduk	10,5 /1000	0,92	9,02	8,26	
4	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	1,55	1,9	1,84	2,2	1,71

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KByang tidak terpenuhi)	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	Persen	15,34	14,2	20,54	14,9	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

h. Perhubungan

Tabel 2. 66. Indikator Kinerja Daerah Perhubungan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Ijin Trayek	%	n/a	n/a	n/a	23.31	23,52
2	Rasio Panjang Jalan per Jumlah kendaraan	%	n/a	n/a	n/a	21.41	19,49
3	Persentase Kepemilikan KIR angkutan	%	n/a	n/a	n/a	92.23	75,44

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2024

Pada tahun 2024 target rasio ijin trayek sebesar 24,37% terealisasi sebesar 23,52% dengan tingkat capaian sebesar 96,52% dibandingkan realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,85% dimana realisasi tahun 2023 sebesar 23,31%.

Target pada tahun 2024 untuk target rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 24,79% dan terealisasi 19,49% sehingga capaian realisasi sebesar 78,61% dibandingkan tahun 2023 terjadi penurunan kinerja sebesar 7,74% dimana tahun 2023 realisasi 21,4% dengan target 24,79%. Faktor- faktornya adalah panjang jalan cenderung tetap sedangkan jumlah kendaraan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya pergerakan orang dan barang disamping itu meningkatnya jumlah penduduk memicu peningkatan pergerakan orang dan barang sehingga memicu pertumbuhan alat transportasi terutama angkutan orang.

Persentase Kepemilikan KIR angkutan target sebesar 82% dan realisasi 75,44 % maka capaian realisasi capaiannya 92% dibandingkan tahun 2023 dengan target yang sama sebesar 82% terealisasi sebesar 92,23% dengan capaian kinerja sebesar 12,47 sehingga terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 20,47%

Hal -hal yang melatarbelakangi keberhasilannya ini di antaranya persyaratan Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perhubungan yang memberikan subsidi BBM ke pengemudi angkota dan mewajibkan kendaraan tersebut memiliki persyaratan administrasi yang lengkap dan persyaratan teknis, antara lain melakukan uji KIR secara rutin.

i. **Komunikasi dan Informatika**

Tingkat ketersediaan informasi publik pada tahun 2024 dengan target nilai 97 dan terealisasi 100% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 106,26%. Capaian ini meningkat 0,02% dibandingkan tahun 2023 yaitu 97.73 %. Faktor-faktor di antaranya:

- 1) Dilaksanakannya kegiatan Workshop Forum PPID, monev PPID dan monev website kepada seluruh OPD, sebagai sarana untuk koordinasi, monitoring serta evaluasi dalam penyediaan, pengelolaan serta pelayanan informasi publik.
- 2) Dokumen DIP dari OPD dilakukan digitalisasi, disimpan dan dipublikasi kepada masyarakat melalui website resmi PPID yaitu ppid.salatiga.go.id dan medsos yang lengkap sesuai dengan peraturan yang ada serta terupdate.
- 3) Melaksanakan workshop Forum Admin PPID dengan peserta seluruh admin/tenaga teknis OPD dengan materi penyusunan DIP.

Pada Tahun 2024 target Indeks SPBE sebesar 2,50% terealisasi 3,64% dengan predikat sangat baik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Ssstem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan capaian kinerjanya sebesar 145,6% dengan target RPD sebesar 2.7% serta status tercapai.

Faktor yang mendukung keberhasilan ini diantaranya layanan pengembangan aplikasi , layanan infrastruktur dasar data center, disaster recover sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2. 67. Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keterbukaan informasi publik	skor	93.86	87.00	100	100	100
2	Tingkat pengembangan layanan e-Government dan smart city	Skor	85.00	87.00	na	n/a	n/a
3	Indeks SPBE	Skor	n/a	n/a	n/a	3,26	3,64

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2024

Rumah tangga dengan akses internet merupakan indikator untuk mengukur semakin baik kondisi akses internet di masyarakat menjadi salah satu kebijakan pada RKPD tahun 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja untuk mendukung Indikator utama pembangunan RPJPD tahun 2025-2045 sesuai dengan Indikator utama pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah yang diturunkan ke Kabupaten/Kota.

j. **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Pengembangan sektor usaha mikro dan kecil mendorong peningkatan perekonomian daerah. Pengembangan sektor ini akan berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja dan

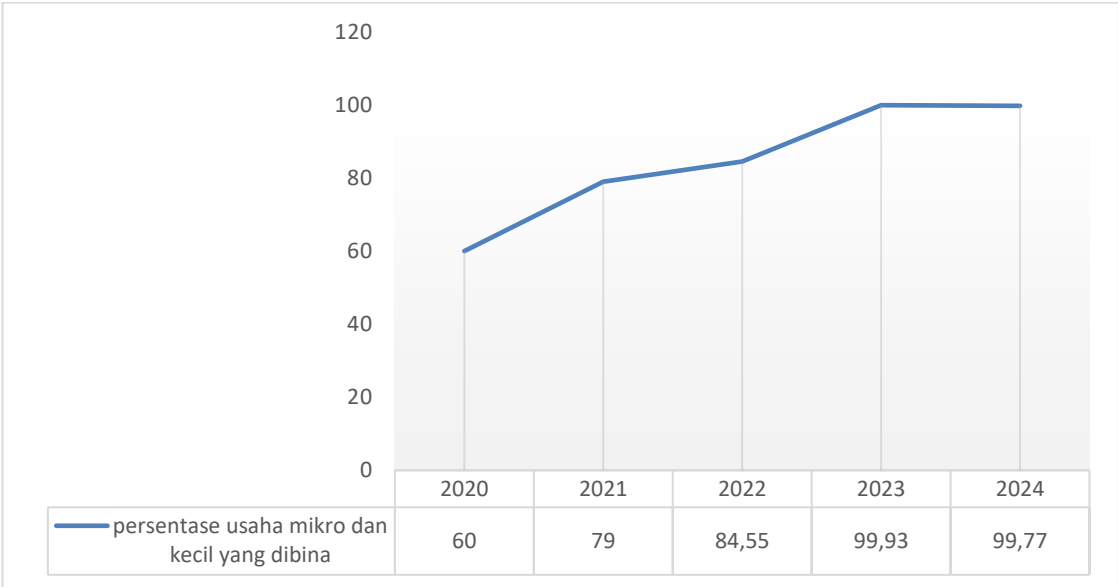
peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan keberdayaan usaha mikro dan kecil, pemerintah melakukan pembinaan baik dengan memberikan bantuan modal ataupun dengan memberikan pelatihan yang menunjang pengembangan usaha mikro dan kecil.

Pada tahun 2024 target usaha mikro dan kecil sebesar 96.00% dan realisasi sebesar 99.97%, capaian realisasi kinerja sebesar 103,92%. Realisasi tahun 2024 dibandingkan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,16%, Namun melihat target tahun 2024 sebesar 96% dan terealisasi((,77% berarti ada kenaikan 3,77%

Hitungan ini berasal dari perbandingan antara jumlah usaha mikro sebanyak banyaknya UMKM yang dibina sebanyak 26,541 unit usaha dibagi dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 26,601 unit usaha

Prosentase usaha mikro dan kecil ini meningkat di dukung oleh keterbukaan informasi publik dan pelayanan yang cepat, responsif dan akuntabel melalui media sosial dan media online serta animo pelaku UKM untuk mengikuti pelatihan yang tinggi. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan, fasilitasi sertifikasi halal dan badan hukum kelompok UMKM, fasilitasi aplikasi pintar umkm, broadcast dan konsultasi baik melalui tatap muka maupun melalui media online.

Grafik 2. 66. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah, Tahun 2024

Persentase koperasi aktif target sebesar 71,11% dan realisasi sebesar 53,07% dan capaian 73,48%. Realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terjadi penurunan angka sebesar 0,05. Pada 2024 target koperasi aktif 71,11% dari total 180 koperasi, atau ada 128 koperasi di Salatiga yang ditargetkan aktif. Realisasinya terdapat 95 koperasi aktif dari 179 keseluruhan koperasi yang ada (53,07%). Ini berarti (18,04%) di bawah target.

Capaian yang belum maksimal juga di sebabkan banyak koperasi yang mengalami permasalahan likuiditas, adanya permasalahan internal pengurus koperasi sendiri, permasalahan kredit macet, koperasi bermasalah hukum, sehingga beberapa koperasi tidak melaksanakan RAT dan ada yang menutup usahanya. Semakin banyak indikator yang harus

dipenuhi untuk memperoleh status koperasi aktif, juga menjadi sebab jumlah koperasi aktif menurun.

k. Penanaman Modal

Target persentase kenaikan nilai investasi berskala nasional (PMA) tahun 2024 adalah 10,25% dan terealisasi sebesar – 17,42%. Capaian indikator kinerja dibandingkan antar target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk persentase kenaikan nilai investasi berskala nasional (PMA) tidak tercapai dan mengalami penurunan kinerja sebesar 170%. Capaian kinerja tersebut tidak bisa dicapai karena sebagian besar pelaku usaha modal asing tidak dapat melakukan penambahan investasi yang terkendala dengan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu kepindahan kepemilikan perusahaan dari PMDN ke PMA atau sebaliknya dapat menyebabkan ketidakberhasilan atas capaian kinerja.

Target persentase kenaikan jumlah berskala nasional (PMA/PMDN) tahun 2024 adalah sebesar 3,50% dan terealisasi sebesar 41,02%. Capaian kinerja tersebut dapat tercapai karena kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya meningkat. Capaian indikator kinerja ini bila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja persentase kenaikan jumlah berskala nasional (PMA/PMDN) tercapai dan mengalami peningkatan kinerja sebesar 1.172.%

Capaian kinerja tahun 2024 sebesar 41,02% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 75,94% mengalami penurunan sebesar 34,92%. Namun capaian kinerja tahun 2024 sebesar 41,02 % melebihi target 3,5%

Penyebab keberhasilan kenaikan nilai investasi PMA di antaranya adalah

- ✓ Kondusifnya iklim investasi di Kota Salatiga
- ✓ Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha
- ✓ Pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif meningkatkan daya tarik investasi.

Pada tahun 2023 target investasi PMDN sebesar 10% dan realisasi 76,62%. Capaian indikator kinerja bila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tersebut belum sudah tercapai. Namun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 9,29% mengalami kenaikan sebesar 67,33%. Capaian kinerja nilai investasi PMDN tahun 2022 sebesar Rp101,195 miliar, sedangkan capaian nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp178,729 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp77,53 miliar.

Penyebab belum tercapainya capaian ini dikarenakan:

- ✓ Realisasi Investasi yang diakui sebagai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan realisasi dari pelaku usaha yang usahanya menengah keatas. Sehingga untuk usaha menengah kebawah belum diakui sebagai realisasi investasi PMDN, padahal sebenarnya dapat menambah nilai realisasi investasi PMDN.
- ✓ Ancaman resesi yang melanda Indonesia juga menjadi pengaruh turunnya nilai investasi PMDN di Kota Salatiga -Selain itu juga kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan laporan kegiatan penanaman modalnya masih rendah.

Tabel 2. 68. Indikator Kinerja Daerah Penanaman Modal di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kenaikan nilai investasi PMA	Milyar Rupiah	333.12	887,89	(931,90)	-	-
2	Persentase kenaikan nilai investasi PMA	%	n/a	n/a	n/a	43,61	-17,42
3	Kenaikan nilai investasi PMDN	Milyar Rupiah	183.33	92.592	8,603	n/a	-
4	Persentase kenaikan nilai investasi PMDN	%	n/a	n/a	n/a	76.62	63,36
5	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA)/PMDN)	%	n/a	n/a	n/a	166.22	3.13

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2024

I. **Kepemudaan dan olah raga**

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2024 ditargetkan sebesar 20,59% tercapai sebesar 22.95%. Angka ini diperoleh dari rata- rata jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Salatiga dibagi jumlah pemuda (umur 16 – 30 tahun) di Kota Salatiga ditambahkan dengan jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dibagi dengan jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Salatiga. Capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan,

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri , organisasi kepemudaan serta organisasi sosial kemasyarakatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 23,27% . Hal ini dikarenakan data diperoleh dari update data Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Dinas Pendidikan sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga hanya menggunakan data yang tersedia.

Peningkatan prestasi olah raga pada tahun 2024 ditargetkan memperoleh medali sebanyak 30 (tiga puluh) medali dan tercapai sebanyak 32 (tiga puluh dua) medali. Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan perolehan medali dalam kejuaraan nasional dan internasional. Jumlah perolehan medali emas sebanyak 10 medali, perak sebanyak 8 medali dan perunggu sebanyak 14 medali. Capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Pembinaan prestasi olah raga tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan karena adanya pembinaan para atlet dan kerjasama

Pembinaan prestasi olah raga pada tahun 2023 memperoleh 39 medali sedangkan untuk tahun 2024 memperoleh 32 medali. Hal ini sangat tergantung pada diselenggarakannya atau tidaknya kejuaraan tingkat nasional maupun internasional.

Cakupan pembinaan olah raga pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%. Angka ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah cabang olah raga

yang dibina dengan jumlah cabang olah raga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olah raga yang ada / terdaftar. Cabang olah raga yang dibina sejumlah 47 dan cabang olah raga yang terdaftar sejumlah 47 sehingga capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Cakupan pembinaan cabang olah raga tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 100 % . Hal ini karena seluruh cabang olah raga yang terdaftar di Salatiga telah dibina oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bekerja sama dengan para stakeholder.

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri tahun 2024 ditargetkan sebesar 2.45% tercapai sebesar 1,96%. Angka ini diperoleh dari rata-rata jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Salatiga dibagi jumlah pemuda (16-30) tahun di Kota Salatiga.

Capaian kinerja

Tabel 2. 69. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan dan Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	n/a	n/a	n/a	2.50	1,96
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	n/a	n/a	n/a	43,61	43,95
Cakupan pembinaan olah raga	%	n/a	n/a	n/a	100	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2024

m. Statistik dan Persandian

Dalam menyediakan layanan data dan statistik, Pemerintah Kota Salatiga memiliki system data yang terintegrasi dalam website yang memberikan informasi daerah kepada masyarakat. Adapun perkembangan persentase ketersediaan data statistik sektoral dan tingkat pengamanan informasi daerah sebagai berikut. Dibandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan di tahun 2024 dengan target sebesar 94% sedangkan tingkat pengamanan informasi daerah juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 2. 70. Indikator Kinerja Daerah Statistik dan Persandian di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	81	84.29	100	94	100
2	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	100	n/a	92.30	70.85	80	100

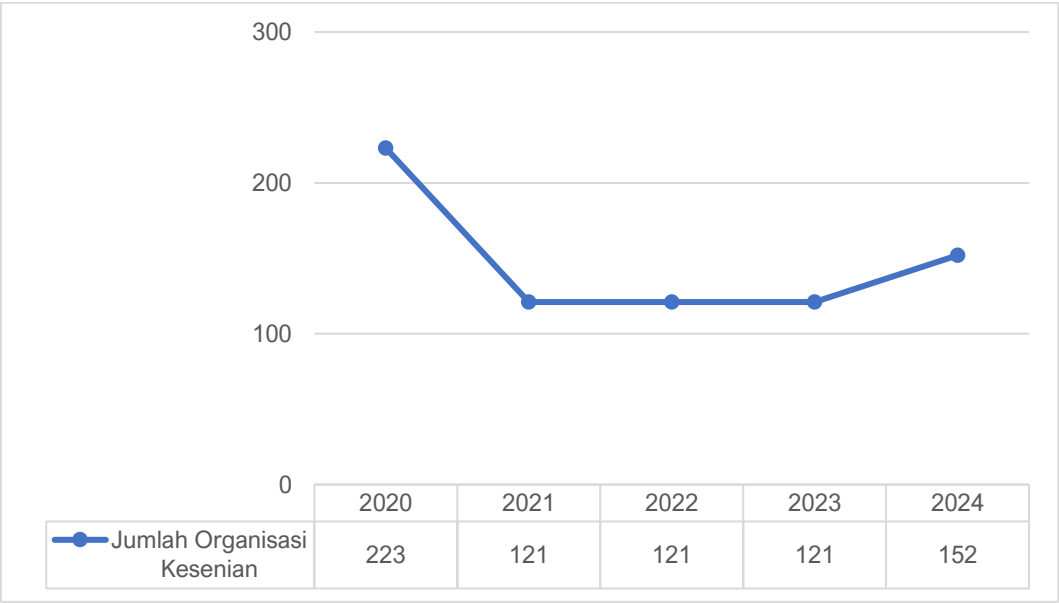
Sumber Dinas Kominfo, 2024

n. Kebudayaan

Kota Salatiga yang disebut sebagai Indonesia mini terdiri dari beragam etnis sehingga menumbuhkan keragaman seni dan budaya yang ada. Jenis organisasi yang ada di antaranya Drumblek, Rebana, Tari, Kuda Lumping/Jaranan, Keroncong, Dangdut, Reog, Band dan lain-

lain. Jumlah Organisasi Kesenian di Kota Salatiga cenderung stagnan pada tiga tahun terakhir dengan jumlah 152 organisasi kesenian. Berikut gambaran perkembangan organisasi kesenian di Kota Salatiga dalam kurun waktu 2020-2024.

Grafik 2. 67. Perkembangan Banyaknya Organisasi Kesenian di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2024

Pada Tahun 2024 persentase obyek pemajuan yang dilindungi , dikembangkan dan dimanfaatkan target sebesar 29.42% , realisasi 57,97% dan capaian kinerja 197,11hasilnya mencapai 41,18 melebihi target pada tahun 2023 sebesar 14,71%. Persentase cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 22,86% pada tahun 2022 meningkat 28,57% pada tahun 2023.

Tabel 2. 71. Indikator Kinerja Daerah Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1)	Persentase obyek pemajuan yang ilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan	%	n/a	n/a	n/a	41,18	57,97
2)	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	11,35	14,18	22,86	28,57	38,57

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2024

Tabel 2. 72. Data Dukung Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
1)	Jumlah Karya Budaya Tercatat	0	0	0	3	1
2)	Jumlah Cagar Budaya (CB)	141	141	140	140	140
3)	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan	n/a	n/a	n/a	68	69

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

Keterangan :
Karya Budaya Tercatat : Warisan Budaya Tak Benda
Cagar Budaya : Cagar Budaya yang Terdata

Obyek Pemajuan Kebudayaan : Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)

o. Perpustakaan dan Kearsipan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2024 target 6,45% terealisasi 21,07% dengan capaian 326,67% dan target RPD 2026 sebesar 7,45% sehingga status tercapai. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja , alat bukti yang sah dengan target di tahun 2024 sebesar 76% terealisasi 88,67% dengan capaian kinerja 116,67% dan target RPD tahun 2026 sebesar 77% maka status tercapai.

Tabel 2. 73. Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	7,45	6,45	21,07	6.34	326,67	Sangat Tinggi	Tercapai
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah)	%	77	76	88,67	88,67	116,67	Sangat tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2024

Jumlah perpustakaan di Kota Salatiga pada tahun 2024 sebanyak 284 perpustakaan dengan jumlah kunjungan rata- rata harian sebanyak pengunjung 59914 orang mengalami peningkatan dari tahun 2023 dikarenakan sudah dibukanya kembali layanan perpustakaan pada Hari Sabtu dan Minggu. Berikut data perkembangan jumlah pengunjung, anggota dan jumlah koleksi Perpustakaan Umum Kota Salatiga dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 74. Jumlah Pengunjung, Anggota dan Koleksi Perpustakaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Tahun	PENGUNJUNG	ANGGOTA	KOLEKSI BUKU	KOLEKSI NON BUKU / AV
2020	75.098	38.276	60.643	686
2021	35.870	38.764	61.016	686
2022	18.007	39.667	64.692	686
2023	23608	41036	66.226	686
2024	59914	41.909	66.642	686

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2024

Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2024 sebanyak 66.642, meningkat sebesar 0,62% dari tahun 2023. Koleksi ini merupakan penambahan dari belanja koleksi yang terdiri dari koleksi buku dan non buku/audio visual.

Indikator kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Perpustakaan mengalami perubahan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026, dengan indikatornya sebagai berikut :

- 1) Indeks Literasi Masyarakat pada tahun 2023 tercapai sebesar 63,14 dari target 52,06, sehingga capaian kinerjanya sebesar 82,45%.
- 2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2023 tercapai sebesar 17,06 dari target 5,95, sehingga capaian kinerjanya sebesar 286,72%.
- 3) Nilai Tingkat kegemaran membaca pada tahun 2023 tercapai sebesar 64,50 dari target 81,83, sehingga capaiannya 78,82%

Indikator kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kearsipan juga mengalami perubahan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026, dengan indikatornya Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, pada tahun 2023 tercapai sebesar 68,70 dari target 75,5, sehingga capaiannya 89.22%.

2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2. 75. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6	6	6.34	6.34	105,67	Sangat Tinggi	Tercapai
2	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5	5	6	6	120	Sangat tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

Peningkatan Produksi perikanan budidaya (ikan konsumsi) yang ditargetkan 6% dan terealisasi 6.34% dengan realisasi capaian kinerja 105,67 % dan target RPD tahun 2026 sebesar 6 persen sehingga status tercapai.

Peningkatan produksi perikanan (benih) ditargetkan 5% dan realisasi 6% dengan capaian kinerja 120% dan target RPD tahun 2026 sebesar 5% sehingga status tercapai.

b. Pariwisata

Tabel 2. 76. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	110.13	108,08	113,00	113,00	104,56	Sangat tinggi	Tercapai
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	79	65	117,74	117,74	181,13	Sangat Tinggi	Tercapai
3	Tingkat hunian akomodasi	%	28	22	51,42	51,42	233,75	Sangat Tinggi	Tercapai
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0.16	9	7,92	7.92	87.95	Tinggi	Akan tercapai
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0.16	0.12	0.16	0.16	133,33	Sangat Tinggi	tercapai

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2024

Pada Tahun 2024 target persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara sebesar 108,08% dan realisasi sebesar 113,00% dengan capaian kinerja sebesar 104,56% dan target RPD tahun 2026 sebesar 110.13% sehingga status tercapai. Penyebab berhasilnya capaian kinerja disebabkan karena :

- a. Adanya koordinasi antar stakeholder pelaku pariwisata, pokdarwis, PHRI, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sektoral terkait dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penggunaan berbagai motode dan media untuk mempromosikan pariwisata baik di dalam dan luar daerah.

Pada tahun 2024 persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara target 65% dan realisasi 17,74% dan capaian kinerja 181,13% dan target RPD Tahun 2026 adalah 79% sehingga status tercapai. Hal- hal yang mendukung keberhasilan antara lain :

- a) Kegiatan promosi melalui pameran promosi dan berbagai media serta event/ gelar pentas seni yang dilaksanakan baik di dalam kota maupun di luar kota Salatiga
- b) Daya Tarik Kota Salatiga sebagai kota MICE dan kota tertoleran.
- c) Peningkatan kelengkapan sarana prasarana dan pelayanan akomodasi hotel/penginapan/home stay di Kota Salatiga
- d) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder pelaku pariwisata, Pokdarwis, PHRI, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sector terkait dalam pengembangan pariwisata.

Pada tahun 2024 tingkat hunian akomodasi target sebesar 22% dan realisasi sebesar 51,42% dan capaian kinerja sebesar 233,75%. Target RPD tahun 2026 sebesar 28% maka status tercapai dan target RPD tahun 2026 sebesar 0.16% maka status tercapai. Penyebab keberhasilan ini disebabkan:

- a) Kegiatan promosi melalui pameran promosi dan berbagai media dan event/pentas gelar seni yang dilaksanakan di dalam / luar kota Salatiga.
- b) Peningkatan kelengkapan sarpras dan pelayanan akomodasi horel/penginapan/home stay di Kota Salatiga
- c) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder pelaku pariwisata, Pokdarwis , PHRI , pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sektor terkait pengembangan pariwisata.

Pada Tahun 2024 target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku adalah 9,00% dan realisasi 7,92% dan capaian kinerja sebesar 87,95% dan target RPD tahun 2026 sebesar 0.16% sehingga status akan tercapai. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 7,85% maka tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,07 %.

Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga meliputi retribusi kolam renang Pemandian Kalitaman, sewa kafetaria, parkir Kalitaman, bilas air panas Kalitaman, retribusi penyewaan tanah insidentil, sewa Taman Wisata Sejarah Salatiga (TWSS) dan sewa Gedung Pemerintah Daerah (GPD).

Pada Tahun 2024 target kontribusi PAD Sektor pariwisata terhadap PAD Kota adalah 0,12%, realisasi 0,16% dan capaian kinerjanya adalah 133,33%.

Tabel 2. 77. Capaian SDGs Urusan Pariwisata

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	5.028	Data Belum Tersedia	467	1.318	1367
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	436.832	89.429	182.743	286.916	253.312

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2024

c. Pertanian

Tabel 2. 78. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1	Produktivitas padi	%	6.15	6.10	6.29	6.29	102,28	Sangat Tinggi	Tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
2	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10	10	10	10	100	Sangat tinggi	tercapai
3	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	6,90	0,03	0,04	0,04	133,33	Sangat Tinggi	Tercapai
4	Produktivitas Sapi Perah	%	0,52	0.66	1,09	1,09	165,15	Sangat tinggi	tercapai
5	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

Produktivitas padi yang ditargetkan 6.15 % terealisasi 6.29% dengan capaian kinerja adalah 102,28% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 6.15% dengan status tercapai. Penyebab keberhasilan peningkatan produktivitas padi adalah :

- ✓ Memberikan pelatihan dan pendampingan teknik budidaya yang tepat serta sesuai rekomendasi kepada petani seperti bimbingan teknik pembuatan Nitrobacter,
- ✓ Melakukan identifikasi potensi kerusakan saluran irigasi serta usulan pembangunan jalan usaha tani;
- ✓ Penyediaan stok pestisida dan agensi hayati yang diberikan ke petani serta melakukan gerakan pengendalian OPT secara masif.

Tabel 2. 79. Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kota Salatiga 2020-2024

No	ProduksiTernak	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Daging (kg)	189.542.780	20.477.043	30.012.661	2.823.078.324	2.799.665.456
2.	Sapi	950.410	1.395.800	1.701.880	1.372.200	130.657.372
3.	Kambing	29.100	7.830	13.440	35.805	4.156.208
4.	Domba	17.350	9.195	9.510	8.580	1.967.336
5.	Babi	47.970	23.530	28.275	35.165	5.128.290
6.	Ayam Ras	18.475.097	19.026.758	28.244.356	2.818.266.154	2.660.230.365
7.	Ayam Buras	15.960	13.930	15.200	2.455.830	2.130.436
8.	Entog	6.893	-	-	904.590	10.849
9.	Telur (kg)	23.799.288	200.793	204.605	16.817.460	4.806.604
10.	Ayam Ras	12.545.560	136.443	128.086	16.817.460	4.806.604
11.	Ayam Buras	4.169.620	51.650	40.994	-	-

No	Produksi Ternak	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Itik	2.516.151	8.600	24.371	-	-
13.	Puyuh	1.269.056	4.100	11.154	-	-
14.	Entog	3.298.901	-	-	-	-
15.	Susu (liter)	4.686.120	4.688.280	3.796.200	246.384.438	303.209.154
15.	Susu	4.686.120	4.688.280	3.796.200	246.384.438	303.209.154

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

Tabel 2. 80. Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Kota Salatiga 2020-2024

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sapi Perah	3.640	3.998	2.520	720	720
2.	Sapi Potong	1.345	1.388	499	257	257
3.	Kuda	-	-	-	27	27
4.	Kambing	3.350	3.171	3.384	612	612
5.	Domba	866	818	897	182	182
6.	Kerbau	66	64	35	15(potong)	15(potong)
7.	Kuda	52	50	51	27	27
8.	Babi	-	-	294	1	1
9.	Ayam Petelur	14.000	20.000	20.600	7	7
10.	Ayam Buras	86.612	89.023	32.601	10	10
11.	Ayam Broiler	656.500	305.000	465.000	4.500	4.500
12.	Itik	3.518	3.604	3.341	153	153
13.	Puyuh	7.200	7.200	12.132	6	6
14.	Kelinci	914	929	1.261	54	54
15.	Entog	4.913	4.772	4.663	545	545
16.	Angsa	-	-	-	75	75
17.	Merpati	-	-	-	285	285
18.	Kambing Perah	-	-	-	14	7

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

Secara umum, kondisi penggunaan lahan pertanian tahun 2020-2024, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 81. Luas Penggunaan Lahan Pertanian Kota Salatiga 2020-2024

No	Tahun	Lahan Sawah (ha)	Bukan Sawah (ha)	Total Lahan Pertanian (ha)	Kenaikan /Penurunan (ha)
1	2020	630,67	1.758,00	2.388,67	(4,63)
2	2021	626,70	1.737,00	2.363,70	(24,97)
3	2022	626,70	1.742,00	2.368,70	5,00
4	2023	514,75	1.843,00	2.357,75	(10,95)
5	2024	514,75	1.843,00	2.357,75	(10,95)

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura dengan target 10% dan realisasi 10% dengan capaian kinerja 100% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 10% dengan status tercapai. Keberhasilan ini karena adanya pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kab/kota.

Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi yang ditargetkan 0.03% dan terealisasi 0.04% dan realisasi capaian 133,3% dan target terhadap RPD s.d tahun 2026 sebesar 0.04% dengan status tercapai. Faktor penyebab keberhasilan diantaranya adanya sekolah lapang pelatihan ternak, monev dari penyuluh terhadap kesehatan ternak serta sosialisasi kesehatan hewan ternak.

Produktivitas sapi perah ditargetkan 0,66% dan realisasi 1,09% dan capaian kinerja 165,15% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 0.52% dengan status tercapai . Faktor penyebab keberhasilan diantaranya adanya peningkatan pembinaan kapasitas ternak, pemberian vaksinasi serta sosialisasi kesehatan hewan ternak.

Penurunan kejadian kematian hewan akibat zoonosis ditargetkan 100 % dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 100% sehingga status tercapai.

d. Perdagangan

Tabel 2. 82. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 204 (%)	Kategori Status	Status
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4.89	4,81	4.48 (2023)	4.48 (2023)	93.14	93.14	Akan Tercapai

Sumber : Dinas Perdagangan, Tahun 2024

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB target 4.81% dan realisasi tahun 2023 sebesar 4.48% (tahun 2024 belum dirilis BPS) dan capaian realisasi 93,14% dan target RPD tahun 2026 sebesar 4.89% dengan status akan tercapai.

Tabel 2. 83. Capaian SDGs Urusan Perdagangan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Persen	5,88	-1,68	3,33	4,70	5,34
2	PDRB perkapita	PDRB perkapita	juta rupiah				78,99	54,89 Juta
3	Laju pertumbuhan	Laju pertumbuhan PDRB	Persen	5,88	-1,68	3,33	5,53	5,34

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
	PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun							

Sumber : Dinas Perdagangan, Tahun 2024

e. Perindustrian

Tabel 2. 84. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0.30	0.37	0.43	0.43	117.44	Sangat tinggi	tercapai
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	31.15	31.05	33.10	33.10	106.60	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan untuk persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah sebesar 0,37% dan terealisasi 0.43% dimana capaian kinerja sebesar 117.44 % dan target RPD tahun 2026 sebesar 0.30% tercapai. Kontribusi sektor indistri terhadap PDRB target yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 31.05% terealisasi 33.10% dimana capaian kinerja sebesar 106.60% dan target RPD tahun 2026 sebesar 31.15%

f. Transmigrasi

Tabel 2. 85. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024(%)	Kategori Status	Status
1	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	4.60	3.70	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Upaya keras

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2024

Pada tahun 2024 target persentase peminat transmigrasi sebesar 0.00 % dengan realisasi kinerja sebesar 0.00 dimana capaian kinerja sebesar 0% dan target RPD tahun 2026 sebesar 4.60 % maka status upaya keras. Kendala dalam capaian kinerja ini karena :

- a) Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan.
- b) Penentuan lokasi transmigrasi dan jumlah kuota oleh Pemerintah Pusat setelah Kegiatan penyuluhan/sosialisasi transmigrasi sehingga pada saat sosialisasi belum diketahui lokasinya dan jumlah kuotanya.
- Solusinya dalam pencapaian kinerja adalah mengoptimalkan kegiatan fasilitasi program transmigrasi.

2.4.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kepegawaian dan Pengawasan.

a. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2. 86. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1	Indeks Inovasi	%	46.36	46.32	51,1	51,1	110,32	Sangat Tinggi	tercapai
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	46.67	33,33	58,33	58,33	175,01	Sangat Tinggi	tercapai
2	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	90	80	98.84	98.84	123,55	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2024

Pada tahun 2024 indeks inovasi target 46.32 dengan realisasi 51,10 dan capaian kinerja 110,32 serta target RPD tahun 2026 sebesar 46.36 dengan status tercapai , dengan ditetapkannya Perwali no 10 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan inovasi daerah menjadi salah satu landasan hukum dalam upaya meningkatkan indeks inovasi melalui tahapan – tahapan yang telah ditentukan sesuai peraturan.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan dengan target 33,33% dan realisasi sebesar 58,33% dan capaian kinerja 175,11% serta target RPD Tahun 2026 sebesar 46.67% maka status tercapai.

Pemanfaatan kelitbangan menjadi salah satu pertimbangan awal dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, serta penyusunan dokumen kelitbangan juga mengacu

pada kebijakan nasional sebagai salah satu landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Terekamnya data usulan masyarakat dalam sistem maka pemantauan usulan menjadi lebih valid dan terukur. Selain itu dengan semakin sadarnya masyarakat dalam mengusulkan kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun yang berkenaan menjadikan tingginya usulan yang terakomodasi dalam dokumen perencanaan.

Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD target sebesar 80% terealisasi 98.84% dan capaian kinerja 123,55% dan target RPD tahun 2026 sebesar 90% maka status tercapai.

Tabel 2. 87. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan						
1	Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	46,67	72,76	51,20	-	-
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	90,62	73,33	80,00	-	-
3	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	85,71	100	100	-	-
4	Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD	%	105,66	100	100	-	-
5	Indeks Inovasi	n/a	n/a	n/a	n/a	44.55	44.55
6	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	n/a	n/a	n/a	n/a	20.00	20.00
7	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	98.84	98.84

Sumber Bappeda Kota Salatiga , Tahun 2024

b. Keuangan

Target Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan capaian kinerja untuk tahun 2024 masih dalam proses penilaian dan diharapkan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena sebelumnya memperoleh keempat kalinya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya di raih di tahun 2020, 2021, 2022 , 2023 dan 2024.

Tabel 2. 88. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Keuangan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
B.	Keuangan						
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Proses penilaian

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan	%	n/a	n/a	n/a	2,57	1,42

Sumber BPKPD Kota Salatiga, Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan target 5.00 dan realisasi 1.42% dengan capaian realisasi 28,4 dan target RPD sebesar 10.00 maka status belum tercapai.Karena pendapatan lain- lain yang syah mengalami penurunan.

Tabel 2. 89. Capaian SDGs Urusan Keuangan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Rupiah			639.492.055.476	502.920.730.466	
2	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber BPKPD Kota Salatiga, Tahun 2024

c. Kepegawaian

Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai 78,84% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,01%.

Tabel 2. 90. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Kepegawaian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
C.	Kepegawaian						
1)	Indeks Profesionalitas ASN	%	45,35	52,04	54,74	74.01	78.84
2)	Nilai Sistem Merit	%	n/a	n/a	n/a	274.5	274.5

Sumber BKPSDM Kota Salatiga, Tahun 2024

Indeks Profesionalitas ASN yang ditargetkan 54.00 terealisasi sebesar 78.84. Target capaian kinerja RPD Tahun 2026 adalah 61.00 dan capaian kinerja sebesar 138.32 dengan status tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah adanya peningkatan jumlah pelatihan pegawai dan perbaikan pelaporan setelah pelatihan.

Nilai sistem merit ditargetkan 275% dan realisasi 274.5% dan capain kinerja 99.82 dan target RPD tahun 2026 sebesar 326% dengan status akan tercapai.

Tabel 2. 91. Capaian SDGs Kepegawaian

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon II,III, dan IV	%	46,65	44,87	44,24	44,24	43,06
2		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	%				23.2	

Sumber BKPSDM Kota Salatiga , Tahun 2024

d. Pengawasan

Indikator QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) target 2.96 terealisasi 2.802 sesuai dengan QA dari Kepala BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/LHP-672/PW11/3.1/2024 Tanggal 24 Desember 2024 sehingga capaian target adalah 94,66% dengan kategori berhasil tetapi kurang memenuhi target nilai yang ditetapkan.

Realisasi capaian QA IEPK Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan nilai 2,802 (level2) menunjukkan belum adanya peningkatan dari capaian nilai dari tahun 2023 dengan nilai 2,80 yang masih berada di level 2.

Tabel 2. 92. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Pengawasan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pengawasan						
1	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	level	3	3	3	3.04	-

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Kapabilitas APIP	level	-	-	-	-	3.00
3	Tingkat Maturitas SPIP	level	3	3	3	3.00	-
4	QA SPIP	nilai	-	-	-	2.80	3.00
5	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	nilai	-	-	-	2.87	2.802
6	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	nilai	-	-	-	-	2.80

Sumber Irda Kota Salatiga , Tahun 2024

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya manusia yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

APIP yang meningkat kapasitas dan kompetensi diukur dengan nilai Kapasitas APIP yang direalisasi dengan Level 3 , menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis suatu program / kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko serta pengendalian intern.

Target capaian level kapabilitas APIP pada level 3 dan terealisasi sesuai target yaitu level 3 sesuai hasil QA BPKP berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-351/PW11/6/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 sehingga capaian target adalah 100% dengan kategori sangat berhasil memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi capaian Level Kapasitas APIP Inspektorat Daerah tahun 2024 pada level 3 adalah sama dengan capaian pada tahun 2023, 2022,2021,2020 dan tahun 2019 dengan hasil level 3 dimana capaian tahun 2018 dan 2017, Inspektorat masih berada di level 2. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil level Kapabilitas APIP yang semula di Level 2 menjadi level 3.

QA Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan target nilai 2,86 terealisasi dengan nilai 2,897 sesuai dengan QA dari Kepala BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/LHP-672/PW11/3.1/2024 Tanggal 24 Desember 2024 sehingga capaian target adalah 01,28% dengan kategori sangat berhasil sesuai target nilai yang ditetapkan.

Realisasi capaian QA MRI Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan nilai 2,897 (level 2) menunjukkan adanya peningkatan capaian pada tahun 2023 dengan nilai 2,87, namun belum ada peningkatan hasil QA MRI yang masih di level 2.

Quality Assurance (QA) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan sisten pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

QA SPIP terintegrasi digunakan sebagai instrumen evaluatif, penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah.

QA SPIP Terintregrasi Inspektorat Daerah Kota Salatiga dapat dicapai dengan nilai 3.00 (Level 3) pada tahun 2024 dengan kategori berhasil tetapi kurang memenuhi target nilai yang ditetapkan.

Realisasi capaian QA SPIP Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan nilai 3,00 (level 3) adalah sama dengan capaian [ada tahun 2023,2022,2021, 2020, 2019 dan 2018 untuk capaian tahun 2017 Inspektorat masih berada di Level 2. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil QA Maturitas SPIP yang semula di level 2 menjadi level 3.

2.4.5 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Lainnya

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

a. Sekretariat DPRD

Tabel 2. 93. Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD	%	100	88	100		-
2	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	-	-	-	97.86	94,54

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2024

Prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2024 dengan target 100 dan realisasi 94.54% dan target RP tahun 2026 sebesar 100 dengan status akan tercapai. Penyebab belum tercapainya ini karena ada 2 pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pengadaan Peralatan dan Mesin karena permintaan jenis kendaraan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2027 dan dilaksanakan oleh OPD teknis terkait

Tabel 2. 94. Capaian SDGs Setwan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	%	30	24	24	24,00	25

Sumber Setwan Kota Salatiga , Tahun 2024

b. Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2024 nilai Kepatuhan standar pelayanan publik target 81.25 realisasi 98.15. Indeks Kematangan Organisasi daerah target 34.67 realisasi 36.16, Indeks PMPRB target 72.00. terealisasi 73,63 , Nilai Sakip target 66% terealisasi 66.54 dan Indeks Kepuasan Masyarakat target 84.75 terealisasi 86,32 .

Tabel 2. 95. Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)	%	83,23	84,61	84,95	-	-
2	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	-	-	-	90.09	98.15
3	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	-	-	-	32.93	36.16
4	Indeks PMPRB	Nilai	-	-	-	74.98	73,63
5	Nilai SAKIP	Angka	-	-	-	65.81	66.54
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	85.55	86.32

Sumber : SETDA, Tahun 2024

Target tahun 2024 untuk nilai kepatuhan standar pelayanan publik dengan target 81.25 dan realisasi 98.15 dan capaian kinerja sebesar 120.8 dan target RPD tahun 2026 sebesar 81.75 maka status tercapai. Indeks kematangan organisasi daerah dengan target 34.67 dan realisasi 36.16 dan capaian kinerja sebesar 104.30 , dan target RPD tahun 2026 sebesar 35.00% maka status tercapai.

Indeks PMPRB dengan target 72 dan realisasi 74.98 (Tahun 2023) dan target pada RPD tahun 2026 sebesar 74 maka status tercapai. Nilai SAKIP dengan target sebesar 66.00 dan realisasi sebesar 66.54 dan realisasi capaian kinerja sebesar 100.82 dan target RPD Tahun 2026 sebesar 74 maka status tercapai.

Indeks Kepuasan masyarakat dengan target sebesar 84.75 dan realisasi 86.32 dan realisasi target sebesar 101.85 dan target RPD tahun 2026 sebesar 85.00 maka status tercapai.

Tabel 2. 96. Capaian SDGs Setda

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Kategori	B	B	B	B	A-

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	(Provinsi/ Kabupaten/Kota)							
2	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Tingkat Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Zona	Zona Hijau	Tidak dilakukan penghitungan	Zona Kuning	Zona Hijau	A-

Sumber Setda Kota Salatiga , Tahun 2024

c. Kecamatan Sidomukti

Tabel 2. 97. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidomukti Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Kecamatan Sidomukti						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	71	84,96	90,14	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	-	59.00	63.41
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	62	79,91	78,78	97.94	97.01
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	84	89,11	89,15	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-			90.28
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-		-	76.24	100

Sumber : Kecamatan Sidomukti, Tahun 2024

Pada tahun 2024 nilai indeks kepuasan masyarakat dengan target 89.25% dan realisasi 90.28% dan realisasi capaian sebesar 101.15% dan target RPD tahun 2026 sebesar 89.00% maka status tercapai.

Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 target 61% adapun realisasinya sebesar 63,41% dan realisasi capaian sebesar 103,95% dan target RPD tahun 2026 sebesar 63% maka status tercapai.

Faktor pendorong keberhasilan dalam pencapaian target ini adalah antara lain mempermudah WP membayar pajak dengan melakukan jemput bola melalui pembayaran PBB-P2 keliling di kelurahan bekerja sama dengan BPD Jateng Cabang Salatiga dan pemberian diskon dalam pembayaran PBB.

Presentase realisasi usulan hasil musrenbang Tahun 2024 target sebesar 79,8% realisasi sebesar 97,04 %. dan realisasi capaian sebesar 121,60% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 79.90 % dan status tercapai.

Presentase PKK aktif dengan target 55% dan terealisasi sebesar 100 % dengan capaian 181,82 %. Pelaksanaan berhasil dengan baik karena ada partisipasi dan swadaya dari masyarakat dari tingkat RT sampai dengan RW terutama pada saat pelaksanaan pra musrenbang di tingkat RT dan RW.

d. Kecamatan Sidorejo

Tabel 2. 98. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidorejo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Kecamatan Sidorejo						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	93	93,51	91.97	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	-	91.84	88.97
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	35	41,23	53.83	53.49	64.96
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	85	85,83	91.25	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	88.73	88.67
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	-	72.46	84,06

Sumber : Kecamatan Sidorejo, Tahun 2024

Pada tahun 2024 nilai indeks kepuasan masyarakat target sebesar 87% dan realisasi sebesar 88.67 % dan realisasi capaian sebesar 101.92 , target RPD tahun 2026 sebesar 89% maka status tercapai. Penyebab keberhasilan karena peran sumber daya manusia yang terus meningkatkan performa dengan memberikan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai seperti tersedianya jalur difabel, ruang laktasi bagi ibu menyusui, dan ruang tunggu ber-AC .

Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 target sebesar 93.53% dan realisasi sebesar 88.97% dan realisasi capaian sebesar 95.12% dan target RPD tahun 2026 sebesar 93.55% maka status akan tercapai.

Faktor penyebab belum tercapainya ini karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. tingkat penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan dan persepsi wajib pajak akan sanksi tidak taat pajak. Dalam usaha meraih keberhasilan pencapaian target, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens untuk mengedukasi wajib pajak yang belum membayar pajak supaya menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak.

Persentase usulan hasil musrenbang Kecamatan dengan target 59% dan realisasi sebesar 64,96% dan realisasi capaian sebesar 110.10% dan target RPD sebesar 60% maka status tercapai.

Persentase PKK aktif dengan target 55% dan realisasi 84.06% dan capaian realisasi sebesar 152.84% dan target RPD tahun 2026 sebesar 65% maka status tercapai.

e. Kecamatan Tingkir

Tabel 2. 99. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Tingkir Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Kecamatan Tingkir						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	89	95,62	91,76	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	-	65.33	68.82
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	42,5	42,5	36,73	65.99	68.18
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	85	85	85,94	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	91.72	91.45
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	-	100	100

Sumber : Kecamatan Tingkir, Tahun 2024

Pada tahun 2024 nilai indeks kepuasan masyarakat target sebesar 92.10% dan realisasi 91.45% dengan realisasi capaian 99.29 % dan target RPD sebesar 92.2% dan status akan tercapai.

Hal- hal yang melatarbelakangi karena belum tercapai di antaranya masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengisi quisioner dan upaya yang akan dilakukan adalah menempatkan petugas untuk proaktif.

Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 dengan target 72% dan realisasi 68.82% dan capaian realisasi 95.58% dan target RPD tahun 2026 sebesar 74% dengan status akan tercapai.

Hal- hal yang melatarbelakangi diantaranya adalah adanya SPPT yang beralamatkan tidak sesuai dengan pemiliknya atau kosong, WP yang mempunyai tanah dan bangunan di wilayah Kecamatan Tingkir tetapi tinggal di luar wilayah Kecamatan Tingkir sehingga tidak semua SPPT PBB dapat tersampaikan ke WP dan mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat membayarkan kewajiban pajaknya tepat waktu.

Upaya yang akan dilakukan untuk mendukung tercapai di tahun mendatang dengan menyebarkan informasi ke media sosial yang ada dan dengan melakukan pelayanan terpadu (pelayanan dengan mendatangi masyarakat lebih dekat ke tingkat RT/RW).

Pada Tahun 2024 persentase realisasi usulan hasil musrenbang dengan target 60.05% dan realisasi 68.18% dan realisasi capaian sebesar 113.54% dan target RPD tahun 2026 sebesar 60.15% dan status tercapai.

Prosentase PKK Aktif target 72.50% dan realisasi 100% , capaian realisasi sebesar 137.93% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 73.5% dan status tercapai.

Faktor -faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian Persentase PKK Aktif adalah

- o seluruh unsur yang masuk dalam PKK di kecamatan Tingkir aktif melakukan kegiatan rutin dalam rangka pemberdayaan masyarakat,
- o Tim Penggerak PKK Kecamatan Tingkir rutin melakukan pembinaan rutin ke PKK yang ada di wilayah Kecamatan Tingkir,
- o Sering diadakan lomba-lomba yang melibatkan PKK sehingga PKK menjadi lebih aktif dalam mendukung kegiatan tersebut.

f. Kecamatan Argomulyo

Tabel 2. 100. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamtan Argomulyo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Kecamatan Argomulyo						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	73	60	59	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	-	60.00	63.55
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	75	77,97	93,32	90.48	90.60
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	79	80,60	81,38	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	84.02	85.26
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	-	100	100

Sumber : Kecamatan Argomulyo, Tahun 2024

Pada tahun 2024 nilai indeks kepuasan masyarakat target sebesar 84% realisasi sebesar 85.26% dan realisasi capaian sebesar 101.50% serta target RPD tahun 2026 sebesar 88% dan status tercapai.

Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 target sebesar 61.00% dan realisasi sebesar 63.55% dan realisasi capaian sebesar 104.18% dan target RPD tahun 2026 sebesar 62% maka status akan tercapai.

Faktor penyebab belum tercapainya ini karena :

- ✓ kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak,
- ✓ kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak
- ✓ tingkat penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan dan persepsi wajib pajak akan sanksi tidak taat pajak. Dalam usaha meraih keberhasilan pencapaian target, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens untuk mengedukasi wajib pajak yang belum membayar pajak supaya menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak.

Persentase usulan hasil musrenbang Kecamatan dengan target 64% dan realisasi sebesar 90,60% dan realisasi capaian sebesar 141,56% dan target RPD sebesar 68% maka status akan tercapai.

Persentase PKK aktif dengan target 55% dan realisasi 100% dan capaian realisasi sebesar 181.81% dan target RPD tahun 2026 sebesar 65% dan status tercapai.

Kegiatan pendukung indikator kinerja terlaksana dikarenakan adanya semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan PKK dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2.5 Evaluasi Hasil Program RKPD Tahun 2024 dan Realisasi terhadap Target Akhir RPD Tahun 2023-2026

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2024 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kota Salatiga Tahun 2024 yang terbagi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

- 1) Sangat Tinggi, untuk presentase capaian target akhir RPD s/d 2024 sebesar $91\% \leq 100\%$);
- 2) Tinggi, untuk presentase capaian target akhir RPD s/d 2024 sebesar 76% sampai dengan 90% ($76\% \leq 90\%$);
- 3) Sedang, untuk presentase capaian target akhir RPD s/d 2024 sebesar capaian $66\% \leq 75\%$
- 4) Rendah untuk presentase capaian target akhir RPD s/d 2024 sebesar capaian $51\% \leq 65\%$
- 5) Sangat Rendah untuk presentase capaian target akhir RPD s/d 2024 sebesar $\leq 50\%$.

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi,
- 2) Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
- 3) Hasil Sedang
- 4) Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup)
- 5) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian diharapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 sejumlah 29 indikator. terdiri dari 28 Indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel rekap data capaian Indikator Kinerja Daerah di bawah ini:

Tabel 2. 101. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPD 2023 - 2026	Tahun 2024			Kategori	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian				
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.70	10.68	11.48	107.49	Sangat Tinggi	11.48	107,29	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.46	15.44	15.46	100.13	Sangat Tinggi	15.46	100.00	Tercapai
3	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	53.26	52.26	63.14	120.13	Sangat Tinggi	63.14	118.55	Tercapai
4	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	52.00	30	33.17	110.58	Sangat Tinggi	33.17	63,79	Tercapai
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	16	30	32	106.67	Sangat Tinggi	32	200.00	Tercapai
6	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	21.00	20.59	22.96	111.51	Sangat Tinggi	22.96	109.33	Tercapai
7	Angka harapan Hidup	Tahun	77.98	77.78	77.93	100.19	Sangat Tinggi	77.93	99,94	Tercapai
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.3	1.32	1.25	105.30	Sangat Tinggi	1.25	96,15	Tercapai
9	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,86-5,44	4,86-5,44	5.54	100.83	Sangat Tinggi	5.54	100.00	Tercapai
10	Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	Juta	59.16	54.80	86,18	154,44	Sangat Tinggi	86,18	145,67	Tercapai
11	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10.55	10.22	6,89	67,42	Sangat Tinggi	6,89	65,31	Akan Tercapai

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPD 2023 - 2026	Tahun 2024			Kategori	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian				
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,46-5,51	6,46-5,51	3,86	129,95	Sangat Tinggi	3,86	129,95	Tercapai
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70.1	69.84	70,72	101,26	Sangat Tinggi	70,72	100,88	Tercapai
14	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	96	95.00	97,01	102,12	Sangat Tinggi	97,01	101,05	Tercapai
15	Pola Pangan Harapan	Skor	97	94.40	92.4	97,88	Sangat Tinggi	92.4	95.26	Tercapai
16	Persentase Peminat Transmigrasi	%	4.6	3.70	20	540,54	Sangat Tinggi	20	434,78	Tercapai
17	Score Capaian KLA	Nilai	630	620	611	98,55	Sangat Tinggi	611	96.98	Tercapai
18	IDG	Nilai	81.5	80.05	79.48	98,73	Sangat Tinggi	79,48	97.29	Tercapai
19	IPG	Nilai	96.5	95.50	95.45	99,95	Sangat Tinggi	95.45	98.90	Tercapai
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70	67.00	64,93	96,91	Sangat Tinggi	64,93	92,76	Tercapai
21	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	100	100.00	Tercapai
22	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	100	100.00	Tercapai
23	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3.9	3.84	5.6	145.83	Sangat Tinggi	3.9	100.00	Tercapai
24	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	%	60	55,00	61,80	112,36	Sangat Tinggi	61,68	102,8	Tercapai

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPD 2023 - 2026	Tahun 2024			Kategori	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian				
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	56.8	56.40	61,80	112.36	Sangat Tinggi	61.68	102.8	Tercapai
26	Rasio Konektivitas Kota	%	0.71	0.71	61,45	108,95	Sangat Tinggi	61.45	108.19	Tercapai
27	Kinerja Lalu Lintas Kota	%	0.5	0.40	0.88	123,94	Tinggi	0.88	123.94	Tercapai
28	Persentase Rumah yang di dukung oleh PSU	%	11	10.37	0.31	122,50	Sangat Tinggi	0.31	138.00	Tercapai
29	Pemukiman yang Tertata	%	6.49	6.34	12.90	124,36	Sangat Tinggi	12.90	117,27	Tercapai

Sumber : Data yang diolah Bappeda, Tahun 2024

2.6 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan tahun 2024 yang menjadi dasar penentuan isu strategis berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah daerah serta berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025, dirumuskan sebagai berikut

1. Optimalisasi penurunan Angka Kematian Balita, Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), Belum optimalnya pencapaian tingkat kesehatan keluarga, Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak;
2. Masih perlunya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/Paket;
3. Belum optimalnya peran pemuda dalam mendukung kegiatan ekonomi dan prestasi olahraga;
4. Masih kurangnya dukungan pengembangan dan pelestarian nilai seni dan budaya daerah dan peningkatan pelestarian kota pusaka;
5. Belum optimalnya peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif;
6. Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak;
7. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat;
8. Belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga;
9. Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;
10. Belum semua masyarakat mendapatkan akses terhadap pemenuhan rumah layak huni;
11. Belum optimalnya pemenuhan dan pemerataan infrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan;
12. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana;
13. Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk;
14. Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal.

Tabel 2. 102. Persandingan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Optimalisasi penurunan Angka Kematian Balita, Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), Belum optimalnya pencapaian tingkat kesehatan keluarga, Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
2	Masih perlunya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/Paket	
3	Belum optimalnya peran pemuda dalam mendukung kegiatan ekonomi dan prestasi olahraga	
4	Masih kurangnya dukungan pengembangan dan pelestarian nilai seni dan budaya daerah dan peningkatan pelestarian kota pusaka	Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah
5	Belum optimalnya peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Kesenjangan gender, belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan serta pelayanan lansia
6	Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak	
7	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing
8	belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga	
9	Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah	
10	Belum semua masyarakat mendapatkan akses terhadap pemenuhan rumah layak huni	Pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
11	Belum optimalnya pemenuhan dan pemerataan insfrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan	
12	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
13	Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk	
14	Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Jawa Tengah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2026.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

PROYEKSI BELANJA & PENDAPATAN TAHUN 2026

PENDAPATAN

Rp. 865.462.393.600

BELANJA

Rp. 997.254.556.471

Pada tahap RKPD belum memasukkan proyeksi pendapatan DAK dan Bankeu serta belanja usulan Musrenbang, Pokir, hibah dan kebutuhan pembiayaan tambahan Perangkat daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI

DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah sebagai dasar pencapaian sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun global. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026.

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Jawa Tengah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2026. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Salatiga. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2026. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2026 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2026.

3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah ketidakpastian global. Pada Q4-2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan *peer countries* seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%). Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2024 mampu tumbuh sebesar 5,03% melambat dibanding capaian 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Capaian ini didorong oleh

peningkatan aktivitas investasi dan manufaktur, serta didukung permintaan domestik yang terjaga dan permintaan global yang mulai pulih.

Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan permintaan luar negeri. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 adalah Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB. Hal ini tecermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan penambahan barang modal untuk aktivitas produksi. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu Jasa Lainnya, Transportasi & Pergudangan, serta Akomodasi & Makan Minum. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi. Sepanjang tahun 2024, wilayah Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku & Papua tumbuh di atas ekonomi nasional. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98% pada kuartal IV 2024, secara keseluruhan mencapai 4,94% sepanjang tahun. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali serta peningkatan mobilitas masyarakat. Peningkatan ini tercermin dari kenaikan okupansi hotel dan jumlah penumpang di berbagai moda transportasi. APBN menjaga daya beli masyarakat antara lain melalui belanja bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi pasokan pangan untuk stabilitas harga. Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru yang mencapai 4,79 juta di tahun 2024 turut mendorong konsumsi masyarakat. Sementara itu, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) pada kuartal IV 2024 tumbuh 6,06% dan 12,48% sepanjang tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, serta berbagai ajang olahraga.

Sepanjang tahun 2024, konsumsi Pemerintah tumbuh 6,61% dengan pertumbuhan 4,17% pada triwulan IV. Kinerja yang sangat baik tersebut tercermin dari peran belanja negara yang semakin optimal sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Realisasi belanja negara tersebut memberikan multiplier effect bagi perekonomian, baik terhadap aktivitas dunia usaha maupun konsumsi masyarakat melalui kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlintas. Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi) tercatat tumbuh 5,03% pada triwulan IV dan 4,61% sepanjang tahun 2024. Kinerja pertumbuhan ini melanjutkan tren penguatan yang konsisten dalam kurun empat tahun terakhir. Stabilitas ekonomi-politik serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter, mampu meningkatkan kepercayaan investor dan realisasi investasi di berbagai sektor, termasuk hilirisasi. Hal ini terlihat dari realisasi PMA dan PMDN yang tumbuh 20,82% dengan total nilai Rp1.714 T, lebih dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan impor barang modal dan bahan baku juga memberi indikasi kinerja manufaktur yang terjaga. Melalui APBN, Pemerintah turut mendorong investasi dengan meningkatkan belanja modal untuk konstruksi serta pembangunan infrastruktur konektivitas, bendungan, kawasan industri dan pariwisata.

Kinerja Ekspor pada kuartal IV tumbuh 7,63% dan secara tahunan tumbuh 6,51%. Pertumbuhan positif ekspor tahun 2024 ditopang oleh meningkatnya ekspor barang dan

ekspor jasa. Peningkatan ekspor barang terutama didorong oleh peningkatan ekspor komoditas besi baja dan bahan bakar mineral yang secara volume tumbuh masing-masing 17,8% dan 7,8%. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor jasa ditopang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang tumbuh 19,05%. Di sisi lain, impor barang masih berkontraksi sebesar 10,36 % pada kuartal IV dan sebesar 7,95 % secara tahunan.

Sektor Manufaktur pada kuartal IV 2024 tumbuh 4,89% dan 4,43% sepanjang tahun 2024. Permintaan domestik maupun global yang tetap kuat menjadi penopang pertumbuhan, terutama pada subsektor industri logam dasar, elektronik, dan makan minum. Sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur, sektor perdagangan tumbuh 5,19% pada kuartal IV atau tumbuh 4,86% sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas produksi.

Sektor-sektor terkait mobilitas masyarakat mencatat pertumbuhan signifikan sepanjang tahun 2024. Sektor transportasi tumbuh 7,92% pada kuartal IV dan mencapai 8,69% sepanjang tahun 2024. Sejalan dengan itu, sektor Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh tinggi, sebesar 6,61% pada kuartal IV dan 8,56% di sepanjang tahun 2024. Momentum ini didorong oleh penyelenggaraan event nasional dan internasional serta perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata yang meningkatkan arus wisatawan baik dari domestik dan mancanegara.

Sektor primer mengalami moderasi, baik dari sektor pertanian maupun sektor pertambangan. Sektor pertanian tumbuh 0,71% pada kuartal IV atau 0,67% untuk keseluruhan tahun 2024. Pelemahan kinerja sektor pertanian ini disebabkan penurunan produksi padi dan kelapa sawit. Namun demikian, kinerja sektor pertanian diperkirakan akan meningkat seiring dengan kebijakan swasembada pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, sektor pertambangan juga tumbuh moderat sebesar 3,95% pada kuartal IV atau 4,90% untuk tahun 2024. Moderasi harga komoditas menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan sektor pertambangan.

Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh positif sepanjang tahun 2024. Wilayah Jawa dan Sumatera tetap menjadi kontributor utama penopang pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,92% dan 4,45%. Aktivitas manufaktur, perdagangan, dan pembangunan konsisten menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara itu, aktivitas hilirisasi menopang pertumbuhan tinggi di wilayah Timur Indonesia. Wilayah Maluku-Papua dan Sulawesi tumbuh tinggi masing-masing sebesar 7,81% dan 6,18%. Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi pendorong aktivitas konstruksi di Kalimantan sehingga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,52%. Aktivitas pariwisata tumbuh kuat mampu menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tumbuh sebesar 5,04%.

Kinerja perekonomian nasional yang resilien tidak terlepas dari kerja keras APBN. APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui keberpihakan program perlindungan sosial (Perlinsos), mendukung perekonomian nasional, serta melaksanakan agenda pembangunan nasional. Guna menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah akan terus memperkuat program Perlinsos, seperti PKH, Kartu Sembako, serta Subsidi dan Kompensasi.

Peningkatan kapasitas UMKM akan dilakukan melalui program KUR dan fasilitas perpajakan. Sementara, upaya untuk menjaga stabilitas harga akan dilakukan melalui stabilisasi harga pangan (SPHP).

Peran APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan melalui berbagai strategi kebijakan Pemerintah. Keberlanjutan upaya penguatan fundamental ekonomi terus dilakukan, antara lain melalui transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan sinergi untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan

Meski demikian, perekonomian Indonesia masih tetap berada pada jalur yang solid dan menunjukkan resiliensi dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2024 sebesar 4,95% (yoy) ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya kinerja ekspor. Tingkat pertumbuhan tersebut juga didukung dengan inflasi yang rendah dan terkendali pada angka 1,84% pada bulan September 2024. Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain, seperti Tiongkok (4,6%), Singapura (4,1%), Korea Selatan (1,5%), dan Amerika Serikat (2,7%).

Gambar 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024



Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan sustainable dalam jangka menengah – panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasi terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi, bergerak dalam rentang 1,5 – 3,5 persen. Pencapaian target inflasi jangka menengah perlu didukung dengan terjangkaunya ekspektasi inflasi, kondisi inflasi inti yang stabil, serta pergerakan inflasi pangan yang terkendali. Berbagai kebijakan strategis

pengendalian inflasi nasional terus diperkuat didukung dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan serta mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim. Seluruh langkah kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah–panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif.

Tabel 3. 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%, (yoy)	5,5 – 6,0
2.	Inflasi	%, (yoy)	1,5 – 3,5
3.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/USD	14.900 – 15.400
4.	Yield SBN 10 Tahun	%	6,3 – 7 3
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP	USD/barel	70 – 90
6.	Lifting Minyak	rbph	593 – 621
7.	Lifting Gas	rbsmph	1.087 – 1.151

Sumber : Kesepakatan pada rapat koordinasi antar K/L dan Bank Indonesia tanggal 6 Mei 2024

Tabel 3. 2. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): Akhir Periode	%	1,5–3,5 a)
2.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	15.000–15.400 b)
3.	Cadangan Devisa	US\$ miliar	149,5–153,7
4.	Cadangan Devisa	dalam bulan impor	6,1–6,1 c)
5.	Neraca Transaksi Berjalan	% PDB	(0,4)–(0,2) d)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,9–20,0
7.	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,60
8.	Nilai Devisa Pariwisata	miliar US\$)	22,10
9.	Penerimaan Perpajakan	% PDB	10,70–11,20
10.	Keseimbangan Primer	% PDB	0,00–0,00 c)
11.	Surplus/Defisit APBN	% PDB	(2,45)–(2,80) d)
12.	Stok Utang Pemerintah	% PDB	39,78–39,98
13.	Pertumbuhan Investasi	%	6,5–7,8
14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	1.868,2–1.905,6
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Triliun Rp	805,5–842,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Keterangan: a) Keputusan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Tingkat Menteri pada Januari 2024 dan sasaran inflasi dalam RPJPN Tahun 2026-2045; b) Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro tanggal 7 Februari 2024; c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; serta d) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 tumbuh 4,95 % (c to c), tumbuh 4,96% (y to y) dan tumbuh 0,48% (q to q). Perekonomian pada 2024 mengalami pelambatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,97 persen.

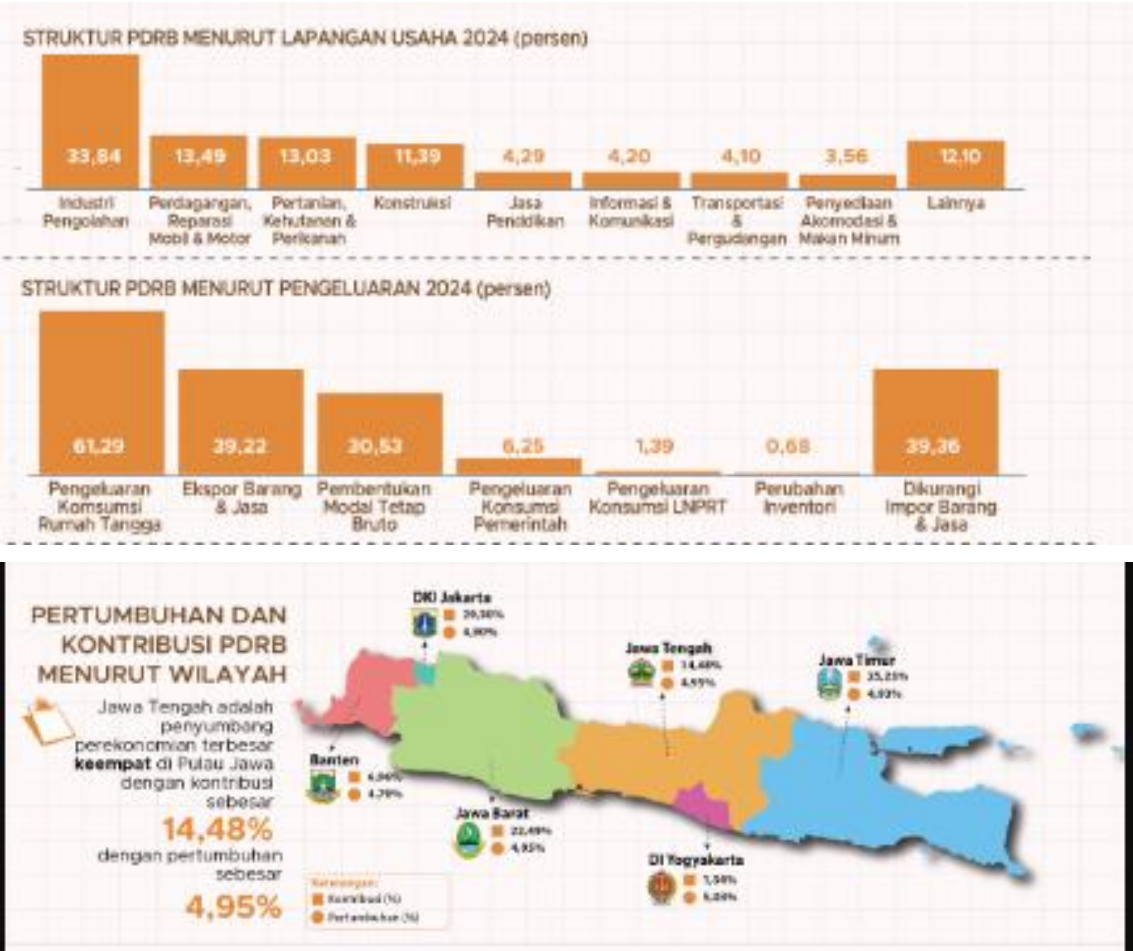
Gambar 3. 2. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 12/02/33/Th.XIX, BPS

Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada tahun 2024. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Jateng, yakni Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, dan Konstruksi menunjukkan pertumbuhan positif. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Infokom, dan Jasa Perusahaan. Lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada 2024 dengan kontribusi sebesar 33,84 persen. Dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,29 persen. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,03 persen. Sementara, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dengan angka 16,38 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jateng pada periode tersebut masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 5,03 persen. Namun, Jateng masih lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah lain di Pulau Jawa yang tercatat 4,92 persen.

Gambar 3. 3. Gambaran Struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 12/02/33/Th.XIX, BPS

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat PDRB per Kapita naik dari Rp. 45,17 juta Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 47,97 juta Tahun 2024. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,78% pada Agustus 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,13% pada Agustus 2023. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77% pada Maret 2023, turun menjadi 9,58% pada September 2024. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,369 (Maret 2023) turun menjadi 0,364 (September 2024).

Sampai bulan Maret 2024 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah cukup baik dengan tingkat inflasi yang terjaga, namun Pemerintah harus tetap waspada. Industri Pengolahan yang kuat dan dukungan UMKM yang terus tumbuh menjadi penopang perekonomian Jawa Tengah. Proyeksi Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada *"Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis"*. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada :

- a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
- e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- f. Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2024 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami pertumbuhan sebesar 5,37%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,11%, sedangkan kontraksi tertinggi pada sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar -27,16%.

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2024, yaitu sebesar 33,14% dengan laju pertumbuhan sebesar 3,77%. Sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 13,59 persen dan 12,64 dengan pertumbuhan sebesar 7,07% dan 4,89%.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga tahun 2026 diprioritaskan pada peningkatan ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan pelayanan sosial serta peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah untuk mendukung ekonomi yang produktif dan inklusif.

Kebijakan ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan infrastruktur distribusi pangan dan pengembangan jaringan distribusi pangan lokal. Sedangkan untuk ketahanan energi diarahkan pada penguatan implementatif terutama pada kelompok peternak dengan pembangunan dan pemeliharaan digester biogas ternak sapi untuk pemenuhan gas rumah tangga. Peningkatan pelayanan sosial masyarakat difokuskan pada pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan, berupa penguatan jaminan pemenuhan standar pelayanan PPKS, meningkatkan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS serta meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS. Selain itu tahun 2026 masih fokus juga pada pengoptimalan program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan yang berpedoman pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pengelolaan potensi perekonomian lokal fokus pada peningkatan iklim investasi, penguatan UMKM, koperasi, dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, Koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi local-kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2024, dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2025, maka perekonomian Kota Salatiga Tahun 2026 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi :

- 1) Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga yang relatif masih tinggi;
- 2) Jumlah stunting di Kota Salatiga yang masih relatif tinggi;

- 3) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan infrastruktur dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan pemerintah pusat yang relatif tetap dibandingkan dengan tahun lalu;
- 5) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat;
- 6) Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Salatiga dapat digambarkan capaian pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target 2026 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.3. berikut.

*Tabel 3. 3. Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2021, 2022, 2023 , 2024 dan Target
Perkembangan Ekonomi Tahun 2026*

No	Indikator	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	TARGET 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,33%	5,53	5,34	5,37	5,56 - 6,20
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,14%	4,73	4,66	4,57	4,49 - 4,24
3	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	7,26%	5,58	4,57	3,86	3,80 – 3,65
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,60	84,35	84,99	85,72	86,19

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah serta mendukung pencapaian target RPD Tahun 2023-2026 dan RPJPD Tahun 2025-2045. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut :

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pemenuhan mandatory spending menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Daerah agar tetap memprioritaskan belanja yang sifatnya merupakan mandatory spending, yaitu :

- a. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah;
- b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah;
- c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;
- d. Belanja Wajib dari pajak Daerah paling rendah 10% - 50% sesuai dengan jenis Pajak Daerah.

Adapun proyeksi pemenuhan mandatory spending untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan pada RKPD tahun 2026 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 4. Komposisi Anggaran untuk pemenuhan Mandatory Spending Tahun 2026

No	Unsur Mandatory	Minimal	Pagu 2026	Keterangan
1	PENDIDIKAN	20 %	23,35 %	
2	KESEHATAN	10 %	30,16 %	
3	INFRASTRUKTUR	40 %	33,69 %	
4	PENGAWASAN	1 %	1,07 %	

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Kebijakan opsen pajak yang berlaku efektif mulai 5 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang besar bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui percepatan dan peningkatan porsi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penerapan skema opsen ini, Kota Salatiga dapat secara langsung menerima 66% dari pokok pajak terutang, mempercepat aliran kas daerah dan memperkuat kapasitas fiskal lokal.
- c) Asumsi Pendapatan Transfer untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan tidak memproyeksikan DAK Fisik dan DBHCHT, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak memproyeksikan Bankeu Provinsi.
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Salatiga, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 antara lain :

- 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi;
- 2) Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- 7) Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak menambah beban Wajib Pajak.
- 8) Pengoptimalkan pelayanan pajak melalui digitalisasi dan inovasi, memperbaiki akurasi data wajib pajak, serta memperkuat basis pajak menjadi salah satu kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk optimalisasi PAD.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Realisasi pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2023 (*audited*) sebesar Rp987.276.298.498,00; realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1.038.143.487.948,00; proyeksi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp1.011.082.764.640,00 serta proyeksi pendapatan tahun 2026 adalah sebesar Rp865.462.393.600,00.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

Secara keseluruhan, pada tahun 2024 realisasi pendapatan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan capaian 101,59%. Akan tetapi secara jenis pendapatan ada 3 pos

pendapatan yang belum mencapai target yaitu Penapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah serta pendapatan transfer dana alokasi khusus. Beberapa hal yang mengakibatkan penurunan dan kenaikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Pajak Daerah melebihi target yang ditetapkan seiring dengan peningkatan aktivitas belanja makan dan minum perangkat daerah yang diwajibkan pembayaran pajak sebesar 10%
- 2) Pendapatan Restribusi daerah melampaui target yang telah ditetapkan karena naiknya pendapatan BLUD Rumah Sakit yang merupakan komponen utama restribusi pelayanan kesehatan
- 3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memenuhi target yang telah ditentukan karena berkurangnya bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD terutama pada Bank Salatiga dan PDAU Aneka Usaha
- 4) Pendapatan lain-lain PAD yang sah belum memenuhi target yang telah ditentukan karena belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berakibat turunnya pendapatan sewa BMD

Komponen Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan transfer antar daerah dari komponen bantuan keuangan provinsi diproyeksikan menurut usulan belanja bantuan keuangan, yang nantinya apabila alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan maka proyeksi pendapatan akan dikoreksi dan disesuaikan dengan ketentuan alokasinya. Demikian halnya untuk komponen dana alokasi khusus, DBHCHT dan dana insentif fiskal akan menyesuaikan dengan ketentuan alokasinya.

Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan pendapatan daerah maka dapat dilihat pada tabel-tabel sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3. 5. Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2022 sampai dengan Penetapan APBD Tahun 2024

Uraian	2022			2023			2024		
	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian%
PENDAPATAN	905.568.012.938	919.729.813.254	101,56%	958.039.688.000	987.276.298.498	103,05%	1.021.905.073.561	1.038.143.487.948	101,59%
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
Pendapatan Pajak Daerah	69.470.000.000	75.518.553.026	108,71%	74.873.052.000	82.607.886.150	110,33%	88.044.163.163	96.219.165.860	109,29%
Pendapatan Retribusi Daerah	10.892.475.000	11.341.448.745	104,12%	14.641.869.000	16.855.722.636	115,12%	164.333.407.363	181.487.098.335	110,44%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.732.135.000	20.463.337.373	98,70%	21.280.674.000	21.280.725.694	100,00%	23.792.126.002	23.424.606.758	98,46%
Lain-lain PAD yang Sah	117.549.428.938	133.652.742.533	113,70%	140.057.024.000	163.791.965.078	116,95%	14.631.914.033	12.832.810.034	87,70%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	218.644.038.938	240.976.081.677	110,21%	250.852.619.000	284.536.299.558	113,43%	290.801.610.561	313.963.680.987	107,96%
PENDAPATAN TRANSFER									
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	556.674.455.000	549.840.528.577	98,77%	577.863.008.000	577.244.229.102	99,89%	613.652.935.000	612.196.645.044	99,76%
Dana Bagi Hasil Pajak	25.094.848.000	32.568.607.426	129,78%	27.313.216.000	29.967.992.050	109,72%	23.904.097.000	27.806.723.000	116,33%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.598.546.000	3.340.952.497	128,57%	1.644.094.000	1.865.352.243	113,46%	1.309.048.000	1.353.371.000	103,39%
Dana Alokasi Umum	418.013.566.000	414.805.071.746	99,23%	439.194.634.000	440.735.874.040	100,35%	463.312.491.000	463.728.380.299	100,09%
Dana Alokasi Khusus	110.967.495.000	99.125.896.908	89,33%	109.711.064.000	104.675.010.769	95,41%	125.127.299.000	119.308.170.745	95,35%
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	556.674.455.000	549.840.528.577	98,77%	577.863.008.000	577.244.229.102	99,89%	613.652.935.000	612.196.645.044	99,76%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA									

Uraian	2022			2023			2024		
	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian%
Dana Otonomi Khusus	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
Dana Penyesuaian	52.018.907.000	52.018.907.000	100,00%	49.138.845.000	49.138.845.000	100,00%	33.500.801.000	33.500.801.000	100,00%
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)	52.018.907.000	52.018.907.000	100,00%	49.138.845.000	49.138.845.000	100,00%	33.500.801.000	33.500.801.000	100,00%
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI									
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	66.045.612.000	64.841.765.000	98,18%	73.000.216.000	69.602.560.141	95,35%	74.002.957.000	68.809.586.628	92,98%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	12.185.000.000	12.032.531.000	98,75%	7.185.000.000	6.494.279.000	90,39%	9.946.770.000	9.659.516.350	97,11%
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	78.230.612.000	76.874.296.000	98,27%	80.185.216.000	76.096.839.141	94,90%	83.949.727.000	78.469.102.978	93,47%
Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	686.923.974.000	678.733.731.577	98,81%	707.187.069.000	702.479.913.243	99,33%	731.103.463.000	724.166.549.022	99,05%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH									
Pendapatan Hibah	-	20.000.000	0,00	-	260.000.000	0,00	-	10.000.000	0,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
Pendapatan Lainnya	-	-	0,00	-	85.697	0,00	-	3.257.939	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	-	20.000.000	0,00	-	260.085.697	0,00	-	13.257.939	0,00
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	905.568.012.938	919.729.813.254	101,56%	958.039.688.000	987.276.298.498	103,05%	1.021.905.073.561	1.038.143.487.948	101,59%

Tabel 3. 6. Target Proyeksi Pendapatan Tahun 2025, Proyeksi Pendapatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Proyeksi		Selisih Anggaran Tahun 2026 dan 2025	
			2026	Perkiraan Maju 2027	Nominal	%
4	PENDAPATAN	1.011.082.764.640	865.462.393.600	897.973.000.000	(145.620.371.040)	-14,40
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	321.906.883.640	298.499.841.600	327.440.000.000	(23.407.042.040)	-7,27
4.1.01	Pajak Daerah	109.263.327.376	87.000.000.000	97.440.000.000	(22.263.327.376)	-20,38
4.1.02	Retribusi Daerah	176.728.889.664	182.862.753.900	192.000.000.000	6.133.864.236	3,47
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	22.744.935.000	21.350.000.000	23.000.000.000	(1.394.935.000)	-6,13
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.169.731.600	7.287.087.700	15.000.000.000	(5.882.643.900)	44,67
4.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	689.175.881.000	566.962.552.000	570.533.000.000	(22.213.329.000)	-17,73
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.555.616.000	521.342.287.000	524.912.735.000	(122.213.329.000)	-18,99
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.620.265.000	45.620.265.000	45.620.265.000	-	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

- 1) Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2026, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) Optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan daerah terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi (ekstensifikasi dan intensifikasi);
- 3) Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna;
- 4) Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
- 5) Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Elektronifikasi Pendapatan dan BMD;
- 6) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- 7) Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
- 8) Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil;
- 9) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah;
- 10) Menegakkan peraturan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Alokasi belanja daerah RKPD Tahun 2026 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan secara proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam

rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2026 diarahkan pada prioritas sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan belanja yang bersifat *mandatory spending* antara lain : pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur pelayanan publik (40%), dana kelurahan (5%), Pengawasan (1%);
- 2) Pemenuhan belanja pegawai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maksimal 30% pada tahun 2027 melalui penguatan kinerja pegawai dengan memaksimalkan potensi SDM pegawai sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Selain itu akan dilakukan peninjauan kembali besaran tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kinerja yang dicapai;
- 3) Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang terdiri dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Pemenuhan program prioritas Wali kota yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029;
- 5) Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;
- 6) Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden, yaitu terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, makan bergizi gratis dan pengendalian inflasi.

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Mendorong peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan Efisien. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi isu strategis pada tahun 2023. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mengacu Standar Pelayanan Minimal, mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan serta memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah. Peningkatan belanja produktif melalui Penguatan TKD, Penguatan Local Taxing Power dan Inovative Financing.

Belanja Daerah 2026 juga memprioritaskan untuk menindaklanjuti INPRES Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c) Tolok Ukur dan target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur

d) Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

e) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP.

f) Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), Dana Insentif Fiskal dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

g) Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan

Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Peningkatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target-target kinerja dalam perencanaan, realisasi belanja daerah tahun 2023 dan tahun 2024, target belanja daerah tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3. 7. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 dan 2024, anggaran 2025 dan Proyeksi tahun 2026

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Anggaran 2025	Proyeksi Anggaran 2026
1	PENDAPATAN	958.039.688.000	987.241.298.498	103,05%	1.021.905.073.561	1.038.143.487.948	101,59%	1.011.082.764.640	865.462.293.600
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		-	-		-	-
3	Pendapatan Pajak Daerah	74.873.052.000	82.607.886.150	110,33%	88.044.163.163	96.219.165.860	109,29%	109.263.327.376	87.000.000.000
4	Pendapatan Retribusi Daerah	14.641.869.000	16.855.722.636	115,12%	164.333.407.363	181.487.098.335	110,44%	176.728.889.664	182.862.753.900
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.280.674.000	21.280.725.694	100,00%	23.792.126.002	23.424.606.758	98,46%	22.744.935.000	21.350.000.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	140.057.024.000	163.791.965.078	116,95%	14.631.913.033	12.832.810.034	87,70%	13.169.731.600	7.287.087.700
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	250.852.619.000	284.536.299.558	113,43%	290.801.610.561	313.963.680.987	107,96%	321.906.883.640	298.499.841.600
8	PENDAPATAN TRANSFER								
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	577.863.008.000	577.244.229.102	99,89%	613.652.935.000	612.196.645.044	99,76%	634.566.210.000	512.352.881.000
10	Dana Bagi Hasil Pajak	27.313.216.000	29.967.992.050	109,72%	23.904.097.000	27.806.723.000	116,33%	957.787.000	28.795.997.000
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.644.094.000	1.865.352.243	113,46%	1.309.048.000	1.353.371.000	103,39%	1.309.048.000	957.787.000
12	Dana Alokasi Umum	439.194.634.000	440.735.874.040	100,35%	463.312.491.000	463.728.380.299	100,09%	482.599.097.000	482.599.097.000
13	Dana Alokasi Khusus	109.711.064.000	104.675.010.769	95,41%	125.127.299.000	119.308.170.745	95,35%	116.877.956.000	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	577.863.008.000	577.244.229.102	99,89%	613.652.935.000	612.196.645.044	99,76%	634.556.210.000	512.352.881.000
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA								

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Anggaran 2025	Proyeksi Anggaran 2026
16	Dana Otonomi Khusus	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
17	Dana Penyesuaian	49.138.845.000	49.138.845.000	100,00%	33.500.801.000	33.500.801.000	100,00%	8.989.406.000	8.989.406.000
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)	49.138.845.000	49.138.845.000	100,00%	33.500.801.000	33.500.801.000	100,00%	8.989.406.000	8.989.406.000
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI								
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.000.216.000	69.602.560.141	95,35%	74.002.957.000	68.809.586.628	92,98%	45.620.265.000	45.620.265.000
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.185.000.000	6.494.279.000	90,39%	9 946 770 000	9.659.516.350	97,11%	-	-
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	80.185.216.000	76.096.839.141	94,90%	83.949.727.000	78.469.102.978	93,47%	45.620.265.000	45.620.265.000
23	Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	707.187.069.000	702.479.913.243	99,33%	731.103.463.000	724.166.549.022	99,05%	689.175.881.000	566.962.552.000
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH								
25	Pendapatan Hibah	-	260.000.000	0,00	-	10.000.000	0,00	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	85.697	0,00	-	3.257.939	0,00	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	-	225.085.697	0,00	-	13.257.939	0,00	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	958.039.688.000	987.241.298.498	103,05%	1.021.905.073.561	1.038.143.487.948	101,59%	1.011.082.764.640	865.462.393.600
30	BELANJA								
31	BELANJA OPERASI								

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Anggaran 2025	Proyeksi Anggaran 2026
32	Belanja Pegawai	424.730.532.544	400.688.586.142	94,34%	455.186.056.380	426.945.256.800	93,80%	427.366.748.499	412.098.753.912
33	Belanja Barang	523.549.501.841	486.728.958.738	92,97%	514.033.668.415	472.770.420.733	91,97%	477.914.414.746	507.978.414.746
34	Belanja Bunga	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-
35	Belanja Subsidi	96.000.000	60.890.000	63,43%	200.000.000	90.070.000	45,04%	150.000.000	200.000.000
36	Belanja Hibah	34.036.940.990	33.881.276.232	99,54%	35.682.250.336	35.434.836.887	99,31%	24.656.918.216	11.990.000.000
37	Belanja Bantuan Sosial	837.800.000	826.800.000	98,69%	637.350.000	636.900.000	99,93%	1.417.850.000	1.022.250.000
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)	983.250.775.375	922.186.511.112	93,79%	1.005.739.325.131	935.877.484.420	93,05%	931.505.931.461	933.289.623.836
39	BELANJA MODAL								
40	Belanja Tanah	1.124.210.200	1.082.183.240	96,26%	2.389.546.200	2.359.523.920	98,74%	1.604.899.115	232.600.000
41	Belanja Peralatan dan Mesin	36.913.346.014	34.307.626.051	92,94%	44.014.818.851	38.714.376.504	87,96%	37.736.888.834	19.263.041.850
42	Belanja Gedung dan Bangunan	19.269.281.333	17.402.770.950	90,31%	29.484.333.960	28.209.975.585	95,68%	33.183.067.192	25.981.647.185
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.795.587.074	36.831.079.856	92,55%	34.790.233.092	34.066.477.100	97,92%	38.029.190.855	11.945.200.000
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.262.027.100	2.196.462.134	97,10%	2.572.249.401	2.034.937.660	79,11%	1.902.373.400	1.542.443.600
45	Belanja Aset Lainnya	137.884.850	132.849.900	96,35%	67.569.400	57.205.200	84,66%	126.770.300	-
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	99.502.336.571	91.952.972.131	92,41%	113.318.750.904	105.422.495.969	93,05%	112.583.189.696	58.964.932.635
47	BELANJA TAK TERDUGA								
48	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000	607.900.000	60,79%	1.000.000.000	430.453.250	43,05%	3.000.000.000	5.000.000.000
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	1.000.000.000	607.900.000	60,79%	1.000.000.000	430.453.250	43,05%	3.000.000.000	5.000.000.000
50	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)	1.083.753.111.946	1.014.747.383.243	93,64%	1.120.058.076.035	1.041.750.433.639	93,01%	1.047.089.121.157	997.254.556.471

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Anggaran 2025	Proyeksi Anggaran 2026
51	TRANSFER								
52	BELANJA TRANSFER								
53	Belanja Bagi Hasil	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
54	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
55	JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (53 s/d 54)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)	1.083.753.111.946	1.014.747.383.243	93,64%	1.120.058.076.035	1.041.750.433.639	93,01%	1.047.089.121.157	997.254.556.471

Komposisi dan persentase alokasi anggaran yang bersifat *Mandatory Spending*, seperti Pendidikan (20%), Kesehatan (10%), Infrastruktur (40%), Belanja Pegawai termasuk didalamnya P3K disesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk pendanaan kelurahan (baik proporsi belanja daerah maupun alokasi yang bersumber dari DAU *earmark*). Pemenuhan amanat alokasi anggaran kelurahan sebesar 5% dari APBD dikurangi DAK, Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan melalui RKPD, untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kelurahan baik secara pemenuhan sarana dan prasana fisik, kegiatan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Selanjutnya untuk prosentase penggunaan alokasi dana kelurahan diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor : 900.1.3/309/2024 tanggal 11 Desember 2024, mengamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pemberdayaan masyarakat minimal sebesar 40% dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan maksimal 60%. Adapun perkembangan alokasi Dana Kelurahan tahun 2023-2025 serta proyeksi Dana Kelurahan tahun 2026 sebagaimana Tabel 3.8 berikut di bawah ini.

Tabel 3. 8. Alokasi Dana Kelurahan Kota Salatiga Tahun 2023-2025

Perangkat Daerah/Kelurahan		Alokasi Pagu Dana Kelurahan			Proyeksi Dana Kelurahan
Kode	Nama	2023	2024	2025	2026
7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Argomulyo	5.472.912.000	7.282.800.000	7.755.800.000	7.705.000.000
7.01.0.00.0.00.28.0001	Kelurahan Ledok	912.152.000	1.213.800.000	1.333.800.000	1.403.000.000
7.01.0.00.0.00.28.0002	Kelurahan Kumpulrejo	1.126.776.000	1.499.400.000	1.457.300.000	1.564.000.000
7.01.0.00.0.00.28.0003	Kelurahan Tegalrejo	965.808.000	1.285.200.000	1.679.600.000	1.357.000.000
7.01.0.00.0.00.28.0004	Kelurahan Noborejo	858.496.000	1.142.400.000	1.432.600.000	1.334.000.000
7.01.0.00.0.00.28.0005	Kelurahan Cebongan	697.528.000	928.200.000	716.300.000	828.000.000
7.01.0.00.0.00.28.0006	Kelurahan Randuacir	912.152.000	1.213.800.000	1.136.200.000	1.219.000.000
7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Sidomukti	3.782.748.000	5.105.100.000	5.409.300.000	5.520.000.000
7.01.0.00.0.00.29.0001	Kelurahan Mangunsari	1.099.948.000	1.463.700.000	1.827.800.000	1.863.000.000
7.01.0.00.0.00.29.0002	Kelurahan Kecandran	858.496.000	1.213.800.000	1.210.300.000	1.288.000.000
7.01.0.00.0.00.29.0003	Kelurahan Dukuh	1.126.776.000	1.499.400.000	1.654.900.000	1.702.000.000
7.01.0.00.0.00.29.0004	Kelurahan Kalicacing	697.528.000	928.200.000	716.300.000	667.000.000
7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Sidorejo	5.579.702.000	7.425.600.000	6.965.400.000	7.130.000.000
7.01.0.00.0.00.30.0001	Kelurahan Sidorejo Lor	1.099.948.000	1.463.700.000	1.654.900.000	1.702.000.000
7.01.0.00.0.00.30.0002	Kelurahan Salatiga	1.099.948.000	1.463.700.000	1.482.000.000	1.541.000.000
7.01.0.00.0.00.30.0003	Kelurahan Bugel	724.356.000	963.900.000	691.600.000	644.000.000
7.01.0.00.0.00.30.0004	Kelurahan Pulutan	724.356.000	963.900.000	691.600.000	805.000.000
7.01.0.00.0.00.30.0005	Kelurahan Kauman Kidul	724.356.000	963.900.000	691.600.000	644.000.000

Perangkat Daerah/Kelurahan		Alokasi Pagu Dana Kelurahan			Proyeksi Dana Kelurahan
Kode	Nama	2023	2024	2025	2026
7.01.0.00.0.00.30.0006	Kelurahan Blotongan	1.206.738.000	1.606.500.000	1.753.700.000	1.794.000.000
7.01.0.00.0.00.31.00	Kecamatan Tingkir	5.338.772.000	7.175.700.000	7.311.200.000	7.774.000.000
7.01.0.00.0.00.31.0001	Kelurahan Tingkir Tengah	697.528.000	928.200.000	716.300.000	667.000.000
7.01.0.00.0.00.31.0002	Kelurahan Tingkir Lor	643.872.000	928.200.000	889.200.000	989.000.000
7.01.0.00.0.00.31.0003	Kelurahan Kutowinangun Lor	1.019.464.000	1.356.600.000	1.901.900.000	1.932.000.000
7.01.0.00.0.00.31.0004	Kelurahan Kutowinangun Kidul	858.496.000	1.142.400.000	1.210.300.000	1.288.000.000
7.01.0.00.0.00.31.0005	Kelurahan Sidorejo Kidul	831.668.000	1.106.700.000	1.383.200.000	1.610.000.000
7.01.0.00.0.00.31.0006	Kelurahan Gendongan	697.528.000	928.200.000	716.300.000	667.000.000
7.01.0.00.0.00.31.0007	Kelurahan Kalibening	590.216.000	785.400.000,00	494.000.000	621.000.000
TOTAL		20.174.134.000	26.989.200.000	27.441.700.000	28.129.000.000

Sedangkan komposisi dan persentase alokasi pagu indikatif anggaran Perangkat Daerah pada RKPD tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 3.9 ini.

Tabel 3. 9. Alokasi Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	PAGU OPD RKPD 2026	Persentase terhadap total
1	Dinas Pendidikan	182.135.669.000	18,26%
2	Dinas Kesehatan	155.712.822.000	15,61%
	Rumah Sakit Umum Daerah	150.000.000.000	15,04%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.935.775.500	5,61%
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	35.327.795.000	3,54%
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.783.775.000	1,18%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.327.957.000	0,33%
7	Dinas Sosial	9.690.926.000	0,97%
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	10.422.489.000	1,05%
9	Dinas Pangan dan Pertanian	14.282.516.500	1,43%
10	Dinas Lingkungan Hidup	27.204.871.000	2,73%
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.459.186.000	0,65%
12	Dinas Perhubungan	19.452.258.287	1,95%
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.037.727.000	1,01%
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9.731.016.000	0,98%
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.772.933.000	0,48%
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	21.607.297.000	2,17%
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.250.870.000	0,83%
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.879.618.000	0,89%
19	Dinas Perdagangan	15.757.117.000	1,58%
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.328.137.000	0,94%
21	Sekretariat Daerah	35.106.621.100	3,52%
22	Sekretariat DPRD	43.543.548.000	4,37%
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.420.416.000	0,94%
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	31.146.188.000	3,12%
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.982.936.000	0,90%
26	Inspektorat	12.560.247.000	1,26%
27	Kecamatan Argomulyo	19.131.502.000	1,92%
28	Kecamatan Sidomukti	17.346.350.084	1,74%
29	Kecamatan Sidorejo	19.241.777.000	1,93%
30	Kecamatan Tingkir	21.681.600.000	2,17%
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.992.616.000	0,90%
	JUMLAH	997.254.556.471	

3.2.2.1. Belanja Operasi

3.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN, adapun kebijakannya adalah :

- 1) Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- 2) Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2026;
- 3) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- 4) Belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total APBD, jika telah melebihi 30%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2027; dan
- 5) Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3.2.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang

3.2.2.1.4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut

hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

3.2.2.1.5. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu kali periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

3.2.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

3.2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan Penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan penerimaan yang bersumber dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau;
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pengeluaran untuk pembiayaan :

- a. pembayaran cicilan pokok piutang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan dana cadangan;
- d. pemberian pinjaman daerah;
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan defisit masih menggunakan kebijakan pemberian ruang pengalokasian program dan kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat melalui Musrenbang dan Anggota Dewan melalui Pokir yang sudah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2026. Selanjutnya pengalokasian anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam KUA PPAS serta analisis kemampuan fiskal oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Untuk SILPA pada Struktur APBD dibuat sama dengan Defisit Belanja. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan

yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Adapun Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga dilakukan sesuai regulasi dan memperhitungkan secara cermat dan rasional dan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan, memulai memanfaatkan alternatif pembiayaan seperti Pinjaman Daerah, KPBU, Sukuk Daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga diarahkan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Kebijakan penyertaan modal di Kota Salatiga didasarkan pada analisis investasi dan kemampuan keuangan daerah sehingga dana publik yang diinvestasikan tidak memiliki risiko tinggi. Selain itu penyertaan modal perlu sejalan dengan rencana bisnis dan rencana pembangunan pemerintah daerah sehingga sinkron dengan concern pemerintah pusat untuk mendorong peran strategis BUMD dalam transformasi ekonomi sebagai value creator maupun agent development.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel 3.10.

Tabel 3. 10. Realisasi Pembiayaan pada Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025	Tahun 2026
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Proyeksi
	Surplus/Defisit pendapatan dan belanja	(125.713.423.946)	(27.506.084.745)	21,88	(98.153.002.474)	(3.606.945.691)	3,67	(36.006.356.517)	(131.792.162.871)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN								
72	Penggunaan SILPA	127.213.423.946	127.159.087.219	100%	98.153.002.474	98.153.002.474	100	-	0
73	Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
75	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
76	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
77	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
78	Jumlah Penerimaan (72 s/d 77)	127.213.423.946	127.159.087.219	100%	98.153.002.474	98.153.002.474	100	0	0
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN								
81	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
82	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	-	0,00	0,00	-	1.500.000.000
83	Pembayaran Pokok Utang	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
84	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
85	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 84)	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	-	-	0,00	-	1.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETO (78 - 85)	125.713.423.946	125.659.087.219	100,00	98.153.002.474	98.153.002.474	100	0	(1.500.000.000)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	98.153.002.474	0,00	-	94.546.056.783	100	0	(133.292.162.871)

Dengan memperhatikan target pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka struktur APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 digambarkan sebagaimana Tabel 3.11 berikut di bawah ini.

Tabel 3. 11. Proyeksi Struktur APBD Kota Salatiga Tahun 2026 dan 2027

	Uraian	Proyeksi	
		2026	Perkiraan Maju 2027
1	PENDAPATAN	865.462.393.600	897.973.002.000
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-
3	Pajak Daerah	87.000.000.000	97.440.000.000
4	Retribusi Daerah	182.862.753.900	192.000.000.000
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.350.000.000	23.000.000.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.287.087.700	15.000.000.000
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	298.499.841.600	327.440.000.000
8	PENDAPATAN TRANSFER		
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	512.352.881.000	515.923.331.000
10	Dana Bagi Hasil Pajak	28.795.997.000	32.251.510.000
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	957.787.000	1.072.724.000
12	Dana Alokasi Umum	482.599.097.000	482.599.097.000
13	Dana Alokasi Khusus	-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	512.352.881.000	515.923.331.000
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
16	Dana Otonomi Khusus	-	-
17	Dana Penyesuaian	8.989.406.000	8.989.406.000
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)	8.989.406.000	8.989.406.000
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.620.265.000	45.620.265.000
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	45.620.265.000	45.620.265.000
23	Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	566.962.552.000	570.533.002.000
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
25	Pendapatan Hibah	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	865.462.393.600	897.973.002.000
30	BELANJA		
31	BELANJA OPERASI		
32	Belanja Pegawai	412.098.753.912	461.927.489.106

	Uraian	Proyeksi	
		2026	Perkiraan Maju 2027
33	Belanja Barang	507.978.619.924	544.024.302.341
34	Belanja Bunga	-	-
35	Belanja Subsidi	200.000.000	200.000.000
36	Belanja Hibah	11.990.000.000	8.300.782.756
37	Belanja Bantuan Sosial	1.022.250.000	1.124.475.000
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)	933.289.623.836	1.015.577.049.203
39	BELANJA MODAL		
40	Belanja Tanah	232.600.000	255.860.000
41	Belanja Peralatan dan Mesin	19.263.041.850	190.589.169.519
42	Belanja Gedung dan Bangunan	25.981.647.185	30.402.728.073
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.945.200.000	12.057.700.000
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.542.443.600	1.571.518.800
45	Belanja Aset Lainnya	-	-
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	58.964.932.635	234.876.976.392
47	BELANJA TAK TERDUGA		
48	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	5.000.000.000	5.000.000.000
50	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)	997.254.556.471	1.255.454.025.595
51	TRANSFER		
52	BELANJA TRANSFER		
53	Belanja Bagi Hasil	-	-
54	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
55	JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (53 s/d 54)	-	-
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)	997.254.556.471	1.255.454.025.595
57	SURPLUS / DEFISIT	(131.792.162.871)	1.255.454.025.595
58	PEMBIAYAAN		-
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
60	Penggunaan SILPA	-	-
61	Pencairan Dana Cadangan	-	-
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
63	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
64	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah	-	-
65	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
66	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (60 s/d 65)	-	-
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
68	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
69	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000	-

	Uraian	Proyeksi	
		2026	Perkiraan Maju 2027
70	Pembayaran Pokok Utang	-	-
71	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
72	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (67 s/d 70)	1.500.000.000	-
73	PEMBIAYAAN NETO (66 - 72)	(1.500.000.000)	-
74	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (73 + 57)	(133.292.162.871)	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2026 mengacu dan memperhatikan :

1. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
2. RTRW Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
3. Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Tahap ke-1
4. Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya; dan
5. Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Jawa Tengah guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah

Tema RKPD 2026 berdasarkan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah didukung Pemerintahan Berintegritas dan Infrastruktur Berkualitas

Tema RKPD 2026 berdasarkan dokumen RPD 2023-2026

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA MENUJU SALATIGA MAKMUR DAN BERBAGI

Prioritas Pembangunan & Arah Kebijakan berdasarkan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

Peningkatan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia

Program Salatiga CERDAS

Program SEHATI

Program KOMIK

Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah

Program SEKAR

Program JARKOM MABAR

Peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal

Program SI AKAS

Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup

Program SARI

Program BIRULAH

Program STBM

Program SOS

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Salatiga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Salatiga. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengacu dan memperhatikan : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029; (2) Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga yang tertuang pada dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029; (3) RTRW Kota Salatiga Tahun 2023-2043; (4) Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Tahap ke-1 (5) Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya; dan (6) Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Jawa Tengah guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Target tahun pertama dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 diupayakan akan tercapai melalui penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 dengan arah kebijakan pembangunan yang direpresentasikan melalui tema pembangunan ***“Peningkatan Pembangunan SDM dan pengelolaan potensi perekonomian daerah didukung pemerintahan berintegritas dan infrastruktur berkualitas”***. Tema Pembangunan ini ditujukan untuk peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia, peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah, peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal, peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga, dan peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan.

Dalam upaya pencapaian tema pembangunan Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga beserta target kinerja Tahun 2026 berdasarkan hasil capaian tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun		2026
				2024	2025	
Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia		Angka Kemiskinan	Persen	4,57	4,52-4,24	4,34-4,20
		PDRB Perkapita	Juta Rp	89,83	90,49 - 91,10	90,49-136,1
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,67	81,35	82,15
		Penurunan emisi GRK kumulatif	TonCO2eq	13.291,89	24.158,45	48.158,45
		Indeks Daya saing Daerah		4,16	4,5	4,84
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	85,72	85,87	86,43
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,86	3.84-3.54	3.84-3.54
	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,37	5,56-6,56	5,56 – 6,56
		Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKP)	Nilai	91,35	94,34	94,4
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,62	4,65	4,68
		Indeks Integritas Nasional	Nilai	78,94	79,49	80,06
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,64	3, 65	3, 70
	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	NA	47,37	48,06
		Indeks kualitas lingkungan Hidup	Nilai	61,45	69,93	69,98
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	51,10	51,50	52

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 telah memperhatikan Visi dan Misi Wali Kota Salatiga periode 2025-2029 dengan persandingan sebagaimana tabel 4.2

Tabel 4. 2. Keselarasan Visi dan Misi Wali Kota Salatiga dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Visi - Misi Wali Kota Salatiga Tahun 2025-2029		Tujuan RPJMD Tahun 2025 - 2029	Sasaran
1	Visi : Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Unggul Misi : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul
2	Visi : Transformasi Sosial dan ekonomi yang inklusif Misi : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM		2 Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
3	Visi : Tata Kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur		3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital
4	Visi : Masyarakat yang Maju dan berkelanjutan Misi : a. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas b. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang bertumpu pada tujuan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan		4 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan pemenuhan target kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dan penuntasan permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu strategis yang relevan, melalui kolaborasi semua Perangkat Daerah dan stakeholder.

RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD tahun 2026 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Salatiga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

- a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
- b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
- c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**.

Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2026 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 3. Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 - 5,0
3.	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0
4.	Nilai Tukar Petani	kumulatif	113 - 115
5.	Nilai Tukar Nelayan	kumulatif	104 - 105
6.	Rasio Gini	Nilai	0,379 – 0,382
7.	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	38,6

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial**

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Hak Asasi Manusia.

Sedangkan Arah Kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut adalah :

- a. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- b. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
- c. Penguatan Lembaga Demokrasi;
- d. Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil

2. **Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**

Untuk mendukung prioritas pembangunan ke – 2 tersebut telah dirumuskan dalam 6 (enam) sasaran pembangunan, sebagai berikut :

- a. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dengan indikator :
 - 1) Asia Power Index (Military Capability)
 - 2) Asia Power Index (Diplomatic Influence)

- 3) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
- 4) *Global Cybersecurity Index*
- 5) Indeks Keamanan Laut Nasional

Arah Kebijakan :

- 1) Pembangunan postur pertahanan
 - 2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
 - 3) Komponen cadangan dan komponen pendukung
 - 4) Intelijen dan keamanan dalam negeri
 - 5) Keamanan siber, sandi dan sinyal
 - 6) Keamanan laut dan hidro-oseanografi
 - 7) Keamanan dan ketertiban masyarakat
 - 8) Profesionalisme pelayanan kepolisian
 - 9) Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi
- b. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*), dengan indikator :
- 1) Indeks Ketahanan Pangan;
 - 2) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Arah Kebijakan :
- 1) Swasembada pangan
- c. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*), dengan indikator :
- 1) Indeks Ketahanan Energi
 - 2) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)
- Arah Kebijakan :
- 1) Swasembada energi
- d. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*), dengan indikator :
- 1) Indeks Ketahanan Air Nasional
 - 2) Kapasitas tampungan air (m³/kapita)
 - 3) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
 - 4) Rumah tangga dengan akses sanitasi Aman (%)
- Arah Kebijakan :
- 1) Swasembada air
- e. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan indikator :
- 1) Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)

- 2) *Indonesia Blue economy Index (IBEI)*
- 3) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)

Arah Kebijakan :

- 1) Ekonomi syariah
- 2) Ekonomi digital
- 3) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru

f. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau, dengan indikator :

- 1) Indeks Ekonomi Hijau
- 2) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
- 3) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)
- 4) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)
- 5) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- 6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 7) Indeks Kualitas Udara
- 8) Indeks Kualitas Air
- 9) Indeks Kualitas Lahan

Arah Kebijakan :

- 1) Ekosistem ekonomi sirkular
- 2) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik
- 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
- 4) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
- 5) Pembangunan rendah karbon
- 6) Pekerjaan hijau/green jobs
- 7) Pengelolaan hutan lestari

Selain intervensi kebijakan tersebut, terdapat juga dukungan program yang menjadi penekanan dan memiliki daya ungkit tinggi. Dalam merespons hal tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 2 didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Sasaran pembangunan untuk prioritas nasional ke - 3 pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dengan indikator:

- 1) Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimodal
- 2) Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik

- b. Meningkatkan Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
 - 1) Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)
 - 2) Aset Perbankan/PDB (%)
 - 3) Aset Dana Pensiun/PDB (%)
 - 4) Aset Asuransi/PDB (%)
 - 5) Kapitalisasi Pasar Modal/ PDB (%)
 - 6) Total Kredit/PDB (%)
 - 7) Inklusi Keuangan (%)

Arah Kebijakan:

 - 1) Pendalaman Sektor Keuangan
 - c. Meningkatnya Lapangan Pekerjaan yang Berkualitas
 - 1) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
 - 2) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)
 - 3) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)
 - 4) Rasio Kewirausahaan (%)

Arah Kebijakan:

 - 1) Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi
 - d. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
 - 1) Rasio PDB Pariwisata (%)
 - 2) Dcvisa Pariwisata (Miliar USD)

Arah Kebijakan:

 - 1) Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
 - e. Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
 - 1) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)

Arah Kebijakan:

 - 1) Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
- 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**
- Terdapat lima sasaran pembangunan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 4 sebagai berikut :
- a. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata, dengan indikator:
 - 1) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
 - 2) Harapan lama sekolah (tahun)
 - 3) Rata-rata nilai PISA
 - 4) Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional
 - 5) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)
 - 6) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)

- 7) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)

Arah Kebijakan :

- 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
 - 2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - 3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
 - 4) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
 - 5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan
 - 6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic* (STEAM)
- b. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua, dengan indikator:
- 1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
 - 2) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)
 - 3) Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
 - 4) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
 - 5) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
 - 6) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
 - 2) Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi
 - 3) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
 - 4) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
 - 5) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
- c. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif, dengan indikator:
- 1) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
 - 2) Indeks Perlindungan Anak
 - 3) Indeks Pembangunan Pemuda
 - 4) Indeks ketimpangan Gender
 - 5) Indeks Pembangunan Gender
 - 6) Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)
 - 7) Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan Ketangguhan keluarga
- 2) Peningkatan kualitas perlindungan anak
- 3) Peningkatan kualitas pemuda
- 4) Peningkatan Kesenjangan Gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan

- 5) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
- d. Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator:
 - 1) Peringkat Indeks Inovasi Global
 - 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
 - 3) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)
 - 4) Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

Arah Kebijakan:

 - 1) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
 - 2) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
 - 3) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional
- e. Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat, dengan indikator:
 - 1) Jumlah perolehan medali emas pada *Olimpic Games*
 - 2) Jumlah perolehan medali emas pada *Paralimpic Games*
 - 3) Peringkat pada *Asian Games*
 - 4) Peringkat pada *Asian Paragames*
 - 5) Peringkat pada *SEA Games*
 - 6) Peringkat pada *ASEAN Paragames*
 - 7) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga (%)

Arah Kebijakan:

 - 1) Peningkatan pembinaan prestasi olahraga
 - 2) Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif

Berdasarkan perspektif siklus hidup manusia, dimensi kesehatan dan pendidikan merupakan kunci tumbuh kembang dan produktivitas manusia. Dalam merespons isu tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 4 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat:

- 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten; dan
- 3) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas berupa Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Terdapat 5 (lima) sasaran pembangunan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan, dengan indikator:

1) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampi, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor
- 2) Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi

- b. Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, dengan indikator:

1) Biaya Logistik (% PDB)

2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)

3) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)

Arah Kebijakan:

- 1) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
- 2) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
- 3) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
- 4) Optimalisasi investasi strategis negara

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 6 adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, dengan indikator:

1) Tingkat kemiskinan (%)

2) Tingkat kemiskinan ekstrem (%)

3) Proporsi penduduk kelas menengah (%)

4) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)

5) Penyandang disabilitas yang berkerja di sektor formal (%)

Arah Kebijakan

- 1) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi
- 2) Perlindungan sosial adaptif dan inklusif
- 3) Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif

- b. Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

1) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman

- c. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

1) Peresentase desa mandiri (%)

Arah Kebijakan:

1) Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

- d. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

1) Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)

2) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)

Arah Kebijakan:

1) Pembangunan Perkotaan berkelanjutan

2) Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dalam memastikan keberhasilan pembangunan dari desa dan dari bawah dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, serta pengentasan kemiskinan, maka dirumuskan Program Hasil Terbaik Cepat yang memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6 yaitu :

(1) Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut dan

(2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 7 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya supermasi hukum yang transparan, adil, tidak memihak serta sistem politik yang fungsional, dengan indikator:

1) Indeks Pembangunan Hukum

2) Indeks Persepsi Korupsi

3) Indeks Materi Hukum

4) Indeks Integritas Nasional

5) Indeks Integritas Partai Politik

Arah Kebijakan:

1) Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilo

2) Reformasi Hukum

3) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidanda Pencucian Uang (TPPU)

- 4) Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum
 - 5) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal*
- b. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, dengan indikator:
- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
 - 2) Indeks Pelayanan Publik
 - 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 4) Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri
- Arah Kebijakan:
- 1) Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
 - 2) Pemerintah Digital
 - 3) Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
 - 4) Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
 - 5) Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia
- c. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, dengan indikator:
- 1) Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika
- Arah Kebijakan:
- 1) Pencegahan, Pemberantasan Penyelenggaraan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- d. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agem pembangunan, dengan indikator:
- 1) *Return on Asset* (ROA) BUMN
- Arah Kebijakan:
- 1) Peningkatan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara
- e. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, dengan indikator:
- 1) Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB
 - 2) Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB
- Arah Kebijakan:
- 1) Optimalisasi Pendapatan Negara
 - 2) Optimalisasi Belanja Negara
 - 3) Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
- f. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan indikator:
- 1) Tingkat Inflasi
- Arah Kebijakan:

1) Pengendalian Inflasi

Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat:

- (1) menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara; dan
- (2) mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23 persen.

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui kegiatan prioritas Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN

8. **Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 8 adalah sebagai berikut :

a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, dengan indikator:

- 1) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
- 2) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
- 3) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Arah Kebijakan:

- 1) Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
- 2) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa

b. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dengan indikator:

- 1) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Pembangunan berketahanan iklim
- 2) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

4.2.2. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 diarahkan pada kebijakan “**Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional**”. Tahun 2026 juga diarahkan untuk tema pembangunan daerah, yaitu “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dengan prioritas daerah meliputi :

- 1) Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis :
 - a. Pelayanan publik yang merata dan inklusif;
 - b. Penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, risiko, dan riset;

- c. penguatan meritokrasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
 - d. penguatan pengembangan kompetensi dan integritas melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
 - e. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal akan menjadi prioritas serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi serta peningkatan kapabilitas APIP;
 - f. pelaksanaan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - g. kelembagaan pangan efektif;
 - h. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
 - i. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
 - j. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
 - k. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
 - l. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
 - m. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; serta
 - n. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.
- 2) Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan;
- a. Peningkatan produktivitas ekonomi desa berbasis potensi unggulan dengan pemenuhan sarpras pendukung ekonomi;
 - b. Peningkatan kualitas BUMDes melalui pembentukan BUMDes, peningkatan kapasitas SDM pengelola, dan pembentukan BUMDes sebagai lembaga hukum;
 - c. Pengembangan produksi desa berbasis ekonomi kreatif;
 - d. Peningkatan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- 3) Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter;
- a. Penguatan vokasional melalui identifikasi pemetaan sekolah kejuruan dengan potensi lokal,
 - b. pengembangan dan penguatan kerjasama DUDI dan rintisan sekolah unggulan;
 - c. Pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap, untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pemenuhan biaya personil pendidikan;
 - d. Peningkatan pemantauan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. Penguatan kapasitas Guru dalam pendidikan karakter dan pencegahan serta penanganan bullying;
 - f. Penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta review dan penyusunan kebijakan/regulasi;

- g. Pemerataan akses layanan kesehatan melalui identifikasi perencanaan pengembangan layanan kesehatan lanjutan dan primer;
- h. Pengembangan program rekrutmen dan seleksi untuk SDM kesehatan;
- i. Pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah;
- j. Pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap Kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
- k. Pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan;
- l. Pemetaan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial;
- m. Pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah;
- n. Penyediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat;
- o. Peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- p. Peningkatan kapasitas SDM dan Lembaga Kebudayaan;
- q. Pemetaan kerjasama dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan

Target indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang akan dicapai antara lain meliputi :

- 1) PDRB per kapita sebesar 52,0 juta rupiah – 55,0 juta rupiah;
- 2) Angka Kemiskinan sebesar 8,70 – 8,53%;
- 3) Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00 – 6,0%;
- 4) Inflasi pada angka 1,5 – 3,5 %
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71 – 4,27 %;
- 6) Indeks Modal Manusia sebesar 0,61;
- 7) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,00;
- 8) Indeks Integritas Nasional sebesar 81,78;
- 9) Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 86,46 – 89,50;
- 10) Otonomi Fiskal Daerah sebesar 65,72%
- 11) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73;

Keterangan :

*Perubahan metode perhitungan IKLH berdasarkan Surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.2/B/02/2024 yang berlaku mulai tahun 2025

4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Tema Pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah “**Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas**”. Kebijakan difokuskan dalam rangka mencapai peningkatan pembangunan SDM dan pengelolaan potensi perekonomian daerah difokuskan

pada pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan UMKM. Selain itu, kebijakan ini mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan sektor unggulan daerah seperti pariwisata dan industri kreatif, didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar dan distribusi. Pemerintahan yang berintegritas akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2026 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada :

1. Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia;
2. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah;
3. Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal;
4. Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup;
5. Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektifitas layanan perkotaan.

Sasaran pembangunan pada tahun 2026 berdasarkan Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan antara 4,34% - 4,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka antara 3,84% - 3,54%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,56% - 6,56%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 86,43
5. Indeks Ketahanan Pangan sebesar 94,40
6. *Prevalence of Undernourishment* (PoU) sebesar 3,90

Prioritas pembangunan Kota salatiga yang disusun berdasarkan Rancangan RPJMD 2025-2029 juga memperhatikan :

1. Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.
Persandingan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah serta prioritas pembangunan Kota Salatiga sebagaimana dalam tabel 4.3;
2. Upaya penanganan permasalahan dan isu strategis
Sinkronisasi permasalahan, isu strategis dan program prioritas sebagaimana tersaji dalam tabel 4.4;
3. Upaya mendukung kebijakan Nasional antara lain Penerapan SPM, Pembangunan Berkelanjutan, dan Stunting yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Tabel 4. 4. Keselarasan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2026

No	Nasional			Provinsi	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif			Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumberdaya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
	Asta Cita	Quick Wins	Prioritas Nasional tahun 2026	Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional - Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		Pertahanan Semesta	PP1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	PD3. Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal
			1. Komponen Cadangan		
			2. Pemenuhan alutsista		
			3. Penguatan kemampuan teritorial		
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional	Swasembada Pangan, Energi, dan Air	PP2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	PD2. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah
			1. Optimalisasi BULOG		PD4. Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup
			2. Pelaksanaan <i>food estate</i>		PD5. Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektifitas layanan perkotaan
			3. Peningkatan bauran <i>ethanol</i> dan <i>biodiesel</i>		
			4. Energi terbarukan		
			5. Pengembangan SPAM erintegrasi hulu ke hilir		
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,	Melanjutkan pembangunan Infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin	Adopsi Teknologi dan Inovasi	PP2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	PD2. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah
			1. Transformasi Digital		
			2. Riset dan Inovasi		

No	Nasional			Provinsi	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif			Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumberdaya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
	Asta Cita	Quick Wins	Prioritas Nasional tahun 2026	Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional - Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)			
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Pendidikan dan Kesehatan	PP3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	PD1. Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia
		Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten	1. Ekosistem Makanan Bergizi Gratis		
		Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap	2. Percepatan renovasi sekolah		PD5. Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektifitas layanan perkotaan

No	Nasional			Provinsi	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif			<i>Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumberdaya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan</i>	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
	Asta Cita	Quick Wins	Prioritas Nasional tahun 2026	<i>Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional - Penguatan Landasan Pembangunan Daerah</i>	<i>Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar</i>
		kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	3. Sekolah Rakyat		
			4. Sekolah Unggulan		
			5. Digitalisasi Pendidikan		
			6. Cek Kesehatan		
			7. Percepatan rumah sakit daerah		
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 1. Percepatan hilirisasi SDA oleh entitas milik Pemerintah 2. Optimalisasi potensi Danantara	PP2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	PD2. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Percepatan Pengentasan Kemiskinan 1. Data tunggal kemiskinan 2. Digitalisasi Bantuan 3. Tiga juta rumah 4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PP2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	PD2. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah PD5. Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektifitas layanan perkotaan
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan	Deregulasi dan Kepastian Hukum	PP1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	PD3. Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal

No	Nasional			Provinsi	Kota Salatiga
	Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif			Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumberdaya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas Dan Infrastruktur Berkualitas
	Asta Cita	Quick Wins	Prioritas Nasional tahun 2026	Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional - Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar
	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara			
		Mendirikan Badan Penerimaan negara daerah untuk memaksimalkan penerimaan negara terhadap pendapatan bruto (PDB) ke 23%	1. Reformasi Birokrasi		
			2. Kemudahan berbisnis		
			3. Ketertarikan investasi		
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi	PP2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	PD2. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah
				PP3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	PD4. Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup
				PP1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	PD1. Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia
					PD3. Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal

Pada tahun 2026 Kota Salatiga mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui:
 - Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas;
 - Menyediakan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran;
 - Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran;
 - Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - Revitalisasi pendidikan nonformal;
 - Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
- (2) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui:
 - Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro;
 - Pendayagunaan dokter spesialis.
 - Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis melalui:
 - Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;
 - Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;
 - Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu
 - Pemeriksaan kesehatan gratis.
- (3) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui:
 - Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa;
 - Penyehatan lingkungan;
 - Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan gratis;
 - Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana;
 - Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba;
 - Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi.
- (4) Penuntasan TBC melalui:
 - Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT);
 - Menanggulangi TB di tempat kerja;
 - Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile;
 - Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat.
- (5) Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kab/Kota melalui:
 - Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;
 - Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;
 - Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11).
- (6) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui:
 - Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;
 - Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;
 - Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;
 - Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.
- (7) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui:

- Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan
- (8) Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui:
- Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan;
 - Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR.
- (9) Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui:
- Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM);
 - Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk;
 - Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi;
 - Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik;
 - Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan
 - dan analitik data secara real-time;
 - Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan;
 - Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU);
 - Percepatan konversi BBM ke BBG.
- (10) Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:
- Perluasan infrastruktur digital;
 - Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital;
 - Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok.
- (11) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah, antara lain melalui:
- Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan;
 - Pelestarian Cagar Budaya, ODCB, dan OPK;
 - Event film, musik, dan seni;
 - Peningkatan kompetensi SDM kebudayaan;
 - Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan;
 - Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya;
 - Pelindungan dan pelestarian warisan budaya;
 - Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- (12) Pengelolaan hutan secara lestari melalui:
- Peningkatan produktivitas hasil kehutanan;
 - Pengembangan produk melalui agroforestri;
 - Pengembangan kapasitas pengelola kawasan;
 - Penguatan kelompok perhutanan sosial, dan perlindungan serta pengamanan.
- (13) Penguatan ekonomi syariah melalui:
- Pengembangan Industri dan UMKM Halal;
 - Peningkatan Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional;
 - Penguatan Ekosistem Halal;
 - Penguatan Keuangan Syariah;
 - Penguatan Dana Sosial Syariah.
- (14) Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, antara lain melalui:
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;
 - Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif;
 - Pengembangan kewirausahaan.
 - Peningkatan kapasitas dan pengembangan infrastruktur SDM transportasi;

- Irigasi Perpompaan (QW);
 - Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP;
 - Peserta Pelatihan Vokasi Bidang Industri dan Jasa;
 - Kawasan Bawang Merah;
 - Kawasan Aneka Cabai;
 - Ternak Ruminansia Perah;
 - Pengembangan kawasan Perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan;
 - Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;
 - Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional;
- (15) Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) melalui:
- Mendampingi perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;
 - Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers;
 - Memfasilitasi uji kompetensi wartawan;
 - Melaksanakan pelatihan bidangjurnalistik;
 - Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran.
- (16) Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berperspektif Gender melalui:
- Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;
 - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;
 - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;
 - Pedidikan HAM bagi K/L/D.
- (17) Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim melalui:
- Indonesia Game Academy;
 - Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim.
- (18) Pencegahan tindak pidana korupsi melalui:
- Roadmap penguatan sistem antikorupsi;
 - Pemenuhan kewajiban Indonesia untuk akses Konversi Anti-Suap (OECD);
 - Integrasi pencegahan korupsi di K/L dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- (19) Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk melalui:
- Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;
 - Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;
 - Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;
 - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
 - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.

Selain itu, Kota Salatiga melakukan dukungan dan penyelarasan dengan 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya termasuk 35 program delegatif, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 5. Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Menerbitkan SK Wali Kota yang mengatur Penggunaan Dana Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Renovasi Lintasan Sintetik Atletik Stadion Kridanggo KOTA SALATIGA "Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota : - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru"
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Peningkatan kapasitas APIP dengan penyediaan anggaran 1% dari APBD di luar Gaji
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) : 213 Posyandu, Rehab (Revitalisasi) Puskesmas Pembantu
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	-
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	-
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Penyediaan anggaran sewa Rumah Aman untuk korban kekerasan
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Sosialisasi dan Penetapan Desa Wisata
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	-
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan mitigasi bencana di setiap kecamatan di Salatiga yang salah satunya ada praktik Dapur Umum (DU)
11	Cek Kesehatan Gratis	Pemenuhan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), Penyiapan sarana dan prasarana di puskesmas, Sosialisasi, Promosi Media sosial
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penerapan Puskesmas dengan Integrasi Layanan Primer (ILP)
13	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Profesionalitas ASN dengan menerapkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit
		Pembinaan Kelurahan dan LPMK (bagian Pemerintahan)
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	UPTD Pelindungan Perempuan Anak, pelaporan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. (tahap pembentukan UPTD PPA di tahun 2025)

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	-
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pelatihan PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi), Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bintek Peningkatan Kapasitas 7 Pilar PSKS, Fasilitasi Adopsi, Visit dan Pendampingan Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Fasilitasi Program Bantuan Yapi (Yatim Piatu), Fasilitasi Rujukan LKSA, Pelatihan Kemandirian Anak Terlantar, Porseni/Jambore Anak Terlantar, Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Orang Tua Anak Terlantar, Fasilitasi Akses SPMB Jalur Afirmasi Panti Dikdas dan Dikmen
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Pembinaan kepada Pelaku Usaha Pariwisata terkait Program Pengembangan Wisata Ramah Muslim
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Produk UKM berbahan daging (Program Reguler) dan rekomendasi HAKI secara gratis.
		Penyelenggaraan Bimtek Keamanan pangan bagi pelaku usaha P-IRT.
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan Juleha dan Sertifikasi Juru Sembelih Halal, Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pelatihan pasaca panen bagi KWT / Poktan penerima program Pekarangan Pangan Lesatari
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan bagi Pengelola Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Subsidi Kredit bagi UMKM melalui BPR Salatiga sebesar Rp 6 Milyar dan tanpa jaminan serta Pemdampingan bagi Kelompok UMKM agar mempunyai Legalilitas usaha (berbadan hukum)
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	-
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Pemeliharaan taman (RTH) se Kota Salatiga, Belanja bibit tanaman
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	- Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas - Antisipasi Kerawanan Sosial Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru - Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme dan Radikalisme
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	- Audiens Walikota dan Forkopimda dengan ormas - Fasilitasi Ormas - Hibah Ormas
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Honor petugas kesehatan Kader Posyandu ILP, Honor petugas kesehatan Kader Puskesmas Pembantu ILP

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia melalui pemeriksaan / skrining kesehatan lansia sesuai standar, Puskesmas santun lansia dan lansia dengan ketergantungan sedang, berat dan total mendapatkan perawatan jangka panjang (PJP) Sekolah Lansia (Bina Keluarga Lansia /BKL)
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Penumbuhan wirausaha muda
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Peningkatan SDM bagi Pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) bagi 23 Kelurahan
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih di popda provinsi, uang saku bagi atlet dan pelatih pplopd
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Layanan konseling pendidikan inklusi, Pelatihan Guru Pembimbing Khusus dan Shadow Teacher, Psikotest Inklusi, Parenting Anak Berkebutuhan Khusus, Sosialisasi Hasil Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Pemasangan alat Early Warning Sistem (EWS) di wilayah rawan banjir/luapan air dan longsor

Adapun dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Pendukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 6. Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Pendukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Program Delegasi Pendukung Pangan	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	-	
2	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal	
3	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri	Peningkatan pelayanan dan peran penyuluh pertanian	
4	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	-	
5	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	-	
6	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)	-	
7	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	-	
8	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian	Penyelerasan Perda Ketahanan Pangan dengan Rencana Induk Pangan Provinsi Membangun sistem pemantauan stok pangan antar-daerah berbasis platform digital bersama Dinas Provinsi terkait	
9	Petani milenial gajian	Pemberian modal dan fasilitasi kepada anak muda petani untuk pengembangan usahatani	
10	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa	-	
11	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	Hilirisasi pertanian, menjadikan Salatiga sebagai pusat Distribusi dan Pengolahan hasil pertanian Rehabilitasi Gudang Penyimpanan Hasil Pertanian/ lumbung Pangan yang representatif sebagai “Modern Food Storage”	
12	Revitalisasi embung	Rehabilitasi / Normalisasi Bendung	
13	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan	Mengembangkan tanaman hidroponik di area binaan	
14	Subsidi Pangan Murah	Bazar Pangan Murah tiap Kecamatan	
15	Penyediaan benih yang berkualitas	Bantuan benih padi unggul	
16	Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian	Bantuan sarpras pertanian Pembuatan / Rehabilitasi Irigasi Pertanian di kawasan budidaya padi	

Sedangkan dukungan program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Prioritas Nasional adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4. 7. Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2026

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan	
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		4 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		5 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		6 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		7 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		8 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		9 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		10 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		11 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		12 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		3 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		6 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		7 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		8 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan	
		9 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		10 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		6 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		7 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		8 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		9 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		10 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		11 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		12 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
		13 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		14 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		5 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		6 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		7 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		8 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		9 PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		10 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
		11 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan	
		12 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		13 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		14 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		15 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		4 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		6 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		8 PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		4 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		6 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		7 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		8 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		9 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
		10 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Tabel 4. 8. Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Prioritas Tahun 2026 sesuai Rancangan RPJMD dengan Program Unggulan Kepala Daerah

NO	PRIORITAS 2026 SESUAI Ranwal RPJMD	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
1	Peningkatan kualitas Pembangunan sumber daya manusia	PROGRAM SALATIGA CERDAS
		Peningkatan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional
		Pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri
		PROGRAM SEHATI : Salatiga Sehat dan Terlindungi
		PROGRAM KOMIK : Kolaborasi Minelial Kreatif
		Pengembangan ruang ekspresi gaya hidup positif, seni dan budaya bagi Gen-Z, pemuda dan pelaku seni
2	Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	PROGRAM SEKAR : SALATIGA BERKARYA
		Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM
		pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan UMKM
		PROGRAM JARKOM MABAR
		Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha
		SMART URBAN FARMING
		pengelolaan budidaya pangan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pertanian <i>on farm</i> dan <i>off farm</i> untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan sektor unggulan daerah
3	Peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal	PROGRAM SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap
		Pemerintahan yang berintegritas akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan
4	Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup	PROGRAM STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
		PROGRAM SARI : Salatiga Lestari
		Penegakan regulasi daerah untuk pencegahan/penindakan pencemaran lingkungan dan pelanggaran RTRW untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
5	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan	PROGRAM BIRULAH : Bangun Rumah Layak Huni
		PROGRAM SOS : Salatiga Online System
		Membangun infrastruktur jaringan online untuk pengawasan infrastruktur lingkungan hidup dan mobilitas masyarakat yang berpusat pada <i>Command Center</i>
		Peningkatan infrastruktur yang berkualitas untuk mempermudah akses pasar dan distribusi

Tabel 4. 9. Konsistensi Permasalahan, Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026

No	Permasalahan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan
		Global	Nasional	Provinsi	Isu Strategis 2026	
1	Optimalisasi penurunan Angka Kematian Balita, Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), Belum optimalnya pencapaian tingkat kesehatan keluarga, Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak	Demografi Global	Rendahnya produktivitas	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia
2	Masih perlunya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/Paket	Urbanisasi dunia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia		
3	Belum optimalnya peran pemuda dalam mendukung kegiatan ekonomi dan prestasi olahraga					
4	Peningkatan angka ketergantungan penduduk					
5	Masih kurangnya dukungan pengembangan dan pelestarian nilai seni dan budaya daerah dan peningkatan pelestarian kota pusaka			Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah	
6	Belum optimalnya peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif				Kesenjangan gender, belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan serta pelayanan lansia	
7	Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak					

No	Permasalahan	Isu Strategis				Prioritas Pembangunan
		Global	Nasional	Provinsi	Isu Strategis 2026	
8	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat	Geopolitik dan Geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing	Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah
9	belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga	Perdagangan internasional	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Ketahanan pangan yang berkelanjutan		
10	Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah	Keuangan Internasional	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif			
11	Belum semua masyarakat mendapatkan akses terhadap pemenuhan rumah layak huni	Persaingan Sumber Daya Alam	Krisis Lingkungan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur	Peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektifitas layanan perkotaan
12	Belum optimalnya pemenuhan dan pemerataan insfrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan					
13	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Perubahan Iklim		Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup
14	Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk					
15	Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal	Disrupsi Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif	Peningkatan kualitas ASN dan Implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal

Prioritas pembangunan Kota Salatiga diselenggarakan dengan menerapkan berbagai inovasi dalam rangka pengoptimalan pencapaian target kinerja daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Salatiga telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Selain itu, diperlukan pula pemetaan kegiatan yang mendukung implementasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh Perangkat Daerah agar hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat mendukung perencanaan pemerintah daerah.

Tabel 4. 10. Pemetaan Kegiatan Implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sekolah Menengah Pertama
8	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
10	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
11	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
12	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
14	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

No	Kegiatan	Sub Kegiatan
15	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
16	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
17	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
18	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
19	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
20	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
21	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
22	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
23	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

4.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 untuk Mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 juga berkorelasi dengan Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting, Standar Pelayanan Minimal, *Sustainable Development Goals* (SDG's), penanggulangan kemiskinan, serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

4.2.4.1. Kebijakan Penurunan Stunting

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2026. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam penurunan stunting, yang terdiri dari :

- 1) Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
- 2) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal;
- 3) Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional;

- 4) Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 5) Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
- 7) Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi;
- 8) Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintah dalam upaya penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi *stunting* 13,5% di tahun 2026 dan 5 % di tahun 2045. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang meliputi :

- 1) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa melakukan :

- 1) penguatan perencanaan dan penganggaran;
- 2) peningkatan kualitas pelaksanaan;
- 3) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pada tahun 2026, untuk mendukung target penurunan *stunting* tersebut, perencanaan pembangunan Kota Salatiga menerapkan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian

dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksklusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Prevalensi *Stunting* pada Balita menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada bidang Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi untuk penanganan *Stunting* dilakukan dengan berbagai inovasi penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kota Salatiga dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 4. 11. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penurunan Stunting di Kota Salatiga Tahun 2026

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendidikan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesehatan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan
	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sosial
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial
	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Penyediaan Permakanan	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial
	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
	Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
11	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian
	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lingkungan Hidup
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perhubungan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanaman Modal
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepemudaan dan Olahraga
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebudayaan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perpustakaan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perdagangan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perindustrian
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan
	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Keuangan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepegawaian
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengawasan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

4.2.4.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka pada tahun 2026 Kota Salatiga tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan). Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Pemerintah Kota Salatiga memprioritaskan pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar melalui beberapa program di perangkat daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan Masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan secara merata dengan arah kebijakan pada tahun 2026 adalah peningkatan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global serta Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam menciptakan masyarakat Salatiga sebagai kota cerdas. Hal tersebut sesuai dengan tahap arah kebijakan tahunan pada rancangan RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029.

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2026 fokus pada penguatan infrastruktur layanan primer (laboratorium kesehatan masyarakat, puskesmas, posyandu) dan layanan

Rujukan serta pendidikan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala. Prioritas tersebut dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagaimana strategi yang ditetapkan pada RPJMD Kota Salatiga 2025-2029.

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2026 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2026 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, informasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4. 12. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pemenuhan SPM di Kota Salatiga Tahun 2026

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	PENDIDIKAN	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
2	KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>humam immudeficiency virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
			Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
			Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
6	SOSIAL		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

No	SPM Bidang	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan

4.2.4.3. Dukungan terhadap penurunan Kemiskinan

Kemiskinan yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, menjadi salah satu kebijakan pusat yang didukung dengan arah kebijakan pembangunan Daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kota Salatiga mendukung strategis nasional dalam melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, diantaranya melalui :
 - a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
 - b. Peningkatan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung terlaksananya strategi penghapusan kemiskinan ekstrim sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 4. 13. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kota Salatiga Tahun 2026

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
		Pengelolaan Dana BOP PAUD
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Alat Bantu
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Pemberian Layanan Kedaruratan
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
		Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
2	Meningkatkan Pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
		Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
		Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
		Pembangunan Tanggul Sungai
		Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
		Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyuluhan Transmigrasi

4.2.4.4. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka konteks perencanaan pembangunan daerah, upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) merupakan hal yang sangat strategis, tidak hanya dikaitkan dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga diintegrasikan dengan potensi daerah yang dikaitkan dengan data di tingkat basis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maupun pemetaan terhadap potensi dan permasalahan merupakan suatu keharusan.

Pada tahun 2026, prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evaluasi capaian SDG's tahun 2024. Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator-indikator sasaran maupun program telah disinkronkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan (*goal*) berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan TBP. Pemerintah Kota Salatiga sepenuhnya berkomitmen dalam mendukung terwujudnya 17 (tujuh belas) tujuan SDGs melalui program-program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Salatiga sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. 14. Sasaran, Prioritas dan Program yang Mendukung Terwujudnya SDGs di Kota Salatiga Tahun 2026

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	- Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif - Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung	- peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia - peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		aktivitas sosial ekonomi - Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi		- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	- Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif - Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	- Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	- peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	- Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	- peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
5	Mencapai kesetaraan gender dan	- Meningkatnya perlindungan	- peningkatan kualitas	- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
	memberdayakan kaum perempuan	perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	pembangunan sumber daya manusia	GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	- inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	- Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi - Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi - Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	- Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	- peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan	- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif - Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah - peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal	- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif - Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima	- peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga - peningkatan infrastruktur kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Meningkatnya pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	- peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	- Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	- peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga	- PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena kawasan laut merupakan kewenangan Provinsi		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena bukan kewenangan kabupaten/kota		
16	Mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	- Meningkatnya kondusivitas wilayah dalam mendukung	- peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang	- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		aktivitas sosial ekonomi - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima	berintegritas dan handal	- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - PROGRAM PENCATATAN SIPIL - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Salatiga, karena bukan kewenangan kabupaten/kota		

4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah tingkat Kota. Dengan demikian, maka dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan tujuan dan sasaran Kota Salatiga.

Pokok-pokok pikiran DPRD Salatiga tahun 2026 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Salatiga, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 4 daerah pemilihan yang meliputi 4 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Salatiga lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2025, KUA-PPAS dan APBD tahun 2026.

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, selanjutnya dirumuskan dalam tema pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Dokumen RKPD tahun 2026. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa bidang

yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Berikut ini adalah usulan pokok-pokok pikiran berdasarkan kamus usulan dan permasalahan.

Tabel 4. 15. Usulan Pokok-pokok Pikiran berdasarkan Kamus Usulan dan Permasalahan untuk RKPD Tahun 2026

KAMUS USULAN	JUMLAH USULAN
Bantuan Benih Hewan Ternak	2
Bantuan Jalan Usaha Tani (JUT)	1
Bazar UMKM, Sosialisasi Perkoperasian	5
Drainase (perbaikan/rehabilitasi, pembangunan)	20
Festival Olahraga Pernapasan tingkat Jateng	1
Kejuaraan cabang olahraga tingkat pelajar (voli, renang, billiard, tenis meja, basket)	1
Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (menjahit , memasak)	2
Pelatihan bagi Usaha Mikro (kewirausahaan, packaging, dsb)	2
Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat (menjahit, tata rias, pembuatan roti, barista, komputer Office)	4
Pelatihan Kompetensi Kader Posyandu ILP	2
Pelatihan penanganan darurat bencana	1
Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan	2
Pemasangan LPJU	15
Pemeliharaan Jalan	10
Pemeliharaan Jembatan	1
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	4
Pengadaan matras pencak silat	1
Pengadaan/Pemasangan Cermin tikungan, pita pengkaduh, guardrail	2
Penyelenggaraan event olahraga rekreasi dan masyarakat	1
Perbaikan RTLH	12
Perluasan SPAM Perpipa	3
Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	8
Tanggul Sungai, Irigasi	9
TOTAL USULAN	109

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PRIORITAS 1



pentahapan
perencanaan RPD
Tahun 2023-2026,



program Intervensi
yang bersifat
kebijakan, isu global,
isu Nasional, isu
Provinsi,



isu strategis, SDGs
dan SPM



Prioritas
pembangunan 2026.

PRIORITAS 2



Program Perangkat Daerah
yang berhubungan dengan
permasalahan pelayanan tugas
fungsi



Pencapaian kinerja
pemerintahan daerah sesuai
urusan

Penentuan prioritas berpengaruh kepada alokasi pendanaan dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan

TAMAN WISATA RE

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam rangka mencapai target RPJMD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 berisi program dan kegiatan dari pemerintah Kota Salatiga sebagai jawaban atas permasalahan pembangunan daerah yang berkembang saat ini. Program dan kegiatan dalam rencana kerja ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, *Sustainable Development Goal's* (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang. Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Salatiga. Tahapan penyusunan program dan kegiatan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Rencana program dan kegiatan disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

5.1. Rencana Kerja

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah, sehingga penjabaran program dibedakan menjadi dua prioritas, yaitu :

- 1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun pertama RPJMD 2025-2029, program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, isu Provinsi, Prioritas pembangunan, isu strategis, SDGs dan SPM.
- 2. Prioritas II, merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama

5.1.1.1. Rencana Kerja Prioritas RPJMD untuk Tahun 2026

Pelaksanaan prioritas Pembangunan yang merupakan penerjemahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 harus direncanakan secara utuh dalam RKPD Kota Salatiga sesuai dengan pentahapan Tahun 2026 untuk mewujudkan Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah didukung Pemerintahan berintegritas dan infrastruktur berkualitas. Penentuan prioritas Pembangunan tidak terlepas dari penyelesaian permasalahan Pembangunan dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada RKPD tahun 2026, permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024. Prioritas Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada nomenklatur perencanaan Pembangunan dan ketentuan regulasi yang terkait agar program yang dilaksanakan tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat. Tidak semua program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dijadikan program prioritas. Pemilihan program prioritas juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah pada tahun rencana.

Hasil penyelarasan prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 dengan nomenklatur program sesuai ketentuan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 1 penyelarasan prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
1	Peningkatan kualitas Pembangunan sumber daya manusia	140,954,983,867	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	49,270,870,160	Dinas Pendidikan	Program ini di tujuan untuk meningkatnya partisipasi anak usia sekolah, yang didukung dengan peningkatan kualitas sarana prasarana serta tenaga pengajar.	SALATIGA CERDAS Peningkatan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional Pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	11,350,000	Dinas Pendidikan	Program ini diarahkan pada presentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok pada berbagai jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan PKBM.	
			3 PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	19,654,858,940	Dinas Pendidikan	Program ini di arahkan pada menjamin kualitas tenaga pendidik yang sudah bersertifikat dan telah memenuhi kualifikasi minimal S1.	
			4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	21,734,000	Dinas Pendidikan	Program ini di arahkan pada kegiatan yang menjamin sekolah, lembaga kursus maupun PKNM sudah memiliki ijin operasional serta terakreditasi.	
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	287,332,300	Dinas Pendidikan	Program ini diarahkan pada pengembangan model pembelajaran bahasa jawa	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						terhadap jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, serta PKBM	
			6 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,345,007,700	DINPERSIP	Program ini di lakukan untuk penilaian tingkat kegemaran membaca masyarakat	
			7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6,540,000,000	DPU PR	Program ini diarahkan pada penjaminan kualitas bangunan gedung serta rasio ijin PBG	
			8 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,847,000,000	BPKPD	Program ini di arahkan pada peningkatan tata kelola anggaran yang di dukung dengan persentase penambahan nilai aset tetap	
			9 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	763,533,067	Disperinaker	Program ini diarahkan peningkatan keterampilan dan pendidikan penduduk usia kerja melalui pelatihan keterampilan spesifik dan sertifikasi, penyuluhan dan job matcing serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan pendidikan dan pelatihan kerja dengan dukungan operasional yang baik	
			10 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	474,236,000	Disperinaker	Program ini diarahkan pada peningkatan penempatan tenaga kerja yang di dukung dengan persentase tenaga kerja yang ditempatkan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah serta informasi pasar kerja.	
			11 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	282,898,000	DP3APPKB	Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) didukung dengan Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun, Cakupan Kader BKB yang Terlatih, dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	
			12 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51,412,881,176	Dinas Kesehatan	Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan serta meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	SALATIGA SEHATI : Salatiga Sehat dan Terlindungi Layanan pendampingan tenaga medis di saat kehamilan, kelahiran dan Nifas Layanan kesehatan ibu

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			13 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	94,634,000	Dinas Kesehatan	Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan	bebas anemia dan terpenuhi nutrisi Layanan jaminan kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga zero stunting
			14 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	284,765,000	Dinas Kesehatan	Program ini diarahkan pada standar fasilitas pelayanan kafarmasian serta persyaratan perijinannya	Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Meningkatkan asilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis profesional
			15 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6,091,805,000	Dinas Kesehatan	Program ini diarahkan pada prosentase cakupan desa/kelurahan siaga strata mandiri	untuk RSUD berstandar Internasional
			16 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	955,297,524	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program ini diarahkan untuk meningkatnya daya saing kepemudaan didukung dengan prosentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	KOMIK : (Kolaborasi Minelial Kreatif) Pengembangan ruang ekspresi gaya hidup positif, seni dan budaya bagi Gen-Z, pemuda dan pelaku seni
			17 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	75,000,000	DISBUDPAR	Program ini diarahkan pada meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			18 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,057,875,500	DISBUDPAR	Program ini diarahkan pada meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan objek pemajuan kebudayaan	
			19 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	483,905,500	DISKOMINFO	Program ini diarahkan pada penguatan Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga, serta penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	
2	Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah	8,229,225,284	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1,988,000,000	DINKOP UKM	Program ini diarahkan pada Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri didukung dengan prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	SEKAR : SALATIGA BERKARYA Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan UMKM
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1,527,231,000	DINKOP UKM	Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM dengan didukung pada prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,790,687,000	DISDAG	Program ini diarahkan pada Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi didukung dengan pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	
			4 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	40,000,000	DISBUDPAR	Program ini diarahkan pada peningkatan warisan cagar budaya yang dilestarikan	
			5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	955,297,524	DISPORA	Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing kepemudaan didukung dengan prosentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.	JARKOM MABAR : Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha
			6 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,754,353,200	DISPANGTAN	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian didukung dengan pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian, stimulan bantuan benih padi, pengendalian OPT dan DPI, mempertahankan luas lahan pertanian yang ada	SMART URBAN FARMING Pengelolaan budidaya pangan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pertanian on farm dan off farm untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	160,000,000	DISPANGTAN	Program ini di arahkan pada presentase cakupan bina kelompok tani kategori pemula, lanjut, madya serta utama serta upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pada pada lahan yang ada	dan pengembangan sektor unggulan daerah
			8 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	13,656,560	DISPANGTAN	Program ini di arahkan pada penyediaan infrastruktur cadangan pangan termasuk hiliisasi komoditas susu dan daging serta komoditas pertanian lokal lainnya	
3	Peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal	14,445,968,142	1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7,387,500,000	BPKPD	Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan keuangan didukung dengan presentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan serta cash management	SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap Pemerintahan yang berintegritas akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan
			2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	600,904,500	BAPPEDA	Program ini diarahkan pada penigkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di dukung dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	
			3 PROGRAM PELAYANAN	254,313,000	DPMPTSP	Program ini diarahkan pada peningkatan perizinan dan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			PENANAMAN MODAL			penanaman modal berbasis resiko dengan didukung oleh Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	
			4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	483,905,500	DISKOMINFO	Program ini diarahkan pada penguatan Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga, serta penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	
			5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2,508,494,000	SEKRETARIAT DAERAH	Program ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat yang didukung pengembangan kebijakan berbasis data dan bukti (evidence base policy) yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat	
			6 PROGRAM PEREKONOMIAN	671,246,000	SEKRETARIAT DAERAH	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			DAN PEMBANGUNAN			dan pembangunan di dukung dengan cakupan koordinasi dari berbagai sektor	
			7 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	523,646,100	BKPSDM	Program ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian yang didukung dengan nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,901,219,042	BKPSDM	Program ini diarahkan pada peningkatan pengembangan sumber daya manusia dengan didukung dengan prosentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi	
			9 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	114,740,000	INSPEKTORAT DAERAH	Program ini diarahkan pada peningkatan cakupan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah didukung dengan tindaklanjut rekomendasi BPK dan juga hasil pengawasan internal N-1	
4	Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup	62,714,551,974	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51,412,881,176	DINKES	Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan serta meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Upaya perubahan perilaku higiene Penyediaan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,280,000,000	DPU PR	Program ini diarahkan peningkatan akses masyarkat terhadap sistem pengelolaan air limbah didukung dengan Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dan dilakukan penyedotan secara berkala	PROGRAM SARI : Salatiga Lestari Penegakan regulasi daerah untuk pencegahan/penindakan pencemaran lingkungan dan pelanggaran RTRW untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
			3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	200,000,000	DLH	Program ini diarahkan pada penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan didukung oleh pemantauan status mutu air dan peningkatan sarana prasarana laboratorium	
			4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	2,587,155,798	DLH	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati dengan dukungan RTH publik dan RTH privat terhadap peningkatan prosentase RTH tingkat kota	
			5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	194,515,000	DLH	Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola persampahan dengan dukungan penanganan sampah, pengurangan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						sampah serta fasilitasi pengolahan sampah	
			6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	500,000,000	DPU PR	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, dengan dukungan tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	
			7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6,540,000,000	DPU PR	Program ini diarahkan pada penjaminan kualitas bangunan gedung serta rasio ijin PBG	
5	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan	40,383,345,785	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,416,142,131	Dinas PKP	Program ini diarahkan pada pengembangan perumahan	PROGRAM BIRULAH : Bangun Rumah Layak Huni Bantuan sosial untuk pemenuhan rumah yang layak dan sehat bagi rumah tangga miskin
			2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6,698,700,000	Dinas PKP	Program ini diarahkan pada peningkatan lingkungan permukiman kumuh kawsan permukiman	
			3 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10,420,700,000	DINAS PKP	Program ini diarahkan pada pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku higiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	483,905,500	Diskominfo	Program ini diarahkan pada penguatan Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga, serta penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	PROGRAM SOS : Salatiga Online System Membangun infrastruktur jaringan online untuk pengawasan infrastruktur lingkungan hidup dan mobilitas masyarakat yang berpusat pada Command Center Peningkatan infrastruktur yang berkualitas untuk mempermudah akses pasar dan distribusi
			5 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3,003,218,664	Diskominfo	Program ini diarahkan pada peningkatan akses internet oleh diskominfo kepada Organisasi Perangkat Daerah serta pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
			6 PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	16,569,992,490	DPU PR	Program ini diarahkan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman serta dapat diukur dengan rasio kemandapan jalan	
			7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,790,687,000	DISDAG	Program ini diarahkan pada Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi didukung	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
						dengan pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	

5.1.1.2. Program Prioritas untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's* (SDGs) adalah isu global yang harus dipastikan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai target tahunan menuju target di tahun 2030. Pada Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2026, program prioritas untuk mendukung pencapaian SDGs menjadi salah satu prioritas program untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan rencana program tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Akomodasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
TUJUAN : 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam segala Bentuk Dimanapun			
INDIKATOR SDGs: ANGKA KEMISKINAN			
INDIKATOR SDGs: Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	920.249.700,00	
PROGRAM 2: Program Rehabilitasi Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	963.185.000,00	
	Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	249.090.000,00	
PROGRAM 3: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000,00	
PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.059.142.131,00	
PROGRAM 5: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50.000.000,00	
PROGRAM 6: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 7: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.280.000.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM 8: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM 9: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
	Kegiatan 1 : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	257.986.000,00	Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 2 : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	45.014.000,00	
PROGRAM 10: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
	Kegiatan 1 : Pembangunan Prasarana Pertanian	914.000.000,00	Dinas pangan dan Pertanian
PROGRAM 11: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
	Kegiatan 1 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM
PROGRAM 12: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
	Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.216.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM
PROGRAM 13: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
	Kegiatan 1: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.270.456.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM
PROGRAM 14: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	Kegiatan 1 : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	236.945.000,00	BAPPEDA
PROGRAM 15: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			DP3APPKB

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	255.398.000,00	
PROGRAM 16: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	103.000.000,00	
PROGRAM 17: PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	304.220.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	388.318.000,00	
PROGRAM 18: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			DISDIK
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.264.407.070,00	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.153.976.600,00	
	Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	20.097.785.200,00	
	Kegiatan 4: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	754.701.290,00	
PROGRAM 19: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	175.000.000,00	
PROGRAM 20: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	135.181.300,00	
PROGRAM 21: PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perinaker
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	787.008.067,00	
PROGRAM 22: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perinaker
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	764.000.000,00	
PROGRAM 23: PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			DISBUDPAR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
PROGRAM 24: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			DISBUDPAR
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35.475.000,00	
PROGRAM 25: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			BPBD
	Kegiatan 1 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	195.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	841.500.000,00	
PROGRAM 26: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			KECAMATAN
	Kegiatan 1: Pemberdayaan Kelurahan (di 4 Kecamatan)	29.270.228.000,00	
	Kegiatan 2: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.260.237.000,00	
TUJUAN 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs: Ketersediaan Pangan Utama Beras			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	45.014.000,00	
INDIKATOR SDGs: Penanganan Rumah tangga Rawan Pangan			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	45.014.000,00	
	Kegiatan 2: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	257.986.000,00	
	Kegiatan 3: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	288.000.000,00	
INDIKATOR SDGs :Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	45.014.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Indikator SDGs Persentase Kasus Stunting di Salatiga			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs: Prevalensi balita Gizi Buruk			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Ibu hamil yang anemia			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGS : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs : Pola Pangan Harapan (Skor PPH)			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	45.014.000,00	
	Kegiatan 2: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	257.986.000,00	
	Kegiatan 3: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	288.000.000,00	
TUJUAN 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
Indikator SDGs: Angka Kematian Ibu (AKI).			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs: Angka Kematian Balita (AKaBa) per 1000 kelahiran hidup.			

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs: Prevalensi Hipertensi Penduduk Usai >18 tahun			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs: Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
INDIKATOR SDGs: Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	249.090.000,00	
INDIKATOR SDGs : Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba			
PROGRAM: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
INDIKATOR SDGs : CPR/ Peserta KB Aktif			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	304.220.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	388.318.000,00	
INDIKATOR SDGs : Total Fertility Rate (TFR)			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	304.220.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	388.318.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
INIDIKATOR SDGs : UN MEET NEED			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	304.220.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	388.318.000,00	
	Kegiatan 3: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB	441.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase cakupan kepesertaan JKN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.921.850.000,00	
TUJUAN 4 : Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua			
Indikator SDGs : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.153.976.600,00	
Indikator SDGs :Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.334.992.051,00	
Indikator SDGs: Persentase guru layak mengajar SD/ MI, SMP/MTs			
PROGRAM PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.571.858.940,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.153.976.600,00	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	20.097.785.200,00	
	Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	754.701.290,00	
TUJUAN 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan			
Indikator SDGs : Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG			

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 1: PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			DP3APPKB
	Kegiatan 1: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	84.248.800,00	
	Kegiatan 2: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota		
	Kegiatan 3: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	152.022.000,00	
Indikator SDGs : Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Sesuai Standart			
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			DP3APPKB
	Kegiatan 1: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	28.069.800,00	
TUJUAN 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua			
INDIKATOR SDGs :Persentase penduduk berakses air minum (Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak)			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM			Dinas PUPR
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Pemenuhan Air Baku			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.280.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			DPUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.280.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM			
PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)			
PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase rumah tangga yang terlayani limbah sistem komunal			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			DPUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.280.000.000,00	
TUJUAN 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua			
TUJUAN 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Layak untuk Semua			
INDIKATOR SDGs : Laju Pertumbuhan PDRB per kapita (laju pertumbuhan PDB per kapita)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	175.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.615.687.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			BPKPD
	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	800.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Kegiatan 1: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.043.688.000,00	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	135.181.300,00	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
	Kegiatan: Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	20.825.000,00	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Disnas Perinaker
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	764.000.000,00	
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	852.032.891,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35.475.000,00	
INDIKATOR SDGs :Presentase Tenaga kerja formal (Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin)			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	787.008.067,00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	Kegiatan 1: Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	410.000.000,00	
INDIKATOR SDGs :Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Idem)			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	787.008.067,00	
INDIKATOR SDGs : Jumlah wisatawan mancanegara			
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	70.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35.475.000,00	
INDIKATOR SDGs : Jumlah wisatawan nusantara			
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35.475.000,00	
TUJUAN 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi			
INDIKATOR SDGs : Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik			
Program Penyelenggaraan Jalan			Dinas PUPR
	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	14.169.992.490,00	
INDIKATOR SDGs : Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
	Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota	37.155.798,00	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.900.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	53.000.000,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		
INDIKATOR SDGs : Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
TUJUAN 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara			
INDIKATOR SDGs: Koefisien Gini (Indeks Gini atau Rasio Gini)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	175.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			BPKPD
	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	800.000.000,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	135.181.300,00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perindustrian dan Ketenaga kerjaan
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	764.000.000,00	
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Disbudpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35.475.000,00	
INDIKATOR SDGs: Tingkat kemiskinan (Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur)			
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Sosial			Dinas Sosial

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	920.249.700,00	
PROGRAM 2: Program Rehabilitasi Sosial			
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	963.185.000,00	
	Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	249.090.000,00	
PROGRAM 3: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000,00	
TUJUAN 11: Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan			
Indikator SDGs: Cakupan ketersediaan rumah layak huni			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
	Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.059.142.131,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan			
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	40.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
	Kegiatan: Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	274.545.500,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Penanganan Sampah			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	53.000.000,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		
INDIKATOR SDGs : PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)			
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota	37.155.798,00	
INDIKATOR SDGs : KELURAHAN SIAGA BENCANA			
PROGRAM: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			BPBD
	Kegiatan 1 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	195.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	841.500.000,00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			SATPOL PP
	Kegiatan 1: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	218.000.000,00	
	Kegiatan 2: Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
TUJUAN 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs : Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			
	Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.900.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan (Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan).			
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.900.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA	
INDIKATOR SDGs : Persentase Penanganan Sampah (Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang)				
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Dinas Lingkungan Hidup	
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	53.000.000,00		
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			
TUJUAN 13: Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya				
INDIKATOR SDGs : Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup	
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
	Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota	37.155.798,00		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)				
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.646.000,00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	53.000.000,00		
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			
TUJUAN 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan				
TUJUAN 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati				
TUJUAN 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh				
INDIKATOR SDGs: INDEKS KRIMINALITAS				
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM			SATPOL PP	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1:Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	770.100.000,00	
	Kegiatan 2 :Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	175.000.000,00	
INDIKATOR SDGs: Cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun (Persentase anak yang memiliki akta kelahiran)			
Program: PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Kegiatan 1: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	26.046.000,00	
	Kegiatan 2: Penataan Pendaftaran Penduduk	422.852.000,00	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	86.304.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	15.150.000,00	
	Kegiatan 2: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Opini BPK Atas Laporan Keuangan			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Kegiatan 1 : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	822.000.000,00	
	Kegiatan 2: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	415.500.000,00	
	Kegiatan 3: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	650.000.000,00	
	Kegiatan 5: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	800.000.000,00	
	Kegiatan 6: Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	200.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Nilai SAKIP			
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Inspektorat
	Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	94.740.000,00	
INDIKATOR SDGs : Indeks Refomasi Birokrasi (Indeks RB)			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Sekretariat Daerah
	Kegiatan 1: Penataan Organisasi	159.240.500,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM : PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Dinas Komunikasi dan
	Kegiatan 1: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	483.905.500,00	Informatika
INDIKATOR SDGs: Tingkat Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Sekretariat Daerah
	Kegiatan 1: Penataan Organisasi	159.240.500,00	
TUJUAN 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs: Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Badan Pengelolaan Keuangan dan
	Kegiatan 1: Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.043.688.000,00	Pendapatan Daerah

5.1.1.3. Program prioritas pendukung Penerapan SPM

Pelaksanaan amanat PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait serta pelaksanaan Perwali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026, menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja RKPD Kota Salatiga Tahun 2026. Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan SPM Tahun 2026 dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagai berikut

Tabel 5. 3 Akomodasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
JENIS SPM : SPM BIDANG PENDIDIKAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	5,000,000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	650,000,000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah	405,000,000	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Literasi dan Numerasi	9,787,600	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Literasi dan Numerasi	9,787,600	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	27,675,200	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Literasi dan Numerasi	78,200,800	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	72,708,000	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Literasi dan Numerasi	23,517,218,550	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Angka Partisipasi Sekolah	30,000,000	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah	75,000,000	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	7,418,000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kekhususan PAUD	100,000,000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kekhususan PAUD	24,908,400	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kekhususan PAUD	9,709,600	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	9,709,600	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	10,214,600	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kekhususan PAUD	-	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kekhususan PAUD	7,189,600	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	116,650,000	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	30,000,000	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	11,000,000	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	8,750,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	11,000,000		
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	49,674,900		
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah	158,000,000		
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah	132,750,200		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	39,918,000		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	76,635,000		
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Sekolah	7,550,000		
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Sekolah	8,325,000		
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	40,449,800		
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	285,848,400		
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	10,000,100		
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	3,375,000		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Literasi dan Numerasi	19,468,944,940		
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	Literasi dan Numerasi	102,914,000		

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
JENIS SPM : SPM BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita	32,912,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12,705,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	193,245,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	148,128,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	15,860,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	40,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	115,500,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34,734,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15,540,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	52,685,000	
JENIS SPM : SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	330,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
(SPALD) Terpusat Skala Permukiman	dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	750,000,000	
JENIS SPM : SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	-	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11,000,000	
JENIS SPM : SPM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	250,000,000	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	50,000,000	
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	55,000,000	
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	600,000,000	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	46,500,000	
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan	75,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Evakuasi Korban Bencana		
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50,000,000	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	45,000,000	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25,000,000	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	130,000,000	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	22,000,000	
JENIS SPM : SPM BIDANG SOSIAL			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Dinas Sosial
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Penyediaan Permakanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	440,000,000	
Penyediaan Alat Bantu	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	30,071,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	215,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Pemberian Layanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	278,114,000	

5.1.1.4. Program prioritas pendukung Kebijakan Nasional untuk Penurunan Stunting

Perwujudan peran pemerintah daerah dalam mendukung penurunan stunting adalah berupa sinkronisasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan. Kebijakan Pemerintah pusat berupa “Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045”, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2026. Pada RKPD tahun 2026 dilakukan penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan Penurunan Stunting. Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan Penurunan Stunting Tahun 2026 dalam RKPD Kota Salatiga tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Akomodasi untuk Kebijakan Penurunan Stunting Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendidikan		Dinas Pendidikan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		199,664,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan		
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		5,000,000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		85,000,000	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		17,113,918,500	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		5,000,000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		85,000,000	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		75,000,000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		24,908,400	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		270,600,000	
Pengelolaan Dana BOP PAUD		-	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		7,418,000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		10,214,600	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		199,070,400	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		49,674,900	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		8,674,900	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesehatan		Dinas Kesehatan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200,000,000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan		
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2,000,000,000	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		5,815,850,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		6,000,000	
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		148,128,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		193,245,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		12,705,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		32,912,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		-	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		15,540,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		224,872,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		200,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		459,201,000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		108,000,000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		284,301,176	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		24,000,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		50,000,000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		-	
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		96,032,000	
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		45,000,000	
Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		136,733,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan		
Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		5,508,230,000	
Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		583,575,000	
Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pekerjaan Umum dan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Penataan Ruang		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		192,353,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		100,000,000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		150,000,000	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		750,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		330,000,000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		150,000,000	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		-	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		100,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		350,000,000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		1,000,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sosial		Dinas Sosial
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150,000,000	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		433,873,000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Penyediaan Permakanan		440,000,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		400,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemberdayaan Perempuan dan		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Perlindungan Anak		Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		115,000,000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		103,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		288,318,000	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		-	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		-	
Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangan		Dinas Pangan dan Pertanian
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan		
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		-	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		82,679,000	
Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		250,400,000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan		
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		70,450,000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan		
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		60,000,000	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		30,000,000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		100,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lingkungan Hidup		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		85,200,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup		
Kegiatan : Pengelolaan Sampah			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		-	
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		53,000,000	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		165,000,000	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7,830,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perhubungan		Dinas Perhubungan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		113,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komunikasi dan Informatika		Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80,075,176	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika		
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Media Komunikasi Publik		233,750,500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		216,450,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		300,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		200,000,000	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		2,016,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		1,270,456,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		130,000,000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal		
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		254,313,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal		
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		60,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepemudaan dan Olahraga		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		202,420,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebudayaan		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		234,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perpustakaan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perdagangan		Dinas Perdagangan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		266,931,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perindustrian		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		192,000,000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian		
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		544,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah		Sekretariat Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1,145,270,393	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah		
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		41,056,000	
			Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1,800,000,000	
			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		613,000,000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan		
Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		41,922,000	
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		125,000,000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan		
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		7,000,000	
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Keuangan		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		350,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepegawaian		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		99,577,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat		Inspektorat
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		462,000,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Argomulyo
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90,788,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		142,520,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3,596,536,600	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Sidomukti
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		100,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2,817,651,200	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Sidorejo
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		183,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3,558,342,000	
			Kecamatan Tingkir
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		102,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		165,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3,697,287,960	
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesatuan Bangsa dan Politik		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200,074,200	

5.1.1.5. Program prioritas pendukung Kebijakan Nasional untuk Penurunan Kemiskinan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kota Salatiga mendukung strategis nasional dalam melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasa kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;

2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat;
 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- Untuk pelaksanaan tahun 2026 diarahkan sebagai berikut

Tabel 5. 5 Akomodasi untuk Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2026

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	49,270,870,160	DINAS PENDIDIKAN
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD		
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51,412,881,176	DINAS KESEHATAN
		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,340,461,000	BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	795,278,000	DINAS SOSIAL
		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	970,209,000	DINAS SOSIAL
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		Penyediaan Permakanan		
		Penyediaan Alat Bantu		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
		Pemberian Layanan Kedaruratan		
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	705,000,000	DINAS SOSIAL
		Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	282,898,000	DP3APPKB

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	570,065,200	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	505,826,000	DISDUKCAPIL
		Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk		
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	59,800,000	DISDUKCAPIL
		Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	478,655,000	DISPERINAKER
		Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		
		Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
2	Meningkatkan Pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	50,000,000	DP3APPKB
		Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	473,805,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	200,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	749,887,300	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
		Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	26,800,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	160,000,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1,527,231,000	DINKOP UKM
		Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	75,000,000	DISBUDPAR
		Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	763,533,067	DISPERINAKER
		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
		Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
3	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	49,270,870,160	DINAS PENDIDIKAN
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5,278,502,000	DPU PR
		Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		
		Pembangunan Tanggul Sungai		
		Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1,450,000,000	DPU PR
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,280,000,000	DPU PR
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem		

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,416,142,131	DINAS PKP
		Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6,698,700,000	DINAS PKP
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10,420,700,000	DINAS PKP
		Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	13,656,560	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	570,065,200	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	101,864,000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,754,353,200	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11,718,043,469	DINAS PERHUBUNGAN
		Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	119,300,000	DISPERINAKER
		Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyuluhan Transmigrasi		

5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung

urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.1.2.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

5.1.2.1.1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/ rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD, APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs, Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen, Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SD/MI, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SMP/MTs, Persentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang, Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik, Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik. Selain itu pada program ini juga diarahkan pada pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan PAUD maupun kesetaraan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang TK dan jenjang PKBM.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA, SD, SMP dan Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD, SD, dan SMP.

4) Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam

bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase TK/RA yang terakreditasi, Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi, Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs.

5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, workshop serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa Jawa jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs dan Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa.

5.1.2.1.2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM, Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM, Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD), Cakupan pembinaan remaja di sekolah, Pembentukan Posyandu Remaja, Persentase Ibu hamil KEK, Persentase Ibu Hamil yang Anemia, Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan, Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan, Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A, Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) , Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram), Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, Cakupan pelayanan kesehatan balita, Angka Kematian balita (AKABA), Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan, Prevalensi Stunting pada Balita, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB, Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR), Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan

ARV, Incident Rate DBD per 100.000 penduduk, Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, Angka Penemuan Pneumonia Balita, Deteksi Dini Hepatitis, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Cakupan UCI kelurahan, Cakupan BIAS DT/Td, Cakupan BIAS Campak Rubela, Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar, Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam, Penemuan kasus AFP, (Acute Flaccid Paralysis), Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi, Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar, Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas, cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, Cakupan kepesertaan JKN, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK, Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan, Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, Persentase RS rujukan yang terakreditasi.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase akreditasi puskesmas strata utama.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase sarana produksi IRT yang memenuhi ketentuan, Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat, Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan, Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan, Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri, Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit,

Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR), Average Length of Stay (Av LOS), Bed Turn Over (BTO), Turn Over Internal (TOI), Net Death Rate (NDR), Gross Death Rate (GDR).

5.1.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasion luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase rumah tangga dengan akses air minum.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun strategi dan teknis sistem drainase perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase jaringan drainase dalam kondisi baik.

5) Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Kepatuhan IMB.

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya untuk mencapai indikator kinerja Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungan.

7) Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai indikator kinerja

Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK Jalan kondisi mantap dan Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik.

8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasion tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi.

9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.1.2.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan melalui kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota, Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota, Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan.

2) Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP), Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni).

3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan, terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU, cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU.

4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target indikator kinerja yaitu jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

5.1.2.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum, Selain itu juga diarahkan pada kegiatan penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali dan juga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencapai indikator kinerja persentase cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran untuk mencapai indikator kinerja Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

3) Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dan juga penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM), Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik.

5.1.2.1.6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social untuk mencapai indikator kinerja persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, persentase PSKS yang dibina.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi.

4) Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota untuk mencapai indikator kinerja cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

5.1.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

5.1.2.2.1. Tenaga Kerja

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja.

3) Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Selain itu, pada program ini untuk kinerja cakupan kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mulai mulai memperhatikan arah kebijakan perlindungan tenaga kerja yang informal, mengingat untuk kedepan target kepesertaan Jamsostek tidak hanya yang formal saja, namun yang informal juga dilihat capaiannya.

5.1.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Target kinerja dari program ini adalah Persentase ARG pada belanja langsung APBD; Persentase kelembagaan PUG aktif, presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dan Persentase Perempuan di Lembaga legislatif.

2) Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota dengan target kinerja persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart dan Rasio Kekerasan terhadap perempuan.

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan.

4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencapai target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak.

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak.

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja presentase anak korban kekerasan.

5.1.2.2.3. Pangan

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini di arahkan pada penyediaan infrastruktur cadangan pangan termasuk hiliisasi komoditas susu dan daging serta komoditas pertanian lokal lainnya.

- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini direncanakan untuk mencapai target Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) dan kinerja ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya.

- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.

- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar aman.

- 5) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini di arahkan pada presentase cakupan bina kelompok tani kategori pemula, lanjut, madya serta utama serta upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pada lahan yang ada.

- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian didukung dengan pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian, stimulan bantuan benih padi, pengendalian OPT dan DPI, mempertahankan luas lahan pertanian yang ada.

5.1.2.2.4. Pertanian

- 1) Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi untuk mencapai target indikator kinerja persentase rencana pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA).

- 2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian permasalahan ganti kerugian tanah untuk pembangunan.

3) Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, inventarisasi dan pengurusan hak atas tanah aset pemerintah untuk mencapai indikator kinerja persentase aset tanah pemerintah. Selain itu Program ini juga diarahkan pada pelaksanaan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bisa ditambahkan dukungan program pertanahan pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan penataan aset dan akses.

4) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja persentase penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

5) Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan untuk mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.2.5. Lingkungan Hidup

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dengan indikator kinerja berupa dokumen IKPLHD dan dokumen KLHS.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target kinerja pada program ini Pemantauan Status Mutu Air, Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium, Presentase Konservasi Lahan, dan Persentase Konservasi Sumber Mata Air.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan target kinerja peningkatan Persentase ruang terbuka hijau dan cakupan layanan penerangan jalan umum. Program kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam memenuhi luasan RTH di Kota Salatiga.

4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target capaian persentase penyimpangan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan. Indikator capaian program ini adalah Kegiatan penegakan hukum lingkungan, Prosentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan presentase tersusunnya dokumen IGRK.

6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk meraih prestasi berupa penghargaan tingkat kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat propinsi. Indikator capaian program ini adalah Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota, Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi, Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup.

7) Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan dan juga kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase Pengurangan Sampah, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengangkutan Sampah.

5.1.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penataan Pendaftaran Penduduk. Indikator yang ditargetkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program ini yaitu Persentase perekaman KTP-el dan Persentase penerbitan KIA usia 0-5 tahun.

2) Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan pencatatan sipil dan Penyelenggaraan pencatatan sipil. Target capaian program ini yaitu Persentase penerbitan akta kelahiran usia 0-5 tahun dan Presentase akta perkawinan non muslim.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan; penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator kinerja program ini yaitu untuk mencapai ketersediaan database kependudukan.

5.1.2.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas

penduduk; pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator program ini yaitu Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan *Grand Design*, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk), Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR), Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan, Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP).

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Capaian indikator program yaitu untuk mencapai Rasio akseptor KB baru, Cakupan peserta KB aktif, Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmetneed*), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator kinerja dari program ini yaitu Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun, Cakupan Kader BKB yang Terlatih, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, dan Persentase Baduta Stunting.

5.1.2.2.8. Perhubungan

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; Pengelolaan terminal penumpang Tipe C; Pengujian berkala kendaraan bermotor; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota; Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupaten/kota; dan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu Presentase rambu-rambu terpasang dan Presentase Layanan angkutan darat.

5.1.2.2.9. Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.

2) Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

5.1.2.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.

2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan.

3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.

4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.

5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.

6) Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan capaian program persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

5.1.2.2.11. Penanaman Modal

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Nilai Prosentase kenaikan jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN).

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota capaian Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan capaian program Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola.

5.1.2.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Capaian program adalah Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan capaian program Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan.

5.1.2.2.13. Statistik

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk mencapai target Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

5.1.2.2.14. Persandian

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi.

5.1.2.2.15. Kebudayaan

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.

2) Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase kajian sejarah.

3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase penetapan cagar budaya.

4) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina.

5) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan museum Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Presentase penambahan jumlah koleksi museum.

5.1.2.2.16. Perpustakaan

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program nilai tingkat kegemaran membaca.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian program presentase koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan.

5.1.2.2.17. Kearsipan

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota serta Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan; autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media serta pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dengan capaian program Persentase jumlah arsip yang diselamatkan.

3) Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota dengan capaian program Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip.

5.1.2.3. Urusan Pilihan

5.1.2.3.1 Kelautan dan Perikanan

1) Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan serta indikator presentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

5.1.2.3.2 Pariwisata

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase obyek wisata yang ditingkatkan.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.

- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.

- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan capaian program Jumlah Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5.1.2.3.3 Pertanian

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme; Peningkatan Mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang seumumnya dalam 1 daerah, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian.

- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.

- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.

- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase kejadian bencana pertanian.

- 5) Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.

5.1.2.3.4 Perdagangan

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. Capaian program ini yaitu Persentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan.

- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar, Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina, Persentase kelompok PKL yang dibina, Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL, Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program adalah Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk dan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.

4) Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota capaian program adalah Persentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga.

5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan guna mencapai indikator program berupa Persentase Alat UTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah.

5.1.2.3.5 Perindustrian

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mendapatkan indikator berupa Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

5.1.2.3.6 Transmigrasi

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan capaian program Persentase pelaksanaan proses transmigrasi.

5.1.2.4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.2.4.1. Sekretariat Daerah

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan; Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan; Cakupan fasilitasi Kerjasama daerah; skor LPPD; Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret); Prosentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum dan Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam; Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan; cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT; Cakupan koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD; Cakupan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA; Cakupan Koordinasi POK dan Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas; presentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi dan Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

5.1.2.4.2. Sekretariat DPRD

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD. Capaian program ini adalah Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi, Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran, Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan.

5.1.2.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.2.5.1. Perencanaan

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, capaian program ini adalah Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah.

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Capaian program ini yaitu Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang.

5.1.2.5.2. Keuangan

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Capaian program ini yaitu Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures), Budget execution, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Cash management (Persentase anggaran), Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

5.1.2.5.3. Kepegawaian

1) Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Capaian dari program ini adalah presentase Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan, Rasion PNS yang mengikuti assessment, Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio pegawai Fungsional

(PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan), Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

5.1.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Capaian program ini yaitu Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional.

5.1.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan capaian program Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah.

5.1.2.5.6. Kecamatan

Program yang diselenggarakan oleh kecamatan di Kota Salatiga dilaksanakan oleh 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, capaian program ini adalah Persentase Peningkatan Skor IKM.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan kelurahan. Capaian program ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel.

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan capaian indikator program yaitu Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah dan Persentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan capaian program Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2 dan Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP.

5.1.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.1.2.6.1. Inspektorat Daerah

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Capaian program ini yaitu Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal; Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dan kegiatan pendampingan dan asistensi. Capaian program ini yaitu nilai MCP Korsupgah KPK.

5.1.2.7. Urusan Pemerintahan Umum

5.1.2.7.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan capaian program yaitu Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila.

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik untuk mencapai indikator program persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan.

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan capaian program Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan capaian program yaitu Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial.

5.2. Pendanaan Daerah

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2026, didukung dengan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dana. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program hingga sub kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan daerah, upaya pencapaian target capaian kinerja yang merupakan rangkaian upaya penerjemahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2026, secara terperinci dipersiapkan kebutuhan anggaran per sub kegiatan yang nantinya sebagai pedoman dalam penggunaan belanja untuk menerjemahkan indikator kinerja yang akan dicapai.

Pencapaian kinerja Pembangunan daerah tahun 2026 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp865.462.393.600,-, belanja daerah sebesar Rp960.041.220.000,-. Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Kota Salatiga tahun 2026.

Tabel 5. 5 Kerangka Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi	
		2026	2027
1	PENDAPATAN	865.462.393.600	897.973.000.000
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-
3	Pendapatan Pajak Daerah	87.000.000.000	97.440.000.000
4	Pendapatan Retribusi Daerah	182.862.753.900	192.000.000.000
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.350.000.000	23.000.000.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.287.087.700	15.000.000.000
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	298.499.841.600	327.440.000.000
8	PENDAPATAN TRANSFER		
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	512.352.881.000	515.923.331.000
10	Dana Bagi Hasil Pajak	28.795.997.000	32.251.510.000
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	957.787.000	1.072.724.000
12	Dana Alokasi Umum	482.599.097.000	482.599.097.000
13	Dana Alokasi Khusus	-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	512.352.881.000	515.923.331.000
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
16	Dana Otonomi Khusus	-	
17	Dana Penyesuaian	8.989.406.000	8.989.406.000
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)	8.989.406.000	8.989.406.000
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.620.265.000	45.620.265.000
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	45.620.265.000	45.620.265.000

No	Uraian	Proyeksi	
		2026	2027
23	Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	566.962.552.000	571.533.002.000
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
25	Pendapatan Hibah	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	865.462.393.600	897.973.002.000
30	BELANJA		
31	BELANJA OPERASI		
32	Belanja Pegawai	409.532.796.625	461.927.489.106
33	Belanja Barang & Jasa	480.131.240.740	544.024.302.341
34	Belanja Bunga	-	-
35	Belanja Subsidi	200.000.000	200.000.000
36	Belanja Hibah	185.000.000	8.300.782.756
37	Belanja Bantuan Sosial	1.022.250.000	1.124.475.000
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)	891.071.287.365	1.015.577.049.203
39	BELANJA MODAL		
40	Belanja Tanah	232.600.000	255.860.000
41	Belanja Peralatan dan Mesin	19.263.041.850	190.589.169.519
42	Belanja Gedung dan Bangunan	25.981.647.185	30.402.728.073
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.945.200.000	12.057.700.000
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.542.443.600	1.571.518.800
45	Belanja Aset Lainnya	-	-
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	58.964.932.635	234.876.976.392
47	BELANJA TAK TERDUGA		
48	Belanja Tak Terduga	5.000.000	5.000.000.000
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	5.000.000	5.000.000.000
50	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)	950.041.220.000	1.255.454.025.595
51	TRANSFER	-	-
52	BELANJA TRANSFER	-	-
53	Belanja Bagi Hasil	-	-
54	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
55	JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (53 s/d 54)	-	-
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)	950.041.220.000	1.255.454.025.595
57	SURPLUS / DEFISIT	(85.073.826.400)	1.255.454.025.595

No	Uraian	Proyeksi	
		2026	2027
58	PEMBIAYAAN		-
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
60	Penggunaan SILPA	-	-
61	Pencairan Dana Cadangan	-	-
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
63	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
64	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah	-	-
65	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
66	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (60 s/d 65)	-	-
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
68	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
69	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
70	Pembayaran Pokok Utang	-	-
71	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
72	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (67 s/d 70)	-	-
73	PEMBIAYAAN NETO (66 - 72)	-	-
74	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (73 + 57)	-	-

LAMPIRAN BAB V

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



<https://rkpd.salatiga.go.id/2025/08/peraturan-wali-kota-nomor-25-tahun-2025-tentang-rkpd-tahun-2026/>

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing



30
Indikator
Kinerja Utama



157
Indikator
Kinerja Daerah



172
Indikator
Program OPD

BAB VI KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode pertama RPJMD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dapat dicapai. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga tahun 2026 berdasarkan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga memperhatikan target indikator makro yang merupakan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045 sebagai baseline tahun 2025 Tahap I RPJPD yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Penetapan target juga berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/1761SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan dinamika pembahasan terkait Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan Pemerintah Pusat.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2026, maka ditetapkan target pada Indikator kinerja utama pemerintah Kota Salatiga tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 6. 1. Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		Perangkat Daerah Koordinator
			Realisasi 2024	Target 2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	85,72	86,43	Sekretariat Daerah
2	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,37	5,56 – 6,56	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		Perangkat Daerah Koordinator
			Realisasi 2024	Target 2026	
3	PDRB Perkapita	Juta Rp	89,83	90,49-136,1	Sekretariat Daerah
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,86	3.84-3.54	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5	Angka Kemiskinan	Persen	4,57	4,34-4,20	Sekreatriat Daerah
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,67	82,15	Sekretariat Daerah
7	Penurunan emisi GRK kumulatif	TonCO2eq	13.291,89	48.158,45	Dinas Lingkungan Hidup
8	Indeks Daya saing Daerah	Nilai	4,16	4,84	Bappeda

Keterangan :

*)Target tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025

6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kota Salatiga tahun 2026. Indikator kinerja daerah tahun 2026 adalah sebagi berikut :

Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara
Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
I	INDIKATOR KINERJA DAERAH			
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	91,35	91,40
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	4,04	4,02
3	Konsumsi Listrik Per kapita	kWh/kapita	NA	280.630.448
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	NA	66,09
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	61,45	69,98
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	NA	19,4
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	10950
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	NA	30
9	Indeks Resiko Bencana	Angka	76,52	76,2
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,9	0,6
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,24	1,2
12	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	3.619	4.063
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	5,46
2	Indeks Gini	Angka	0,402	0,372
3	Usia harapan Hidup	Tahun	78,26	78,64
4	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,468	0,41
5	Prevalensi stunting	%	5,92	5,6
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	16,07
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,46	11,23
8	Angka Literasi/Numerasi	%	NA	91,55
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	100	100
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	NA	54
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	78,98	78,2
12	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,222	0,12-0,11
13	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,59	95,41
	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Angka Ketergantungan	%	43,16	49,49
2	Rasio PDRB Industri pengolahan	%	29,25	34,32
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	7,92	8,2
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	5,92	7,11
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,72	66,74
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	51,1	52
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Angka	NA	91,94
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	42,44	42
9	Ekspor Barang dan Jasa	Rp	157.256.067	180.042.471
10	Rasio panjang jalan	%	91,97	95,53
11	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	94,02	95
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,532	0,65
13	Tingkat Inflasi	%	0,35	2,5
14	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	5,69	5,71
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,36	80,6
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,64	3,75
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,62	4,45
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	78,16	79,49
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100
6	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	94,54	100
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI			
	URUSAN PENDIDIKAN			
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	97,88	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,33	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,82	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	71,04	100

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
	URUSAN KESEHATAN			
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	3,96	4,32
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	0	100
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	%	0	0
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	%	93,19	100
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	92,008	100
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	87,67	88,2
7	Rasio kemantapan jalan	%	91,97	93,09
8	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	93,81	100
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT & PERMUKIMAN			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	%	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangan	%	10,6	10,6
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,17	4,44
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	65,69	68,32
URUSAN TRANTIBUM & LINMAS				
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	1.184	1.304,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	700	770
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	8.861	8.511,00
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7	<15
URUSAN SOSIAL				
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	%	100	100
URUSAN TENAGA KERJA				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	10	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100	100
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Jt Rp/org	106,182	114,67
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%	93,23	93,79
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	71,05	71,48
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,23	9,69
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	%	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	69,63	42,35
URUSAN PANGAN				
1	Persentase cadangan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	267,676	100
URUSAN PERTANAHAN				

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	0	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	100
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0	100
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	%	61,45	61,63
2	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kota	%	98,15	98,35
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	17,8	19,44
	URUSAN ADMINISTRASI PENDUDUK & CATATAN SIPIL			
1	Perekaman KTP Elektronik	%	97,95	98,38
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	85,85	88,97
3	Persentase Penduduk usia 0- 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	%	99,44	99,63
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	100
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEENCANA			
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	1,71	1,72
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	65,71	67,02
3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,51	7,66
	URUSAN PERHUBUNGAN			
1	Rasio konektivitas Kota	Rasio	0,88	0,87
2	Kinerja lalu lintas Kota	Rasio	0,31	0,32
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
	URUSAN KOPERASI DAN UMKM			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	71,57	74,43
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	100
	URUSAN PENANAMAN MODAL			
1	Persentase peningkatan investasi di Kota	%	6,891	6,91
	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,96	2,64
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	36,385	46,13
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	32	36,76
	URUSAN STATISTIK			
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
	URUSAN PERSANDIAN			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	70,85	72
	Urusan Kebudayaan			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	40
	Urusan Perpustakaan			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	75,23	75,73
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	100	100
	Urusan Kearsipan			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) (Pasal 40 dan Pasal 59 UU Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan)	%	88,67	89,17
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	16,67	17,17
	Urusan Kelautan Perikanan			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kota di wilayah kota (sumber data: one data KKP)	Ton	84,28	87
	Urusan Pariwisata			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	117,73	0,5
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota	%	113,003	0,2
3	Tingkat hunian akomodasi	%	51,42	56,69
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	7,92	7,9
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		0,16	0,18
	Urusan Pertanian			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	758,25	720,34

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-179,89	100
	Urusan Kehutanan			
	Urusan Perdagangan			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	48,27	65,25
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,32	73,16
	Urusan Perindustrian			
1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kota	%	0,43	0,5
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota	%	97,76	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	%	0	-
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/tidak	100	100
	Urusan Transmigrasi			
	Perencanaan dan Keuangan			
1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	0,815277778	19,16
2	Persentase PAD	%	30,24	32,17
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3.023
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3
5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	86,365	88,09
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
	Pengadaan			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	63,61	64
3	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	58,99	59,83
4	Presentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		-0,7	1,5
	Kepegawaian			
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,44	74,44

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,94	25,44
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99,45	99,5
Manajemen Keuangan				
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,3691	4,5
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,43	22,45
3	Assets management	Satuan Hasil	4	4
	Apakah ada daftar aset tetap?	ada/tidak	Ya	Ya
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	ada/tidak	Ya	Ya
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	ada/tidak	Ya	Ya
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	ada/tidak	Ya	Ya
4	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	8,72	8,28
Transparansi dan Partisipasi Publik				
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	96,09	96,44
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100

6.3 Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga diselaraskan melalui Rakortekbang dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. 3. Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

NO	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2026	
			Provinsi	Kota Salatiga
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.7 - 6.0	5,46
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	54.2 - 55.7	90,49-136,1
3	Kontribusi PDRB Provinsi		8,2	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	8.53 - 8.7	4,49-3,81
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.27 - 4.71	3,84 - 3,54
6	Rasio Gini		0.351 - 0.361	0,372
7	Indeks Modal Manusia		0,63	
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	5,32	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		75,73	69,98

6.4 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

Keselaran Indikator Utama Pembangunan antara Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 6. 4. Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2026	Kota Salatiga			Target Tahun 2026
Arah Pembangunan		IUP		Arah Pembangunan		IUP	
1	2		3	4	5		6
CJ01. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,14	1. Kesehatan untuk Semua	4	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	78,59
	2	Kesehatan Ibu dan Anak :				Kesehatan Ibu dan Anak :	
	a	Angka Kematian Ibu	85,35		5	Jumlah Kasus Kematian Ibu (angka)	2
	b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17		6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,6
	3	Penanganan Tuberkulosis:				Penanganan Tuberkulosis:	
	a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	92		7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	99,11
	b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92		8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90,4
	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,1		9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,38
CJ02. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif	5	Hasil Pembelajaran:		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Hasil Pembelajaran:	
	a	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			10	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	
		i) Literasi Membaca	78,82 - 79,14			a) Literasi Membaca SD/Sederajat	73,69

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2026	Kota Salatiga			Target Tahun 2026
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
		ii) Numerasi	38,70 - 39,02			b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	69,9
						c) Numerasi SD/Sederajat	58,75
						d) Numerasi SMP/Sederajat	48,22
	b	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,27
		i) Literasi Membaca	66,97 - 67,24				
		ii) Numerasi	50,63 - 50,91				
	c	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	n/a		12	Harapan Lama Sekolah (tahun)	16,1
	d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,98		13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	22,8
	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	n/a		14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	90,95
	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	59,66				
CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Tingkat Kemiskinan (%)	9,21-8,56	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	1	Tingkat Kemiskinan (%)	4,49-3,81

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2026	Kota Salatiga			Target Tahun 2026
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	41,99		38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	54
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	21,75				
CJ04. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	34,65	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	23	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	34,32
	12	Pengembangan Pariwisata:			24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	8,2
	a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,36		25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	1120
	b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	122,6		26	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	7,11
	3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	n/a		27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,53
	4	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			28	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3,03
	a	Proporsi Jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	10,49		29	Disparitas Harga	±10
	b	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Provinsi	6,23				

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2026	Kota Salatiga			Target Tahun 2026
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	c	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,53				
	d	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,16				
	e	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,62				
	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,47-4,37		36	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-4,42
	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,05		37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	66,74
	17	Tingkat Penguasaan IPTEK : Kapabilitas Inovasi	n/a		34	Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)	3,84
CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		5. Penerapan Ekonomi Hijau			
	a	Indeks Ekonomi Hijau	n/a				
	b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	21,60				
CJ06. Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		6. Transformasi Digital	39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	91,94
CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	7,23	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	42
	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,38		55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	91,11 - 124,86
	22	Ekspor Barang dan Jasa	11,12		56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	16,42-16,92

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2026	Kota Salatiga			Target Tahun 2026
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:		8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	93,35
	a	Proposi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	2,45		41	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (%) (sesuai kewenangan)	95,52
	b	Rumah Tangga dengan Askes Hunian Layak, Terjangkau dan Berkenalan	74,32		42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	11,8
	c	Persentase Desa Mandiri	20,95		35	Persentase Desa Mandiri	-
	d	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	94,35				
	e	Indeks Pelayanan Transportasi	6.530				
	f	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang					
CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif	24	Indeks Reformasi Hukum	91,50	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	51	Indeks Reformasi Hukum	80,6
	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a		52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,33
	26	Indeks Pelayanan Publik	4,57		53	Indeks Pelayanan Publik	4,45
	27	Indeks Integritas Nasional	81,78		54	Indeks Integritas Nasional	75,55
					50	Indeks Reformasi Birokrasi	70,21

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2026	Kota Salatiga			Target Tahun 2026
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	28	Indeks Pembangunan Hukum : Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM	99	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			
	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	n/a				
	30	Indeks Demokrasi Indonesia	84,20				
CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,38	11. Stabilitas Ekonomi makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,65
	32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1		32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	62,6
	33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:			33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	44,79
	a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	48,20				
	b	Aset Dana Pensiun/PDRB	0,4308				
	c	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	n/a				
	d	Total Kredit/PDRB	31,24				
	34	Inklusi Keuangan	n/a				

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2026	Kota Salatiga			Target Tahun 2026
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah	35	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	n/a	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			
	36	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah	n/a				
CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	62,76	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	89,93
	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,60		16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	19,75
					17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	14232
					18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	18,71
					19	Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	1,07
					20	Jumlah Kejadian Konflik Sara (kali)	0
CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	74,08	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	21	Indeks Pembangunan Keluarga	63,50-64,82

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2026	Kota Salatiga			Target Tahun 2026
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	40	Indeks Ketimpangan Gender	0,319		22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,12-0,11
CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah		15. Lingkungan Hidup Berkualitas	46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,98
	42	Kualitas Lingkungan Hidup :			43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	22
	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,73*		47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	78,67
	b	Rumah Tangga dan Akses Sanitasi Aman	12,00				
	c	Pengelolaan Sampah : - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	18,46				
		- Proposi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	n/a				
CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan	44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	67,45
	a	Ketahanan Energi:			45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	66,85
	-	Konsumsi Listrik per Kapita	895		2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,69
	-	Intensitas Energi Primer	n/a		3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	94,48

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2026	Kota Salatiga			Target Tahun 2026
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	b	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	9,02				
	c	Ketahanan Air					
	-	Kapasitas Air Baku	n/a				
	-	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	n/a				
	-	Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampung Air Kewenangan Provinsi	70,58				
	-	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	n/a				
	-	Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi	n/a				
CJ17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana	94,75	17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim	48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	87,63
	45	Persentase Penurunan Emisi GRK:			49	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)	48158,45
	a	Kumulatif	n/a				
	b	Tahunan	n/a				

6.5 Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan RKP dengan RKPD

Keselaran Intervensi Pembangunan Kewilayahan antara RKP dan RKPD Kota Salatiga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 6. 5. Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan antara RKP dengan RKPD Kota Salatiga

KODE	RKP 2026			RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	
	Jawa Tengah	A. Kawasan Pertumbuhan				
		5 WM Semarang - Kota Semarang - Kota Salatiga - Kab. Semarang - Kab. Kendal - Kab. Demak - Kab. Grobogan	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Semarang melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta komuter;			
			Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;			
			Pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Kab. Kendal);			
			Pembangunan TPST Bokongsemar;			
			Prasarana pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis Kabupaten Demak;			
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Permukiman/Kawasan Tertentu.	Kota Salatiga	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

KODE	RKP 2026			RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Penyediaan Unit pengolahan setempat	
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		B. Kawasan Komoditas Unggulan				
		C. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi				
		D. Kawasan Afirmasi				
		E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana				

KODE	RKP 2026			RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	
		1 Kawasan Konservasi TN Merbabu-Merapi	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik;			
			Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri;			
			Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan;			
			Perlindungan dan pengamanan hutan;			
			Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi;	Kota Salatiga	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana;		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana.		<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>	
					<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	
					<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	

KODE	RKP 2026			RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	
					<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	
					<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	
					<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	
					<i>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	

6.6 Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga

Keselaran Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 6. 6. Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
2	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest		
3		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah		
4		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan		
5		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan		
6		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
7		Pembangunan pangan akuatik (blue food)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
8		Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
9		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
10		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
11		Peningkatan penyediaan energi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
12		Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
13		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan		
14		Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
15		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
16		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
17		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa		
18		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital		
19		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya		
20		Pengelolaan susut dan sisa pangan		
21		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
22		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
23		Peningkatan kualitas ekosistem gambut		
24		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
25		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		
26		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut		
27	Prioritas Nasional 3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
28		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
29		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur Yogyakarta-Prambanan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
30		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramen	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
31		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
32		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo		
33		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
34		Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
35	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
36		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas		
37		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		
38		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
39		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
40		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi		
41		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
42		Penurunan kematian ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
43		Pencegahan dan penurunan stunting		
44		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis		
45		Penuntasan TBC		
46		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita		
47		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi		
48		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis		
49		Investasi pelayanan kesehatan primer		
50		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses		
51		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
52		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
53		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
54		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
55	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Nikel	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
56		Pengembangan hilirisasi Tembaga	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
57		Pengembangan hilirisasi Bauksit	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
58		Pengembangan hilirisasi Timah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
59		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
60		Pengembangan hilirisasi Kelapa	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
61		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
62		Pengembangan hilirisasi Kimia	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
63		Pengembangan industri semikonduktor	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
64		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
65		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja		
66		Pengembangan industri dirgantara		
67		Pengembangan KEK Sei Mangkei		
68		Pengembangan KIT Batang		
69		Pengembangan KI Weda bay		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
70	Prioritas Nasional 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
71		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
72		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
73		Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
74		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
75		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
76	Prioritas Nasional 7	Pencegahan tindak pidana korupsi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
77		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
78		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
79		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
80		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak		
81	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
82		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
83		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

6.7 Indikator Kinerja Program

Adapun program perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Kota Salatiga Tahun 2026 berdasarkan masing-masing urusan dalam langkah penyelenggaraan pemerintah daerah dijabarkan dalam target kinerja program. Perincian program dan indikator program dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut

Tabel 6. 7. Program , Indikator dan Target Kinerja berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2026

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
DINAS PENDIDIKAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	95,45	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,29	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,30*	79,31
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah				
		Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat parsipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	%	97,88	100
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	%	99,34	100
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)	%	96,82	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	%	71,05	100
		Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,005	0,004
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,058	0,057
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	88,44	88,45
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	87,78	87,78
		Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	78,07	78,08
		Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,43	87,44
		Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	%	95,45	95,46
		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,81	93,79
		Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,55	85,07
		Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,84	94,76
		Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,73	90,93
		Iklim Kebhinekaan SD	%	78,15	69,05
		Iklim Kebhinekaan SMP	%	80,75	74,58

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Iklim Keamanan SD	%	77,9	73,70
		Iklim Keamanan SMP	%	76,73	74,40
		Iklim Inklusivitas SD	%	59,5	61,44
		Iklim Inklusivitas SMP	%	63,56	64,1
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan				
		Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	74,19	74,2
		Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	63,89	63,9
		Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	75	75,01
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi institusi pendidikan				
		Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	36,84	36,85
		Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	49,31	49,32
		Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	58,65	58,66
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	87,8	87,81

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,15	97,16
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	99,1	99,11
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan				
		Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	90,35	90,36
		Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	83,33	83,33
		Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	92,86	92,86
		Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	100	100
		Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	100	100
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestariannya bahasa dan sastra daerah				
		Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	20,43	20,43
		Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	42,86	42,86
		Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa	%	66,67	66,67

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa			
DINAS KESEHATAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,31	73,31
Rumah Sakit					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit	Nilai	88,57	86,5
		Cost Recovery Rumah Sakit	Nilai	102,32	100
KPM (Klinik Paru Masyarakat)					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Klinik Paru Masyarakat	Nilai	84,92	85
Puskesmas Tegalrejo					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Tegalrejo	Nilai	86,5	86,5
Puskesmas Cebongan					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Cebongan	Nilai	88,52	88,75
Puskesmas Kalicacing					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Kalicacing	Nilai	88,4	88,75

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
<i>Puskesmas Mangunsari</i>					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Mangunsari	Nilai	85,17	86,5
<i>Puskesmas Sidorejo Lor</i>					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas sidorejo Lor	Nilai	82,05	86,5
<i>Puskesmas Sidorejo Kidul</i>					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Sidorejo Kidul	Nilai	87,35	88,75
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat				
		Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	11,49	11,49
		Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	%	134	134,5
		Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Errollment TBC)	%	90,04	91
		Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	%	20	30
		Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,74	< 1
		Persentase KK dengan akses fasilitas sanitasi layak	%		100
		Persentasi KK melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	%		75
		Persentasi KK melaksanakan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT)	%		75

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Persentasi KK melaksanakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT)	%		75
		Persentasi KK melaksanakan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT)	%		40
		Kelurahan sehat iklim	%	NA	3
		Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	%	NA	30
		Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	%	NA	70
		Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100
		Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,87	85
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	82,07	83
		Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	%	98,92	95,5
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100
		Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	100	99
		Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,6	100
		Cakupan kepesertaan JKN	%	98,55	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	100
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100
		Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,55	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	338	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	98,16	100
		Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100
		Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	99,71	99,72

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Cakupan Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	99,44	65
		Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	%	75,78	75,8
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	100	95,5
		Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	/ 100 rb penduduk	9,18	9,15
		Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	60	61
		Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	86,9	85
		Pelayanan Kesehatan Olahraga	%	95,68	80
		Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	%	NA	50
		Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja		NA	100
		Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	Kasus	9	6
		Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	7,21	7,1
		Persentase Ibu hamil KEK	%	13,78	13,5
		Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	7,43	7,4
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan RME	%	100	100
		Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	100	100
		Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	105,19	87
		Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	118.86	85
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	/1000 penduduk	3,99	4
		Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart		100	100
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan				
		Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	73,04	73,5
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (RSUD)					
		Persentase karyawan RSUD yang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi minimal 20 jam per tahun	%	NA	60
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
	kesehatan, dan makanan minuman				
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	58,33	58,45
		Persentase pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	%	82,22	82,45
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	16,271	29,763
		Persentase apotek dan toko obat yg mampu memelihara persyaratan perijinan	%	100	100
		Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	89,28	90
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				
		Cakupan desa siaga strata mandiri	%	100	100
		Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	97,55	97,65
		Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	95,65	95,75
		Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100
		Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	90,34	90,45
		Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	94,34	94,45
		Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok	%	37,5	50

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1.02.07 PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)	Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	71,43	76,73
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,22	88,6
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,96	72
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman				
		Rasio kemantapan jalan	%	91,97	95,53
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi				
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai	64,84	66

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya askes masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah				
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	10,29	19,4
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan				
		Prosentase jaringan drainase kondisi baik	%	96,49	96,7
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum				
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	63,83	66,09
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung				
		Presentase Bangunan Gedung Negara milik Pemerintah Kota dalam Kondisi Baik	%	71,93	76,93
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata				
		Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	25	32,24
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi				
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analisis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	67	75
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Jumlah KKPR yang diterbitkan	Dokumen	396	400
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	95	95,1
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,6	74,7
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat pemerintah				
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	%	100	100
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	%	10,01	19,71
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	%	5,11	5,20
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman				
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	46	65
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
2.10.17 PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN					
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	50	100
2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					
		Persentase luas lahan bersertifikat	%	50	100
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan				
		Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%		100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)				
		Persentase bidang tanah yang diredistribusi	%		100
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)					
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,09	88
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,55*	70
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada				
	Meningkatnya penanganan gangguan ketentrman dan ketertiban umum				
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat				
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Prosentase Penegakan Perda dan Perkada (Prosentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada)	%	100	100
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran				
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	75	75
		Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran (Waktu tanggap (response time) penanganan kkebakaran)	Menit	7	< 15
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran)	%	100	100
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86	88
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63	65
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana)	%	100	100
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)	%	100	100
		Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	%	100	100
DINAS SOSIAL					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	89,91	90,47
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,75	70,9
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial				
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkatkan Kulaitasnya dalam pelayanan sosial	%	NA	46
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial				
		Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100
		Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100
		Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100
		Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial				
		Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	95.5	96
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban dan bencana				
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan				
		Persentase TMP yang terkelola dengan baik	%	100	100
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
URUSAN TENAGA KERJA					
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,78	89,03
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,6*	74,9
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,232	0,31
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja				
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	71,05	78,79
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi				
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	93,24	93,71
URUSAN PERINDUSTRIAN					
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri				
		Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,31	0,44
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian				
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	20
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin	%	1,41	2,47

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri				
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100
URUSAN TRANSMIGRASI					
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi				
		Persentase pelaksanaan proses transmigrasi	%	20	60
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,44	85,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,9	77
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan				
		Persentase Kelembagaan PUG Aktif	%	100	100
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100
		Persentase UPTD PPA sesuai standart layanan	%	0	100
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
		Persentase PKK aktif	%	100	100
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak				
		Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	100	100
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Persentase kelembagaan forum anak yang aktif	%	100	100
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif				
		Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah	%	100	100
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100
		Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,07	0,08
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	23	23
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
		Rasio akseptor KB baru	%	14,31	14,4

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	67,7	67,75
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	8,51	8,47
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26,65	26,65
		Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	65,71	69,75
		Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	%	13	11,7
		Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)	%	81	82,7
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera				
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	01.01,9	01.02
		Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	100	100
		Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	74,74	74,85
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	95,3	95,5
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	56,5	57,3
		Indeks Lansia Berdaya	Indeks	55,6	56,6
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	92,1	93,1
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan				
		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	1	
2.09.03PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat				
		Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	Rasio	1,49	1,63
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan				
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	87,14	87,74
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	89,7	90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian				
		Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	70	75
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian				
		Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	50	75
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner				
		Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				
		Persentase kejadian bencana pertanian	%	5	0
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian				
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani			
		- Pemula	%	60	58,56
		- Lanjut	%	74	58,56
		- Madya	%	22	15,31

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		- Utama	%	0	2,6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya				
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100	100
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi perikanan budidaya				
		Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	100
		Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					0
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,43	82,82
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,1	77,12

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan				
		Nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	75,23	75,33
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno				
		Persentase koleksi nasional dan kuno yg dimiliki	%	0	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis				
		Tingkat ketersediaan Arsip	%	88,67	88,67
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK				
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	16,67	50
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup				
		Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	0	25

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	83	84,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,1	75,3
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP				
		Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan LH	%	100	30
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
		Persentase pemantauan status mutu air	%	100	100
		Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	%	100	100
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati				
		Persentase Ruang Terbuka Hijau Tingkat Kota	%	17,4	18
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	(B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				
		Persentase kelompok masyarakat yang memahami rencana aksi pengurangan dan penghapusan peralatan bermerkuri	%	5	10
		Persentase sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) yang terkumpul	%	0	30
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan				
		Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	89,28	39,23
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup				
		Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh penyuluhan, kampanye dan pelatihan lingkungan hidup	%	30	60
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
		Persentase penghargaan lingkungan hidup yang terfasilitasi	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup				
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan				
		Persentase penanganan sampah	%	76,51	74
		Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	21,65	25
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	82,91	82,96
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,85	91,05
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,51	68,6
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk				
		Perekaman KTP-Elektronik	%	98,19	98,2

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	85,86	85,95
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil				
		Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	%	99,44	99,47
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan				
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100
DINAS PERHUBUNGAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,82	88
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,1	74,3
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat				
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	56	45

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	%	7	8,05
		Kinerja Lalu Lintas	V/C	31	45
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82	88,31
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,15	75,25
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah				
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100	100
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika				
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60,05	65
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)				
		Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	90
		Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	90
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah				
		Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	70,85	70,9
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,42	85,73
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,9	69,05
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi				
		Prosentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	62,5	71,79
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi				
		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	71,58	72,16
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian				
		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	57,89	52,58
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi				
		Persentase Koperasi Aktif	%	53,98	62,18
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	%	40,88	47,89
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM				
		Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan	%	24,8	25,55
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	84,75	85
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,9	77
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi				
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Miliar rupiah	634,854	636,44
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal				
		Jumlah investor berskala nasional	pelaku usaha	363	370
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko				
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	97,64	97,75

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal				
		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	67	67
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal				
		persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	%	0	80
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	78,84	80
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,2	68,2
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan				
		persentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5,44	5
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	17,04	17
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan				
		persentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	65	65
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,64	87
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,6	70
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan				
		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	38,57	40
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum				
		Persentase Penambahan Jumlah Koleksi Museum	%	38,18	38,68
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	57,97	58
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional				
		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	0	58
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah				
		Persentase Sejarah yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	0	25
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata				
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	%	NA	5
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	%	NA	5
		Tingkat Hunian Akomodasi	%	51,42	56,42
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata				
		Persentase Fasilitas Pemasaran Pariwisata	%	100	100
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	0	3
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif				
		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	0	50
DINAS PERDAGANGAN					
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	96,46	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,66	87,06
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,35	67,65
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha				
		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100%	100%
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Prosentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital	%	90%	25
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100%	100%
		Disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	-0,68	-0,64
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor				
		Fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor Barang dan Jasa	%	3,3%	3,5
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
		Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,23%	45
SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	NA	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	84,19	86
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,86	73

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
		Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	185	100
		Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	136	100
		Cakupan Fasilitas Kerjasama Daerah	%	430	100
		Skor LPPD	Nilai	3,1	3,1
		Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	%	100	100
		Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	120	100
		Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	100
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan				
		Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	312	100
		Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	162	100
		Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD	%	120	100
		Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100	100
		Cakupan Koordinasi POK	%	99,04	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	57,13	60
SEKRETARIAT DPRD					
SEKRETARIAT DPRD					
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	84,07	86
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	73
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan				
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
5.01 PERENCANAAN					
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%		

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai		82,58
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah				
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	98	100
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan				
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA				
		Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	97,24	100
		Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	88,38	90
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan				
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan				
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah				
	Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah				
		Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	%	44,3	44,44
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					
5.02 KEUANGAN					
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	78,47	78,47

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,73	82,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,11	72,15
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran				
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan				
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan				
		Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	18,94	20,2
		Cash managenent (Persentase anggaran)	%	15,07	8,28
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	%		100
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah				
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	2,7	3
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan				
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan				
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital				
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
5.03 KEPEGAWAIAN					
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,519	87,55
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,9	79,95
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian				
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN				
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN				
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN				
		Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	Nilai	75,11	76
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional				
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi				
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis				
		Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	NA	15
INSPEKTORAT					
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	80	81,4
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	78,2
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan				
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	%	90	90,1

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	94	94,1
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi				
		Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Nilai	94	94,7
		Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	%	100	100
KECAMATAN ARGOMULYO					
7.01 KECAMATAN					
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,26	86
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	73
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	80
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%		75
KECAMATAN SIDOMUKTI					
7.01 KECAMATAN					
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,28	90,29
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,9	70,95
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	80

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	89,73	89,74
KECAMATAN SIDOREJO					
7.01 KECAMATAN					
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
	pemerintahan dan pelayanan publik				
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	80
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	82,9	83
KECAMATAN TINGKIR					
7.01 KECAMATAN					
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	91,45	91,47

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,35	72,36
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	80
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	83,48	83,49
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,13	86,13
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,7	68,7
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan				
		Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kegiatan	5	5
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MEMALALUI PENDIDIKAN POLITIK DANPENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik				
		Prosentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%		50
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan				
		Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	60	60
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat				
		Prosentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonmi , sosial,budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan	%	80	80

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
		Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan			
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan				
		Prosentase Konflik Sosial yang yang diselesaikan	%	100	100

6.8 Indikator Utama Pembangunan

Indikator utama Pembangunan daerah tahun 2026 merupakan penjabaran indikator dalam dokumen RPJPD Kota Salatiga tahun 2025-2045.

Tabel 6. 8. Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	2026
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, dan Berkualitas	1. Kesehatan untuk Semua	4 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	78,59
			Kesehatan Ibu dan Anak :	
			5 Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	2
			6 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,6
			Penanganan Tuberkulosis:	
			7 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	99,11
			8 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90,40
			9 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,38
		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil pembelajaran:	
			10 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	
			a) Literasi Membaca SD/Sederajat	73,69
			b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	69,90
			c) Numerasi SD/Sederajat	58,75
			d) Numerasi SMP/Sederajat	48,22

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		2026
			11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,27
			12	Harapan Lama Sekolah (tahun)	16,10
			13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	22,80
			14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	90,95
		13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	89,93
			16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	19,75
			17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	14.232
			18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	18,71
			19	Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	1,07
			20	Jumlah Kejadian Konflik Sara (kali)	0
		14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	18	Indeks Pembangunan Keluarga	63,50-64,82
			19	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,221-0,209
2	Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	1	Tingkat Kemiskinan (%)	4,49-3,81
			38	Cakupan Kepesertaan	54,0

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		2026
				Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	
3	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	23	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	34,32
			24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	8,20
			25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	1.120
			26	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	7,11
			27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,53
			28	<i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	3,03
			29	Disparitas Harga	±10
			36	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,84% – 3,54%
			37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	66,74
			34	Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)	3,84
		5. Penerapan Ekonomi Hijau			
		6. Transformasi Digital	39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	91,94
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	42,00
			55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	91,11 - 124,86
			56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	16,42-16,92
		8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	93,35
			41	Persentase Panjang Jalan Kondisi	95,52

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		2026
				Permukaan Mantap (%) (sesuai kewenangan)	
			42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	11,80
			35	Persentase Desa Mandiri	-
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	51	Indeks Reformasi Hukum	80,60
			52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,33
			53	Indeks Pelayanan Publik	4,45
			54	Indeks Integritas Nasional	75,55
			50	Indeks Reformasi Birokrasi	70,21
		10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			
		11. Stabilitas Ekonomi makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,65
			32	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	62,60
			33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	44,79
		12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			
5	Terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,98
			43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	22,00
			47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	78,67

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		2026
				Pengolahan Sampah (%)	
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan	44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	67,45
			45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	66,85
			2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	3,90
			3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	94,40
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim	48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	87,63
			49	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)	48.158,45

BAB VII

PENUTUP

Dengan tersusunnya RKPD Kota Salatiga Tahun 2026, diharapkan :

- ❑ menciptakan **sinergisitas** dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan **efisiensi** alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- ❑ mewujudkan **akuntabilitas** alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 diperlukan **pengendalian** untuk mengetahui resiko sejak dini dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan

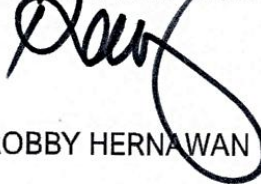
BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 serta kebijakan pusat dan provinsi Jawa Tengah serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran Pembangunan. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2026 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2026. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 menjadi pedoman untuk Menyusun (KUA) serta PPAS Tahun Anggaran 2026. RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan tahun kedua untuk pelaksanaan Perencanaan Daerah yang berpedoman pada Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat untuk periode 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain itu juga untuk mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan RKPD 2026 perlu pengendalian untuk mengetahui resiko sejak dini dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan.

WALIKOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN



<https://rkpd.salatiga.go.id/>

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BAPPEDA



Gd. BAPPEDA
Kantor Wali Kota Salatiga
Jl. Sukowati 51



bappeda.salatiga.go.id



[bappedasalatiga](https://www.instagram.com/bappedasalatiga)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN